

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Agustus 2021	Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	24 – 30 Agustus 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	30 Agustus 2021		:	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/ RW 006/003
 Kel. Senayan, Jakarta 12190 - Indonesia
 Telp. (62-21) 29343888
 Fax. (62-21) 29343777
 Website: <https://www.pthis.id>
 E-mail: corsec.his@hasnurgroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “Program ESA”) sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN PADA VOLATILITAS HARGA KOMODITAS BATU BARA DAN/ATAU CURAH KERING YANG MEMPENGARUHI VOLUME TRANSAKSI SEHINGGA BERPANGKAP PADA PERMINTAAN TERHADAP JASA ANGKUT PERAIRAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 013/HIS-JKT/DIR-UM05/IV/2021 tanggal 23 April 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hasnur Internasional Shipping Tbk sesuai dengan surat S-04328/BEI.PP3/06-2020 tanggal 23 Juni 2021. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	20
VI. FAKTOR RISIKO.....	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	56
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	61
D. PERIZINAN.....	62
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	64
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	65
G. TATA KELOLA PERSEROAN	73
H. SUMBER DAYA MANUSIA	76
I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	93
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	94
K. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	94
L. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK.....	99
M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	103
N. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	107
O. ASURANSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	109
P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	112
Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	112
R. KECENDERUNGAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN SECARA SIGNFIKAN	112
S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	112
IX. EKUITAS.....	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	134
XI. PERPAJAKAN	135
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	138
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	140
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	170
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	177
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	178
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	205

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Kliring” : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
- “BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BKPM” : berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “CAGR” : berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun
- “Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Emisi"	:	berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
"Entitas Anak"	:	berarti perusahaan-perusahaan yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau 2. Kebijaksananya dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. <p>Dimana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana.</p>
"ESA"	:	berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation Program</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.
"Force Majeure"	:	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, huru hara, epidemi atau pandemi atau keadaan lainnya di Indonesia yang berada di luar kendali tiap-tiap pihak, yang mempunyai akibat material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS"	:	berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
"Grup Perseroan"	:	berarti Perseroan dan Entitas Anak.
"Harga Penawaran"	:	berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah).
"Hari Bank"	:	berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	:	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	:	berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
"KAP"	:	berarti Kantor Akuntan Publik.
"Kemenkumham"	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Konsultan Hukum"	:	berarti Kantor Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran"	:	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.

"Masyarakat"	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham Emiten yang ditawarkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum di di Republik Indonesia
"Menkumham"	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID"	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
"OJK"	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik" atau "Partisipan Sistem"	:	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik" atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemesan Ritel"	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan.
"Pemegang Saham"	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rekening Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Pengendali"	:	berarti pihak yang memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung: dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; dan dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemesan Khusus"	:	berarti karyawan yang berhak untuk melakukan pemesanan berdasarkan Program ESA.
"Penawaran Awal"	:	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.
- ““Penjatahan Pasti”” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- ““Penjatahan Terpusat”” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- ““Penjatahan Terpusat Ritel”” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan No. VIII.G.12” : berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK 17/2020” : berarti Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No.11/2017” : berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- "Peraturan OJK No.23/2017" : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- "Peraturan OJK No.25/2017" : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- "Peraturan OJK No. 30/2015" : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- "Peraturan OJK No. 32/2014" : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- "Peraturan OJK No. 33/2014" : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 34/2014" : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunisasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 35/2014" : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 55/2015" : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- "Peraturan OJK No. 41/2020" : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- "Peraturan OJK No. 42/2020" : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- "Peraturan OJK No. 56/2015" : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- "Perjanjian Pendaftaran Efek" : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" : berarti Akta Perjanjian Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 15 tanggal 10 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 3 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 19 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 14 tanggal 10 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 2 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 18 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- "Pernyataan Efektif" : berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan yang telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.

"Perseroan"	:	berarti PT Hasnur Internasional Shipping Tbk , berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pihak Terafiliasi"	:	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.
"Profesi Penunjang Independen"	:	berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Program ESA"	:	berarti singkatan dari Program <i>Employee Stock Allocation</i> , yaitu program pemberian alokasi pasti dari Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini untuk karyawan dalam jumlah sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.018.500 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.
"Prospektus"	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.
"Prospektus Awal"	:	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
"Rekening Penawaran Umum"	:	berarti Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari Investor.
"Rupiah" atau "Rp"	:	berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Biasa Atas Nama"	:	berarti Efek yang mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aset yang dimiliki Perseroan dan ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sejumlah

525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE” : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan” : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “Surat Kolektif Saham” : berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- “SE OJK No. 15 Tahun 2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Surat Konfirmasi Pencatatan Saham” : berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"HIS"	:	berarti PT Hasnur Internasional Shipping
"HRT"	:	berarti PT Hasnur Resources Terminal
"HMS"	:	berarti PT Hasnur Mitra Sarana
"HJI"	:	berarti PT Hasnur Jaya International
"NIS"	:	berarti PT Nur Internasional Samudra

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan Entitas Anak terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 (“**Akta No. 9/2021**”) dan komposisi modal dan kepemilikan saham di dalam Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456 (“**Akta 107/2021**”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 9/2021 maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha utama:**
Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50133**).
2. **Kegiatan usaha penunjang:**
 - (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50131**).

- (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
- (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
- (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang mana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456 ("Akta No. 107/2021") sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya Internasional	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

C. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 2 (dua) Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020
PT Hasnur Resources Terminal	2011	Pengawasan dan Pengelolaan Pelabuhan	2020	95,00	Sudah Beroperasi	4,85%
PT Hasnur Mitra Sarana	2019	Perusahaan Bongkar Muat	2020	99,80	Sudah Beroperasi	0,26%

D. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1.	Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham baru
2.	Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
3.	Harga Penawaran	:	Rp300 (tiga ratus Rupiah)
4.	Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham
5.	Jumlah Penawaran Umum	:	Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
6.	Tanggal Penawaran Umum	:	24 – 30 Agustus 2021
7.	Tanggal Pencatatan di BEI	:	1 September 2021

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
	Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4.	Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5.	Masyarakat	-	-	00,00	525.250.000	52.525.000.000	20,00
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
	Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja Perseroan secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5. Masyarakat	-	-	00,00	519.231.500	51.923.150.000	19,77

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham				Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
6. ESA	-	-	00,00	6.018.500	601.850.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
	6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 46% (empat puluh enam persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.
2. Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

F. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang material bagi Perseroan berikut pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan pada volatilitas harga komoditas batu bara dan/atau curah kering yang mempengaruhi volume transaksi sehingga berdampak pada permintaan terhadap jasa angkutan perairan

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN/ ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

1. Ketergantungan kepada pelanggan utama
2. Volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan
3. Tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola rantai supply (*supply chain*) batu bara dan komoditas lain
4. Kondisi non-teknis di alur perairan yang digunakan dan dilalui oleh armada angkutan air Perseroan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak
5. Kondisi alam terhadap kegiatan operasional dan nota keamanan pelayaran dari otoritas Pelabuhan
6. Variasi komoditas yang diangkut

7. Risiko terhadap Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus
8. Risiko persaingan usaha
9. Risiko kenaikan harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya
10. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami armada kapal Perseroan
11. Risiko ketergantungan terhadap fasilitas navigasi dan komunikasi yang memadai

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat
2. Pelabuhan mungkin mengalami pendangkalan akibat sedimentasi
3. Debit air disekitar pelabuhan sebagai akibat arus pasang/surut, gelombang dan perubahan iklim
4. Batasan jumlah kapal bersandar di pelabuhan
5. Tingkat kedalaman dari pelabuhan
6. Operator pelabuhan yang memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi
7. Risiko persaingan usaha
8. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin terjadi pada mesin dan infrastruktur pelabuhan

C. RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko pendanaan
2. Risiko fluktuasi mata uang asing
3. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga
4. Risiko terhadap kebijakan akuntansi
5. Risiko terhadap *cost overrun* pada kegiatan operasional dan pengembangan usaha

D. RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi dan kestabilan kondisi politik
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Tuntutan atau gugatan hukum yang bersifat material dan berpengaruh terhadap jalannya usaha perseroan
4. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 (Tidak diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) dan Laporan Keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran

Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909
Total Liabilitas	131.999.074.093	129.372.361.450	163.199.047.906	151.528.963.419
Total Ekuitas	252.297.320.185	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Penjualan Neto	77.773.818.670	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
Beban Pokok Penjualan	62.328.389.402	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
Laba Bruto	15.445.429.268	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
Laba Usaha	8.613.025.964	33.140.341.225	42.593.299.352	28.552.376.305
Laba Tahun Berjalan	7.882.013.440	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	7.882.013.440	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
Laba Per Saham Dasar	94	184,956	304,351	280,167

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	16,3	(16,9)	2,7	15,4
Laba Tahun Berjalan	(31,6)	(38,8)	10,7	72,3
Jumlah Aset	1,6	(11,7)	6,3	6,8
Jumlah Liabilitas	2,0	(20,7)	7,7	(3,5)
Jumlah Ekuitas	1,3	(6,2)	5,4	14,2
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	19,9	20,7	18,3	16,9
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	4,0	17,0	16,0	15,2
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	6,1	25,8	25,8	24,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	10,1	7,1	10,1	7,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	5,8	8,8	6,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	8,8	14,2	10,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	10,1	6,0	8,1	7,6
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	4,9	7,1	6,8
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	7,5	11,5	10,9
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	1,8	6,3	3,4	4,8
Receivable days	197,7	58,1	107,0	76,4
Inventory turnover ratio	22,1	70,3	94,6	74,3
Inventory days	16,6	5,2	3,9	4,9
Rasio Solvabilitas (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,8	0,6	0,4	0,2
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,0	1,7	2,6	1,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,5	0,5	0,6	0,6

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,3	0,3	0,4	0,4
<i>Interest coverage ratio</i>	7,16	2,71	6,60	7,15
<i>Debt services coverage ratio</i>	1,38	1,31	1,94	2,09

* dibandingkan dengan laporan keuangan 2017.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan			
		31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x	2,0	1,7	2,6	1,1
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 2,5x	0,51	0,5	0,6	0,6
<i>Debt services coverage ratio</i>	Minimal 100%	138%	131%	194%	209%

H. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi perseroan, entitas anak, komisaris dan direksi perseroan, serta komisaris dan direksi entitas anak.

I. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021 atau ditentukan lain dalam RUPS Tahunan.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta 9/2021, menyetujui untuk diadakannya Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "Program ESA"). Persetujuan pemegang saham Perseroan tersebut di mengenai Program ESA tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan SK Direksi Nomor 0325a/HIS-JKT/DIR-OP057/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 bahwa Program ESA tersebut akan dilakukan sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/ RW
006/003
Kel. Senayan, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. (62-21) 29343888
Fax. (62-21) 29343777
Website: <https://www.pthis.id>
E-mail: corsec.his@hasnurgroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KETERGANTUNGAN PADA VOLATILITAS HARGA KOMODITAS BATU BARA DAN/ATAU CURAH KERING YANG MEMPENGARUHI VOLUME TRANSAKSI SEHINGGA BERDAMPAK PADA PERMINTAAN TERHADAP JASA ANGKUT PERAIRAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan struktur kepemilikan saham dalam Perseroan telah mengalami perubahan sehingga terakhir kali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1. PT Nur Internasional Samudra		1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2. PT Hasnur Jaya International		735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3. Jayanti Sari		147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4. Zainal Hadi HAS HB		147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5. Masyarakat		-	-	00,00	525.250.000	52.525.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat adalah maksimal sebanyak-sebanyak sebesar 25% (dua lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Jumlah ini sesuai dengan SE OJK nomor 15/SEOJK.04.2020 jika Penawaran Umum Perseroan masuk didalam Golongan Penawaran Umum I. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, Perseroan akan melakukan penyesuaian porsi alokasi antara penjatahan tetap dan penjatahan terpusat.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation Program* dengan memberikan saham secara gratis kepada karyawan yang telah ditentukan ("**ESA Saham Penghargaan**"). Program ESA ini dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 9 tanggal 16 Maret 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA akan berasal dari kas internal Perseroan. Harga penawaran yang diberikan untuk program ESA adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana saham ini.

Tujuan utama Program Kepemilikan ESA Saham Penghargaan Perseroan dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki pegawai atas Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja masing-masing pegawai. Selain itu ESA Saham Penghargaan diberikan Perseroan untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Peserta Program ESA Saham Penghargaan

Peserta Program ESA Saham Penghargaan adalah karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan syarat-syarat:

- Merupakan karyawan Perseroan
- Karyawan yang disebutkan pada butir 1 (satu) di atas haruslah karyawan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0325a/HIS-JKT/DIR-OP057/III-2021 tanggal 18 Maret 2021.
- Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Program ESA Saham Penghargaan dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada karyawan peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan peserta Saham Penghargaan atas nama masing-masing peserta.
- Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan;
- Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.
- Sumber dana pembayaran saham dalam Program ESA Saham Penghargaan adalah dibayarkan langsung oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.
- Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal efektif saham Perseroan dicatatkan dalam bursa saham sehingga dalam periode waktu tersebut, pemegang saham hasil program ESA tidak dapat menjual, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga
- Jika peserta program ESA mengundurkan diri dari Perseroan sebelum tanggal distribusi maka Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian.
- Selama masa *lock-up*, dalam hal peserta Program ESA:
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran terhadap kontrak kerja peserta tersebut atau terhadap kebijakan/kebijakan/peraturan/pedoman/kode etik perusahaan;
 - peserta melakukan tindakan kriminal apapun;
 - pelanggaran atas kesalahan berat atau dikarenakan peserta melakukan tindakan indisipliner, peserta tidak akan memiliki hak-hak atas saham atau hasil-hasil penjualan atas saham dan Perseroan akan memberikan instruksi kepada perusahaan efek yang ditunjuk untuk mengalihkan saham kepada karyawan lain sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.
- Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.
- Setelah *lock-up period* Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA Saham Penghargaan adalah tim pengelola Program ESA Saham Penghargaan yang terdiri dari divisi Sumber Daya Manusia dan Hukum Perseroan.

Tata Cara Pemesanan Program ESA Saham Penghargaan

- Periode pemesanan saham oleh peserta Program ESA Saham Penghargaan dilakukan selama masa Penawaran Umum.
- Dasar alokasi penjatahan saham Program ESA Saham Penghargaan kepada masing-masing karyawan meliputi peringkat jabatan dan masa kerja karyawan.
- Karyawan yang mendapatkan alokasi penjatahan atas saham Program ESA Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA Saham Penghargaan yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia; dan
 - melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA Saham Penghargaan melalui bagian SDM masing-masing unit kerja ditempat karyawan peserta Program ESA ditugaskan.
- Bagian SDM unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan karyawan peminat saham Program ESA kepada Divisi HCA Perseroan.

Hak-Hak Pemegang ESA Saham Penghargaan

Para peserta program ESA berhak memiliki opsi untuk membeli saham Program ESA Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA.

Ketentuan Program ESA Saham Penghargaan

Biaya dan pajak yang timbul sehubungan dengan pembelian saham Program ESA Saham Penghargaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Aspek Perpajakan Program ESA Saham Penghargaan

Setelah periode *lock-up* berakhir, peserta Program ESA Saham Penghargaan dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi.
- untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta Program ESA Saham Penghargaan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5. Masyarakat	-	-	00,00	519.231.500	51.923.150.000	19,77
6. ESA	-	-	00,00	6.018.500	601.850.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	-

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebesar 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) lembar Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI Surat Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dari BEI sesuai dengan surat S-04328/BEI.PP3/06-2020 tanggal 23 Juni 2021. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesana saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, (i) PT Nur Internasional Samudra, (ii) PT Hasnur Jaya International, (iii) Jayanti Sari, dan (iv) Zainal Hadi HAS HB selaku para pemegang saham Perseroan yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 30 Juni 2021, dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham berdasarkan Akta No. 107/2021, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam 12 bulan mendatang setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 46% (empat puluh enam persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.
2. Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana transaksi belanja modal Perseroan sebagaimana disebutkan pada poin (1) tersebut di atas, akan memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Maka Perseroan akan tunduk pada ketentuan transaksi material sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020.

Terhadap rencana penggunaan dana berupa penggunaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum sebagaimana disebutkan pada poin (2) dan (3) di atas, tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena rangkaian transaksi penggunaan dana tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Lebih lanjut, (i) kontraktor, konsultan, dan supplier dalam transaksi pembelian kapal Perseroan secara umum akan menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada poin (1) dan (3) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"). Pada poin (2) rencana pemberian pinjaman ke entitas anak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga Perseroan harus tunduk pada ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil

Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,39% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar 2,00% yang terdiri dari
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 1,75%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,125%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,125%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,80%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,86%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,70%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,24%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,05%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,54%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp129.372.361.450 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2020
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	-
Utang usaha	-
Pihak berelasi	43.415.406
Pihak ketiga	29.020.859.669
Utang lain-lain	471.146.230
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.747.211.100
Utang pajak	2.256.181.589
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	208.841.378
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	54.058.635.372
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.218.936.000
Liabilitas derivatif	-
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000
Liabilitas imbalan kerja	19.079.990.078
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	75.313.726.078

Hingga saat ini tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi/dibayar.

1. Utang Usaha

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan utang usaha yang diterima dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Rupiah) 31 Desember 2020
Pihak berelasi	
PT Barito Putera Docking	43.415.406
PT Hasnur Jaya International	-
PT Magma Sigma Utama	-
PT Hasnur Jaya Utama	-
PT Hasnur Informasi Teknologi	-
Sub Total	43.415.406
Pihak ketiga	
PT Borneo Samudra Perkasa	4.586.680.309
PT AKR Corporindo Tbk	4.347.648.728
PT Trans Energy Indonesia	2.992.380.505
PT Ambang Barito Nusapersada	2.349.828.459
PT Bahtera Energi Samudra Tuah	2.011.434.875
PT Pulau Seroja Jaya	1.859.719.658
PT Patria Maritime Industry	1.171.950.000
PT Pelayaran Saudara Sejati	1.394.403.518
PT Duta Bahari Menara Line Dockyard	792.715.550
PT Virgo Samudera Jaya	789.966.517

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
PT Lumena Mandiri Nusantara	781.354.551
PT Karya Santosa Tatajaya	632.880.652
PT Walasuji Padmarin Nusantara	556.146.558
PT Pelita Samudera Shipping	267.639.528
PT Mitra Sarana Lines	-
PT Habco Primatama	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	4.486.110.261
Sub total	29.020.859.669
Total	29.064.275.075

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Belum jatuh tempo	16.151.983.247
Jatuh tempo:	
Sampai dengan 30 hari	9.856.104.533
31 - 90 hari	391.991.560
> 90 hari	2.664.195.735
Total	29.064.275.075

2. Utang Lain-lain

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan utang karyawan terkait uang muka perjalanan dinas dan utang lain-lain kepada pihak ketiga tidak berkaitan dengan operasional Perusahaan dengan rincian adalah sebagai berikut:

(dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Utang karyawan	234.184.189
Lain-lain	236.962.041
Total	471.146.230

3. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan kompensasi karyawan, pengangkutan, jasa profesional dan lain-lain dengan rincian adalah sebagai berikut:

(dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Kompensasi karyawan	2.562.710.534
Pengangkutan	1.459.922.965
Jasa profesional	606.300.000
Perlengkapan	-
Persediaan bahan bakar	-
Lain-lain (masing-masing dibawah 500juta)	118.277.601
Total	4.747.211.100

4. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan pinjaman bank jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.325.780.000
Total pinjaman bank	43.325.780.000
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 019/BMM/PKKI/2018 tanggal 28 Februari 2018, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian tugboat dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp60.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12,75% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 60 bulan terhitung sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2023. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp29.644.980.000 pada Maret dan Mei 2018 dan akan jatuh tempo pada Januari 2022. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tugboat dan tongkang dan piutang usaha HIS dan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya International (HJI). Fasilitas ini juga dijamin dengan tanah dan bangunan milik Direksi Ibu Jayanti Sari seluas 360 meter persegi (SHM No. 10571) yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp11.170.980.000, Rp22.414.980.000 dan Rp27.358.980.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp2.129.406.376, Rp2.927.072.014 dan Rp2.408.975.489

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan aset kekayaan HIS atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (*merger*), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi *proceed* HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;
12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Berdasarkan perjanjian No. 1041/His-JKT/DirUM051/IX-2019 tanggal 17 Januari 2020, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian tugboat dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp33.154.800.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 72 bulan terhitung sejak 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2026. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp33.154.800.000

pada April dan Mei 2020 dan akan jatuh tempo pada Januari 2026. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini sebesar Rp32.154.800.000.

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan HIS kepada pihak lain;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (merger), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi proceed HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;
12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Sehubungan dengan pembatasan di atas, Manajemen HIS telah mendapat persetujuan BNI untuk pengesampingan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham berdasarkan tangan persetujuan Bank BNI atas Surat Perseroan No. 0880/HIIS-JKT/DIR-LG072/X-2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan Ketentuan – Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Surat Bank BNI tertanggal 10 Februari 2021 No. BMM/2.5/88 Perihal Persetujuan atas Perubahan Jadwal Rencana Penawaran Umum dan Tindakan – Tindakan Perseroan (“Surat Persetujuan BNI”).

Manajemen HIS berpendapat bahwa seluruh ketentuan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan BNI telah dilaksanakan dan tidak terdapat pelanggaran terhadap pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan BNI tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini sebesar Rp32.154.800.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.565.146.933 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban Lain-lain - Beban Bunga” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka Panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021, 16 April 2020 dan 12 Juni 2019. Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2020
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun
Tingkat diskonto aktuarial	5,88 - 6,59% per tahun
Tingkat mortalita	TMI-IV 2019
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	5%, ≤ 39 tahun 3%, 40 - 44 tahun 2%, 45 - 49 tahun 1%, 50 - 54 tahun

Rincian berikut ini menyajikan komponen beban dan liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan:

a. Beban imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	1.344.377.704
Biaya bunga	987.498.455
Jumlah beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi	2.331.876.159

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.079.990.078

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Saldo awal	13.134.188.465
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908
Laba (rugi) komprehensif lain	3.226.073.346
Beban imbalan kerja tahun berjalan	2.331.876.159
Pembayaran manfaat	(143.338.800)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan entitas anak	-
Saldo akhir	19.079.990.078

Pada tanggal 31 Desember 2018, pembayaran manfaat yang belum dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp307.935.600 dicatat sebagai bagian dari "Liabilitas yang Masih Harus Dibayar - Kompensasi Karyawan".

d. Perubahan atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Saldo awal	13.134.188.465
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908
Keuntungan aktuarial	3.226.073.346
Beban jasa kini	1.344.377.704
Beban bunga	987.498.455
Pembayaran manfaat	(143.338.800)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan investasi	-
TOTAL	19.079.990.078

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel lain konstan, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih rendah sebesar Rp1.087.876.766, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih tinggi sebesar Rp1.225.922.723.

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan Gaji

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp1.172.106.825, sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp1.063.206.801.

Profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2020
Sampai dengan 2 tahun	3.891.367.634
2 tahun - 5 tahun	3.839.591.007
Lebih dari 5 tahun	11.349.031.437
TOTAL	19.079.990.078

Manajemen Perseroan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas tersebut memadai untuk memenuhi liabilitas imbalan kerja Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI DAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 (Tidak diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) dan Laporan Keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET LANCAR				
Kas dan bank	41.308.791.794	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928
Piutang usaha – neto				
Pihak ketiga	28.194.988.455	16.602.381.547	11.305.986.757	17.995.343.569
Pihak-pihak berelasi	13.923.482.926	31.342.438.692	98.155.262.715	58.138.272.643
Piutang lain-lain	673.768.486	790.265.083	1.485.334.927	2.004.596.280
Persediaan	2.826.560.136	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727
Beban dibayar dimuka	1.495.141.107	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184
Uang muka – bagian lancer	7.349.202.138	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555
Pajak dibayar dimuka	5.394.737.525	1.330.157.644	-	-
TOTAL ASET LANCAR	101.166.672.567	92.266.921.060	139.289.412.561	102.489.975.886
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang usaha – neto	-	1.466.438.021	-	-
Pihak ketiga				
Uang muka pembelian lahan	27.230.383.173	26.823.491.000	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp184.825.798.291 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp161.891.815.408 pada tanggal 31 Desember				

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
2019, Rp140.965.654.711 pada tanggal 31 Desember 2018	225.766.566.916	230.909.554.164	204.041.498.985	223.576.833.592
Beban docking ditangguhkan - setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp63.363.768.690 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp49.436.458.549 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp38.660.610.750 pada tanggal 31 Desember 2018	21.154.576.936	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255
Piutang dari pihak-pihak berelasi - bagian tidak lancar	8.468.531.076	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862
Aset pajak tangguhan	509.663.610	509.663.610	547.475.711	2.291.936.314
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	283.129.721.711	286.131.053.493	289.372.124.293	300.825.770.023
TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909
LIABILITAS				
Utang usaha	36.725.687.249	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264
Utang lain-lain	-	471.146.230	294.714.485	123.635.618
Liabilitas yang masih harus dibayar	2.308.072.876	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504
Utang pajak	4.894.702.512	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083
Utang kepada pihak- pihak berelasi - bagian lancar	-	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.704.980.000	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	50.633.442.637	54.058.635.372	54.335.890.340	91.555.297.957
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada pihak- pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.130.841.378	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.154.800.000	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000
Liabilitas imbalan kerja	19.079.990.078	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	81.365.631.456	75.313.726.078	108.863.157.566	59.973.665.462
TOTAL LIABILITAS	131.999.074.093	129.372.361.450	163.199.047.906	151.528.963.419

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS				
Modal saham	210.000.000.000	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	34.142.522.432	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Kprehensif Lain	(2.424.328.374)	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	248.912.366.704	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non- pengendali	3.384.953.481	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	252.297.320.185	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
PENDAPATAN NETO	77.773.818.670	92.902.194.139	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
BEBAN POKOK PENDAPATAN	62.328.389.402	73.575.872.158	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
LABA BRUTO	15.445.429.268	19.326.321.981	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	6.832.403.304	5.476.288.323	31.181.805.572	25.865.676.027	32.812.061.518
LABA USAHA	8.613.025.964	13.850.033.658	33.140.341.225	42.593.299.352	28.552.376.305
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan jasa keagenan – neto	68.730.574	588.245.000	663.892.445	615.044.453	821.355.189
Pendapatan bunga	154.363.831	156.305.664	563.900.597	831.727.371	447.309.860
Laba (rugi) selisih kurs – neto	4.882.876	4.611.328	140.123.462	(14.812.063)	274.932.986
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-	-	515.446.412
Beban bunga	(1.253.661.829)	(2.547.251.406)	(12.539.795.928)	(6.569.841.848)	(4.380.645.685)
Lain-lain - neto	294.672.024	(523.765.509)	9.866.753	174.841.903	1.155.498.983
Beban lain-lain - Neto	(731.012.524)	(2.321.854.923)	(11.162.012.671)	(4.963.040.184)	(1.166.102.255)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	7.882.013.440	11.528.178.735	21.978.328.554	37.630.259.168	27.386.274.050

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
BEBAN PAJAK					
PENGHASILAN					
Kini - Final	-	-	3.533.988.999	4.314.323.046	4.244.984.954
Kini - Tidak final	-	-	634.026.715	849.613.404	741.293.331
Tangguhan	-	-	59.394.386	1.708.733.628	(1.843.060.454)
Beban Pajak Penghasilan	-	-	4.227.410.100	6.872.670.078	3.143.217.831
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	7.882.013.440	11.528.178.735	17.750.918.454	30.757.589.090	24.243.056.219
LABA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	875.156.034	(322.526.498)	3.773.719.997
LABA TAHUN BERJALAN	7.882.013.440	11.528.178.735	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Bagian efektif dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(3.226.073.346)	452.844.344	(190.737.791)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	-	21.582.285	(35.726.975)	(43.156.544)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS	-	-	(3.204.491.061)	417.117.369	(233.894.335)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
SEPENGENDALI					
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	(107.180.924)	(129.469.634)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(3.204.491.061)	309.936.445	(363.363.969)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.882.013.440	11.528.178.735	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	7.826.825.781	11.447.461.644	18.495.659.911	30.435.062.592	28.016.776.216
Kepentingan non-pengendali	55.187.659	80.717.091	130.414.577	-	-
TOTAL	7.882.013.440	11.528.178.735	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	7.882.013.440	11.528.178.735	15.498.102.435	30.744.999.037	27.653.412.247
Kepentingan non-pengendali	(55.187.659)	(80.717.091)	(76.519.008)	-	-
TOTAL	7.826.825.781	11.447.461.644	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
LABA PER SAHAM DASAR	94	137	185	304	280

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018*
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	16,3)	(16,9)	2,7	15,4
Laba Tahun Berjalan	(31,6)	(38,8)	10,7	72,3
Jumlah Aset	1,6	(11,7)	6,3	6,8
Jumlah Liabilitas	2,0	(20,7)	7,7	(3,5)
Jumlah Ekuitas	1,3	(6,2)	5,4	14,2
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	19,9	20,7	18,3	16,9
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	4,0	17,0	16,0	15,2
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	6,1	25,8	25,8	24,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	10,1	7,1	10,1	7,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	5,8	8,8	6,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	8,8	14,2	10,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	10,1	6,0	8,1	7,6
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	4,9	7,1	6,8
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	7,5	11,5	10,9
Rasio Aktivitas (x)				
<i>Receivable turnover ratio</i>	1,8	6,3	3,4	4,8
<i>Receivable days</i>	197,7	58,1	107,0	76,4
<i>Inventory turnover ratio</i>	22,1	70,3	94,6	74,3
<i>Inventory days</i>	16,6	5,2	3,9	4,9
Rasio Solvabilitas (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,8	0,6	0,4	0,2
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,0	1,7	2,6	1,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,5	0,5	0,6	0,6
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,3	0,3	0,4	0,4
<i>Interest coverage ratio</i>	7,16	2,71	6,60	7,15
<i>Debt services coverage ratio</i>	1,38	1,31	1,94	2,09

* dibandingkan dengan laporan keuangan 2017.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan			
		31 Maret 2021	2020	2019	2018
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x	2,0	1,7	2,6	1,1
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 2,5x	0,51	0,5	0,6	0,6
<i>Debt services coverage ratio</i>	Minimal 100%	138%	131%	194%	209%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021.

1. UMUM

Sejak Perseroan didirikan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 (“Akta No.9/2021”).

Perseroan berdomisili dan berkantor pusat di Ged. Office 8 Lantai 7 SCBD, LOT 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (“DSAK-IAI”) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Kebijakan Akuntansi Penting

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup. Grup telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amandemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas. Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan

- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis”

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, amendemen PSAK 22 tersebut:

- a. mengamendemen definisi bisnis;
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan Penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output; dan
- d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis” akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual”

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual” ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual pelaporan keuangan.

Secara umum, Amandemen PSAK 22 ini: *In general, the amendments to PSAK 22:*

- a. Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- b. Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- c. Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual” akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- a. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
- b. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK

- a. perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari asset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- b. akuntansi lindung nilai; dan
- c. pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

Penerapan PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan membuat laporan keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdaya banding" dengan industri-industri lain seperti perbankan dan Perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62, "Kontrak Asuransi" yang berlaku saat ini masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh pemangku kepentingan dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"

Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan transisi PSAK 112 ini adalah prospektif *catch-up* sejak awal periode sajian.

PSAK 112, "Akuntansi Wakaf" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 69, "Agrikultur"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berikut adalah rincian perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana ketiga perubahan tersebut merupakan:

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Laba ditahan berkurang sebesar Rp 993.043.850 pada 31 Desember 2019 sebagai pengaplikasian PSAK 71.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah Analisa dimana Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian

3. FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi perekonomian Indonesia, global, dan harga batubara

Saat ini Perseroan bergerak di bidang jasa pelabuhan dengan pendapatan utama berasal dari komoditas batu bara sehingga pergerakan di industri batu bara sangat berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan. Apabila pertumbuhan industri batu bara di Indonesia meningkat, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu pertumbuhan industri batu bara di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri di Indonesia, maka hal tersebut akan menopang pertumbuhan industri dan secara tidak langsung menopang kinerja keuangan Perseroan.

b. Jumlah dan kualitas armada kapal

Jumlah, kualitas, dan kondisi kapal yang dimiliki Perseroan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap operasi Perseroan. Seiring berjalannya waktu jumlah kapal yang bertambah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan dan biaya operasional. Selain itu kondisi dan usia kapal berpengaruh juga terhadap operasional Perseroan pada efisiensi biaya operasional, biaya perawatan kapal, dan *docking*. Umur kapal yang tergolong tua akan membutuhkan biaya operasional dan biaya perawatan yang lebih tinggi dibanding dengan kapal baru. Dalam hal ini Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja kapal melalui perawatan yang dilakukan secara rutin.

c. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan, industri keuangan dan pertambangan juga mempengaruhi Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan seperti asas cabotage sangat berdampak bagi Perseroan. Kebijakan dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga pinjaman bisa menjadi pendorong iklim investasi.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa tax amnesty, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Selain itu kebijakan Pemerintah dalam industri pertambangan batu bara dan mineral lainnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan seperti kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional dimana untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation). Disamping itu, kebijakan Pemerintah untuk menentukan pajak ekspor yang dapat mempengaruhi ekspor batubara.

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perkembangan industri pelayaran tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menentukan arah dari perkembangan industrinya serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Dalam upayanya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan industri pelayaran sebagai berikut:

a. Perizinan Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU 17/2008”), untuk melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri dan internasional, Badan Usaha Indonesia wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (“SIUPAL”). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (“Permenhub PM 93/2013”) mengatur bahwa usaha angkutan laut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

SIUPAL berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan. Gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu dalam bentuk: (i) peringatan tertulis, (ii) pembekuan SIUPAL, dan/atau (iii) pencabutan SIUPAL.

b. Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Penerapan Asas Cabotage

Pada tahun 2008, Pemerintah mengesahkan UU Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 21 tahun 1992 untuk mendukung pengembangan industri pelayaran di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan prinsip cabotage yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional (“INPRES No. 5/2005”). Undang-undang ini antara lain mengatur implementasi asas cabotage, minimum persyaratan navigasi, tata kelola pelabuhan yang baik, tarif dan status pelabuhan, registrasi kapal, ketentuan standar internasional untuk awak kapal dan ketentuan manajemen kelautan dan keamanan lingkungan hidup. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim pelayaran yang lebih baik, efisiensi, serta perbaikan pada infrastruktur usaha.

Dalam UU Pelayaran asas cabotage diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat 1: kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Pasal 8 ayat 2: kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- 3) Penjelasan pasal 8 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ketentuan azas cabotage juga dipertegas di dalam PP No. 20 tahun 2009 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan turunan dari UU Pelayaran. PP tersebut menegaskan penyelenggaraan angkutan di perairan di laksanakan dengan cara memberlakukan azas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan laut nasional menjadi tuan di negeri sendiri. Dalam PP tersebut menegaskan kegiatan pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia, yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Penerapan azas cabotage ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri ("**KM 71 Tahun 2005**") yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari INPRES No. 5/2005 tersebut. Dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan azas cabotage secara efektif dan secara menyeluruh di perairan Indonesia bahwa untuk kegiatan pengangkutan batubara dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010. Untuk komoditas sayur, buah-buahan dan ikan segar (*fresh product*), crude palm oil (CPO), biji-bijian lainnya, dan bahan galian tambang/bahan galian logam dan non logam maupun bahan galian golongan C (*mine and quarry*) dilaksanakan selambatnya-lambatnya 1 Januari 2008. Adapun untuk kegiatan pengangkutan batu bara antar pelabuhan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010.

c. Kepemilikan Kapal dan Pembebanan atas Kapal

Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2012 memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal ("**Permenhub No. PM 13/2012**"), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 168 UU Pelayaran yang mengatur mengenai pembebanan hipotek dan tentang pendaftaran kapal. Permenhub No. PM 13/2012 mengatur bahwa pendaftaran kapal dapat melalui: (i) pendaftaran hak milik, (ii) pembebanan hipotek, dan (iii) pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran ini akan dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dan dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan.

d. Kewajiban Keselamatan dan Keamanan Kapal

Setiap kapal berlayar yang beroperasi di perairan Indonesia tunduk pada peraturan keselamatan di Indonesia. Tiga sertifikat utama yang diwajibkan berdasarkan UU Pelayaran agar kapal dapat beroperasi di perairan Indonesia adalah sebagai berikut: (i) sertifikat keselamatan kapal, (ii) sertifikat keselamatan radio, (iii) sertifikat jalur muatan. Sehubungan dengan pelaksanaannya keselamatan dan keamanan kapal, inspektur kelautan Indonesia diberi wewenang untuk melakukan survei yang diperlukan atau inspeksi kapal di atas kapal, termasuk sebagai berikut: (a) survei awal yang dilakukan untuk kapal baru yang dibuat di galangan kapal atau untuk dipasang kembali pada kapal berbendera asing menjadi kapal berbendera Indonesia; (b) survei tahunan; (c) evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali; (d) survei sementara yang dilakukan tahunan sampai 5 tahunan; (E) di luar survei; dan (f) survei karena kerusakan atau perbaikan kapal. Indonesia adalah penandatangan berbagai konvensi internasional termasuk *International Convention for The Prevention of Pollution From Ships ("MARPOL")*, and *International Convention for the Safety of Life at Sea ("SOLAS")*. Persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut yang relevan, berlaku untuk kapal laut yang beroperasi di perairan Indonesia, selain persyaratan keselamatan yang tercantum dalam Undang-undang Pelayaran Indonesia nomor 17 tahun 2008.

Selanjutnya, berdasarkan UU Pelayaran, kapal diklasifikasikan sebagai kelaiklautan kapal dimana kapal tersebut harus memiliki sertifikat mengenai: (i) keamanan kapal, (ii) pencegahan pencemaran perairan dari kapal, (iii) pengawakan, (iv) garis muat, (v) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (vi) status hukum kapal, (vii) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan (viii) manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Pelayaran, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

5. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan bongkar muat. Divisi-divisi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Grup.

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER 2020			
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	294.499.083.224	18.179.298.443	(2.329.133.319)	310.349.248.348
BEBAN POKOK	243.838.972.753	4.517.262.117	(2.329.133.319)	246.027.101.551
PENDAPATAN LABA BRUTO	50.660.110.471	13.662.036.326	-	64.322.146.797
BEBAN USAHA	25.605.311.636	5.576.493.936		31.181.805.572
LABA USAHA	25.054.798.835	8.085.542.390	-	33.140.341.225
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan jasa keagenan - neto	663.892.445	-	-	663.892.445
Pendapatan bunga	484.280.789	79.619.808	-	563.900.597
Laba (rugi) selisih kurs - neto	140.123.462	-	-	140.123.462
Beban bunga	(4.694.553.309)	(7.845.242.619)	-	(12.539.795.928)
Lain-lain – neto	527.163.015	503.326.048	(1.020.622.310)	9.866.753
Beban lain-lain - Neto	(2.879.093.598)	(7.262.296.763)	(1.020.622.310)	(11.162.012.671)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	22.175.705.237	823.245.627	(1.020.622.310)	21.978.328.554
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini - Final	3.533.988.999	-	-	3.533.988.999
Kini - Tidak final	146.056.328	487.970.387	-	634.026.715
Tanggungan	-	59.394.386	-	59.394.386
Beban Pajak Penghasilan	3.680.045.327	547.364.773	-	4.227.410.100
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	18.495.659.910	275.880.854	(1.020.622.310)	17.750.918.454
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	875.156.034	-	875.156.034
LABA TAHUN BERJALAN	18.495.659.910	1.151.036.888	(1.020.622.310)	18.626.074.488
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3.127.972.052)	(98.101.294)	-	(3.226.073.346)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	21.582.285	-	21.582.285

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER 2020			
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-
TOTAL LABA KOMPRESIF LAIN	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)
TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	15.367.687.859	1.074.517.879	(1.020.622.310)	15.421.583.427
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	18.495.659.911
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	130.414.577
TOTAL	-	-	-	18.626.074.488
LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	15.498.102.435
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(76.519.008)
TOTAL	-	-	-	15.421.583.427
LABA PER SAHAM DASAR YANG DISTRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	-	-	-	184.956
INFORMASI LAINNYA				
Aset Segmen	372.927.566.228	36.070.913.685	(30.111.603.872)	378.886.876.041
Liabilitas Segmen	125.761.052.617	4.706.436.319	(463.789.163)	130.003.699.773
Penyusutan	22.891.235.424	42.747.459	-	22.933.982.883

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2019				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	359.526.920.500	15.298.002.175	(1.302.287.311)	373.522.635.364
BEBAN POKOK PENDAPATAN	301.514.000.901	4.851.946.395	(1.302.287.311)	305.063.659.985
LABA BRUTO	58.012.919.599	10.446.055.780	-	68.458.975.379
BEBAN USAHA	21.139.965.349	4.725.710.678	-	25.865.676.027
LABA USAHA	36.872.954.250	5.720.345.102	-	42.593.299.352
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	772.476.732	59.250.639	-	831.727.371
Pendapatan jasa keagenan - neto	615.044.453	-	-	615.044.453
Beban bunga	(3.348.381.941)	(3.221.459.907)	-	(6.569.841.848)
Rugi selisih kurs - neto	(13.202.833)	(1.609.230)	-	(14.812.063)
Lain-lain - neto	4.255.977	170.585.926	-	174.841.903
Beban lain-lain - Neto	(1.969.807.612)	(2.993.232.572)	-	(4.963.040.184)
				0
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	34.903.146.638	2.727.112.530	-	37.630.259.168
				0
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				0
Final	4.314.323.046	-	-	4.314.323.046
Kini	153.761.000	695.852.404	-	849.613.404
Tanggungan	-	1.708.733.628	-	1.708.733.628
Beban Pajak Penghasilan (neto)	4.468.084.046	2.404.586.032	-	6.872.670.078
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	30.435.062.592	322.526.498	-	30.757.589.090
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(322.526.498)	-	(322.526.498)
LABA TAHUN BERJALAN	30.435.062.592	-	-	30.435.062.592
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja	309.936.445	142.907.899	-	452.844.344
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(35.726.975)	-	(35.726.975)

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2019				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	309.936.445	107.180.924	-	417.117.369
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(107.180.924)	-	(107.180.924)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	309.936.445	-	-	309.936.445
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.744.999.037	-	-	30.744.999.037
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	30.435.062.592
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	30.435.062.592
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	30.744.999.037
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	30.744.999.037
LABA PER SAHAM DASAR YANG DISTRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	-	-	-	304.351
INFORMASI LAINNYA				
Aset Segmen	323.293.632.109	105.826.088.774	(432.734.665)	428.686.986.218
Liabilitas Segmen	88.512.299.326	75.965.508.675	(1.253.310.731)	163.224.497.270
Penyusutan	20.750.694.412	175.466.285	-	20.926.160.697

(dalam Rupiah)

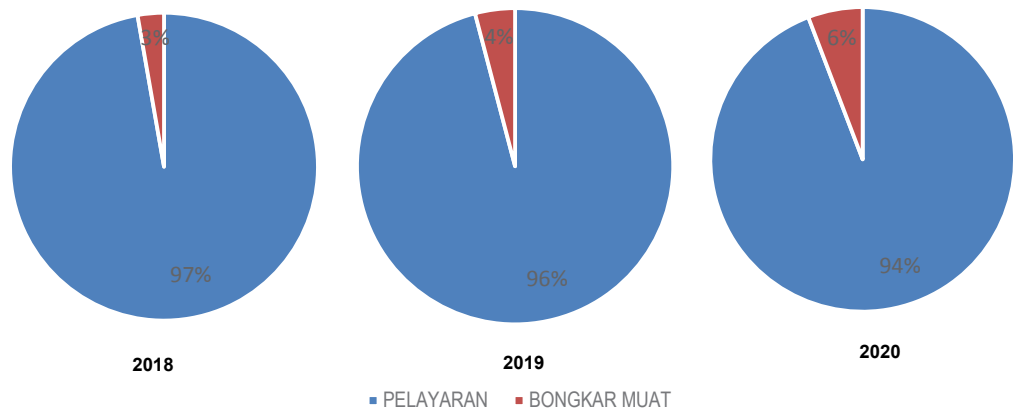
31 DESEMBER 2018				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	353.748.746.139	10.027.259.872	-	363.776.006.011
BEBAN POKOK PENDAPATAN	297.612.580.131	4.798.988.057	-	302.411.568.188
LABA BRUTO	56.136.166.008	5.228.271.815	-	61.364.437.823
BEBAN USAHA	21.672.723.873	11.139.337.645	-	32.812.061.518
LABA USAHA	34.463.442.135	(5.911.065.830)	-	28.552.376.305
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan jasa keagenan - neto	821.355.189	-	-	821.355.189
Pendapatan bunga	396.154.680	51.155.180	-	447.309.860
Laba (rugi) selisih kurs - neto	275.088.776	(155.790)	-	274.932.986
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	515.446.412	-	-	515.446.412
Beban bunga	(4.380.645.685)	-	-	(4.380.645.685)
Lain-lain - neto	376.258.413	779.240.570	-	1.155.498.983
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(1.996.342.215)	830.239.960	-	(1.166.102.255)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)				
PAJAK PENGHASILAN	32.467.099.920	(5.080.825.870)	-	27.386.274.050
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Final	4.244.984.954	-	-	4.244.984.954
Kini	205.338.750	535.954.581	-	741.293.331
Tangguhan	-	(1.843.060.454)	-	(1.843.060.454)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (neto)	4.450.323.704	(1.307.105.873)	-	3.143.217.831
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	28.016.776.216	(3.773.719.997)	-	24.243.056.219
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	3.773.719.997	-	3.773.719.997
LABA TAHUN BERJALAN	28.016.776.216	-	-	28.016.776.216
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(363.363.969)	172.626.178	-	(190.737.791)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(43.156.544)	-	(43.156.544)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(363.363.969)	129.469.634	-	(233.894.335)

(dalam Rupiah)

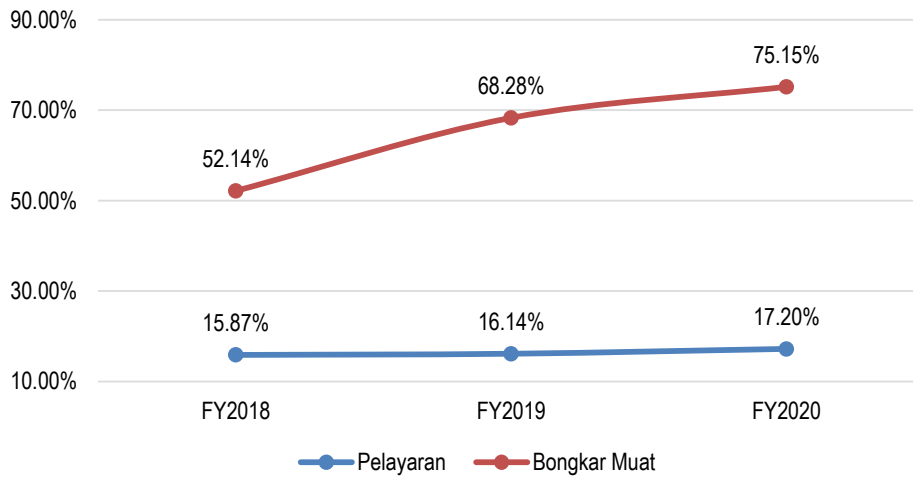
		31 DESEMBER 2018			
		PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENYESUAIAN KOMPRESIF TERJADI RESTRUKTURISASI SEPENGENDALI	LABA (RUGI) PROFORMA YANG DARI TRANSAKSI ENTITAS	-	(129.469.634)	-	(129.469.634)
TOTAL KOMPRESIF LAIN	PENGHASILAN (RUGI)	(363.363.969)	-	-	(363.363.969)
TOTAL LABA BERJALAN	KOMPRESIF TAHUN	27.653.412.247	-	-	27.653.412.247
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk		-	-	-	28.016.776.216
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	28.016.776.216
LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk		-	-	-	27.653.412.247
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	27.653.412.247
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK		-	-	-	280.167
INFORMASI LAINNYA					
Aset Segmen		313.470.397.297	96.625.729.074	(6.527.044.798)	403.569.081.573
Liabilitas Segmen		106.434.063.551	51.875.280.330	(6.527.044.798)	151.782.299.083
Penyusutan		19.784.468.194	256.272.777	-	20.040.740.971

Secara keseluruhan, segmen pendapatan perseroan terbagi menjadi dua yaitu, pelayaran dan bongkar muat. Kontribusi pendapatan perseroan pada tahun 2018 pada segmen bongkar muat sebanyak 3% dari total pendapatan hingga 6% pada bongkar muat. Secara keseluruhan *gross profit margin* segmen bongkar muat lebih besar dibandingkan pelayaran, dimana pada tahun 2020 bongkar muat berada pada level 75.15% dibandingkan dengan 17.2% pada pelayaran. Dikarenakan *gross profit margin* bongkar muat yang lebih besar dibandingkan dengan segmen pelayaran, presentase kontribusi pelayaran pada laba kotor lebih besar dibandingkan pendapatan. Bongkar muat berkontribusi pada 9% total laba kotor perseroan, meningkat menuju 5% pada 2019, hingga mencapai kontribusi 21% dari total laba kotor pada tahun 21%.

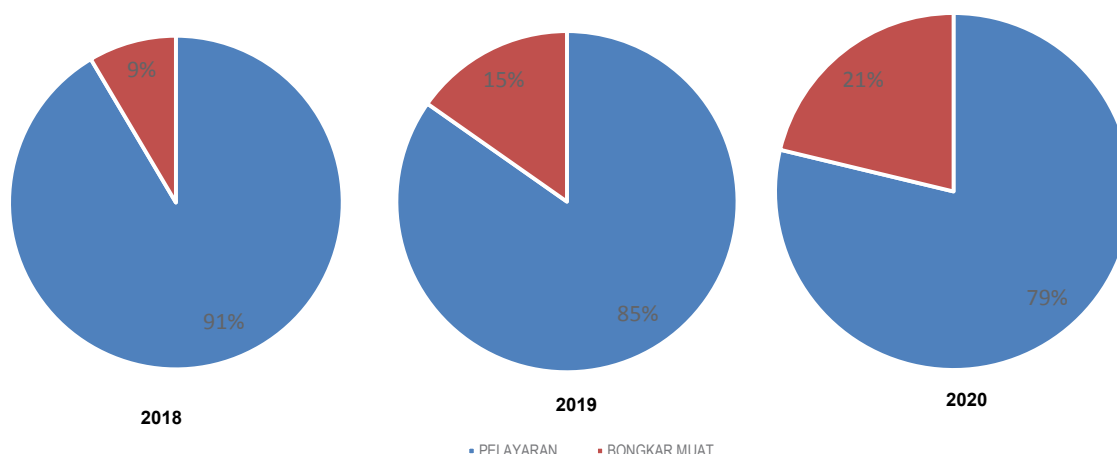
Pendapatan Neto 2018-2020



Gross Profit Margin



Presentasi Kontribusi Segmen 2018-2020



6. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	2020	31 Desember 2019	2018
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Pendapatan Neto	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
Beban Pokok Pendapatan	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
Laba Bruto	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
Laba Tahun Berjalan	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247

PENDAPATAN NETO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp310.349.248.348. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp63.173.387.016, atau turun sebesar 16,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp373.522.635.364 yang sebagian besar disebabkan efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp373.522.635.364. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp9.746.629.353, atau sebesar 2,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp 363.776.006.011 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.027.101.551. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp59.036.558.434, atau turun sebesar 19,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp305.063.659.985 yang sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp305.063.659.985. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp2.652.091.797, atau sebesar 0,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp 302.411.568.188 yang sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) BRUTO**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp64.322.146.797. Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp4.136.828.582 atau berkurang sebesar 6,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba usaha sebesar Rp68.458.975.379 yang sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp68.458.975.379. Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp7.094.537.556 atau meningkat sebesar 11,56% dibandingkan laba usaha tahun 2018 sebesar Rp61.364.437.823 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.626.074.488. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp11.808.988.104 atau berkurang sebesar 38,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp30.435.062.592 sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.435.062.592. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp2.933.732.788 atau sebesar 10,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp27.501.329.804 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.421.583.427. Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp15.323.415.610 atau berkurang sebesar 49,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp30.744.999.037 sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.744.999.037. Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp3.607.033.202 atau meningkat signifikan sebesar 13,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember

2018 yang mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp27.137.965.835 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

7. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

ASET LANCAR

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET LANCAR			
Kas dan bank	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928
Piutang usaha - neto	47.944.820.239	109.461.249.472	76.133.616.212
Piutang lain-lain	790.265.083	1.485.334.927	2.004.596.280
Persediaan	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727
Beban dibayar dimuka	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184
Uang muka	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555
Pajak dibayar dimuka	1.330.157.644	-	-
TOTAL ASET LANCAR	92.266.921.060	139.289.412.561	102.489.975.886

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp92.266.921.060. Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp47.022.491.501 atau berkurang sebesar 33,75% dibandingkan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp139.289.412.561 sebagian besar disebabkan oleh penurunan piutang usaha yang menurun sebesar Rp61.516.429.233 atau berkurang sebesar 56,20% akibat piutang usaha baru terealisasi pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp139.289.412.561. Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp36.799.436.675 atau sebesar 35,91% dibandingkan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp102.489.975.886. Sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp33.327.633.260 atau meningkat sebesar 43,78% akibat meningkatnya pendapatan menjadi piutang usaha yang belum terealisasi.

ASET TIDAK LANCAR

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha – neto pihak ketiga	1.466.438.021	-	-
Uang muka pembelian lahan	26.823.491.000	-	-
Aset tetap - neto	230.909.554.164	204.041.498.985	223.576.833.592
Uang muka - bagian tidak lancar	-	-	-
Beban docking ditangguhkan - neto	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255
Piutang dari pihak-pihak berelasi	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862
Aset pajak tangguhan	509.663.610	547.475.711	2.291.936.314
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	286.131.053.493	289.372.124.293	300.825.770.023

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp286.131.053.493. Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sedikit sebesar Rp3.241.070.80 atau sebesar 1,12% dibandingkan aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp289.372.124.293 sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada piutang dari pihak-pihak berelasi sebesar Rp62.945.244.779 atau sebesar 89,19% yang disebabkan oleh terealisasi nya piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp289.372.124.293 . Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun Rp11.453.645.730 atau sebesar 3,81% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2018 sebesar Rp300.825.770.023 disebabkan oleh penurunan pada Aset tetap - neto sebesar Rp19.535.334.607 atau sebesar 8.74% yang disebabkan oleh biaya depresiasi yang lebih besar pada tahun tersebut.

ASET TETAP

(dalam Rupiah)

2020	<i>Beginning Balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Deductions</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Ending Balance</i>
Harga Perolehan					
Bangunan	216.476.300	-	-	-	216.476.300
Kapal	358.498.960.245	48.827.742.200	-	-	407.326.702.445
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750
Kendaraan	2.471.055.909	590.363.636	-	-	3.061.419.545
Peralatan kantor	3.489.409.189	383.932.226	-	-	3.873.341.415
Sub-total	365.933.314.393	49.802.038.062	-	-	415.735.352.455
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	41.897.760	14.673.305	-	-	56.571.065
Kapal	157.456.293.054	22.404.671.109	-	-	179.860.964.163
Mesin	1.235.859.563	19.895.250	-	-	1.255.754.813
Kendaraan	1.638.555.806	172.864.942	-	-	1.811.420.748
Peralatan kantor	1.519.209.225	321.878.277	-	-	1.841.087.502
Sub-total	161.891.815.408	22.933.982.883	-	-	184.825.798.291
Nilai Tercatat	204.041.498.985				230.909.554.164

(dalam Rupiah)

2019	<i>Beginning Balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Deductions</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Ending Balance</i>
Harga Perolehan					
Bangunan	183.076.300	33.400.000	-	-	216.476.300
Kapal	358.498.960.245	-	-	-	358.498.960.245
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750
Kendaraan	1.917.409.091	553.646.818	-	-	2.471.055.909
Peralatan kantor	2.685.629.917	803.779.272	-	-	3.489.409.189
Sub-total	364.542.488.303	1.390.826.090			365.933.314.393
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	28.227.788	13.669.972	-	-	41.897.760
Kapal	137.157.935.943	20.298.357.111	-	-	157.456.293.054
Mesin	1.215.964.313	19.895.250	-	-	1.235.859.563
Kendaraan	1.404.956.438	233.599.368	-	-	1.638.555.806
Peralatan kantor	1.158.570.229	360.638.996	-	-	1.519.209.225
Sub-total	140.965.654.711	20.926.160.697	-	-	161.891.815.408
Nilai Tercatat	223.576.833.592				204.041.498.985

(dalam Rupiah)

2018	Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Ending Balance
Harga Perolehan					
Bangunan	6.291.076.127	43.589.800	-	(6.151.589.627)	183.076.300
Kapal	315.641.680.245	42.857.280.000	-	-	358.498.960.245
Mesin	1.622.218.070	-	-	(364.805.320)	1.257.412.750
Kendaraan	2.321.909.091	-	351.500.000	(53.000.000)	1.917.409.091
Peralatan kantor	2.083.612.736	751.549.197	-	(149.532.016)	2.685.629.917
Sub-total	327.960.496.269	43.652.418.997	351.500.000	(6.718.926.963)	364.542.488.303
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	1.621.120.552	10.262.472	-	(1.603.155.236)	28.227.788
Kapal	117.772.660.633	19.385.275.310	-	-	137.157.935.943
Mesin	1.529.386.882	19.895.250	-	(333.317.819)	1.215.964.313
Kendaraan	1.238.552.083	456.841.855	263.625.000	(26.812.500)	1.404.956.438
Peralatan kantor	1.139.636.158	168.466.084	-	(149.532.013)	1.158.570.229
Sub-total	123.301.356.308	20.040.740.971	263.625.000	(2.112.817.568)	140.965.654.711
Nilai Tercatat	204.659.139.961	-	-	-	223.576.833.592

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.909.554.164. Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, meningkat sebesar Rp26.868.055.179 atau bertambah sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan Aset Tetap sebesar Rp204.041.498.985 sebagian besar disebabkan oleh penambahan Aset Tetap kapal sebesar Rp48.827.742.200 yang disebabkan oleh penambahan armada kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp204.041.498.985. Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun sebesar Rp19.535.334.605 atau berkurang sebesar 8,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan Aset Tetap sebesar Rp223.576.833.592 sebagian disebabkan oleh biaya depresiasi yang lebih besar pada tahun tersebut.

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264
Utang lain-lain	471.146.230	294.714.485	123.635.618
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504
Utang pajak	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	54.058.635.372	54.335.890.340	91.555.297.957

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.058.635.372. Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun Rp277.254.968 atau sebesar 0,51% dibandingkan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp54.335.890.340 sebagian besar disebabkan oleh pelunasan bagian lancar utang kepada pihak-

pihak berelasi Rp4.147.832.833 atau sebesar 95,21% yang disebabkan oleh pelunasan utang kepada PT. Hasnur Jaya Tambang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp54.335.890.340. Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun signifikan Rp37.219.407.617 atau sebesar 40,65% dibandingkan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp91.555.297.957 sebagian besar disebabkan oleh pelunasan utang usaha kepada PT Hasnur Jaya Utama sebesar Rp30.237.943.928.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000
Liabilitas imbalan kerja	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	75.313.726.078	108.863.157.566	59.973.665.462

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp75,313,726,078. Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang signifikan Rp33.549.431.488 atau sebesar 30,82% dibandingkan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 108,863,157,566. Peningkatan pada liabilitas jangka panjang disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo sebesar sebesar Rp44.948.452.516 atau sebesar 63,34% yang disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank jangka panjang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.863.157.566. Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat signifikan Rp48.889.492.104 atau sebesar 81,5% dibandingkan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp59.973.665.462. Peningkatan pada liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo sebesar sebesar Rp48.248.272.516 atau sebesar 212,4% yang disebabkan oleh Perseroan yang meminjam kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS			
Modal saham	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Komprehensif Lain: Bagian dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non-pengendali	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249,025,613,103. Total ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, turun sebesar Rp16.436.875.845 atau sebesar 6,19% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp265,462,488,948. Penurunan ekuitas disebabkan terutama oleh berkurangnya saldo laba sebesar Rp97.190.615.380 atau sebesar 76,35%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp265.462.488.948. Total ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, naik sebesar Rp13.675.706.458 atau sebesar 5,4% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp251.786.782.490. Peningkatan ekuitas disebabkan terutama oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp27.744.999.037 atau sebesar 27,9%.

8. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Arus Kas			
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	89.056.430.391	(11.947.588.923)	64.165.745.243
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(13.098.550.875)	(25.763.044.395)	(57.280.710.560)
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(64.946.395.438)	40.717.045.779	201.956.890

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp 89.056.430.391 . Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2020 secara total, naik sebesar Rp101.004.019.314 atau sebesar -845% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penggunaan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp11.947.588.923 . Perolehan dari aktivitas operasi ini berasal dari berkurangnya pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lainnya yang berjumlah Rp236.944.642.262 pada tahun 2020, pembayaran berkurang sekitar Rp104.525.890.336 apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp341.470.532.598.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2019 sebesar Rp11.947.588.923. Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2019 secara total, turun sebesar Rp76.113.334.166 atau sebesar -118,62% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp64.165.745.243. Penggunaan dari aktivitas operasi ini berasal dari bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok, karyawan yang berjumlah Rp341.470.532.598 pada tahun 2019, pembayaran naik sekitar Rp58.830.948.460 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp282.639.584.138.

ARUS KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2020 sebesar Rp13.098.550.875. Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2020 secara total, berkurang sebesar Rp12.664.493.520 atau sebesar -49,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penggunaan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp25.763.044.395. Penggunaan dari aktivitas investasi ini berkurang dari Pengurangan (penambahan) piutang pihak-pihak berelasi yang berkurang berjumlah Rp55.214.799.208 pada tahun 2020, apabila dibandingkan pada tahun 2019 terjadi penambahan sebesar Rp14.950.850.227 (selisih Rp70.165.649.435).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 sebesar Rp25.763.044.395. Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2019 secara total, turun sebesar Rp31.517.666.165 atau sebesar -55,02% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp57.280.710.560. Berkurangnya penggunaan dari aktivitas investasi ini berasal dari berkurangnya perolehan aset tetap yang berjumlah Rp1.390.826.090 pada tahun 2019, berkurang sekitar Rp30.418.552.907 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp31.809.378.997.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DAR (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp64.946.395.438. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2020 secara total, berkurang sebesar Rp105.663.441.217 atau sebesar -259,51% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp40.717.045.779. Penggunaan dari aktivitas pendanaan ini berasal dari Pembayaran pinjaman bank yang berjumlah Rp75.802.654.082 pada tahun 2020, naik sekitar Rp62.950.541.228 apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp12.852.112.854.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang diterima dari aktivitas pendanaan tahun 2019 sebesar Rp40.717.045.779. Kas neto yang diterima dari aktivitas pendanaan tahun 2019 secara total, naik sebesar Rp40.515.088.889 atau sebesar 20061,26% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp201.956.890. Penerimaan dari aktivitas pendanaan ini berasal dari pengurangan pembayaran pinjaman bank dari yang berjumlah Rp12.852.112.854 pada tahun 2019, berkurang sekitar Rp80.100.654.096 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp92.952.766.950.

9. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi dengan Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) atau *Debt to Equity Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,5; 0,6; dan 0,6.
2. Total Liabilitas dibagi dengan Total Aset (Solvabilitas Aset) atau *Debt to Asset Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,3; 0,4; dan 0,4.
3. Aset lancar/liabilitas jangka pendek atau *Current Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,7; 2,6; dan 1,1.

PROFITABILITAS

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 6,0%; 8,1%; dan 7,6%.
2. Imbal hasil aset (*Return on Asset*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal hasil aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 -masing adalah sebesar 4,9%; 7,1%; dan 6,8%.
3. Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 7,5%; 11,5%; dan 10,9%.

10. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan dalam menjalankan usahanya hingga saat ini banyak menggunakan kas, modal dan pinjaman yang dimiliki terutama untuk mendanai belanja modal, modal kerja, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari pinjaman bank, uang hasil penjualan, penerimaan uang muka dari pelanggan dan penambahan modal disetor.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dan tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan likuiditas

Perseroan dalam melakukan pembayaran kewajiban.

Sumber likuiditas Perseroan secara umum terbagi menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dimana sumber sumber likuiditas internal didominasi oleh hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal didominasi oleh pinjaman bank.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. KEWAJIBAN KONTRAKTUAL YANG MATERIAL

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perseroan tidak memiliki kewajiban kontraktual yang material.

12. BELANJA MODAL

Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.802.000.000.

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah untuk penambahan kapal dan aset lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Entitas Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Jika kedepannya terjadi ketidakpastian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi

13. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat prospektus ini diterbitkan, belum terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan belum terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

14. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN *OFF BALANCE SHEET*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

15. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, salah satunya terkait dengan masalah listrik seperti terhentinya pasokan listrik dan arus pendek, dan juga hal-hal lain seperti kebakaran dan kerusakan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas adalah fluktuasi harga batu bara. Dimana sebagai Perseroan yang mengangkut komoditas dengan fokus kepada batu bara, harga batu bara mempengaruhi volume pengangkutan Perseroan. Sebagai gambaran pendapatan neto Perseroan pada tahun 2020 adalah Rp310.349.248.348, dimana angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2019 dan 2018 (Rp373.522.635.364 dan Rp363.776.006.011).

16. DAMPAK KONDISI PANDEMI COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 serta pembatasannya yang berlangsung di berbagai daerah berdampak pada Perseroan yang bergerak di jasa penunjang pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan secara moderat. Hal ini dikarenakan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh Perseroan, dimana para pekerja harus bekerja secara shift namun demikian para pekerja yang akan masuk ke area site diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu. Hal ini tentunya berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun dengan turunnya konsumsi batubara, berdampak pada turunnya target produksi dari pemilik tambang, hal ini tentunya juga berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

17. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak terkait dengan pendapatan yang sepenuhnya tergantung oleh harga batu bara. Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara mempengaruhi pendapatan bersih serta laba operasi dikarenakan harga komoditas mempengaruhi jumlah kargo yang terangkut dimana penjualan neto meningkat sebesar 2.4% pada 2019, dan berkurang sebesar 16.9% pada 2020. Laba operasi berkurang sebesar 22.2% pada 2020 dan meningkat 49.18% pada 2019. Laba tahun berjalan meningkat 8.6% pada 2019 dan berkurang sebesar 38.8% pada 2020. Hal ini dikarenakan fluktuasi penurunan harga batu bara di awal 2020 yang mengakibatkan volume penurunan kargo pengangkutan. Dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan

18. MANAJEMEN RISIKO

Salah satu cara manajemen untuk menjaga kinerja Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah dengan menerapkan fungsi manajemen risiko yang diperkirakan dapat menangani permasalahan yang akan muncul untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Beberapa risiko yang diperkirakan dapat menjadi potensi kerugian Perseroan dan/atau Entitas Anak:

1. Risiko Operasional, meliputi:

- a) Risiko ketergantungan pada volume produksi dan permintaan batubara
Upaya Perseroan dalam menanggulangi risiko yang mungkin timbul akibat turunnya produksi dan permintaan batu bara antara lain:
 - Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan profesional dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
 - Perseroan melakukan pemeliharaan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya secara berkala dan memiliki kebijakan untuk mempunyai armada yang relatif muda.
 - Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.Perseroan telah menjalankan kegiatan bisnis tersebut saat ini dan terbukti mampu menambah sumber pendapatan Perseroan.
- b) Risiko ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia ("SDM")
Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan produktifitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi kecakapan operasional, etos kerja, kerjasama dan kreatifitas. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin untuk menunjang kesejahteraan karyawan seperti Family Gathering, Employee Gathering dan pemilihan karyawan terbaik. Perseroan memberikan perlengkapan kerja yang lengkap, fasilitas kesehatan, berikut lingkungan kerja yang nyaman, dan pendukung yang lengkap dengan harapan agar karyawan akan memiliki kebanggaan tersendiri untuk dapat mengabdikan diri kepada Perseroan, sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya risiko-risiko terkait ketersediaan SDM Perseroan.

Perseroan memiliki program-program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya SDM profesi sebagai Pelaksana Bongkar Muat (PBM), semua Pelaksana Bongkar Muat (PBM) yang bekerja untuk Perseroan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keandalan masing-masing Pelaksana Bongkar Muat (PBM) diantaranya adalah pelatihan untuk mendapatkan Surat Izin Operator (SIO) yang dikeluarkan oleh Pihak yang terakreditasi, pelatihan dengan menggunakan alat simulator yang disediakan oleh Perseroan serta pemberian pendidikan harian yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat. Karyawan dari bidang keahlian lain juga mendapatkan fasilitas pelatihan, di antaranya pelatihan ahli kepelabuhanan, pelatihan manajemen risiko, budget control, akuntansi, hukum, pengadaan barang/jasa dan pelatihan-pelatihan lain sesuai bidang keahlian yang juga telah di susun secara sistematis dalam program pelatihan SDM setiap tahun oleh Perseroan.

Program pelatihan SDM oleh perseroan untuk perwira deck antara lain Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I, Rating dan Ahli Nautika Tingkat V, Endorsement Ijasah, kompetensi RADAR Simulator, ARPA Simulator, ECDIS Simulator, GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), BRM (Bridge Resource Management), ORU (Operator Radio Umum), SSO (Ship Security Officer) dan ISM Code. Sedangkan untuk perwira mesin antara lain Ahli Teknika Tingkat IV s/d Ahli Teknika Tingkat I, Rating dan Ahli Teknika Tingkat V, Endorsement Ijasah, kompetensi ERM (Engine Resource Management), SSO (Ship Security Officer) dan ISM Code. Perseroan juga memiliki program – program untuk peningkatan keahlian untuk semua Crew Deck & Engine yaitu Basic Safety Training (BST), SCRB (Survival Craft and Rescue Boats), AFF (Advanve Fire Fighting), MFA (Medical First Aid), MC (Medical Care), SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan) dan SDS (sertifikat keterampilan tugas keamanan).

- c) Risiko kerugian akibat penurunan kondisi, kerusakan, serta kendala teknis lainnya yang mungkin dialami pada fasilitas jasa kepelabuhanan
Dalam menjamin ketersediaan dan kelayakan fasilitas jasa kepelabuhanan, Perseroan selalu berupaya untuk melakukan perawatan berkala bagi fasilitas dermaga, gedung/lapangan penumpukan serta alat bantu bongkar muat yang digunakan setiap harinya. Perawatan tersebut mencakup seluruh proses dari mulai membuat kebijakan strategis mengenai rencana pengadaan barang dan jasa untuk perawatan dan perbaikan fasilitas jasa kepelabuhanan, memonitor kebijakan dan pengelolaan pengadaan barang serta kuantitas barang kebutuhan perawatan dan perbaikan fasilitas jasa kepelabuhanan, hingga menetapkan prosedur kegiatan perawatan fasilitas jasa kepelabuhanan secara rutin maupun dalam kondisi darurat. Semua mekanisme perawatan tersebut sudah dituangkan dalam standar operasional dan keselamatan yang wajib dipenuhi oleh unit teknis Perseroan.
- d) Risiko Bencana Alam di Indonesia
Dalam menjalankan kegiatan jasa kepelabuhanan, Perseroan menyediakan fasilitas gedung kantor dan gedung parkir yang dimana struktur bangunan tersebut sudah dilakukan analisis dan diterapkan tahan gempa untuk dapat menghadapi gempa bumi dan Perseroan bekerjasama dengan perusahaan pelayaran yang memiliki kemampuan kapal yang sudah teruji dengan memiliki standar internasional dan bagi kapal-kapal yang ingin bertambat di dermaga. Perseroan juga melengkapi armada yang dimilikinya dengan peralatan navigasi dan komunikasi yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca dan instrumen-instrumen keselamatan lainnya mampu mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan dari bencana alam. Untuk mencegah perubahan kondisi geografis dan pendangkalan, pihak-pihak di luar Perseroan seperti syahbandar dan pengelola pelabuhan juga bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan pembangunan, pengerukan, dan pengembangan wilayah pelabuhan.
2. Risiko Keuangan, meliputi:
- a) Risiko atas penyesuaian tarif layanan
Dalam menyiasati kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhanan yang hanya dapat dilakukan paling cepat dalam dua tahun sekali, Perseroan melakukan peningkatan tarif yang dibagi menjadi beberapa periode selama dua tahun tersebut, dimana tarif akan mengalami kenaikan secara bertahap umumnya dalam 6 (enam) bulan sekali hingga mencapai tingkatan tarif yang telah disetujui pada akhir tahun kedua. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mengelola arus kas. Selain itu, kenaikan bertahap tersebut dapat memberikan keringanan bagi pengguna jasa, sehingga negosiasi penerapan tarif berkala relatif akan berjalan lebih lancar karena pihak pengguna jasa merasa diuntungkan dengan skema penetapan tarif ini.

Dalam upaya untuk menjamin kelancaran diskusi penyesuaian tarif antara Perseroan, Kementerian Perhubungan, dan pengguna jasa, Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Laut. Dengan demikian, Perseroan dapat menampung aspirasi dari pengusaha-pengusaha angkutan laut sebelum mengusulkan penyesuaian tarif, sehingga diskusi penerapan tarif akan berjalan lebih lancar dan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses diskusi penyesuaian tarif.

- b) Risiko nilai tukar mata uang
Dalam menyediakan layanan fasilitas jasa kepelabuhanan, Perseroan saat ini telah mewajibkan seluruh pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri, sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Penggunaan rupiah dapat meminimalisasi risiko penurunan pendapatan Perseroan yang diakibatkan oleh volatilitas nilai tukar.
 - c) Risiko likuiditas
Dalam menjamin tingkat likuiditas yang sehat, Perseroan melakukan manajemen arus kas yang memadai, di antaranya adalah menjaga agar rasio-rasio keuangan Perseroan tidak melebihi batas tertentu. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan membuat peraturan yang dinamai Cash Management System (CMS) yaitu dengan mensyaratkan kepada pelanggan untuk membuka rekening perusahaan dengan memiliki saldo minimal yang kemudian di kuasakan kepada Perseroan untuk melakukan pendebitan dalam rangka pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan, sebagaimana ketentuan tersebut juga telah disepakati bersama antara Perseroan dan pelanggan yang kemudian dituangkan kedalam surat perjanjian, sehingga meminimalisasi risiko terkait penagihan pembayaran dari pelanggan.
3. Risiko Hukum, meliputi:
- a) Risiko tuntutan pihak ketiga
Dalam mengelola risiko munculnya tuntutan pihak ketiga, Perseroan telah memiliki fasilitas asuransi untuk kerusakan yang terjadi pada kargo pelanggan, aset dan fasilitas serta memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi setiap Karyawan Perseroan, sehingga meminimalisasi risiko tuntutan hukum yang mungkin muncul dari pihak ketiga.
 - b) Risiko perubahan regulasi dan perijinan usaha
Bidang usaha Perseroan dalam memberikan jasa kepelabuhan tentunya dijalankan Perseroan dengan mengikuti regulasi yang ketat yang berada di bawah pengawasan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Regulasi tersebut sudah mencakup penerapan tarif, standar keselamatan, perizinan dan sanksi dari kegiatan jasa kepelabuhanan. Manajemen Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi rencana perubahan pada regulasi seputar jasa kepelabuhanan secara umum di Indonesia.

Penerapan manajemen risiko memungkinkan Perseroan untuk dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, sekaligus memberikan gambaran kepada pemegang saham maupun manajemen Perseroan mengenai potensi peluang maupun kerugian. Dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

19. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan dengan denominasi mata uang rupiah sehingga risiko risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan. Adapun seluruh pinjaman memiliki denominasi dalam mata uang rupiah yang semakin menimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Perseroan saat ini memiliki pinjaman bank dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 43.325.780.000 per 31 Desember 2020, dimana suku bunga yang digunakan suku bunga fixed yang tidak berfluktuasi terhadap suku bunga acuan pinjaman sehingga fluktuasi nilai tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

20. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman. Hingga tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp 43.325.780.000.

Berikut disajikan saldo pinjaman Perseoran pada tanggal 31 Desember 2020 serta analisis jatuh tempo:

Pinjaman dengan denominasi Rupiah:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Jumlah yang Jatuh Tempo			
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	>5 tahun
Pihak ketiga					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.326	17.311	6.480	19.535	
Total Pihak ketiga	43.326	17.311	6.480	19.535	
Pihak berelasi					
Total Pihak berelasi					
Total Pinjaman	43.326	17.311	6.480	19.535	

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Entitas Anak:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan pada volatilitas harga komoditas batu bara

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai *transporter* laut (*shipping*) dan perangkat lainnya seperti pelabuhan masih terkonsentrasi pada komoditas batu bara. Volatilitas harga komoditas batu bara Permintaan Batu Bara baik dari dalam negeri dan luar negeri yang terefleksikan pada kegiatan ekspor/impor dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak secara finansial dan non-finansial. Pembatasan pada kegiatan ekspor/impor langsung memberikan dampak terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Pertumbuhan ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi pertumbuhan dan/atau volatilitas industri batu bara terutama dari segi harga komoditas batu bara dapat memberikan dampak secara langsung kepada Perseroan dan Entitas Anak, dimana mungkin memberikan dampak negatif secara finansial dan non-finansial ketika pertumbuhan ekonomi domestik dan global memberikan volatilitas yang berdampak buruk bagi pertumbuhan industri batu bara.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan harga batubara diantaranya sebagai berikut:

- Volume produksi batubara internasional/global
- Volume produksi batubara nasional
- Ditemukannya cadangan batubara baru baik dalam skala nasional dan internasional
- Penutupan tambang batubara baik dalam skala nasional dan internasional
- Permintaan spesifik dari pelanggan akhir atas kualitas batubara
- Kebijakan dinegara yang melakukan ekspor/impor batubara
- Kebijakan atas pencemaran lingkungan
- Kebijakan atas energi baru terbarukan

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp310.349.248.348. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp63.173.387.016. atau turun sebesar 16.91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp373.522.635.364 yang sebagian besar disebabkan efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN/ ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

1. Risiko kehilangan kontrak penting

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kontrak antara kedua belah pihak, dan operasional dari Perseroan dan/atau Entitas Anak dijalankan berdasarkan pada kontrak yang telah disetujui tersebut. Adanya tindakan pelanggaran dan/atau wanprestasi dari salah satu pihak atas kontrak yang telah disetujui bersama, dapat mengakibatkan hilangnya kontrak dan/atau pemberhentian kontrak yang penting bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin secara pasti bahwa sepanjang usahanya tidak akan mengalami risiko kehilangan kontrak penting.

2. Volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Biaya Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya terutama pada bidang shipping sangat dipengaruhi oleh volatilitas dari harga bahan bakar. Komponen biaya bahan bakar Perseroan dan/atau Entitas Anak cukup dominan sehingga kenaikan harga bahan bakar akan memberikan dampak langsung terhadap naiknya biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Hal ini akan

memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial Perseroan dan/atau Entitas Anak. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat membebaskan kenaikan biaya harga bahan bakar kepada pelanggan.

- 3. Tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola rantai *supply (supply chain)* batu bara dan komoditas lain**
Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya sebagai jasa angkutan air sangat tergantung pada tingkat efisiensi dan efektivitas dari *supply chain* komoditas batu bara ataupun komoditas lainnya. Secara garis besar, Perseroan dan/atau Entitas Anak sangat dipengaruhi beberapa kejadian penting dari *supply chain* tersebut yaitu proses penambangan, proses peremukan, jasa angkutan darat dan proses kesiapan dari pelabuhan itu sendiri. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin secara pasti bahwa proses *supply chain* tersebut dapat berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.
- 4. Kondisi non-teknis di alur perairan yang digunakan dan dilalui oleh armada angkutan air Perseroan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak**
Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan aktivitasnya, menggunakan dan melalui alur perairan yang digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan lain dan penduduk setempat. Sehingga terdapat kondisi-kondisi non-teknis dimana memiliki ketergantungan terhadap penggunaan secara bersama-sama dengan persusahaan dan penduduk setempat. Adapun kondisi non-teknis ini juga sangat mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak terutama kegiatan usaha pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat. Risiko yang dapat muncul sehingga memberikan dampak signifikan baik secara operasional dan finansial akibat penggunaan bersama ini adalah keamanan dan keselamatan. Perseroan tidak dapat menjamin secara pasti bahwa hal-hal terkait kondisi non-teknis selalu bersifat menguntungkan pihak Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- 5. Kondisi alam dan nota keamanan pelayaran dari otoritas Pelabuhan**
Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam baik disekitar tempat menjalankan aktivitas nya ataupun rute-rute perairan yang akan dilalui. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan terkait keamanan pelayaran yang berlaku terutama nota keamanan khusus akibat adanya kejadian yang bersifat insidental. Perseroan dan/atau Entitas Anak oleh karena adanya kondisi alam dan kepatuhan terhadap nota keamanan, memiliki dampak yang dapat merugikan baik operasional dan finansial Perseroan dan/atau Entitas Anak.
- 6. Jenis dan tipe komoditas yang dilayani**
Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak menjalankan usaha *shipping* pada komoditas batubara sebesar 96%. Dengan terkonsentrasinya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan komoditas batubara, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki risiko yang tidak terdiversifikasi. Apabila terdapat kondisi yang kurang baik terhadap industri batu bara, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki risiko secara finansial dan non-finansial dikarenakan tidak terdapat komoditas lain yang menjadi tumpuan. Walaupun Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat mengukur secara pasti dampak korelasi penurunan pendapatan terhadap pertumbuhan industri batu bara.
- 7. Pelanggan utama yang tidak terdiversifikasi**
Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak rata-rata sebesar 88% melayani pelanggan terafiliasi. Rata-rata komposisi pelanggan non-afiliasi adalah sebesar 12%. Apabila oleh faktor tertentu terjadi hal yang mengakibatkan dampak buruk terhadap pelanggan terafiliasi, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak akan terkena dampak negatif baik secara finansial maupun non-finansial. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin pendapatan dari pelanggan non-afiliasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan apabila seluruh pendapatan dari pihak terafiliasi menjadi tidak ada.
- 8. Risiko terhadap Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus**
Dalam menjalankan bidang usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Beberapa peran penting memerlukan SDM yang memiliki sertifikasi khusus dan syarat-syarat khusus. Sehingga ketergantungan terhadap SDM ini dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak kehilangan SDM yang memiliki keahlian khusus, maka kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terganggu sehingga memberikan dampak negatif secara finansial dan non-finansial.
- 9. Kompetisi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus**
Terdapat beberapa Perseroan yang menjalankan usaha sejenis dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun oleh badan usaha milik negara. Hal tersebut berakibat semakin meningkatnya permintaan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang yang dijalankan oleh Perseroan

dan/atau Entitas Anak. SDM yang memiliki keahlian khusus juga memiliki pilihan untuk bekerja baik bagi perusahaan yang lokal ataupun perusahaan internasional. Hal ini memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak atas ketersediaan SDM yang memiliki keahlian khusus.

10. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami armada kapal Perseroan

Perseroan perlu memastikan kesiapan kondisi dari armada kapal yang dimilikinya untuk melakukan layanan shipping nya, Perseroan juga membutuhkan fasilitas pendukung seperti motor pandu dan kapal tunda. Tanpa fasilitas pendukung tersebut, Perseroan tidak akan bisa memenuhi tanggung jawab sesuai dengan kontrak antara Perseroan dengan pelanggan. Tidak ada jaminan bahwa armada kapal yang dioperasikan dan fasilitas pendukungnya bebas dari permasalahan teknis dan akan selalu layak jalan. Tidak ada jaminan pula bahwa suku cadang dan fasilitas perbaikan yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan perawatan dari armada kapal serta fasilitas pendukung. Oleh karena itu terdapat risiko yang akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan apabila terdapat penurunan kondisi, kerusakan dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami oleh armada kapal Perseroan dan fasilitas pendukungnya.

11. Risiko ketergantungan terhadap fasilitas navigasi dan komunikasi yang memadai

Armada kapal Perseroan dilengkapi dengan fasilitas navigasi dan komunikasi. Tanpa kedua fasilitas tersebut, pelayanan armada kapal tidak akan dapat beroperasi dengan optimal dan berisiko untuk menimbulkan kecelakaan akibat human error. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas navigasi dan komunikasi yang digunakan pada setiap armada kapal Perseroan dapat berjalan tanpa ada hambatan.

12. Bencana alam memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional

Walaupun teknologi yang diterapkan pada setiap fasilitas kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak sudah dapat mendukung efisiensi dan keselamatan kegiatan operasional, namun faktor bencana alam merulakan faktor di luar kendali Perseroan dan/atau Entitas Anak. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu.

Bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi Perseroan dan/atau Entitas Anak juga dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, terdapat risiko secara finansial yang berdampak signifikan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak.

13. Risiko Pendanaan

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya memiliki risiko pendanaan. Sesuai dengan tujuan dari setiap perusahaan, Perseroan dan/atau Entitas Anak juga akan melakukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini sangat tergantung pada ketersediaan dana, mengingat bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan investasi yang besar. Ketersediaan dana merupakan salah satu risiko atau hambatan yang akan dihadapi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat akan melakukan investasi dalam rangka melakukan pengembangan usaha. Terdapat kemungkinan atas keterbatasan pengembangan usaha sebagai akibat dari ketersediaan pendanaan yang memadai.

14. Risiko fluktuasi mata uang asing

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki utang dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dimana pengembalian beban biaya utang dan pokok utang akan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi dair mata uang asing. Apabila mata uang Dolar Amerika Serikat menguat terhadap Rupiah maka pada saat Perseroan dan/ atau entitas anak diwajibkan untuk mengembayarkan beban bunga serta pokok utang, Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan dana Rupiah yang lebih untuk mengembalikan beban bunga dan beban pokok utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

15. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) dan tingkat bunga mengambang (floating) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak

16. Risiko terhadap kebijakan akuntansi

Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan dan/atau Entitas Anak akan terdampak pada kebijakan-kebijakan akuntansi yang selalu berkembang dari masa ke masa. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai akibat dari penerapan kebijakan akuntansi tertentu, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak belum bisa melakukan pencatatan atas pendapatan pada bidang tertentu. Hal ini akan memberikan dampak negatif terutama apabila perubahan kebijakan akuntansi menjadi tidak menguntungkan bagi perseroan dan/atau Entitas Anak.

17. Risiko terhadap *cost over run* pada kegiatan operasional

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut memiliki kemungkinan melebihi dari perkiraan awal, sehingga muncul biaya-biaya tambahan yang membebani Perseroan dan/atau Entitas Anak. Hal tersebut memberikan dampak negatif finansial bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

18. Risiko terhadap *costoverrun* pada saat pengembangan usaha

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya secara jangka panjang akan melakukan pengembangan usaha. Pada saat melakukan pengembangan usaha, terdapat perencanaan awal yang akan ditempuh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Akan tetapi perencanaan awal ini tidak dapat secara pasti memperhitungkan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan pengembangan usaha tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa adanya *costoverrun* pada saat implementasi pengembangan usaha tersebut.

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

HRT

1. Pelabuhan mungkin mengalami pendangkalan akibat sedimentasi

Secara geologis, daerah sepanjang aliran sungai akan mengalami penumpukan sedimentasi akibat aktivitas dari gelombang laut dan aliran sungai dar daratan. Tumpukan sedimentasi akan memberikan efek pendangkalan di daerah sekitar pelabuhan. Pendangkalan memberikan dampak sempitnya ruang gerak bagi kapal yang akan berlabuh dengan kondisi demikian, maka akan membatasi jenis kapal yang dapat bersandar di pelabuhan. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengerukan rutin untuk mencegah sedimentasi dapat secara efektif mencegah pendangkalan di pelabuhan.

2. Debit air disekitar pelabuhan sebagai akibat arus pasang/surut, gelombang dan perubahan iklim

Siklus pasang/surut, tinggi gelombang dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi alam disekitar wilayah pelabuhan. Nakhoda kapal bagi kapal yang akan berlabuh, akan mengalami pengalihan atau perubahan rute sebagai akibat dari siklus alam tersebut. Tidak terdapat jaminan bahwa aktivitas di pelabuhan dapat berjalan tanpa hambatan, terutama jika terdapat keadaan luar biasa yang mengharuskan pemilik pelabuhan dan pengelola pelabuhan mengambil tindakan diluar kebiasaan yang dianggap perlu dilakukan.

3. Batasan jumlah kapal bersandar di pelabuhan

Performa dari kegiatan usaha pelabuhan juga dibatasi oleh kapasitas dari pelabuhan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat utilitas pelabuhan, akan semakin baik karena memberikan pendapatan yang lebih bagi Entitas Anak. Namun, jika tingkat utilisasi pelabuhan telah melebihi dari kapasitas yang tersedia, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi Entitas Anak. Dimana terdapat kapal yang menumpuk, *overcapacity* dan *deadlock* arus lalu lintas kapal ke pelabuhan.

4. Tingkat kedalaman dari pelabuhan

Tingkat kedalaman dari pelabuhan yang dimiliki oleh Entitas Anak juga merupakan faktor penentu bagi jenis kapal yang dapat bersandar di pelabuhan. Apabila Entitas Anak tidak dapat mengembangkan usaha pelabuhan yang dapat menunjang berlabuhnya kapal-kapal, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja finansial dari Entitas Anak. Adapun perkembangan kapal pengangkut kargo baik *container* maupun *non-container* di dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan ukuran dan kapasitas angkut, dimana kapal tersebut memerlukan kedalaman yang cukup untuk menunjang berlabuhnya kapal.

HMS

1. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat

Entitas anak dalam melakukan kegiatan pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat memiliki *standard of procedure* yang cukup komprehensif. Dimana setiap aktivitas diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Entitas Anak dalam melakukan kegiatan usahanya juga sangat tergantung sumber daya manusia yang cukup banyak. Sebagai akibat dari tidak tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan, pengawasan dan bongkar muat maka Entitas Anak memiliki kemungkinan untuk terkena dampak negatif baik secara operasional maupun finansial. Entitas Anak tidak dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas atas kegiatan pengelolaan, pengawasan dan bongkar muat dapat selalu pada tingkat yang sempurna.

2. Operator pelabuhan yang memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi

Dalam mengoperasikan pelabuhan dan mengatur lalu lintas kapal diperlukan tingkat keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Dimana hal ini memerlukan individu-individu yang berpengalaman dan *standard operating procedure* yang baik serta memadai. Volume lalu lintas kapal yang semakin tinggi juga memberikan tantangan tersendiri bagi Entitas Anak untuk mengoperasikan pelabuhan serta mengatur lalu lintas kapal tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Entitas Anak tidak mengalami hambatan sebagai operator pelabuhan dalam mengatur lalu lintas kapal untuk berlabuh.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha dalam lingkup nasional dan internasional dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha dalam lingkup nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain
- perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia
- kejadian yang tergolong *force majeure* & pandemi

Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan dan/ atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan dan/ atau Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegagalan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

4. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa kepelabuhanan pemanduan dan penundaan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analisis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan

2. Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Hingga tanggal 19-03-2020, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat senilai \$45.57 triliun, Inggris senilai \$3.67triliun, Jepang senilai \$5.6 triliun, Hong Kong senilai \$6.48 triliun, memiliki nilai kapitalisasi saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang senilai \$484.18 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang, nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia mungkin menjadi relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan saham-saham di negara maju.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan renewable energi apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan pengembangan atas proyek-proyek Perseroan dan/atau Entitas Anak selanjutnya.

5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

- A. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan nilai nominal saham Perseroan oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.
 2. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek- di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 3. Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang- berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 4. Rencana Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia ("**Company Listing**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 5. Rencana Pelaksanaan *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham--saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang- merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah- selesainya proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan tersebut.
 8. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama- dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
 10. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efektif Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Perubahan tersebut (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719.

- B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 107/2021**”), pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain peningkatan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 107/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7
4.	Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.101.000.000	210.100.000.000	100

Akta No. 107/2021 tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456.

Perjanjian - Perjanjian Penting:

1. Perjanjian pembangunan dan jual beli 1 (satu) unit Tug Boat 29,11 meter antara PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan PT Palma Progress Shipyards pada tanggal 8 April 2021 dengan Akta Notaris DR. Yudo Diharjo Lantanea No. 06.
2. Perjanjian pembuatan dan jual beli kapal antara PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan PT Tunas Karya Bahari Indonesia pada tanggal 8 April 2021.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 Mei 2021 atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dengan opini wajar tanpa modifikasi pada tanggal 31 Desember 2020 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Manajemen Perseroan bertanggung jawab terhadap keberadaan laporan keuangan interim yang telah diterbitkan. Tidak ada fakta material terkait LK interim.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** dan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada akta pendirian perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
Modal Dasar		1.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Magma Sigma Utama	250	250.000.000
2.	PT Hasnur Jaya Utama	125	125.000.000
3.	PT Energi Batubara Lestari	125	125.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		500	500.000.000

Sejak Perseroan didirikan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 (“**Akta No.9/2021**”).

Di dalam Akta No.9/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

1. Perubahan nilai nominal saham Perseroan oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.
2. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“**Penawaran Umum**”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek- di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
3. Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang- berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Rencana Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (“**Company Listing**”), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Rencana Pelaksanaan *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:

- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan tersebut.
 8. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
 10. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Akta No. 9/2021 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 9/2021 maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha utama:**
Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50133**).
2. **Kegiatan usaha penunjang:**
 - (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut-operatornya (**KBLI 50131**).
 - (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
 - (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
 - (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Namun demikian, selama periode pemeriksaan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 7/2017**”), laporan pemeriksaan segi hukum struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan hanya mencakup **3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran** (terhitung sejak bulan April tahun 2018) struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan.

2018-2019:

Susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Akta 43/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000	95,00
2. Haji Rachmadi Has	715	715.000.000	0,72
3. Jayanti Sari	715	715.000.000	0,72
4. Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	714.000.000	0,71
5. Hasnuryadi Sulaiman	714	714.000.000	0,71
6. Hasnuryani	714	714.000.000	0,71
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	714.000.000	0,71
8. Zainal Hadi HAS HB	714	714.000.000	0,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

2020

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0054522.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336073 tanggal 08 Agustus dan 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336084 tanggal 08 Agustus 2020, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129602.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 (“**Akta No. 2/2020**”).

Berdasarkan Akta No. 2/2020, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- i. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah);
- ii. Mengubah nilai nominal per saham dari semula senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus Rupiah) per saham, sehingga dengan adanya peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tersebut di atas, modal dasar Perseroan terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham;
- iii. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham;

Lebih lanjut, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Akta 107/2021 dan dirincikan di bawah ini.

Lebih lanjut, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen

sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Akta 107/2021 yang kami elaborasikan di bawah ini.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).
- Modal Disetor : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Jaya International	95.000	199.500.000.000	95,000
2. Haji Rachmadi Has	715	1.501.500.000	0,715
3. Jayanti Sari	715	1.501.500.000	0,715
4. Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	1.499.400.000	0,714
5. Hasnuryadi Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714
6. Hasnuryani	714	1.499.400.000	0,714
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714
8. Zainal Hadi HAS HB	714	1.499.400.000	0,714
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	630.000.000.000	

Dalam hal ini, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta 2/2020 sebagaimana diratifikasi dengan Akta 107/2021 di atas, seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

Sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) adalah merupakan modal baru yang diambil bagian oleh:

- 1) PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, sebesar (i) sebesar Rp. 101.650.000.000 (seratus satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 104.500.000.000 (seratus empat miliar limaratus juta Rupiah).
- 2) Tuan H. Rachmadi HAS, tersebut, sebesar (i) Rp 765.050.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3) Nyonya Jayanti Sari, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 765.050.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu Rupiah) dan (ii) sebesar Rp 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- 4) Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
- 5) Tuan Hasnuryadi Sulaiman, Sarjana Ekonomi, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas

Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);

- 6) Nyonya Hasnuryani, Sarjana Ekonomi, tersebut, sebesar (i) Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- 7) Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman, tersebut, sebesar (i) Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah); dan
- 8) Tuan Zainal Hadi HAS HB, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya Rp785.400.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah).

(PT Hasnur Jaya International, Tuan H. Rachmadi HAS, Nyonya Jayanti Sari, Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar, Tuan Hasnuryadi Sulaiman, Nyonya Hasnuryani, Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman, dan Tuan Zainal Hadi HAS HB untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai – “Pemegang Saham Lama”)

Atas peningkatan modal dan pengalihan saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, sebagaimana diratifikasi dengan Akta 107/2021, masing-masing Pemegang Saham Lama menyetorkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Hasnur Jaya International sebanyak Rp2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor: (i) RTG Transfer- Notifikasi Eksekusi Transaksi *Single Transfer to other Bank* tertanggal 4 November 2020 untuk setoran sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah); dan (ii) RTGS Transfer – Notifikasi Eksekusi Transaksi *Single Transfer to Other Bank* tertanggal 5 November 2020 untuk setoran sejumlah Rp850.000.000. (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Tuan H. Rachmadi HAS Rp97.955.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 3) Nyonya Jayanti Sari sebanyak Rp97.955.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 4) Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 5) Tuan Hasnuryadi Sulaiman sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 6) Nyonya Hasnuryani, Sarjana Ekonomi sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 7) Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020; dan
- 8) Tuan Zainal Hadi sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020.

Bahwa penyetoran tunai di atas dilakukan bersamaan dengan pembayaran kewajiban pajak Pemegang Saham Lama atas jumlah dividen yang telah diterima dengan nilai pembayaran pajak secara keseluruhan sejumlah Rp535.000.000 (lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah), sehingga jumlah total tunai yang disetorkan oleh para Pemegang Saham Lama adalah sebesar Rp3.530.000.000 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah).

Kemudian, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

- Penjualan saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) saham kepada PT Nur Internasional Samudra;
- Penjualan sebagian saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 6.285 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima) saham kepada nyonya Jayanti Sari;
- Penjualan sebagian saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Haji Rachmadi has sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Hajjah nila Susanti Zulfikar sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Hasnuryadi Sulaiman, S.E sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;

- Penjualan seluruh saham milik Hasnuryani, S.E sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB; dan
- Penjualan seluruh saham milik Yuni Abdi Nur Sulaiman sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB.

Berdasarkan perubahan struktur permodalan dan struktur pemegang saham di atas, susunan pemegang saham Perseroan di dalam Akta No. 2/2020 adalah sebagai berikut:

Akta No. 2/2020

Keterangan	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	51.000	107.100.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	35.000	73.500.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	7.000	14.700.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	7.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	630.000.000.000	

2021

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 9/2021 dan Akta No. 107/2021 sebagai berikut:

Akta No. 9/2021

Berdasarkan Akta No. 9/2021, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari semula senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus Rupiah) per saham per saham menjadi bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
- Modal Disetor : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
5. PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51,00
6. PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35,00
7. Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7,00
8. Zainal Hadi HAS HB	147.000.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.300.000.000	630.000.000.000	

Akta No. 107/2021

Sehubungan dengan terjadinya perubahan jumlah jumlah dividen semula sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp107.000.000.000 (seratus tujuh miliar Rupiah) yang terjadi setelah peningkatan modal dasar dan modal ditingkatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 2/2020.

Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Selanjutnya, selain daripada agenda ratifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta No.107/2021, yang mana telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT NUR INTERNASIONAL SAMUDERA, sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah);
- b) PT HASNUR JAYA INTERNATIONAL, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- c) JAYANTI SARI, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- d) ZAINAL HADI HAS HB, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham di dalam Perseroan menjadi sebagai berikut sebagaimana kami jelaskan lebih terperinci di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tahun	Kejadian
2010	Pelayaran komersial pertama HIS pada tanggal 24 Oktober 2010
2011	HIS mulai melayani pengangkutan batu selain batubara
2018	HIS mulai melayani pasar tongkang ukuran 330 feet
2019	HIS mencapai cargo batubara 6.8 juta MT
2020	HIS terus melakukan peningkatan pelayanan operasional secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan pasar pelayaran baik domestik maupun internasional

D. PERIZINAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 8120114011668 tertanggal 16 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NPWP	:	02.900.072.6-038.000
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133
Status Penanaman Modal	:	PMDN

2. Izin Usaha Angkutan Laut

Kami telah menerima Izin Usaha Angkutan Laut tertanggal 17 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
NIB	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133

Lokasi Usaha

Alamat	:	Jl. Berangas Timur No. 95A
Desa/Kelurahan	:	Sungai Puting
Kecamatan	:	Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota	:	Kap. Tapin
Provinsi	:	Kalimantan Selatan

Izin Usaha berupa Izin Usaha Angkutan Laut ini telah berlaku efektif.

3. Izin Komersial/Operasional

a. Kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 16 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Nomor Induk Berusaha	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133

b. Kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 30 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Usaha	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Nomor Induk Berusaha	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Lokasi Usaha	:	Jl. Berangas Timur No. 95A, Sungai Puting, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HRT telah memiliki izin-izin penting antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 8120003921949 tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4,
Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop.
Kalimantan Selatan
NPWP : 03.063.408.3-731.000
Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI : 52221
Status Penanaman Modal : PMDN

2. Izin Usaha Pelabuhan Umum

Kami telah menerima Izin Usaha Pelabuhan Umum tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4.
NIB : 8120003921949
Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI : 52221
Lokasi Usaha
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4
Desa/Kelurahan : Sungai Putting
Kecamatan : Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota : Kap. Tapin
Provinsi : Kalimantan Selatan

3. Izin Komersial/Operasional

Pada Tanggal Pemeriksaan, kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Hasnur Resources Terminal
Nomor Induk Berusaha : 8120003921949
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4,
Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop.
Kalimantan Selatan
NPWP : 03.063.408.3-731.000
Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI : 52221

4. Izin Lokasi

Pada Tanggal Pemeriksaan, kami telah menerima Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Hasnur Resources Terminal
Nomor Induk Berusaha : 8120003921949
Lokasi Yang Dimohon
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4
Desa/ Kelurahan : Sungai Putting
Kecamatan : Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota : Kab. Tapin
Provinsi : Kalimantan Selatan
Luas Lahan : 0 Ha
Rencana Kegiatan : Penyediaan dan/atau pelayanan: jasa dermaga untuk bertambat; pengisian

bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang dan atau kendaraan; jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; jasa aterminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-ro; jasa bongkar muat barang; pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan atau jasa penundaan kapal.

Koordinat : 2.5602421, 114.5386281

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HMS telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 0220203700134 tertanggal 3 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut:

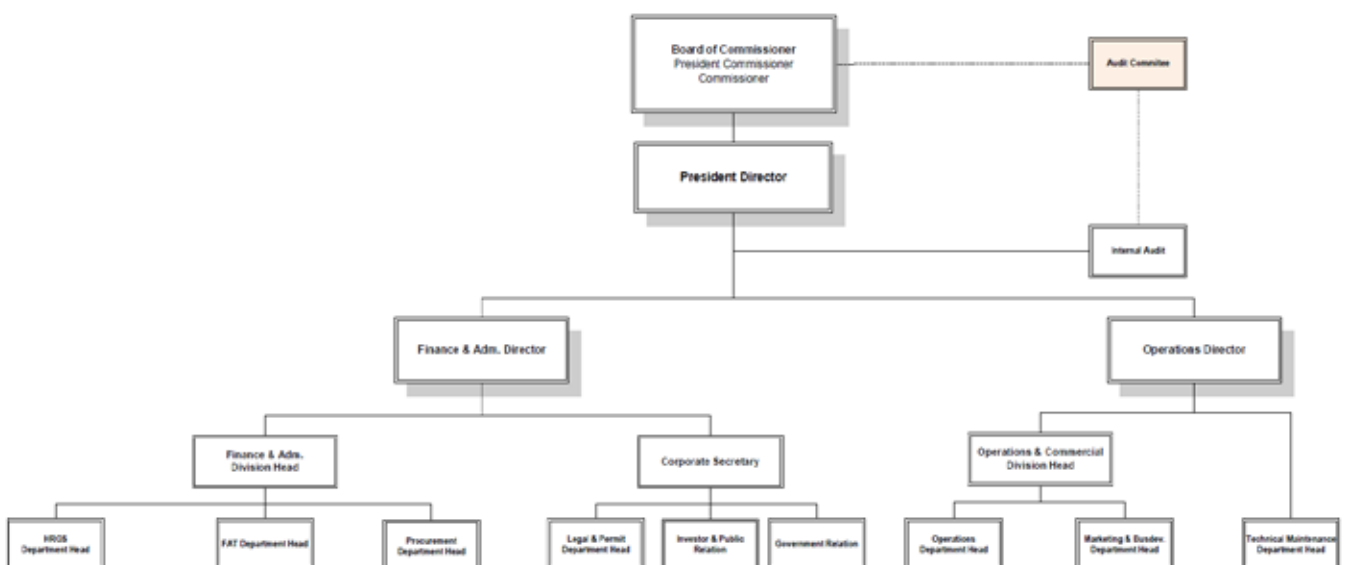
Alamat : Komp. Bunyamin Permai Raya 5, Jl. A. Yani KM6, Kel Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
 NPWP : 02.918.181.5-733.000
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
 Kode KBLI : 52299, 52240, 52293, 52224, 52103, 50222, 49431, 52295, 49432
 Status Penanaman Modal : PMDN

2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Nama Perusahaan : PT Hasnur Mitra Sarana
 Alamat Perusahaan : Jl. Pelabuhan Khusus Hasnur Jaya Utama KM 1.5 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
 Nama Pemilik/Penanggung Jawab : ZAINAL HADI HAS
 Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jl. Melayu Darat No. 66 RT 010/RW 002 Banjarmasin
 NPWP : 02.918.181.5-733.000
 Tanggal Penerbitan : 14 April 2010
 Keberlakuan : Selama HMS masih menjalankan perusahaannya.

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 9/2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB
 Komisaris Independen : Nur Prasetyo
 Komisaris : Ir. Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari
 Direktur : Achmad Ma'mur*
 Direktur : Soma Ariyaka

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.

*Catatan:

Sehubungan dengan telah meninggal dunianya Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit, maka berdasarkan Akta No. 9/2021, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Almarhum telah dinyatakan berakhir.

Pada tanggal pernyataan ini, seluruh kewenangan serta fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Almarhum Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas aspek keuangan dan administrasi Perseroan, akan dijalankan oleh Ibu Jayanti Sari selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana dijelaskan oleh Perseroan melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 062/HIS-JKT/DIR-UM05/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan akan memutuskan dan mengangkat anggota Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Almarhum Bapak Achmad Ma'mur.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Zainal Hadi HAS HB

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun.

Menempuh pendidikan Master of Commerce di bidang *Accounting & Finance* di Deakin University, Australia pada tahun 2006, Bachelor of Commerce di bidang *Marketing & International Trade* di Deakin University, Australia pada tahun 2006 dan Diploma of Commerce di Melbourne Institute of Business and Technology di Jakarta pada tahun 2002.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris PT Nur Jaya Samudra
	Komisaris PT Nur Internasional Samudra
	Komisaris PT Hasnur Cipta Karya
	Komisaris PT Hasnur Informasi Teknologi
	Komisaris PT Hasnur Jaya Power
	Komisaris PT Antang Surya Persada
	Komisaris PT Hasnur Mitra Sarana
	Komisaris PT Magma Sigma Utama
	Komisaris PT Trikarsa Manunggal Jaya
	Direktur Utama PT Hasnur Jasa Terminal
	Direktur Utama PT Sinar Fajar Sejahtera
2019 – Sekarang	Komisaris Utama PT Energi Batubara Lestari
	Komisaris Utama PT Syres Power Energy
2018 – Sekarang	Komisaris PT Hasnur Resources Terminal
	Direktur Utama PT Hasnur Jaya International
	Direktur Utama PT Hasnur Barito Jaya
	Direktur PT Hasnur Graha Jaya

2017 – Sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Tambang Direktur PT Hasnur Group Indonesia
2015 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Internasional Shipping
2014 – sekarang	Komisaris PT Barito Putera Docking Direktur Utama PT Putra Banjar Grafika
2013 - sekarang	Komisaris PT Barito Raya Utama Direktur Utama PT Tapin Suthra Berjaya
2012 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Energi Direktur Utama PT Radio Gema Oskar Lestari Direktur PT Hasnur Jaya Lestari Direktur PT Hasnur Sawit Jaya
2011 – sekarang	Direktur Utama PT Barito Putera Industri Direktur Utama PT Putera Barito Berbakti Direktur PT Hasnur Media Citra Direktur PT Hasnur Binuang Putera Mulia
2010 – sekarang	Anggota Dewan Pembina Yayasan Hasnur Centre Direktur Utama PT Putera Barito Berbakti Direktur Utama PT Hasnur Mitra Sarana
2009 – sekarang	Direktur Utama PT Citra Kalimantan Mediatama Direktur Utama PT Putera Banjar Grafika Direktur PT Hasnur Jaya Utama
2006 - sekarang	Direktur PT Setia Bakti Putera HAS Direktur PT Sinar Hasnur Putera
2016 - 2020	Direktur PT Hasnur Citra Terpadu
2015 - 2020	Komisaris PT Magma Sigma Utama Direktur Utama PT Gunung Masa Batubara Energi
2013 - 2020	Direktur PT Hasnur Jasa Terminal Direktur PT Hasnur Cipta Karya
2012 - 2020	Direktur Utama PT Antang Surya Persada
2011 - 2020	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Power Direktur Utama PT Hasnur Informasi Teknologi
2009 - 2020	Direktur Utama PT Hasnur Mitra Sarana Direktur Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Direktur PT Barito Putera
2016 - 2019	Direktur PT Barito Putera Plantation
2011 - 2019	Direktur PT Hasnur Resources Terminal
2009 - 2019	Direktur PT Energi Batubara Lestari
2013 - 2018	Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi
2011 - 2018	Komisaris PT Hasnur Graha Jaya Direktur Utama PT Yuni Nurhas Direktur PT Hasnur Jaya International
2010 - 2018	Direktur PT Hasnur Riung Sinergi
2012 - 2017	Direktur PT Hasnur Jaya Tambang
2009 - 2015	Komisaris PT Magma Sigma Utama
2009 - 2014	Komisaris Utama PT Putra Banjar Grafika
2013	Direktur Utama PT Tapin Suthra Berjaya
2011 - 2013	Direktur PT Bhumi Rantau Energi
2011 - 2013	Direktur PT Hasnur Citra Terpadu
2011 - 2012	Direktur PT Hasnur Jaya Energi
2010 – 2012	Direktur PT Antang Surya Persada
2007 - 2011	Direktur PT Tapin Suthra Berjaya
2009	Komisaris PT Bhumi Rantau Energi Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi Direktur PT Bhumi Rantau Energi
2008 - 2009	Direktur PT Citra Kalimantan Mediatama

2007 - 2009 Direktur PT Putra Banjar Grafika
 2006 - 2007 Komisaris PT Hasnur Binuang Putera Mulia
 Finance PT Barito Putera



Nur Prasetyo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana *Civil and Planning Engineering, majoring in Construction Management* di Universitas Trisakti pada tahun 1989.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 - sekarang	Komisaris Independen PT Hasnur Internasional Shipping
2020 - sekarang	Komisaris PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
2010 - 2020	Direktur Utama PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
2008 - 2010	<i>Managing Director</i> PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
1996 - 2008	<i>Manager Territorial</i> PT ExxonMobil Lubricants Indonesia
1994 - 1996	<i>Project Manager</i> PT Cakung Remaja Development
1989 - 1994	<i>Field Manager</i> Anadrill – Schlumberger Oil Services



Abdurrachman Kunwibowo

Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Teknologi dan Mekanisme Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – sekarang	Komisaris PT Hasnur Internasional Shipping
2020 - Sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya Energi Komisaris PT Antang Surya Persada Komisaris PT Trikarsa Manunggal Jaya
2018 – Sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya International Ketua Human Capital Committe PT Petrosea (Indika Group)
2011 - sekarang	Komisaris PT Energi Batubara Lestari
2013 - 2020	Komisaris PT Hasnur Citra Terpadu
2011 - 2020	Komisaris PT Hasnur Informasi Teknologi
2016 - 2019	Komisaris PT Petrosea (Indika Group)
2012 - 2016	Komisaris PT Hasnur Sawit Jaya Komisaris PT Hasnur Jaya Lestari Komisaris PT Hasnur Jaya Energi
2009 - 2011	Advisor Hasnur Group
2007 - 2009	Direktur Utama PT Darma Henwa Tbk.
2005 - 2007	Direktur Busdev & Operasional PT Pamapersada Nusantara
2003 - 2005	Direktur Busdev & Engineering PT Pamapersada Nusantara
1990	Manajer Pemasaran Divisi Rental
1980	Management Trainee United Tractors (Astra Group)

DEWAN DIREKSI



Jayanti Sari

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun.

Menempuh pendidikan Associate Diploma di bidang *International Trade* di Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia pada tahun 1994.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Jasa Terminal Komisaris Utama PT Hasnur Mitra Sarana Komisaris PT Hasnur Cipta Karya Direktur Utama PT Nur Jaya Samudra Direktur Utama PT Nur Internasional Samudra Direktur Utama PT Jaya Hananto Utama
2019 - sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Resources Terminal
2018 - sekarang	Komisaris PT Hasnur Barito Jaya Direktur Utama PT Hasnur Agro Lestari
2017 - sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya Tambang Direktur Utama PT Hasnur Group Indonesia
2015 - sekarang	Komisaris Utama PT Magma Sigma Utama
2014 - sekarang	Komisaris Utama PT Citra Kalimantan Mediatama Komisaris Utama PT Putra Banjar Grafika
2013 - sekarang	Komisaris PT Barito Raya Utama Direktur Utama PT Gunung Mas Batubara Energi
2012 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Lestari Direktur Utama PT Hasnur Sawit Jaya
2011 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Informasi Teknologi Komisaris Utama PT Hasnur Jaya Power Komisaris PT Putera Barito Berbakti Komisaris PT Setia Bakti Putera HAS Direktur Utama PT Hasnur Graha Jaya Direktur Utama PT Barito Putera Docking Direktur Utama PT Hasnur Media Citra
2010 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Riung Sinergi Anggota Dewan Pembina Yayasan Hasnur Centre
2009 – sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Internasional Shipping Komisaris Utama PT Hasnur Binuang Putera Mulia Direktur Utama PT Hasnur Jaya Utama Direktur Utama PT Barito Putera Plantation Direktur Utama PT Sinar Hasnur Putera
2008 - sekarang	Ketua Dewan Pengawas Koperasi Teratai Putih
2005 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Citra Terpadu
2013 - 2020	Komisaris PT Hasnur Jasa Terminal Direktur Utama PT Hasnur Cipta Karya
2012 – 2020	Komisaris PT Hasnur Jaya Energi Komisaris PT Antang Surya Persada Komisaris PT Barito Putera
2020	Komisaris Utama PT Hasnur Cipta Karya
2011 – 2020	Komisaris PT Barito Putera Industri
2009 – 2020	Komisaris Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Komisaris PT Hasnur Mitra Sarana Direktur Utama PT Sinar Fajar Sejahtera
2011 – 2019	Direktur Utama PT Hasnur Resources Terminal
2009 – 2019	Komisaris PT Energi Batubara Lestari
2012 – 2017	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Tambang

2011 – 2018	Komisaris PT Yuni Nurhas Direktur Utama PT Hasnur Jaya International
2009 – 2015	Direktur Utama PT Magma Sigma Utama
2012	Komisaris PT Radio Gema Oskar Lestari
2011 – 2012	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Energi
2010 – 2011	Komisaris PT Barito Putera Docking
2009	Komisaris Utama PT Bhumi Rantau Energi
2005 – 2009	Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi
2006 – 2007	Komisaris Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya
2006	Direktur Utama PT Energi Batubara Lestari
2004 – 2006	Direktur Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Direktur PT Hasnur Jaya Utama
1987 – 2004	Komisaris Utama PT Barito Putera
1999 – 2001	Manajer Adm. Keuangan PT Hasnur Jaya Utama
1996 – 1999	Manajer Logistik & Peralatan PT Hasnur Jaya Utama



Achmad Ma'mur

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Menempuh pendidikan MBA di IPMI International Business School di Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) pada tahun 1977.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris PT Sigma Rekayasa Prima Komisaris PT Fajar Anugerah Dinamika Direktur PT Magma Sigma Utama
2018 - sekarang	Direktur PT Hasnur Internasional Shipping
2018 - 2019	Direktur PT Hasnur Jaya International
2017 - sekarang	Direktur PT Hasnur Riung Sinergi
2015 - 2017	Tenaga Ahli Anggota Komisi VII DPR RI
2014 - 2018	Komisaris PT Hasnur Jaya International
2013 - sekarang	Risk Management Committee PT Bayan Resources
2011 - 2017	Komisaris PT Hasnur Riung Sinergi
2010 - 2019	Corporate Advisor PT Hasnur Jaya Utama
2009 – 2010	Komisaris PT Pro M Services
2008 - 2012	Anggota Komite Audit PT Bayan Resources Tbk.
2005 - 2008	Advisor PT Trimitra Sriwidjaja Direktur PT Pro M Services
2002 - 2004	Direktur PT Suprabara Energi Direktur PT Kalimantan Energi Lestari
1984 - 2002	Direktur Keuangan, Kepala Dinas, Kepala Bagian & Staff PT Bukit Asam
1979 – 1984	Treasury Staff Perum Perumnas



Soma Ariyaka

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Menempuh pendidikan Master Teknologi Informasi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 dan Bachelor of Engineering (Honours) di bidang *Aerospace Engineering* di Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Cipta Karya Direktur Utama PT Hasnur Jaya Power Direktur Utama PT Magma Sigma Utama Direktur PT Hasnur Internasional Shipping Direktur PT Hasnur Resources Terminal Direktur PT Hasnur Mitra Sarana Direktur PT Nur Internasional Samudera Direktur PT Hasnur Jasa Terminal
2019 – sekarang	Direktur PT Syres Power Energy
2018 – sekarang	Dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
2016 – sekarang	Direktur PT Putera Barito Berbakti
2014 – sekarang	Direktur PT Hasnur Jaya International
2016 – 2020	Direktur PT Hasnur Cipta Karya
2009 – 2010	Project Manager PT Hasnur Coal Terminal
2005 – 2009	Konsultan Lean Six Sigma and Country Manager Pivotal Resources, Inc
2003 – 2005	Manajer Program Produktivitas & HSE PT Perfetti Van Melle Indonesia
1998 – 2003	Engineer & Asia Pacific Functional Coordinator and Six Sigma Deployment Champion PT Delphi Automotive Systems Indonesia
1996 – 1998	Staff Peneliti Bidang Struktur di Pusat Roket dan Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Direksi dan Komisaris yaitu Jayanti Sari adalah saudara kandung dari Zainal Hadi HAS HB.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Dewan Komisaris diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusandiambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan-kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; dan Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

Rapat dan Kehadiran Direksi

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Direksi diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada

- peserta rapat paling lambat-- sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp7.473.036.177, Rp5.307.548.139, dan Rp5.701.532.890.

G. TATA KELOLA PERSEROAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Dwita Ameilia Lestari sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0181/HIS-JKT/DIR-OP051/II-2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
- c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Dwita Ameilia Lestari
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Domisili : Jakarta

Telepon : (021) 29343888
Email : corsec.his@hasnurgroup.com

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam rangka peningkatan *softskill* dan *technical skill* seperti:

- Untuk pelatihan peningkatan Softskill terdapat:
 1. Hasnur Leadership Program 1 dan 2 (HLP 1 & 2).
 2. Training Corporate Secretary di perusahaan terbuka.
 3. Training Administrasi Remunerasi.
- Untuk pelatihan Technical Skill terdapat:
 1. Training ISO 9001 dan ISO 45001.
 2. Quality Control Circle (QCC).
 3. Training Inventory Planning & Control.
 4. Training Shipping Management Program.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 0387/HIS-JKT/COM-OP053/III-2021 tanggal 1 April 2021, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Nur Prasetyo
Anggota : Boy Hamdani Tamin
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Perbanas pada tahun 1992. Sebelum nya menjabat sebagai Direktur PT Professional Mining Services (2011-2013) dan Manajer Mining Cost Control dan Analyst di PT Dyzamatra Powerindo (2014-2016).

Anggota : Ir. Hendra Iskandar Lubis, MBA
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Perencanaan Kota dan Wilayah di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan Master of Business Administration di The George Washington University pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT BCA Sekuritas (2017 - saat ini) dan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko di PT Perum Perumnas (2020 - saat ini).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 April 2021.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat No.0318a/HIS-JKT/DIR-OP058.3/III-2021 tanggal 1 April 2021 dan telah mengangkat Bapak **Setyo Buwono** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan juga telah memberikan persetujuan atas pengangkatan Setyo Buwono sebagai Ketua Unit Audit Internal melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2021.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 April 2021.

Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).

- a. Unit Audit Internal memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam:Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- c. Melakukan koordinasi kegiataannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk komite nominasi dan remunerasi.

Dalam hal pelaksanaannya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Mei 2021, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang relevan.

Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kompensasi dari para anggota dewan komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi.

Sehubungan dengan tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan terkait uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total karyawan sejumlah 196. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

HIS (Perseroan)

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	2	-	-
Manager	7	8	8
Supervisor	63	60	61
Staff	49	41	36
Non Staff	55	53	53
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55	8	8	8
45-54	31	21	17
35-44	62	67	63
25-34	72	57	54
18-24	3	9	16
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	2	2	2
Sarjana	31	26	23
Diploma/Akademi	49	39	28
SLTA	89	91	99
SLTP dan lain-lain	5	4	6
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	54	49	51
Kontrak	122	113	107
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
HRGS	12	12	11
Finance	22	16	15
Operation	132	123	121
Agency	6	7	7
Marketing	2	2	2
Legal & Permit	2	2	2
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	14	13	12
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	47	39	37
Sungai Putting, Tapin, Kalimantan Selatan	2	3	1
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	-	-	-
Shipping Crew	113	107	108
Jumlah	176	162	158

HRT (Entitas Anak)
Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	-	-	-
Manager	2	-	1
Supervisor	9	10	10
Staff	6	8	7
Non Staff	3	4	2
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55	2	2	2
45-54	9	10	10
35-44	6	7	4
25-34	3	3	4
18-24	-	-	-
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	10	10	10
Diploma/Akademi	1	1	1
SLTA	6	8	7
SLTP dan lain-lain	3	3	2
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	19	18	19
Kontrak	1	4	1
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
HRGS	3	3	4
Finance	-	-	-
Operation	17	19	16
Agency	-	-	-
Marketing	-	-	-
Legal & Permit	-	-	-
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	-	-	-
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-	-	-
Sungai Puting, Tapin, Kalimantan Selatan	11	15	15

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	9	7	5
Shipping Crew	-	-	-
Jumlah	20	22	20

HMS

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	-	-	-
Manager	-	-	-
Supervisor	-	-	-
Staff	-	-	-
Non Staff	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55	-	-	-
45-54	-	-	-
35-44	-	-	-
25-34	-	-	-
18-24	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	-	-	-
Diploma/Akademi	-	-	-
SLTA	-	-	-
SLTP dan lain-lain	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	-	-	-
Kontrak	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
HRGS	-	-	-
Finance	-	-	-
Operation	-	-	-
Agency	-	-	-
Marketing	-	-	-
Legal & Permit	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	-	-	-
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-	-	-
Sungai Puting, Tapin, Kalimantan Selatan	-	-	-
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	-	-	-
Shipping Crew	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Perseroan memiliki total 112 karyawan yang memiliki keahlian khusus dengan usia 26-58 tahun dengan pengalaman kerja 1-36 tahun yang memiliki jabatan sebagai nahkoda, mualim, juru minyak, juru masak, dan masinis yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan, berikut merupakan karyawan dengan keahlian khusus Perseroan:

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
SUPARWANTO	41 TAHUN	16 TAHUN	NAHKODA	INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ISM CODE, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ADI PRIHANTO	52 TAHUN	28 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), TANKER FAMILIRIAZATION (TF), OIL TANKER (OT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), OPERATOR RADIO UMUM, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ANDI AKMAL	27 TAHUN	4 TAHUN	MUALIM II	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
				MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
HENRI	38 TAHUN	13 TAHUN	KKM	ADVANCE OIL TANKER (AOT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
KETUT YUDA PRAWIRA	38 TAHUN	14 TAHUN	MASINIS II	CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
IMAM KAFILAH SUBANGUN	29 TAHUN	1 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
NUR WALUYO	42 TAHUN	21 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIARIZATION (TF), OIL TANKER (OT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
YUDI ARFEN	41 TAHUN	23 TAHUN	JURU MUDI	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
MUDIYONO	37 TAHUN	18 TAHUN	JURU MINYAK	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT V, AHLI TEKNIKA TINGKAT V
NURCAHYO KRISDIANTORO	30 TAHUN	10 TAHUN	JURU MASAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
IMAM MUSOLI	42 TAHUN	12 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
GURUH SRI HANDOKO	39 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM I	GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RUSDI	31 TAHUN	3 TAHUN	MUALIM II	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SANEMAN	44 TAHUN	18 TAHUN	KKM	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUJENO	29 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
RINO DWIJAYANTO	26 TAHUN	2 TAHUN	MASINIS III	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
RUSLI	51 TAHUN	21 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
YUDI MULYANA	44 TAHUN	18 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SYAEFUDDIN	46 TAHUN	14 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
M TOHIR SUYANTO	51 TAHUN	3 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH
KUNTO PURNOMO	50 TAHUN	26 TAHUN	NAHKODA	ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), OPERATOR RADIO UMUM, CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUGIANTO	29 TAHUN	11 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, OPERATOR RADIO UMUM, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
SEPTA DWI KOERNIAWAN	37 TAHUN	9 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUKENDAR	31 TAHUN	9 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), TANKER FAMILIRIAZATION (TF), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
ARDHI PRANATA	28 TAHUN	8 TAHUN	MASINIS II	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ENGINE ROOM SIMULATOR (ERS), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SATRIA HUTAMA PUTRA	31 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS III	CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HINDARTO SUMARDIKO	46 TAHUN	17 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
JOIS JIMMI VERI ALENG	47 TAHUN	26 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIRIAZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
CASPIN	45 TAHUN	8 TAHUN	JURU MINYAK	ISM CODE, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
JOHAN FRANTO	27 TAHUN	5 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
EKO WARDYANATA	46 TAHUN	22 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
BAMBANG TOPAN PRAYOGA	29 TAHUN	10 TAHUN	MUALIM I	OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
SAIFUL ANNAS	28 TAHUN	7 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
WINARTO	49 TAHUN	27 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
FATHURAHMAN ARI DARMAWAN	26 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DIDIK PRAYOGO UTAMA	26 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS III	BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUHAMMAD AMIN	35 TAHUN	14 TAHUN	JURU MUDI	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ADHI SYAHPUTRA RAHMATULLAH	30 TAHUN	7 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
NUR ROHIDIN	47 TAHUN	12 TAHUN	JURU MINYAK	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
SUPRIYANTO	45 TAHUN	10 TAHUN	JURU MASAK	FOOD HANDLING SHIP COOK, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
TRI YULIANTO	49 TAHUN	25 TAHUN	NAHKODA	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
				TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
MOHAMMAD HASAN	38 TAHUN	19 TAHUN	MUALIM I	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
MOHAMAD ROHMAN	47 TAHUN	20 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ISM CODE, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
BAMBANG JOKO WAHYUNTO	58 TAHUN	33 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), ISM CODE, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUHAMMAD JASIN SIA	58 TAHUN	31 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUHAMMAD NURUL RIZAL	29 TAHUN	10 TAHUN	MASINIS III	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), ISM CODE, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
AGUS SURANTO	41 TAHUN	19 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ARIS INDRIYANTO	51 TAHUN	27 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
FEMBRIANSYAH	37 TAHUN	16 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
FREDI DANANG	43 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RIYONO	44 TAHUN	18 TAHUN	NAHKODA	ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), IMDG CODE, IMS CODE, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ANGGA DWI NUGRAHA	30 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
WATONO	41 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM II	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, IMDG CODE, MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
HENDY AMARTHA	31 TAHUN	8 TAHUN	KKM	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC LIQUEFIED GAS TANKER (BLGT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HENRDA HALIM	31 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
ABDUL HAMID	28 TAHUN	11 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
FAJAR SETYAWAN	37 TAHUN	15 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIRIAZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
AGUS PRIYANTO	36 TAHUN	14 TAHUN	JURU MUDI	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SYAHRONI	33 TAHUN	6 TAHUN	JURU MINYAK	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
MUH NUR SUBHI	35 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
MUHAMMAD SOAHID	44 TAHUN	13 TAHUN	NAHKODA	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
TESCHA HADI SAPUTRA	38 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE OIL TANKER (AOT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), OPERATOR RADIO UMUM, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
DEDI PURWANTO	29 TAHUN	4 TAHUN	MUALIM II	GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), OPERATOR RADIO UMUM, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
FAISAL ZULYANTO	31 TAHUN	8 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HARIANTO	37 TAHUN	13 TAHUN	MASINIS II	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), ISM CODE, BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUHAMMAD RIFA'I	28 TAHUN	9 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUZAMIL	32 TAHUN	12 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
DODO HERMAWAN	29 TAHUN	11 TAHUN	JURU MUDI	MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
YUDI SETIAWAN	30 TAHUN	10 TAHUN	JURU MINYAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
ROSYANO	39 TAHUN	8 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
ENDI RUSMANATIKA	42TAHUN	18 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
BEINI SETIAWAN	42TAHUN	18 TAHUN	MUALIM I	TANKER FAMILIRIAZATION (TF), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
MOH SIBRO MUFAKIH	26 TAHUN	2 TAHUN	MUALIM II	ADVANCE LIQUEFIED GAS TANKER, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
NASARUDDIN	39 TAHUN	21 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUYATNO	58 TAHUN	30 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
SUPRIADI	39 TAHUN	19 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUH ILHAM	26 TAHUN	6 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, RATING AS ABLE SEAFARER DECK
YANA MULAYANA	31 TAHUN	11 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
WISNU SAPUTRO	27 TAHUN	6 TAHUN	JURU MINYAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
MUHAMMAD IDRIS	45 TAHUN	25 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
MUHAMMAD TAHIR	45 TAHUN	16 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
RISAL PASA	32 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM II	INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
TASTUWANTO	46 TAHUN	20 TAHUN	KKM	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
WAKHIT NUR SOLIKHIN	29 TAHUN	8 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DENNI SATRIYO	30 TAHUN	9 TAHUN	MASINIS III	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
AZMAN	42 TAHUN	16 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ARDI	45 TAHUN	16 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SUTIMAN	45 TAHUN	19 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
IMAM SUBAGIO	49 TAHUN	12 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RIYADI	49 TAHUN	31 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SLAMET SURYANTO	30 TAHUN	7 TAHUN	MUALIM I	MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUYATNO	54 TAHUN	30 TAHUN	MUALIM II	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ISM CODE, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
FATWA MAHARDHIKA	34 TAHUN	12 TAHUN	KKM	ISM CODE, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT II, AHLI TEKNIKA TINGKAT II
PAULINUS ARI PRATOMO	32 TAHUN	5 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ENGINE ROOM SIMULATOR (ERS), ISM CODE, BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DATYA SUKMANA	31 TAHUN	5 TAHUN	MASINIS III	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ISM CODE, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
M KUKUH KURNIAWAN	26 TAHUN	5 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ROHIM BUDIYONO	41 TAHUN	22 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
DIKI MULYADI KURNIAWAN	33 TAHUN	11 TAHUN	JURU MINYAK	ISPS CODE, ISM CODE, TANKER FAMILIRIAZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
AS ABLE SEAFARER ENGINE				
AGUS SUGIANTO	33 TAHUN	9 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
RAHMAT LADJADO	43 TAHUN	20 TAHUN	NAHKODA	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SEPTIANTO	32 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM I	OPERATOR RADIO UMUM, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
MOECHMAD HANAFI	29 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM II	ISM CODE, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
DEDEN WIJAYA KUSUMA	39 TAHUN	15 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT II, AHLI TEKNIKA TINGKAT II
PRABU SENJA KANJAYA W	27 TAHUN	3 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DANI NURARI JOKO PRATOMO	33 TAHUN	7 TAHUN	MASINIS III	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUSKAMTO	50 TAHUN	28 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ADI SUPIAN	57 TAHUN	10 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
PEPI YOGASMANA	40 TAHUN	12 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
SYAMSUL MUNIR	32 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SIHANA	57 TAHUN	36 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
ASDAR AMIR	32 TAHUN	10 TAHUN	MUALIM I	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT OPERATIONAL AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
EZRA SANDY	39 TAHUN	2 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH

Daftar Ijazah Sertifikat Crew Bagian Deck / Engine

1. Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I (untuk perwira deck)
2. Ahli Teknik Tingkat IV s/d Ahli Teknik Tingkat I (untuk perwira mesin)
3. Endorsement Ijazah untuk perwira deck dan mesin
4. Rating dan Ahli Nautika Tingkat V (untuk bawahan deck)
5. Rating dan Ahli Teknik Tingkat V (untuk bawahan mesin)

Daftar Sertifikat Keahlian Untuk semua Crew Deck & Engine

1. Basic Safety Training (BST)
2. SCRB (Survival Craft and Rescue Boats)
3. AFF (Advance Fire Fighting)
4. MFA (Medical First Aid)
5. MC (Medical Care)
6. SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan)
7. SDSD (sertifikat keterampilan tugas keamanan)

Daftar Sertifikat keterampilan terkait kompetensi

1. RADAR Simulator untuk Perwira Deck
2. ARPA Simulator untuk Perwira Deck
3. ECDIS Simulator untuk Perwira Deck
4. GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) untuk Perwira Deck
5. BRM (Bridge Resource Management) untuk Perwira Deck
6. ERM (Engine Resource Management) untuk Perwira Engine
7. SSO (Ship Security Officer) untuk Perwira Deck & Engine
8. ISM Code untuk Perwira Deck & Engine
9. ORU (Operator Radio Umum) untuk Perwira Deck

Daftar pengalaman tim manajemen

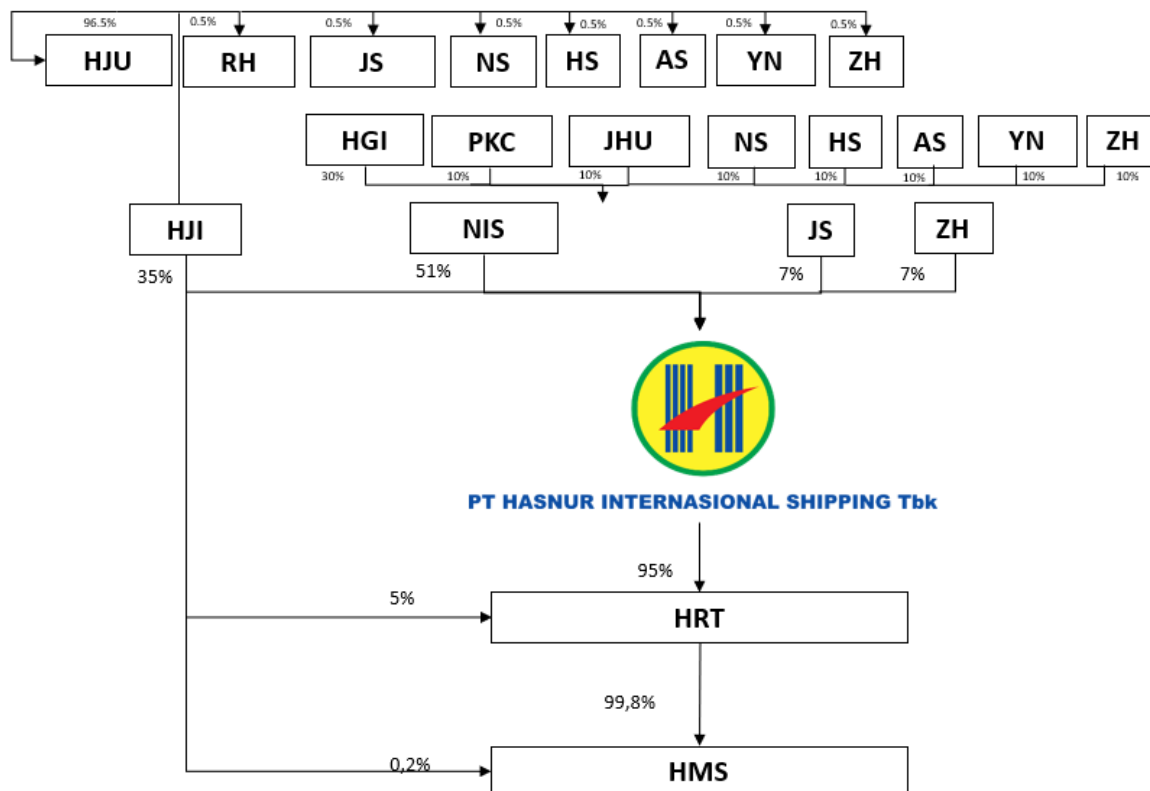
1. Sertifikat Internal Audit
2. Sertifikasi K3
3. Designated Person Ashore (DPA)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/atau Entitas Anak telah mendaftarkan seluruh karyawan untuk fasilitas dan kesejahteraan karyawan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga memberikan fasilitas dan kesejahteraan tambahan bagi karyawan berupa Kesehatan Rawat Jalan, Kesehatan Rawat Inap, Bantuan Pernikahan Bantuan Melahirkan, Santunan Uang Duka, Bantuan Komunikasi (untuk jabatan tertentu) dan Perjalanan Dinas. Sedangkan sarana kesejahteraan yang dimiliki Perseroan antara lain sarana ibadah (musholah), kantin, aktifitas kegiatan olahraga rutin (badminton, basket, tenis, futsal), dan ruang laktasi.

I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Keterangan:

HRT	: PT Hasnur Resources Terminal
HMS	: PT Hasnur Mitra Sarana
HJI	: PT Hasnur Jaya International
NIS	: PT Nur Internasional Samudra
JS	: Jayanti Sari
ZH	: Zainal Hadi HAS HB
HJU	: PT Hasnur Jaya Utama
RH	: Rachmadi HAS
NS	: Nila Susanti Zulfikar
HS	: Hasnuryadi Sulaiman
AS	: Hasnuryani
YN	: Yuni Abdi Nur Sulaiman
HGI	: PT Hasnur Group Indonesia
PKC	: PT Permata Kasih Cahaya
JHU	: PT Jaya Hananto Utama

Pemilik manfaat sekaligus pemegang saham pengendali perseroan adalah Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (“**Perpres 13/2018**”), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut di atas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 7 April 2021 melalui Notaris Muhammad Hanafi, S.H.

J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	NIS	HJI	HMS	HRT
Zainal Hadi HAS HB	KU	K	DU	-	-
Ir. Abdurrachman Kunwibowo	K	-	-	-	-
Nur Prasetyo	KI	-	-	-	-
Jayanti Sari	DU	DU	-	-	-
Achmad Ma'mur	D	-	-	-	-
Soma Ariyaka	D	D	D	-	-
Rachmadi HAS	-	KU	-	-	-
Hasnuryadi Sulaiman	-	K	-	-	-
Hasnuryani	-	D	-	-	-
Yuni Abdi Nur Sulaiman	-	D	-	-	-
Syamsul Bachri Djadi	-	D	-	-	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur

K. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

a. PT Nur Internasional Samudra (“NIS”)

i. Riwayat Singkat

NIS didirikan dengan nama **PT Nur Internasional Samudra** sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tertanggal 6 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029019.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099329.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 Juni 2020 (“**Akta Pendirian NIS**”). Sejak pendirian, NIS tidak pernah mengadakan perubahan anggaran dasar, sehingga Anggaran Dasar NIS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian NIS (“**Anggaran Dasar NIS**”).

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar NIS, maksud dan tujuan NIS adalah berusaha dibidang Angkutan Perairan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- **(50131) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkatan laut berikut operatornya.
- **(50132) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPERL UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkatan laut berikut operatornya.
- **(50133) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus

untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- **(50134) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG**
Menjalankan usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50135) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT;**
Menjalankan usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50141) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal-laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50142) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50143) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS;**
Menjalankan usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50144) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT;**
Menjalankan usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(52221) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT;**
Menjalankan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52222) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAN DAN DANAU;**
Menjalankan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52223) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBRANGAN;**
Menjalankan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52229) AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA;**
Menjalankan usaha kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan

salvage/ pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

iii. Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
1. PT Hasnur Group Indonesia	750	750.000.000	30
2. PT Permata Kasih Cahaya	250	250.000.000	10
3. PT Jaya Hananto Utama	250	250.000.000	10
4. Nila Susanti Zulfikar	250	250.000.000	10
5. Hasnuryadi Sulaiman	250	250.000.000	10
6. Hasnuryani	250	250.000.000	10
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	250	250.000.000	10
8. Zainal Hadi HAS HB	250	250.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rachmadi HAS
Komisaris	:	Hasnuryadi Sulaiman
Komisaris	:	Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama	:	Jayanti Sari
Direktur	:	Hasnuryani
Direktur	:	Yuni Abdi Nur Sulaiman
Direktur	:	Syamsul Bachri Djadi
Direktur	:	Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	375.851.770.020*	-	-
Total Liabilitas	232.861.052.617*	-	-
Total Ekuitas	142.990.717.403*	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	310.349.248.348*	-	-
Harga Pokok Penjualan	246.027.101.551*	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	21.978.328.555*	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	17.750.918.455*	-	-

* laporan keuangan belum di audit

b. **PT Hasnur Jaya International ("HJI")**

i. **Riwayat Singkat**

HJI didirikan dengan nama PT Hasnur Jaya International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 81 tertanggal 31 Mei 2011, dibuat di hadapan Ny. Ira Sudjono, SH, M.Hum, M.Kn, MM, Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-28393.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 7 Juni 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor pendaftaran AHU-0045639.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 Juni 2011 serta diumumkan dalam BNRI No.74 serta Tambahan BNRI No. 49336 tertanggal 14 September 2012 ("**Akta Pendirian HJI**").

Sejak pendirian, anggaran dasar HJI mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HJI No. 1 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Soebiantoro S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076783 tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004409.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 ("**Akta HJI No. 1/2017**").

ii. **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HJI No. 38 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010272.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 31 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066553.AH.01.11.TAHUN 2016 tertanggal 31 Mei 2016 ("**Akta HJI 38/2016**"), maksud dan tujuan HJI adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan batubara, meliputi penggalian, pemurnian dan pengolahan batubara, gambut, batumen padat, batuan aspal, gasifikasi batubara di lokasi pertambangan dan pembuatan brisquet batubara, termasuk namun tidak terbatas pada industry bahan bakar padat/batubara, perdagangan batubara baik yang dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri ataupun tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi; dan
2. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi/pengangkutan umum dan penjualan antara lain pengangkutan hasil hasil pertambangan batubara dengan menggunakan mobil baik truk maupun kendaraan lain untuk di darat.

iii. **Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham**

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham HJI No. 51 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00209.40.21.2014 tertanggal 08 April 2014 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00209.40.21.2014 Tanggal 08 April 2014 ("**Akta No. 51/2014**"); (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0243990 tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0123445.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 ("**Akta No. 14/2018**"); dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tertanggal 20 September 2018 yang dibuat di hadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0244744 tertanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0124510.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 21 September 2018 ("**Akta No. 30/2018**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham HJI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
1. PT Hasnur Jaya Utama	3.524.000.000	352.400.000.000	96,50
2. Rachmadi HAS	18.000.000	1.800.000.000	0,50
3. Jayanti Sari	18.000.000	1.800.000.000	0,50
4. Nila Susanti Zulfikar	18.000.000	1.800.000.000	0,50
5. Hasnuryadi Sulaiman	18.000.000	1.800.000.000	0,50
6. Hasnuryani	18.000.000	1.800.000.000	0,50
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	18.000.000	1.800.000.000	0,50
8. Zainal Hadi HAS HB	18.000.000	1.800.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.650.000.000	365.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.350.000.000	635.000.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indro Hananto
 Komisaris : Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Direktur Utama : Zainal Hadi HAS HB
 Direktur : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Soma Ariyaka
 Direktur : Syamsul Bachri Djadi

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	3.375.597.891.533*	3.445.432.878.499	3.509.142.881.719
Total Liabilitas	1.486.936.450.714*	1.554.493.301.505	1.751.393.961.196
Total Ekuitas	1.888.661.440.819*	1.890.939.576.994	1.757.748.920.523

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	1.319.250.895.065*	2.110.972.793.417	2.538.186.796.536
Harga Pokok Penjualan	1.115.002.369.593*	1.771.283.404.876	1.957.595.563.829
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	28.477.768.185*	179.138.583.410	499.858.915.231
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	27.478.215.049*	144.588.315.975	423.366.112.042

* laporan keuangan belum di audit

L. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 2 (dua) Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020
PT Hasnur Resources Terminal	2011	Pengawasan dan Pengelolaan Pelabuhan	2020	95,00	Sudah Beroperasi	4,85%
PT Hasnur Mitra Sarana	2019	Perusahaan Bongkar Muat	2020	99,80	Sudah Beroperasi	0,26%

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Entitas Anak Perseroan:

1. PT Hasnur Resources Terminal (HRT)

i. Riwayat Singkat

HRT didirikan dengan nama PT Hasnur Resources Terminal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tertanggal 9 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta Barat yang telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU.27245.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0043688.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 serta diumumkan dalam BNRINo. 73 tertanggal 11 September 2012 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 48193 (“**Akta Pendirian HRT**”).

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar HRT sebagaimana tercantum terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HRT No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Drs Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0012470.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 6 Maret 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038144.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 (“**Akta No. 2/2019**”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HRT adalah berusaha dalam bidang kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan HRT, HRT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha di bidang pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12.600 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	126.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Internasional Shipping	2.375.000	29.925.000.000	95,00
2. PT Hasnur Jaya International	125.000	1.575.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	31.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000	94.500.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jayanti Sari
 Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Tubagus Fahed Ichmar Widayasa
 Direktur : Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	36.480.728.331	105.393.354.109	90.098.684.276
Total Liabilitas	4.100.210.321	74.712.197.943	45.348.235.532
Total Ekuitas	32.380.518.010	30.681.156.166	44.750.448.744

Total Aset HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.480.728.331 turun sebesar Rp68.912.625.778 atau 65,39% dibandingkan total Aset HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp105.393.354.109 yang disebabkan oleh pelunasan piutang afiliasi sekitar Rp60 miliar Rupiah dari PT Hasnur Jaya Utama.

Total Liabilitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.100.210.321 turun sebesar Rp70.611.987.622 atau 94,51% dibandingkan total Liabilitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp74.712.197.943 yang disebabkan oleh dilunasinya hutang PT HRT ke OK Bank sekitar Rp60 miliar Rupiah.

Total Ekuitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.380.518.010 naik sebesar Rp1.699.361.844 atau 5,54% dibandingkan total ekuitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 30.681.156.166 sebagian besar disebabkan oleh penambahan setoran tunai saham dari pemegang saham.

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	15.850.165.124	13.995.714.864	10.027.259.872
Harga Pokok Penjualan	1.842.040.935	3.549.659.084	4.798.988.057
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	823.245.627	2.558.807.256	(5.080.825.870)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	275.880.854	322.526.498	1.788.753.134

Total Penjualan HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.854.450.260 atau 13,25% dibandingkan total penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya kenaikan tarif pendapatan di tahun 2020. Sedangkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sebesar Rp46.645.644 atau 14,46% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh beban bunga Bank yang lebih besar di tahun 2020 daripada tahun 2019.

2. PT Hasnur Mitra Sarana (HMS)
i. Riwayat Singkat

HMS didirikan dengan nama PT Hasnur Mitra Sarana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn, M.M. , Notaris di Jakarta Barat dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") No. AHU-00598.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000878.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 82, TBNRI No. 29433 Tanggal 6 Januari 2010 ("Akta Pendirian HMS").

ii. Kegiatan Usaha

Sejak pendirian, Anggaran Dasar HMS mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar HMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di

Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-000453.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001192.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020 (“**Akta No. 29/2019**”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HMS berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan antara lain:

- Angkutan bermotor untuk barang umum;
Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
- Angkutan bermotor untuk barang khusus;
Menjalankan kegiatan usaha untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
- Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- Aktivitas bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikat;
Menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari Pabean yang dengan peraturan pemerintah yang diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
- Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
Menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- Penanganan bongkar muat barang;
Menjalankan kegiatan usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
- Jasa pengurusan transportasi (JPT);
Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.
- Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);
Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.
- Angkutan multimoda;
Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerupa barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

- Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, seperti jasa pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1000	1.000.000.	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Resources Terminal	499	499.000.000	99,80
2. PT Hasnur Jaya International	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	500.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jayanti Sari
 Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Tubagus Fahed Ichmar Widayasa
 Direktur : Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	204.774.282	3.897.662.850	52.745.154.321
Total Liabilitas	937.691.966	4.719.883.357	38.093.677.242
Total Ekuitas	(732.917.684)	(822.220.507)	14.651.477.079

Total Aset HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp204.774.282 turun sebesar Rp3.692.888.568 atau 04,75% dibandingkan total Aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp3.897.662.850 yang disebabkan oleh adanya *nett off* antara piutang afiliasi dengan hutang afiliasi. Total Liabilitas HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 937.691.966 turun sebesar Rp 3.782.191.391 atau 80,13% dibandingkan total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.719.883.357 yang disebabkan oleh adanya *nett off* antara hutang afiliasi dengan piutang afiliasi.

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	2.521.088.459	1.302.287.311	-
Harga Pokok Penjualan	143.921.358	585.262.094	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	228.045.933	455.328.817	(7.319.012.284)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	89.302.823	(1.473.697.586)	(5.562.473.131)

Total Penjualan HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.218.801.148 atau 93,59% dibandingkan total penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya kenaikan tarif pendapatan di tahun 2020. Hal yang sama diikuti dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.563.000.409 atau 106,06% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan di tahun 2020.

M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
PERJANJIAN DENGAN AFILIASI PERSEROAN

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE No. 016- PC. Leg/BRE//2020// HIS No. 006a/HIS-JKT-DIR-LG033.51/I-2020 ("Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE I") Sebagaimana telah diubah berdasarkan amandemen I Perjanjian pengangkutan batubara No. 016/HIS-JKT/DIR-LG03/IV/2021 tertanggal 20 April 2021	1. Perseroan; dan PT Bhumi Rantau Energi (" BRE ")	Pekerjaan pengangkutan batubara BRE dengan menggunakan dan sarana pendukung lain dari Terminal Khusus Batubara Sungai Puti ke Mother Vessel pembeli batubara BRE di Loading Point Taboneo	1 Januari 2020 - 31 Desember 2030	Rp40.000M/T
2.	Perjanjian Pengangkutan Batubara No. 017-O/C.Leg/BRE//2020 sebagaimana telah diubah melalui Amendemen I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE//2021 tertanggal 4 Januari 2021 (" Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE II ")	1. Perseroan; dan 2. BRE Hubungan Afiliasi: Hubungan Afiliasi: Perseroan dan BRE memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Pekerjaan pengangkutan batubara milik BRE untuk pasokan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari pelabuhan/jety muat di Sungai Puting.	1 Juni 2020 s/d 31 Desember 2021	<i>Bergantung pada volume batubara yang akan diangkut</i>
3.	Perjanjian Sewa Ruangan No. 001/BPD-JKT/DIR-LG0311.3/I-2017 tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Barito Putera Docking (" BPD ") (" Perjanjian Sewa Ruangan 2017 ")	1. BPD; dan 2. Perseroan Hubungan Afiliasi: Perseroan dan BPD memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Perseroan hendak menyewa ruangan dalam bangunan yang dimiliki oleh BPD	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021	Rp138.765 per meter persegi
4.	Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 0728/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Jaya Utama sebagaimana terakhir di ubah dalam Addendum pertama Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 1106a/HRT-JKT/DIR-LG035/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020	1. HRT; dan 2. HJU Hubungan Afiliasi: HJU merupakan pemegang saham HJI, yang mana HJI merupakan pemegang saham HRT	Untuk keperluan belanja modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	30 Juni 2020 - 19 Juli 2029	Rp62.481.000.000 (enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
5.	Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 0616b/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Jaya Utama	1. HRT; dan 2. HJU Hubungan Afiliasi: HJU merupakan pemegang saham HJI, yang mana HJI merupakan pemegang saham HRT	Untuk keperluan belanja modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	24 Bulan sejak 30 Juni 2020	Rp1.105.682.634. (satu miliar seratus lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
6.	Perjanjian Pinjaman antara HRT dengan PT Magma Sigma Utama ("MSU") No. 037/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020	1. HRT; dan 2. MSU Hubungan Afiliasi: HRT dan MSU memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Untuk keperluan fasilitas 1 (satu) unit mobil COP karyawan Penerima Pinjaman, sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	12 Bulan sejak 30 Juni 2020	Rp207.174.000 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
7.	Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Bongkar Muat No.1024a/HJI-JKT/DIR-LG033.6/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 antara PT Hasnur Jaya International ("HJI") dan HMS ("Perjanjian Layanan Jasa Bongkar Muat dengan HJI")	1. HMS; dan 2. HJI Hubungan Afiliasi: HJI merupakan pemegang saham dari HRT, yang mana HRT merupakan pemegang saham dari HMS	Untuk kerjasama penyediaan layanan kegiatan jasa bongkar muat	1 Desember 2020 - 31 Desember 2021	Biaya Jasa Layanan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada kisaran harga Rp750,-/MT s/d Rp1.250,-/MT.
8.	Perjanjian Jasa Manajemen No. 1026a/HRT-JKT/DIR LG033.6/XII-2020 tertanggal 1 Desember 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana ("Perjanjian Layanan Jasa Manajemen dengan HRT")	1. HMS; dan 2. HRT Hubungan Afiliasi: HRT merupakan pemegang saham HMS	Untuk keperluan penyediaan bantuan jasa manajemen, dalam pengelolaan perusahaan kegiatan bisnis HMS yaitu penumpukan & pemuatan batubara di terminal khusus Hasnur yang berlokasi di Sungai Negara, Desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan	1 Desember 2020 - 31 Desember 2021	Pembayaran kepada HRT atas Jasa adalah pada kisaran harga Rp600/MT s/d Rp.1.100/MT, selama jangka waktu Perjanjian

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
9.	Perjanjian Pengoperasian dan Perawatan Terminal Khusus Batubara Pendang No. 1002/HJ-JKT/DIR-LG033.5/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 antara PT Hasnur Jaya International dengan PT Hasnur Resources Terminal sebagaimana terakhir di ubah dalam Addendum Pertama atas Perjanjian Pengoperasian & Perawatan Terminal Khusus Batubara Pendang No. 1002/Hrt-Jkt/Dir-Lg033.5/lx-2019 (“Perjanjian Pengoperasian Tersus Pendang”)	1. HJI; dan 2. HRT Hubungan Afiliasi: HJI merupakan pemegang saham dari HRT	Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan tarsus, yaitu pemuatan kargo dan pengelolaan fasilitas penumpukan (<i>stockpile</i>) di Tersus yang dimiliki oleh HJI, mengoperasikan dan merawat <i>conveyor dan jetty</i> , sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021	Rp 21.661 per metrik ton

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pasca Bayar Penggunaan Alur Pelayaran Ambang Barito No. HK.0501/07/ABNP-2021/ No. 0129/HIS-JKT/DIR-LG031.7/11-2021 tertanggal 1 Februari 2021 (“Perjanjian Penggunaan Alur Pelayaran”)	1. Perseroan; 2. PT Ambang Barito Nusapersada (“Ambapers”); 3. PT Sarana Daya Mandiri (“SDM”).	Perseroan diberikan hak untuk menggunakan Alur Pelayaran Ambang Barito sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.	1 Februari 2018 – 31 Januari 2022	Tarif Penggunaan Jasa Alur = Jumlah Muatan x 0,30 x IDRn
2.	Perjanjian Pembuatan dan Jual Beli Kapal tanggal 08 April 2021 (“PJB Kapal Hull 385”)	1. PT Tunas Karya Bahari Indonesia (“TKBI”); dan 2. Perseroan	TKBI bersedia untuk membangun, meluncurkan, memperlengkapi dan mempersiapkan, mejual dan menyerahkan kepada Perseroan berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang baru dengan nama proyek Hull 385	150 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung sejak bentang plat pertama.	Rp27.100.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah)
3.	Perjanjian Pembangunan dan Jual-Beli 1 (satu) Unit <i>Tug Boat 28,11 Meter</i> No. 6 tanggal 8 April 2021 yang dibuat di hadapan Doktor Ilmu Hukum, Yudo Diharjo Lantanea, Sarjana Hukum, Bachelor of Engineering with Business Finance, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam (“PJB Tug Boat”)	1. PT Palma Progress Shipyard (“PPS”); dan 2. Perseroan	PPS dengan ini bersedia/setuju dan sepakat untuk membangun dan menjual Kapal sesuai spesifikasi yang dimintakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini	4 (empat) bulan sejak PPS menerima pembayaran uang muka dari Perseroan	US\$1,380,000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
4.	Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Kalimantan Prima Persada ("KPP") No. 1400A/HJU-JKT/DIR-LG 033.5/XII-2013 tertanggal 13 Desember 2013 ("Perjanjian KSO KPP")	1. HRT; dan 1. KPP	Membentuk kerja sama dalam pelaksanaan yang tercantum dalam pekerjaan KPP pada Perjanjian Pengoperasian dan Perawatan Terminal Khusus PT Hasnur Jaya Utama No. 1400/HJU-JKT/DIR-LG 033.5/XII-2013	Perjanjian ini berlaku untuk selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak	
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara Nomor: HK.0001/01/1/KUPP.Tg.Slp-2020 Nomor: 0815/HMS-JKT/DIR-LG031.3/IX-2020 antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Hansur Resources Terminal	1. HRT 1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyewakan tanah dan bangunan kepada HRT untuk keperluan penumpukan barang.	3 (tiga) tahun terhitung sejak 14 September 2020 dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang Milik Negara.	Nilai Sewa untuk Objek Sewa adalah sebesar Rp.466.785.000 (Empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
6.	Nota Kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan dengan PT Hasnur Resources Terminal No. 0408/HRT-JKT/DIR/LG033.5/IV-2020 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Regional Kalimantan tertanggal 20 April 2020	1. HRT; dan 2. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pelayanan Jasa kepelabuhan yang berada di Regional Kalimantan guna meningkatkan nilai tambah bisnis dan profit Perusahaan dari para pihak	Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak	

PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kredit No. 019/BMM/PK-KI/2018 tertanggal 28 Februari 2018 antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") Sentra Kredit Menengah Banjarmasin ("Perjanjian Kredit BNI 2018")	1. Perseroan; dan 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero).	Pembiayaan untuk 2 (dua) unit Tugboat 200Hp ukuran 28,05m x 8,60m x 4,3m dan 2 (dua) unit Tongkang ukuran 330 ft x 90 ft x 20 ft	28 Februari 2018 - 27 Februari 2023	Maksimum fasilitas pinjaman Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) Suku bunga: 12,75%
2.	Perjanjian Kredit No. 044/BMM/PK-KI/2020 tertanggal 17 Januari 2020 antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") Sentra Kredit Menengah Banjarmasin ("Perjanjian Kredit BNI 2020")	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero). 2.	Kredit Investasi dengan tujuan untuk Pembelian 1 unit Tug Boat 2x1100HP Ukuran = 29,10m x 8,60 m x 4,3 m dan Pembangunan 1 unit Tongkang Ukuran 330 ft x 90 ft x 20 ft	06 Februari 2020 – 05 Februari 2026	Maksimum fasilitas pinjaman Rp33.154.800.000 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) Suku bunga: 12%

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, nilai pinjaman (*outstanding*) per bulan Mei 2021 untuk (i) Perjanjian Kredit BNI 2018 adalah sebesar Rp6.422.980.000; dan (ii) Perjanjian Kredit BNI 2020 adalah sebesar Rp30.334.800.000.

Sehubungan dengan pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana serta ketentuan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan di dalam Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BNI yang dibuktikan dengan telah dibubuhkannya tanda tangan dari pejabat berwenang BNI sesuai dengan peraturan yang berlaku di BNI sebagaimana tercantum di dalam Surat Perseroan No. 0880/HIIS-JKT/DIR-LG072/X-2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan Ketentuan – Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Surat Bank BNI tertanggal 10 Februari 2021 No. BMM/2.5/88 Perihal Persetujuan atas Perubahan Jadwal Rencana Penawaran Umum dan Tindakan – Tindakan Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan persetujuan BNI atas hal-hal sebagai berikut (“**Waiver BNI**”):

- (i) Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan.
- (ii) Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Initial Public Offering (IPO), maupun dalam rangka sahnya, mengikatnya, dan/atau efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, mengadakan, menerbitkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh OJK, BEI, Biro Administrasi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan instansi pemerintah yang berwenang.
- (iii) Persetujuan untuk mengenyampingkan persyaratan mengenai kewajiban penyampaian pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis atas (i) perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) perubahan status perusahaan Perseroan, (iii) Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan (iv) perubahan terhadap susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan, mengingat (a) Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya akan diperdagangkan pada bursa efek dan (b) perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan diumumkan melalui keterbukaan informasi dan situs web Perseroan

Setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan tersebut di atas, maka segala hal yang timbul sebagai bentuk akibat dari dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan:

- (i) diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
- (i) perubahan komposisi pemegang saham publik di dalam Perseroan; dan
- (ii) pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pemegang saham publik.

N. ASET TETAP PERSEROAN

ASET TETAP PERSEROAN

No.	Nama Kapal dan Jenis Kapal	Nomor dan Tanggal Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Nomor Surat Laut	Keterangan
1.	Hasnur 01 – Tug Boat	No. 1226 tertanggal 7 Mei 2010	PK.674/1347/SL-PM/DK-10	Tidak Dibebankan Jaminan
2.	Hasnur 01-1 TKBI I – Tug Boat	No. 2750 tertanggal 21 Januari 2013	PK.205/604/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
3.	Hasnur 02 – Tug Boat	No. 1227 tertanggal 7 Mei 2010	PK.205/2435/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
4.	Hasnur 03 – Tug Boat	No. 1325 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2436/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
5.	Hasnur 05 – Tug Boat	No. 1326 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2437/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
6.	Hasnur 06 – Tug Boat	No. 1327 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2223/SL-PM/DK-15	Tidak Dibebankan Jaminan

No.	Nama Kapal dan Jenis Kapal	Nomor dan Tanggal Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Nomor Surat Laut	Keterangan
7.	Hasnur 07 – Tug Boat	No. 1523 tertanggal 28 Februari 2011	PK.205/2439/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
8.	Hasnur 08 – Tug Boat	No. 2449 tertanggal 22 September 2011	PK.205/2440/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
9.	Hasnur 09 – Tug Boat	No. 2782 tertanggal 4 April 2012	PK.205/2441/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
10.	Hasnur 10 – Tug Boat	No. 2377 tertanggal 2 Juli 2012	PK.205/603/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
11.	Hasnur 11 – Tug Boat	No. 4672 tertanggal 6 Maret 2018	PK.205/568/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
12.	Hasnur 101 – Tongkang	No. 2749 tertanggal 21 Januari 2013	PK.205/604/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
13.	Hasnur 12 – Tug Boat	No. 2377 tertanggal 2 Juli 2012	AL.520/39/2/DK/2020	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
14.	Hasnur 301 – Tongkang	No. 1248 tertanggal 27 Mei 2010	PK.205/2532/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
15.	Hasnur 302 – Tongkang	No. 1247 tertanggal 27 Mei 2010	PK.205/2533/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
16.	Hasnur 303 – Tongkang	No. 1332 tertanggal 9 Agustus 2010	PK.205/2534/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
17.	Hasnur 305 – Tongkang	No. 1333 tertanggal 9 Agustus 2010	PK.205/2535/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
18.	Hasnur 306 – Tongkang	No. 1403 tertanggal 9 November 2010	PK.205/2536/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
19.	Hasnur 307 – Tongkang	No. 1473 tertanggal 12 Januari 2011	PK.205/1173/SL-PM/DK-15	Tidak Dibebankan Jaminan
20.	Hasnur 308 – Tongkang	No. 2448 tertanggal 22 September 2011	PK.205/2539/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
21.	Hasnur 309 – Tongkang	No. 2783 tertanggal 4 April 2012	PK.205/2538/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
22.	Hasnur 310 – Tongkang	No. 2998 tertanggal 5 Juni 2013	PK.205/3075/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
23.	Hasnur 331 – Tongkang	No. 4797 tertanggal 8 Juni 2018	PK.205/1137/SL-PM/DK-18	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
24.	H332 – Barge	No. 5722 tertanggal 12 Mei 2020	AL.520/52/13/DK/2020	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020

Aset tetap Perseroan yang disebutkan pada table di atas merupakan kapal tunda dan kapal tongkang milik Perseroan yang digunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan. Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.909.554.164.

O. ASURANSI PERSEROAN

 1. Asuransi Marine Hull and Machinery FPG

No	Nama Polis/Cover Note	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Jumlah Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Marine Hull and Machinery Insurance						
1.	Polis No. FPG.14.0401.20.00796 tanggal 27 Oktober 2020 (" Polis FPG 796 ")	Perseroan	25 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021		Rp17.958.000.000	Hasnur 02 dan Hasnur 302
2.	Polis No. FPG.14.0401.20.00795 tanggal 27 Oktober 2020 (" Polis FPG 795 ")	Perseroan	14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021		Rp66.736.000.000	Hasnur 01, Hasnur 301, Hasnur 03, Hasnur 303, Hasnur 08, dan Hasnur 308
3.	Polis No. FPG.14.0401.20.00733 tanggal 27 Oktober 2020 (" Polis FPG 733 ")	Perseroan	20 September 2020 – 20 September 2021	-	Rp18.312.000.000	Hasnur 05 dan Hasnur 305
4.	Polis No. FPG.14.0401.20.00859 tanggal 27 November 2019 (" Polis FPG 859 ")	Perseroan	23 November 2020 – 23 November 2021		Rp20.000.000.000	Hasnur 06 dan Hasnur 306
5.	Cover Note No. 013-MHL-IV-2021 (" Cover Note FPG 013 ")	Perseroan	19 April 2021 – 19 April 2022		Rp40.296.000.000	Hasnur 07 dan Hasnur 307
6.	Cover Note No. 012-MHL-IV-2021 (" Cover Note FPG 012 ")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp14.298.000.000	Hasnur 10
7.	Cover Note No. 219/CN/MH/2021 tanggal 3 Agustus 2021 (" Cover Note FPG 219 ")	Perseroan	14 Agustus 2021 – 14 Agustus 2022		Rp20.000.000.000	Hasnur 310
8.	Cover Note No. 214/CN/MH/2021 tanggal 27 Juli 2021 (" Cover Note FPG 214 ")	Perseroan	27 Juli 2021 – 27 Juli 2022		Rp39.997.000.000	Hasnur 09 dan Hasnur 309
(Polis FPG 796, Polis FPG 795, Polis FPG 733, Polis FPG 859, Cover Note FPG 013, Cover Note FPG 012, Polis FPG 555, dan Polis FPG 530 untuk selanjutnya disebut sebagai – " Asuransi Marine Hull and Machinery ")						

2. Asuransi Marine Hull and Machinery TRIPA

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Jumlah Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Marine Hull and Machinery Insurance						
1.	Polis No. 21204012100009 tanggal 12 Maret 2021 ("Polis Tripa 009 Hasnur 11")	Perseroan	1 Maret 2021 – 1 Maret 2022	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp17.555.200.000	Hasnur 11
2.	Polis No. 21204012100013 tanggal 21 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 12")	Perseroan	21 April 2021 – 21 April 2022		Rp20.164.000.000	Hasnur 12
3.	Polis No. 21204012100014 tanggal 15 Mei 2021 ("Polis Tripa Hasnur 332")	Perseroan	15 Mei 2021 – 15 Mei 2022		Rp27.200.000.000	Hasnur 332
4.	Polis No. 11204012100008 tanggal 10 Mei 2021 ("Polis Tripa Hasnur 331")	Perseroan	9 Mei 2021 – 9 Mei 2022		Rp25.000.000.000	Hasnur 331
5.	Polis No. 11204012100007 tanggal 14 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 01-1 Ex TKBI I")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp3.940.000.000	Hasnur 01-1 Ex TKBI I
6.	Polis No. 11204012100006 tanggal 9 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 101")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp6.090.000.000	Hasnur 101
7.	Cover Note No. 219/CN/MH/2021 tanggal 3 Agustus 2021 ("Cover Note FPG 219")	Perseroan	14 Agustus 2021 – 14 Agustus 2022		Rp20.000.000.000	Hasnur 310
8.	Cover Note No. 214/CN/MH/2021 tanggal 27 Juli 2021 ("Cover Note FPG 214")	Perseroan	27 Juli 2021 – 27 Juli 2022		Rp39.997.000.000	Hasnur 09 dan Hasnur 309
(Polis Tripa 006, Polis Tripa 009, Polis Tripa 010, Polis Tripa 015, Polis Tripa 016, Polis Tripa 018, Polis Tripa 01-1 Ex TKBI I, dan Polis Tripa Hasnur 101 untuk selanjutnya disebut sebagai – "Asuransi Marine Hull and Machinery Tripa")						

3. Asuransi Wreck Removal (Penyingkiran Kerangka Kapal)

No	Nomor Sertifikat	Kapal	Pemilik Kapal	Jangka Waktu	Penanggung	Limit
Asuransi Tugu						
1.	A-2021-01778	Hasnur - 01		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
2.	A-2021-01772	Hasnur - 02		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
3.	A-2021-01775	Hasnur - 03	Perseroan	10 April 2021 – 10 April 2022	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk ("Asuransi Tugu")	USD3.000.000
4.	A-2021-01780	Hasnur - 05		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
5.	A-2021-01784	Hasnur - 06		10 April 2021 –		USD3.000.000

No	Nomor Sertifikat	Kapal	Pemilik Kapal	Jangka Waktu	Penanggung	Limit
				10 April 2022		
6.	A-2021-01785	Hasnur - 07		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
7.	A-2021-01786	Hasnur - 08		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
8.	A-2021-01787	Hasnur - 09		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
9.	A-2021-01788	Hasnur - 10		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
10.	K-2021-00360	Hasnur - 12		21 April 2021 – 21 April 2022		USD3.000.000
11.	A-2021-01792	Hasnur - 301		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
12.	A-2021-01789	Hasnur - 302		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
13.	A-2021-01790	Hasnur - 303		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
14.	A-2021-01791	Hasnur - 305		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
15.	A-2021-01793	Hasnur - 306		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
16.	A-2021-01794	Hasnur - 307		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
17.	A-2021-01795	Hasnur – 308		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
18.	A-2021-01796	Hasnur - 309		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
19.	A-2021-01797	Hasnur - 310		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
Asuransi Tri Pakarta						
20.	K-2021-00358	Hasnur - 11	Perseroan	1 April 2021 – 1 April 2022	PT Asuransi Tri Pakarta ("Asuransi Tri Pakarta")	USD3.000.000
21.	K-2021-00362	Hasnur - 331		31 Mei 2021 – 31 Mei 2022		USD5.000.000
22.	K-2021-00361	Hasnur – 332		15 Mei 2021 – 15 Mei 2022		USD5.000.000
23.	K-2021-00364	Hasnur - 101		1 April 2021 – 1 April 2022		USD3.000.000
24.	K-2021-00365	Hasnur 01 - 1 Ex. TKBI 1		1 April 2021 – 1 April 2022		USD3.000.000

Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai dan dilengkapi dengan *Banker's Clause* untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan.

P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

- a. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak sedang tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
- b. Lebih lanjut masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

R. KECENDERUNGAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN SECARA SIGNIFIKAN

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Didirikan pada Desember 2009, Perseroan adalah bagian dari bisnis Hasnur Group yang dulu didirikan oleh Alm. Bapak H. Abdussamad Sulaiman HB dan Alm. Ny. Hj. Nurhayati pada 27 Agustus 1966. Perseroan memulai bisnis jasa logistik dengan transportasi laut di Barito Sungai yang bertujuan mendukung Industri Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perseroan telah mendapatkan izin untuk beroperasi.

Pada saat ini HIS melakukan pengembangan dan modernisasi dengan adanya armada tugboat and barge bagi komoditi batubara antar perairan nasional maupun internasional. HIS juga mengembangkan lini usaha dengan anak perusahaan PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, bongkar, dan muat pelabuhan. HIS memiliki memiliki 12 set kapal tunda (tug boat) dan tongkang dengan kapasitas 7500 – 10.000 MT, termasuk satu set kapal tunda dan tongkang angkut minyak sawit mentas. Total angkutan laut yang dikelola Perseroan sekitar 6 juta metrik ton.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang amanah dan terintegrasi dengan reputasi Internasional, yang membawa manfaat dan kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan dunia. Untuk mencapainya, berikut merupakan misi yang diterapkan Perseroan:

- Memberikan pelayanan terbaik, aman, tepat waktu dan efisien bagi pelanggan
- Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di setiap kegiatan operasional dengan tata kelola perusahaan dan keselamatan yang baik
- Mengikuti dinamika usaha logistik dan pelayaran, serta mengembangkan sumber daya mutakhir dan kompetitif
- Memberikan komitmen kepada prinsip usaha berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sekitar

Perseroan memulai perjalanan usaha penyedia jasa angkutan laut industri pertambangan batubara di Indonesia, khususnya di pulau Kalimantan. Perseroan melengkapi rantai suplai logistik batubara Hasnur Group mulai dari tambang, infrastruktur

dan fasilitas darat, sungai dan laut. Integrasi ini menyebabkan Perseroan mampu mendukung usaha Hasnur Group secara efektif dan efisien.

Saat ini Perseroan sedang menambah dan melakukan modernisasi keberadaan armada tugboat dan barge untuk komoditas batubara laut nasional dan internasional. Perseroan juga mengembangkan usaha bersama dengan anak perusahaan HRT dan HMS yang bergerak di bidang pengelolaan, bongkar muat dan jasa kepelabuhanan.

Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan telah melakukan restrukturisasi kepemilikan saham dan investasi atas Entitas Anak dengan mengkonsolidasi laporan keuangan HRT dan HMS sejak periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian secara komersial, Perseroan menjalankan usaha jasa transportasi perkapalan dan operator pelabuhan khususnya yang mendukung kegiatan pertambangan dan perdagangan komoditas hasil sumber daya alam.

Berikut ini dijelaskan secara terperinci kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan bersama dengan Entitas Anak

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
Perseroan	Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan Pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatormya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya
HRT	berusaha dalam bidang kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.	<ul style="list-style-type: none"> menjalankan usaha di bidang pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan
HMS	bidang pengangkutan dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> Angkutan bermotor untuk barang umum; Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer. Angkutan bermotor untuk barang khusus; Menjalankan kegiatan usaha untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya. • Aktivitas bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikat; Menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari Pabean yang dengan peraturan pemerintah yang diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam. • Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau; Menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. • Penanganan bongkar muat barang; Menjalankan kegiatan usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. • Jasa pengurusan transportasi (JPT); Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. • Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL); Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut. • Angkutan multimoda; Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada peneroma barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai tujuan, tetapi juga memberikan jasa

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
		<p>tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, seperti jasa pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan membagi tiga garis besar strategi usaha yaitu peningkatan efisiensi dengan meningkatkan efisiensi operasional dan perbaikan komposisi penggunaan asset sendiri, perbaikan integrasi moda angkutan laut dengan melakukan akuisi dan pengelolaan pelabuhan dan bongkar muat, dan peningkatan kepastian keberlanjutan usaha dengan mengembangkan sumber komoditas angkut dan moda integrasi. Perseroan tetap patuh pada peraturan perundangan dan keselamatan yang berlaku, serta tetap mendukung pemanfaatan teknologi.

Perseroan berupaya menjalankan strategi tersebut dengan menyusun rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Memperbaiki kinerja operasional dengan mengurangi pemborosan operasional (*waste*), memperbaiki komposisi penggunaan armada antara *Rent Ship* dan *Own Ship*, meningkatkan pemanfaatan kapasitas angkut kapal muat sekali jalan, menggunakan teknologi untuk memonitor pengoperasian armada, dan mengurangi risiko waktu tunggu terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal,
2. Melakukan akuisisi fasilitas dan infrastruktur terminal khusus batubara di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk memastikan tingkat utilisasi aset Perseroan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola rantai suplai, melakukan investasi pada anak perusahaan untuk peralatan bongkar muat sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki tingkat utilisasi dan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada aset Perseroan
3. Melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan pemilik konsesi batubara di Kabupaten Tapin, dan juga dengan perusahaan pemegang konsesi tambang atau pemilik komoditas lain (andesit, pasir dan/atau komoditas lainnya), membangun fasilitas logistik untuk mengamankan dan menambah kargo jangka panjang, serta menerapkan standar manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan, pada seluruh lini operasional Perseroan dan Entitas Anak.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan berencana membagi tiga garis besar strategi usaha yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dengan memperbaiki kinerja operasional dengan mengurangi pemborosan operasional, memperbaiki komposisi penggunaan armada antara *Rent Ship* dan *Own Ship*, meningkatkan pemanfaatan kapasitas angkut kapal muat sekali jalan, menggunakan teknologi untuk memonitor pengoperasian armada, dan mengurangi risiko waktu tunggu terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal;
2. Perbaikan integrasi moda angkutan laut dengan melakukan akuisisi fasilitas dan infrastruktur terminal khusus batubara di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk memastikan tingkat utilisasi aset Perseroan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola rantai suplai, melakukan investasi pada anak perusahaan untuk peralatan bongkar muat sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki tingkat utilisasi dan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada aset Perseroan;
3. Peningkatan kepastian keberlanjutan usaha dengan Melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan pemilik konsesi batubara di Kabupaten Tapin, dan juga dengan perusahaan pemegang konsesi tambang atau pemilik komoditas lain (andesit, pasir dan/atau komoditas lainnya), mengembangkan tambang baru dan/atau melakukan akuisisi perusahaan pemegang konsesi tambang, membangun fasilitas logistik untuk mengamankan dan menambah kargo jangka panjang, serta menerapkan standart manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan, pada seluruh lini operasional Perseroan dan Entitas Anak.

FASILITAS KAPAL DAN TERMINAL KHUSUS

Fasilitas Kapal

Perseroan memiliki beberapa armada sebagai berikut spesifikasi:

12 Set Tug And Barge :

• 1 unit Kapal Tunda 2400 HP

Ship Type : twin screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : BKI
 Main Engine : 2 x 895 KW, Cummins KTA 38 M2

• 2 unit Kapal Tunda 2200 HP

Ship Type : Twin Screw Tug
 Flag : Indonesia
 Class : 1 BKI, 1 NK
 Main Engine : - 2 x 837kW (YANMAR 6EY17W)
 - 2 x YANMAR, Type 12LAKM-STE2

• 8 unit Kapal Tunda 2000 HP

Ship Type : twin screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : 7 BKI, 1 NK
 Main Engine : - 7 units, 2 x Mitsubishi, Type S6R2 – MTK 3L
 - 1 units, 2 x YANMAR, Type 6RY17P-GV

• 1 unit Kapal Tunda 700 HP

Ship Type : Twin Screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : BKI
 Main Engine : 2 x Weichai, Type R616OZC2

• 2 unit Tongkang berkapasitas 10.000 MT: 330 feet; BKI Class

• 9 unit Tongkang berkapasitas 7.500 MT: 300 feet; BKI Class

• 1 unit Tongkang berkapasitas 500 MT: BKI Class, double hull, double bottom, with steam boiler Fulton Type

Terminal Khusus

Berikut adalah keterangan terkait tiga Terminal Khusus Batubara yang dikelola oleh entitas anak Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	Tersus Batubara Sungai Puting (R)	Tersus Batubara Sungai Pendang
Kepemilikan Atas Nama Nama Operator	PT Hasnur Jaya International PT Kalimantan Prima Persada*	PT Hasnur Jaya International PT Kepid Technology*	PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Resources Terminal**
Tahun Kerjasama dengan Operator	01/01/2014	30/10/2014	01/09/2019
Tahun Berakhirnya Kerjasama dengan operator	31/12/2024	01/05/2024	31/12/2020
Keterangan lebih lengkap terkait dengan Kerjasama/kontrak dengan operator	Perjanjian efektif berlaku untuk jangka waktu selama 10 Tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan akan dilakukan peninjauan kembali (riview) pada akhir tahun ke 5.	Perjanjian ini berlaku selama jangka 5 Tahun sejak 30 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2019, dan perjanjian ini di addendum mengenai jangka waktu perjanjian dimulai sejak 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2024.	Perjanjian ini berlaku dan diperpanjang tiap tahun sehingga untuk tahun 2021 dibuatkan perjanjian baru
Kapasitas Stockpile Tersus (ton)	140.000	60.000	60.000
Kapasitas Barge Loader	5.000 TPH	2.000 TPH	2.000 TPH

*) Pada dua tersus diatas, Sungai Puting HJUK dan R HRT bertindak sebagai Pengawas Operator sedangkan operator pada tersus tersebut dioperasikan oleh pihak ketiga.

***) PT Hasnur Jaya Utama menunjuk PT Hasnur Jaya International untuk mengoperasikan tersus batubara Sungai Pendang yang kemudian HRT ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT Hasnur Jaya International.

Berikut adalah keterangan bagi hasil yang didapatkan oleh HRT dengan operator:

Fee Batubara	2017	2018	2019	31 Desember 2020
Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	Rp 875/MT	Rp 833/MT	Rp 1.125/MT	Rp 1.500/MT
Tersus Batubara Sungai Puting (R)	Rp 1.000/MT	Rp 917/MT	Rp 1.125/MT	Rp 1.500/MT
Tersus Batubara Sungai Pendang	-	-	Rp 21.162/MT	Rp 21.162/MT
Total	Rp 1.875/MT	Rp 1.750/MT	Rp 23.412/MT	Rp 24.162/MT

Berikut adalah keterangan volume Batubara yang melewati Terminal Khusus:

Volume Batubara	2017	2018	2019	31 Desember 2020
Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	6.687.773	7.180.779	5.801.854	5.297.289
Tersus Batubara Sungai Puting (R)	978.238	4.352.627	6.518.396	3.323.510
Tersus Batubara Sungai Pendang	-	-	4.472	92.954
Total	7.666.011	11.533.405	12.324.722	8.713.753

Keunggulan Kompetitif Perseroan

- **Penyedia jasa angkutan laut untuk komoditas pertambangan dan sumber daya alam yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur Pelabuhan**

Perseroan merupakan anggota dari grup usaha yang merupakan penyedia jasa yang terintegrasi mulai dari pertambangan batubara, kontraktor pertambangan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan, baik di *point of loading* maupun *discharging* sampai dengan penyediaan jasa pengangkutan baik melalui jalur darat maupun jalur laut sebagaimana yang dilaksanakan oleh Perseroan saat ini.

Perseroan beroperasi di kawasan pusat pertambangan batubara nasional di wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga Perseroan dapat memperoleh pasar yang pasti dan berkelanjutan karena lokasi strategis ini, yang juga didukung oleh penyediaan jasa dan fasilitas infrastruktur yang terintegrasi. Kondisi ini juga membuka peluang pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.

- **Captive market hasil sinergi usaha dengan Hasnur Group yang membuka peluang pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga diperkuat dari grup usaha yang menaunginya, yaitu Hasnur Group. Hasnur Group sudah berdiri sejak tahun 1966, dan saat ini memiliki banyak anak usaha yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya sehingga menciptakan harmonisasi bisnis serta memajukan usaha yang dijalankan satu sama lain.

Dengan pengalaman serta dukungan dari semua pihak dan pemangku kepentingan di Hasnur Group, maka membuka jalan yang sangat luas dalam hal pengembangan usaha Perseroan. Selain memiliki internal *source of cargo* serta rencana kedepan Perseroan untuk mengembangkan usahanya serta anak usahanya untuk pengelolaan pelabuhan curah kering, serta komoditas lainnya yang memungkinkan.

- **Operasional usaha perkapalan tongkang yang didukung dengan armada yang efisien dengan pengaplikasian sistem *tracker navigasi***

Sejak didirikan pada tahun 2009 sampai dengan saat ini Perseroan telah memiliki 11 (sebelas) set kapal tunda dan tongkang dan satu set kapal tunda dan tongkang untuk minyak sawit mentah. Hampir seluruh kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan juga telah dilengkapi dengan peralatan dan system navigasi yang modern. Dalam menjalankan kegiatan

usahanya, Perseroan didukung dengan armada berukuran 300 serta 330 yang efisien dan dilengkapi dengan teknologi ship.loc. sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Perseroan telah memiliki keahlian dan pengalaman operasional yang mendalam di bidang usaha ini. Dengan bekal armada yang kuat serta pengalaman yang dimiliki, Perseroan telah berhasil membangun reputasi dan *track record* yang baik serta memungkinkan Perseroan memiliki keunggulan dalam memperoleh kontrak jangka Panjang dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka.

- **Peluang perluasan usaha dibidang jasa kepelabuhanan yang didukung dengan legalitas ijin usaha serta standarisasi**

Perseroan memiliki anak usaha yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Sebagai pemegang Ijin Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP), HRT sebagai anak usaha Perseroan menjadi mata rantai yang tidak kalah penting dalam pengembangan usaha yang lebih luas lagi. Selain itu, anak usaha Perseroan lainnya adalah HMS yang merupakan perusahaan bongkar muat. Dengan hasil sinergi antara Perseroan serta anak usaha, integrasi rantai suplai logistik antar moda ini dapat membawa pengembangan usaha ke arah yang lebih luas lagi.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu taat dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Selain itu Perseroan juga berusaha memenuhi dan memiliki sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan usahanya. Saat ini Perseroan sedang dalam proses sertifikasi ISM Code serta ISO 9001/2015 dan 45001/2018 yang masih dalam proses. Perseroan selama menjalankan kegiatan usahanya menunjukkan rekam jejak baik dalam mutu pelayanan, serta pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

- **Kepemimpinan dari tim Manajemen yang berpengalaman di industri**

Perseroan memiliki tim manajemen yang kuat dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pelayaran angkutan batubara sehingga kegiatan pemasaran, operasional dan kinerja Perseroan dapat dikelola dengan baik dan efisien. Perseroan juga ditunjang oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan nautika kapal pelayaran niaga, teknik mesin kapal pelayaran niaga, serta ketaatlaksanaan angkatan laut dan pelabuhan, yang menunjang segala kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran.

Adapun Sertifikasi yang dimiliki crew di darat dan di laut sebagai berikut:

Daftar Ijazah Sertifikat Crew Bagian Deck / Engine

1. Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I (untuk perwira deck)
2. Ahli Teknika Tingkat IV s/d Ahli Teknika Tingkat I (untuk perwira mesin)
3. Endorsement Ijazah untuk perwira deck dan mesin
4. Rating dan Ahli Nautika Tingkat V (untuk bawahan deck)
5. Rating dan Ahli Teknika Tingkat V (untuk bawahan mesin)

Daftar Sertifikat Keahlian Untuk semua Crew Deck & Engine

1. Basic Safety Training (BST)
2. SCRB (Survival Craft and Rescue Boats)
3. AFF (Advanced Fire Fighting)
4. MFA (Medical First Aid)
5. MC (Medical Care)
6. SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan)
7. SDS (sertifikat keterampilan tugas keamanan)

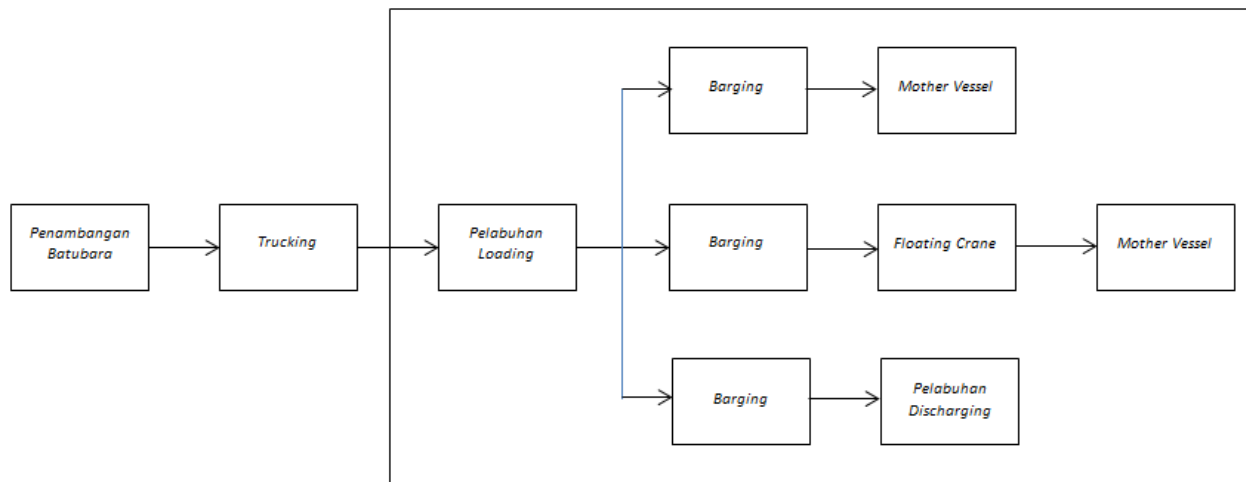
Daftar Sertifikat keterampilan terkait kompetensi

1. RADAR Simulator untuk Perwira Deck
2. ARPA Simulator untuk Perwira Deck
3. ECDIS Simulator untuk Perwira Deck
4. GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) untuk Perwira Deck
5. BRM (Bridge Resource Management) untuk Perwira Deck
6. ERM (Engine Resource Management) untuk Perwira Engine
7. SSO (Ship Security Officer) untuk Perwira Deck & Engine
8. ISM Code untuk Perwira Deck & Engine
9. ORU (Operator Radio Umum) untuk Perwira Deck

Daftar pengalaman tim manajemen

1. Sertifikat Internal Audit
2. Sertifikasi K3
3. Designated Person Ashore (DPA)

3. Operasional Persewaan Kapal Perseroan Oleh Pelanggan



Batubara dibawa dari tambang melalui trucking ke stock pile

- a. Dari stockpile, batubara akan dipindahkan ke tongkang
- b. Apabila transshipment, batubara akan dibawa melalui tongkang ke kapal besar.
- c. Apabila kapal besar memiliki crane sendiri, maka tongkang akan langsung tender di samping kapal besar, dan pemindahan batubara menggunakan crane milik kapal besar
- d. Apabila kapal besar tidak memiliki crane, maka menggunakan floating crane untuk memindahkan batubara dari tongkang ke kapal besar
- e. Apabila near coastal atau long towing, maka pengangkutan batubara akan melalui tongkang langsung ke pelabuhan tujuan

Jumlah Fasilitas	31 Des 2016	31 Des 2017	31 Des 2018	31 Des 2019	31 Des 2020
Kapal tunda	9		1		1
Tongkang	9		1		1
Jumlah kapasitas angkut	300ft (7.500MT)		330ft (10.000MT)		330ft (10.000MT)

Berikut ini adalah beberapa data teknis atas aset persewaan kapal Perseroan:

NAMA KAPAL	JENIS	MESIN	HP	LOA (m)	L (m)	B (m)	D (m)	GRT
TB HASNUR 01	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 02	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 03	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 05	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 06	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 07	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,06	8,6	4,12	266
TB HASNUR 08	Kapal	Yanmar 12 LAKM-STE2	2 x 1100	27	24,97	8,2	4	207
TB HASNUR 09	Kapal	Yanmar 6RY17P-GV	2 x 1000	27	24,97	8,2	4	207
TB HASNUR 10	Kapal	Cummins KTA 38 M2	2 x 1200	31,1	28,96	9,5	4,2	296
TB HASNUR 11	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	28,05	25,74	8,6	4,3	239
TB HASNUR 12	Kapal	Yanmar 6EY17W	2 x 1100	29,11	25,859	8,6	4,3	270
BG HASNUR 301	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3078
BG HASNUR 302	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3063
BG HASNUR 303	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089

NAMA KAPAL	JENIS	MESIN	HP	LOA (m)	L (m)	B (m)	D (m)	GRT
BG HASNUR 305	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 306	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 307	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 308	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3107
BG HASNUR 309	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3103
BG HASNUR 310	Tongkang			91,43	87,78	24,38	5,49	3077
BG HASNUR 331	Tongkang			100,58	96,58	27,43	6,09	4138
BG HASNUR 332	Tongkang			100,58	96,58	27,43	6,09	4249
TB HASNUR 01-1	Kapal	Weichai Type R6160ZC2	2 x 347	13,8	13,78	5	2,5	38
BG HASNUR 101	Oil Barge			44,2	42,43	12,8	2,44	307

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIMILIKI

- *Port to port (near costal)* adalah pelayaran dari pelabuhan muat langsung ke pelabuhan bongkar
- *Port to MV (transhipment)* adalah pelayaran dari pelabuhan muat ke kapal besar / ship-to-ship

4. Operasional Jasa Yang Terkait Kepelabuhanan

Kegiatan Operasional Jasa Kepelabuhanan yang dijalankan oleh PT Hasnur Mitra Sarana (HMS) berlokasi di kawasan pelabuhan Sungai Puting, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa kegiatan/aktivitas yang dilakukan HMS adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Di Stockpile Batubara
 - Penumpukan batubara di stockpile menggunakan Wheel Loader
 - Penyiraman area stockpile menggunakan water truck
2. Kegiatan Loading Ke Tongkang
 - Pemuatan batubara dari stockpile menggunakan Wheel Loader ke Hopper Conveyor
3. Penyandaran Tongkang
 - Pekerjaan penyandaran tongkang ke Pelabuhan
 - Melakukan assist tongkang dengan menggunakan tugboat yang sandar di Pelabuhan

5. Teknologi Informasi

- Shiploc CLS Argos Tracking
CLS Argos mengeluarkan produk Shiploc, yaitu system monitoring lokasi kapal berbasis satelit. Produk ini menawarkan informasi kapal, berupa kecepatan, arah, kondisi laut, arah angin, tinggi gelombang, dan sebagainya. Sistem ini juga berfungsi sebagai perangkat GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), yaitu Sistem Keselamatan Maritim Global, sebagai bagian dari sistem peralatan dan protokol komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah pertolongan bagi kapal dan pesawat terbang yang mengalami bencana. Sistem ini akan menyebarkan peringatan ke semua pihak yang berwenang apabila kapal mengalami bencana atau terancam.
- Citrack - RPM monitoring vessel
Adalah system monitoring rpm mesin berbasis satelit. Dengan mengetahui rpm yang digunakan kapal, perusahaan bisa mengetahui seberapa besar effort kapal untuk berusaha mencapai tujuannya. Informasi yang diberikan berupa rpm kapal, kecepatan, arah, dan diferensiasi status kapal berdasar warna.
- *Automatic Identification System (AIS)* kelas B
AIS adalah singkatan dari *Sistem Identifikasi Otomatis* yaitu *sistim* yang dapat memberikan informasi tentang data-data tentang kapal ke kapal lain.

AIS bekerja dengan menggunakan frekuensi sangat tinggi (*Very High Frequency* – VHF), yaitu antara 156 – 162 MHz . Sistik Yang ADA Beroperasi Sales manager ADA 2 Beroperasi, Yaitu: AIS Kelas A Dan AIS Kelas B .

DESKRIPSI	AIS Kelas A	AIS Kelas B
Skema akses komunikasi	SO-TDMA (Akses Beberapa Divisi Waktu yang Diatur Sendiri)	CS-TDMA (<i>Carrier-sense Time Division Multiple Access</i>)
Daya Pancar	12,5 watt	2 watt
Menyampaikan laporan	10 detik	30 detik
Mengirimkan nomor IMO	YA	TIDAK
Mengirim ETA atau tujuan kapal	YA	TIDAK
Mengirim status navigasi	YA	TIDAK
Pesan Tertulis	dapat mengirim dan menerima (dua arah)	Hanya menerima (satu arah)
Pesan-pesan biner	dapat mengirim dan menerima (dua arah)	Hanya menerima (satu arah)
Informasi <i>Tingkat giliran</i> kapal	HARUS	TIDAK HARUS
Mengirim sarat kapal (<i>konsep statis hadir maksimum</i>)	HARUS	TIDAK HARUS

- Perseroan menggunakan sistem ERP berbasis SAP (System Application Product) modul FICO, MM, PM & HR untuk mengintegrasikan tiap bagian agar dapat berjalan secara optimal dan lebih efisien. Modul FICO (Finance and Control) menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas dan ledger umum yang bertujuan membuat laporan keuangan, akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting. Modul MM (Materials Management) digunakan untuk mengelola inventory perseroan dan proses pembelian atau pengadaan (Procurement) yang memungkinkan mengawasi, merencanakan pergerakan inventory serta pengadaan inventory. Modul PM (Plant Maintenance) membantu perseroan untuk pemeliharaan asset yang kegiatannya terdiri dari Preventive Maintenance (Docking Schedule), Repair / Corrective Maintenance, Inspection dan kegiatan teknik lainnya yang diperlukan untuk menjaga asset / kapal agar dapat bekerja dengan baik.. Modul HR (Human Resources) membantu dalam mengelola data personal karyawan, proses payroll, dan mengelola kompensasi.

6. Sistem Manajemen Mutu

Perseroan menerapkan sistem manajemen pengelolaan melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam prosedur-prosedur standar (SOP) atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pelayaran, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi, pemerintah, maupun aturan-aturan dari IMO, Solas atau konvensi-konvensi pelayaran internasional Perseroan juga melaksanakan kegiatan audit baik internal maupun eksternal secara berkala untuk menjamin agar prosedur tersebut berjalan dengan benar.

9. Sistem Manajemen Keselamatan

Perseroan memberikan perhatian yang mendalam terhadap keselamatan kerja, mengingat sifat operasional Perseroan yang sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan, keselamatan manusia, barang dan lingkungan. Perseroan memiliki Divisi HSSE (*Health, Safety, Security & Environment*) yang Menyusun standar operasi perusahaan yang aman bagi manusia, barang dan lingkungan. Organisasi ini dilengkapi dengan para *safety officer* di lapangan yang mengawasi dan menjaga agar sistem tersebut dijalankan dengan benar. Untuk itu, Perseroan juga telah menerapkan Sistem Keselamatan Internasional bagi operasi pelayaran dengan mengadopsi ISM-Code, sebuah sistem yang menjamin bahwa semua operasi pelayaran dan prosedurnya mengedepankan keselamatan manusia, barang dan lingkungan. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan sertifikat dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan audit untuk manajemen keselamatan secara berkala, baik eksternal maupun internal.

10. Pelanggan Perseroan

Pelanggan utama perseroan dapat digambarkan melalui *chart* dan tabel dibawah. Pada tahun 2020, sebanyak 62% dari total penjualan Perseroan didapatkan dari PT Bhumi Rantau Energi (Rp 183.883.383.405). Sedangkan pelanggan utam ke-2 dan ke-3 adalah PT Energi Batubara Lestari dan PT Kreasi Energi Alama sebesar 14% dan 10%.



Customer	31 Desember 2020	
	Sales	Portion of Net Sales
PT Bhumi Rantau Energi	183.883.383.405	62%
PT Energi Batubara Lestari	41.440.957.075	14%
PT Kreasi Energi Alam	35.040.056.047	12%
PT Pelita Samudera Shipping Tbk	9.312.632.004	3%
PT Sumber Rezeki Samudra Jaya	5.130.677.467	2%
Others	19.691.377.226	7%
Total	294.499.083.224	100%

Contract	31 Desember 2020	
	Sales	Portion of Net Sales
Contract Based on SPAL (spot basis)	110.615.699.819	38%
Long Term Contract	183.883.383.405	62%
Total	294.499.083.224	100%

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 5 (lima) pelanggan terbesar yang pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 secara keseluruhan mewakili 93% dari total penjualan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk mengurangi ketergantungan pada pelanggan terbesar, Perseroan senantiasa secara aktif melakukan diversifikasi penjualan bersih dengan mengakuisisi pelanggan baru, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik untuk pelanggan eksisting maupun pelanggan baru yang akan datang.

TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan entitas anak sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perseroan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”) di dalam mekanisme operasional Perseroan untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dari Perseroan dan mengoptimalkan *shareholder value* yang berkaitan erat dengan bisnis Perseroan untuk jangka panjang.

Pengawasan tata kelola Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Direksi dipercaya untuk melakukan Pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan dan entitas anak. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka seperti sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan pemegang saham dan pemangku kepentingan atas setiap informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan berkaitan dengan kondisi Perseroan dan entitas anak.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Untuk meningkatkan kinerja Perseroan, untuk melindungi kepentingan stakeholders Perseroan, dan untuk meningkatkan pemenuhan hukum dan peraturan, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Perseroan menetapkan target pertumbuhan bisnisnya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan bergantung pada kepercayaan dari masyarakat sekitar tempat bisnis Perseroan, maka kepercayaan seperti itu perlu dipertahankan dengan meningkatkan kinerja Perseroan, efisiensi dan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian. Implementasi tata Kelola perusahaan yang baik juga penting untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aspek dari kegiatan bisnis Perseroan merupakan sebuah keharusan untuk bisa mendukung upaya untuk membangun organisasi yang bersaing dengan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan berkualitas. Untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik melalui pembentukan kebijakan internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai langkah konkret Perseroan dalam tanggung jawab sosial, Hasnur Centre merupakan organisasi yang fokus pada tanggung jawab sosial. Yayasan Hasnur Centre merupakan sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh almarhum Haji Abdussamad Sulaiman HB di Banjarmasin dan diresmikan pada tanggal 21 April 2010. Yayasan Hasnur Centre didirikan sejalan dengan komitmen founder terhadap masyarakat Banua dan terus berupaya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Banua yang mandiri dan sejahtera. Pengembangan program dan kegiatan Yayasan Hasnur Centre terus dilaksanakan hingga saat ini keberadaannya diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Banua sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh Yayasan Hasnur Centre yakni "Bakti untuk Banua". Program kerja yang dijalankan dan dikembangkan Yayasan Hasnur Centre meliputi:

1. Bidang sosial, keagamaan, dan kelembagaan
2. Bidang pendidikan, kepemudaan, dan pengembangan program

Bidang Sosial

Keberadaan bidang sosial merupakan sarana dalam mewujudkan misi yang dimiliki Yayasan Hasnur Centre, yakni menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungan. Adapun program kerja dalam bidang sosial ini yaitu:

1. Penggalangan peran serta masyarakat dalam program-program aksi sosial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan mereka yang kurang mampu, khususnya di wilayah usaha Hasnur Group
2. Pembentukan wilayah pendampingan khususnya di sekitar wilayah usaha Hasnur Group
3. Penyelenggaraan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat kurang mampu dan kelompok dhu'afa/mustadh'afin untuk memiliki akses usaha, kekuatan dan kemandirian
4. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak jalanan dan penyandang kebutuhan khusus
5. Memberikan santunan dan pembinaan kepada guru-guru/mubaligh, tokoh masyarakat, kepada anak yatim/piatu. Anak asuh sekolah, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus serta penanganan isu-isu sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian khusus

Bidang Keagamaan

Dalam mendorong masyarakat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan, bidang keagamaan Yayasan Hasnur Centre menjalankan program:

1. Memperingati hari-hari besar Islam
2. Membentuk Lembaga internal untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq di lingkungan Yayasan Hasnur Centre
3. Memberikan bantuan untuk pembangunan atau pendirian dan pengembangan sarana serta prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren
4. Pelaksanaan Gerakan Masjid, Mushalla Barasih wan Nyaman (Gema Baiman)
5. Penyelenggaraan kegiatan majelis ilmu di lingkungan Yayasan Hasnur Centre

Bidang Kelembagaan

Dalam meningkatkan kolaborasi antara berbagai lembaga untuk mempercepat pembangunan Banua, bidang kelembagaan memiliki program:

1. Pembentukan dan perluasan kerjasama maupun kemitraan dengan pemerintah dan swasta
2. Pengembangan sumber pendanaan Yayasan Hasnur Centre

Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan berpesan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemajuan pendidikan di Banua dengan mendirikan dan mengelola institusi pendidikan mulai dari jenjang usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi yang meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu An-Nur (PAUD IT An-Nur)
2. Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur (SDIT An-Nur)
3. Sekolah Menengah Pertama Global Islamic Boarding School (SMP GIBS)
4. Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School (SMA GIBS)
5. Politeknik Hasnur (Polihasnur)

Bidang Kepemudaan

Dalam bidang kepemudaan, Yayasan Hasnur Centre mendorong munculnya generasi muda Banua yang lebih kreatif, inovatif dan memiliki semangat yang tinggi dalam membangun Banua melalui program Pemuda Bakti Banua (Muda Banua) yang merupakan program kolaborasi bagi para pemuda banua untuk bersinergi dan berkontribusi menjalankan program pendampingan masyarakat, adapun pelaksanaan program meliputi:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Program Muda Banua
 - a. Unit Kerja
 - i. Program Koperasi Muda Banua
 - ii. Unit Usaha Dagang
 - iii. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Pendampingan
 - a. Konsep utama pendampingan yang dilaksanakan oleh Muda Banua, yakni:
 - i. Leadership
 - ii. Social Entrepreneurship
 - iii. Social Empowerment
 - b. Adapun program kerja dalam unit pendampingan meliputi:
 - i. Bidang pendidikan
 - ii. Bidang keagamaan
 - iii. Bidang kesehatan dan lingkungan
 - iv. Bidang ekonomi
3. Memperingati Hari-Hari Besar Nasional antara lain:
 - a. Peringatan Hari Lingkungan Hidup
 - b. Peringatan Hari Anti Narkoba
 - c. Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Bidang Pengembangan Program

Dalam menunjang pengembangan program untuk mencapai visi dan misi yang dimiliki, Yayasan Hasnur Centre terus melakukan pengembangan melalui beberapa divisi, yakni:

1. Business Communication Training Institute (BCTI)
2. Highly Functioning Education Consulting Services (HAF ECS)
 - a. Training
 - b. Publication
3. Hasnur Research and Publication (HRP)
4. Digitaliz

KETERANGAN DAN PROSPEK INDUSTRI

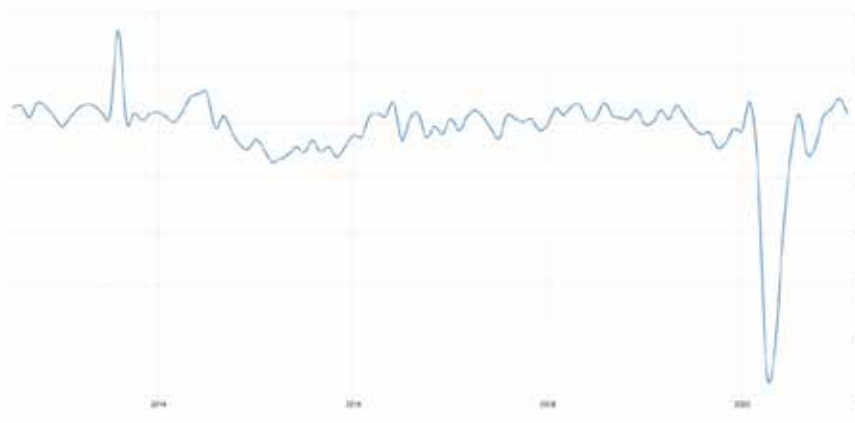
KONDISI EKONOMI DI INDONESIA

Ekonomi global menghadapi tantangan yang berat selama tahun 2020. Efek dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan ekonomi global terpuruk, dimana *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksikan *Gross Domestic Product (GDP)* dunia pada tahun 2020 turun sebesar 3.5%. Ekonomi terbesar dunia merasakan dampak dari pandemi

dimana ekonomi negara-negara G20 tidak mengalami pertumbuhan (dengan pengecualian Turki dan China). Efek tersebut tentu juga dirasakan oleh sektor manufaktur dimana indeks PMI (*Purchasing Managers' Index*) manufaktur juga turun ke level terendah sejak krisis finansial global yaitu 39,8 di bulan April 2020

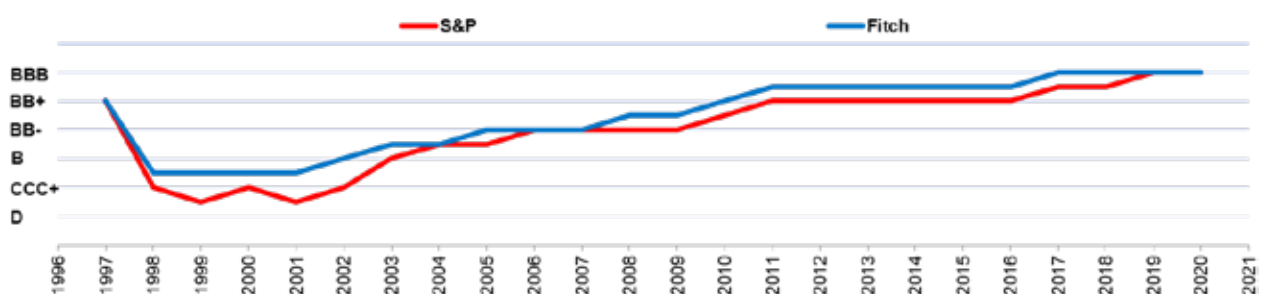


Efek pandemi terhadap ekonomi 2020 tentu juga dirasakan oleh Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 2000, dimana sejak tahun 2000 hingga 2019, pertumbuhan GDP mencatatkan CAGR (*compounded annual growth rate*) 5,54%. GDP Indonesia tentu terkena efek Pandemi Covid-19 juga, dimana pada tahun 2020 GDP Indonesia menurun sebesar 2,1%. Penurunan tersebut merupakan terdalam sejak krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Sektor manufaktur Indonesia pun merasakan efek Pandemi dimana pada bulan April 2020 PMI manufaktur Indonesia menurun hingga ke level 27,5 yang merupakan level terendah selama 10 tahun terakhir. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga sebanyak 5 kali sejak pandemi Covid -19 dari level 4,75% hingga 3,5% (Maret 2021) sebagai kebijakan moneter untuk menanggulangi pertumbuhan ekonomi lokal.



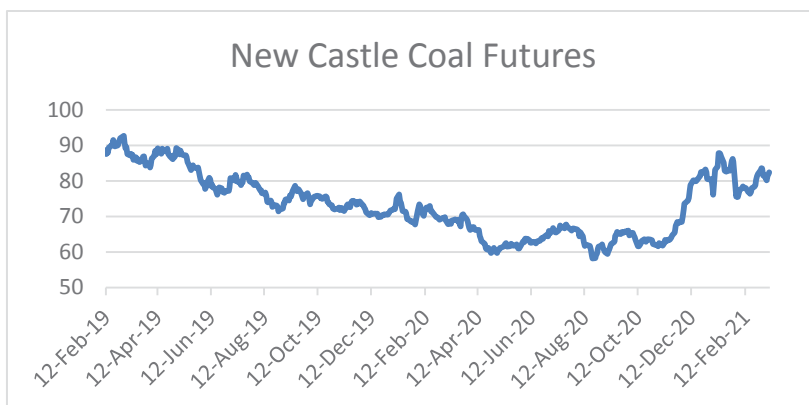
Sumber: PMI Manufaktur Indonesia

Walaupun pandemi Covid-19 mengakibatkan pelambatan ekonomi global, Ekonomi Dunia dan Indonesia menunjukkan proyeksi dan pemulihan yang baik. *International Monetary Fund* memproyeksikan bahwa GDP dunia dan Indonesia akan berkembang sebesar 5,5% dan 4,8% pada tahun 2021. Selain itu, selama tahun 2020 Lembaga Pemeringkat Kredit pada Obligasi Pemerintah Indonesia (S&P dan Fitch) juga tidak menurunkan rating Indonesia. Hal ini menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia selama pandemi. Sektor manufaktur Indonesia pun menunjukkan *outlook* yang positif, dimana sejak April 2020 hingga Februari 2021 indeks PMI Indonesia telah meningkat hingga ke level 50,9.



INDUSTRI BATUBARA

Sebagai komoditas yang bergantung pada *output* ekonomi, harga komoditas batu bara mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana sejak saat itu harga batu bara telah meningkat kembali ke level stabil. Pandemi Covid-19 mempengaruhi harga batu bara, dimana harga batu bara menurut indeks Newcastle Australia mengalami penurunan hingga ke level terendah 58,18 pada bulan Agustus 2020. Hingga saat ini harga batu bara telah kembali meningkat ke level 82,4 pada Maret 2021.



Sumber: Indeks Newcastle Australia, 2021

Pada tahun 2019, batubara yang terproduksi secara global berjumlah 7921mt, dimana produsen utama batu bara adalah China (3693mt). Walaupun China memproduksi batubara terbanyak, China juga merupakan importir batubara terbesar di Dunia pada tahun 2019, China mengimpor 298 Mt batubara pada tahun yang sama. India dan Jepang berada di posisi kedua dan ketiga sebagai negara dengan importir batubara terbesar di dunia dengan, 247Mt dan 185Mt impor pada tahun 2019. Tiga konsumen tersebut akan tetap menjadi negara-negara destinasi ekspor kedepan nya. Sedangkan negara dengan urutan volume ekspor batubara terbesar adalah Indonesia (455 Mt), Australia (393 Mt), dan Russia (217 Mt).

Batu bara adalah pusat dari kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an. Walaupun cadangan batu bara Indonesia bukan yang terbesar di dunia, jumlah cadangan batu bara relatif signifikan dibandingkan sumber daya fosil lainnya. Total cadangan batu bara adalah 22,6 miliar ton atau 2,2% dari total cadangan global (BPS: 2018). Didorong oleh melimpahnya cadangan batu bara, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik seperti yang tercantum di berbagai dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterbitkan sejak 1980-an. Dalam KEN 2014, batu bara ditargetkan untuk menyumbangkan 30% dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dimana total persediaan energi diperkirakan mencapai 400 juta setara ton minyak (TOE). Bukan hanya untuk listrik, pemerintah juga berencana untuk menggunakan batu bara sebagai pengganti minyak dan LPG untuk digunakan pada transportasi dan memasak.

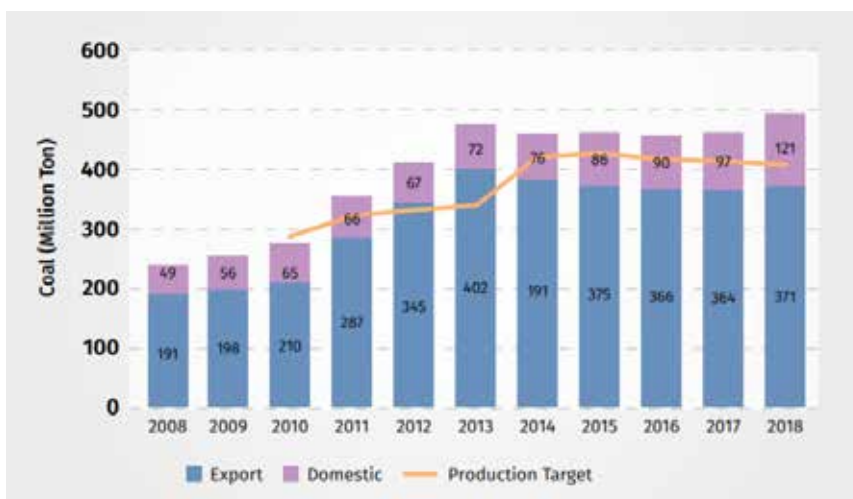
Bauran Energi Indonesia:

	Energy Mix 2011	Energy Mix 2025
Minyak Bumi	50%	23%
Batubara	24%	30%
Gas Alam	20%	20%
Energi Terbarukan	6%	26%

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Indonesia adalah pengeksport batu bara kedua terbesar secara global dan pemasok batu bara utama untuk negara-negara Asia. Pendapatan dari batu bara adalah satu sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara yang diterima mencapai rata-rata sekitar IDR 31 triliun (2,17 miliar USD) atau mencapai rata-rata mendekati 80% dari total pendapatan non minyak & gas. Industri pertambangan menyumbang 5-8% dari PDB Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yang sekitar 80%-nya berasal dari industri batu bara. Pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan produksi batu bara hingga lebih dari 500 juta ton dan membuat penambang dapat mengeksport lebih banyak batu bara. Alasan pemerintah atas pengeksploitasi batu bara adalah untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan membantu menyeimbangkan defisit yang berasal dari perdagangan minyak dan gas.

Target dan Produksi Batu Bara Indonesia



Sumber: Institute for Essential Services Reform (IESR), 2019

Sumber dan produksi batu bara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di empat dari 34 provinsi: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Cekungan batu bara Kutai, Tarakan, dan Barito yang terletak di Kalimantan Timur memiliki batu bara kualitas menengah (nilai kalorifik antara 5.100-6.100 kcal/kg) sementara cekungan Sumatera Tengah dan Selatan memiliki cadangan batu bara kualitas rendah (nilai kalorifik)

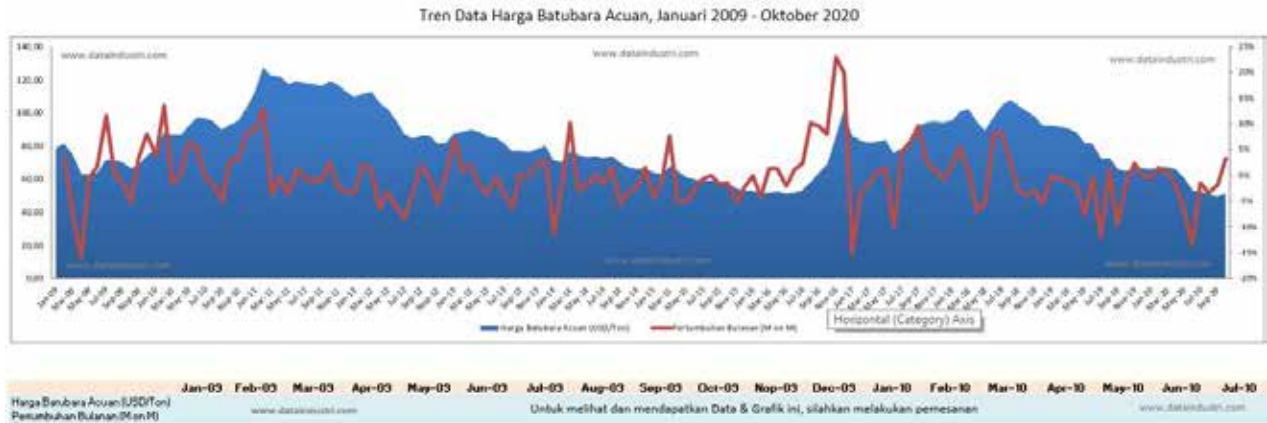
Dimana destinasi ekspor utama Indonesia adalah negara China, India, dan Jepang.

Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2019

Negara Tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Berat Bersih: 000 ton								
India	94 681,9	116 823,5	134 451,8	123 841,9	95 110,5	98 553,5	110 378,2	121 692,5
Tiongkok	81 528,9	89 777,8	49 782,0	36 684,5	50 961,1	48 167,4	48 135,7	65 670,5
Jepang	35 068,2	37 711,5	35 579,3	32 503,5	33 037,8	31 421,4	28 722,9	28 436,4
Korea Selatan	37 899,1	36 149,6	35 574,1	33 037,3	34 943,2	38 075,1	37 150,9	29 550,0
Taiwan	28 692,4	27 947,2	27 018,3	24 088,1	20 289,5	18 187,7	17 935,1	19 061,2
Malaysia	16 034,5	17 120,6	14 452,5	16 567,5	17 272,4	21 189,9	22 045,4	25 323,5
Philipina	11 621,1	14 508,8	15 021,3	15 811,3	17 503,4	18 977,9	22 595,0	27 450,8
Thailand	14 676,0	14 258,0	16 196,1	17 729,5	16 439,0	16 374,7	19 964,1	17 600,4
Hongkong	11 789,5	12 875,6	12 513,5	9 414,7	9 423,9	8 449,8	9 028,4	7 876,8
Spanyol	5 704,8	4 078,0	4 071,5	4 826,5	4 944,0	3 232,2	2 463,9	684,6
Lainnya	9 808,1	10 133,6	11 642,4	13 882,6	11 405,0	16 468,8	24 704,7	31 589,1
Jumlah	347 504,5	381 384,2	356 302,8	328 387,4	311 329,8	319 098,4	343 124,3	374 935,8

Sumber: BPS, 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis Harga Batubara Acuan (HBA) pada Januari 2021 sebesar 87,79 USD/Ton. Nilai HBA ini naik sebesar 15,75 persen dari HBA bulan Januari 2021 yang sebesar 75,84 USD/Ton. Bila dibandingkan HBA Februari 2020 yang sebesar 66,89 USD/Ton, nilai HBA pada Februari 2020 naik sebesar 1,45% persen terhadap HBA Januari 2020 yang sebesar 65,93 persen. HBA Februari 2021 ini menjadi harga tertinggi setelah turun sejak tahun 2020 lalu. Namun, belum termasuk cukup tinggi. Karena pada akhir tahun 2010 sampai awal 2012, juga pada pertengahan tahun 2018, harga batubara sempat mencapai nilai di atas 100 USD/Ton. Kondisi harga batubara terendah dengan nilai 50-an USD/ton juga sempat terjadi pada pertengahan tahun 2016. Untuk selengkapnya Harga batubara bulanan dan pertumbuhan harga batubara tiap bulannya dapat melihat grafik di bawah ini.



Secara keseluruhan proyeksi batu bara dunia akan tetap stabil dimana pada tahun 2020 Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata batu bara pada tahun 2030 akan tetap stabil di USD60. Hal ini dengan rencana konsumsi batu bara lokal yang meningkat menghasilkan prospek yang menarik dan stabil terkait industri batu bara.

Persaingan usaha

Industri pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu khususnya untuk komoditas batubara merupakan industri yang cukup kompetitif dan memiliki produk yang relatif sejenis sehingga harus menghadapi persaingan usaha dengan berbagai perusahaan dengan bidang usaha yang sama lainnya. Umumnya lokasi dari industri pengangkutan komoditas batu bara di Indonesia berlokasi di Sumatera dan Kalimantan yang berdekatan dengan lokasi dari tambang batubara yang relatif lebih dekat dengan lokasi pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan harus mampu bersaing dengan memberikan kualitas, kuantitas, dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan kompetitor lainnya.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan terpilih yang memiliki lingkup usaha sejenis yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

No	Nama Perusahaan	Jumlah kapal tunda yang dimiliki	Jumlah kapal tongkang yang dimiliki
1	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	15	15
2	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	25	24
3	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	39	39
4	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.	76	76

Catatan: data yang disajikan berdasarkan posisi tahun 2020

Sumber: Laporan Tahunan dan keterbukaan informasi masing-masing perusahaan

IX. EKUITAS

Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2009, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan susunan dan keterangan sebagai berikut:

a. Akta Pendirian Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
Modal Dasar		1.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Magma Sigma Utama	250	250.000.000
2.	PT Hasnur Jaya Utama	125	125.000.000
3.	PT Energi Batubara Lestari	125	125.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		500	500.000.000

b. Akta No. 54 tertanggal 29 April 2010 ("Akta 54/2010")

Berdasarkan Akta 54/2010, terdapat: (i) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (ii) pengalihan saham. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
Modal Dasar		75.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Hasnur Jaya Utama	2.000	2.000.000.000
2.	PT Hasnur Coal Terminal	13.000	13.000.000.000
3.	H. Abdussamad Sulaiman HB	5.000	5.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		20.000	20.000.000.000

c. Akta No. 23 tertanggal 27 Juli 2011 ("Akta 23/2011")

Berdasarkan Akta 23/2011, terdapat perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
Modal Dasar		75.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Hasnur Jaya International	19.000	Rp19.000.000.000
2.	H. Abdussamad Sulaiman HB	1.000	Rp1.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		20.000	20.000.000.000

d. Akta No. 14 tertanggal 23 November 2012 (“Akta 14/2012”)

Berdasarkan Akta 14/2012, terdapat peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000
2.	H. Abdussamad Sulaiman HB	5.000	5.000.000.000
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000

e. Akta 43/2018

Berdasarkan Akta 43/2018, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000
2.	Haji Rachmadi Has	715	715.000.000
3.	Jayanti Sari	715	715.000.000
4.	Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	714.000.000
5.	Hasnuryadi Sulaiman	714	714.000.000
6.	Hasnuryani	714	714.000.000
7.	Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	714.000.000
8.	Zainal Hadi Has HB	714	714.000.000
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000

f. Akta No. 2/2020

Lebih lanjut, perubahan susunan pemegang saham terakhir Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0054522.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336073 tanggal 08 Agustus dan 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336084 tanggal 08 Agustus 2020, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129602.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 (“Akta No. 2/2020”), (ii) Akta No. 9/2021 dan (iii) Akta No. 107/2021

Akta No. 2/2020

Modal Dasar : Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
		Saham	Rupiah	%
Modal Dasar		400.000	840.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Nur Internasional Samudra	51.000	107.100.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	35.000	73.500.000.000	35
3.	Jayanti Sari	7.000	14.700.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	7.000	14.700.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		100.000	210.000.000.000	100

g. Akta No. 9/2021.

Selain atas Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) menjadi nominal Rp100,- (seratus Rupiah), tidak terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang terelisasi berdasarkan Akta No. 9/2021.

Lebih lanjut, rencana pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana disetujui dalam Akta No. 9/2021 baru akan berlaku efektif setelah adanya penyetoran modal dari masyarakat setelah masa Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	147.000.000	14.700.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.100.000.000	210.000.000.000	100

h. Akta No.107/2021

Berdasarkan Akta 107/2021, Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang semula adalah sebesar Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) yang diambil oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT NUR INTERNASIONAL SAMUDERA, sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah);
- b) PT HASNUR JAYA INTERNATIONAL, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- c) JAYANTI SARI, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- d) ZAINAL HADI HAS HB, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Sehingga merubah struktur permodalan Perseroan menjadi berikut:

Modal Dasar	: Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
Modal Disetor	: Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	147.070.000	14.707.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.101.000.000	210.100.000.000	100

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun 31 Desember 2020, 2020 dan 2019. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS			
Modal saham	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Komprehensif Lain: Bagian dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non-pengendali	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719

Berdasarkan Akta No.9/2021 tersebut di atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7,00
4. Zainal Hadi Has HB	147.000.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.300.000.000	630.000.000.000	

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021 atau ditentukan lain dalam RUPS Tahunan.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembagian dividen dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pembagian Dividen	Jumlah Dividen yang Dibayarkan (Rp)
2019	3.000.000.000
2020	4.565.259.388
2021	4.610.306.358

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan tercatat memiliki dokumentasi yang menunjukkan dirinya adalah Wajib Pajak Badan sebagaimana tercantum di dalam (i) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") 02.900.072.6-038.000, (ii) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") Nomor S-480PKP/WPJ.05/KP.0803/2015 dan (iii) Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Nomor S-584KT/WPJ.05/KP.0803/2015 seluruhnya atas nama Perseroan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perpajakan ESA

Biaya Program ESA (khusus Saham Bonus) merupakan bagian dari remunerasi Peserta, sehingga dengan demikian PPh pasal 21 atas Saham Bonus akan menjadi beban Perseroan. Selanjutnya setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta menanggung beban perpajakan atas transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atau pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Untuk beban dan pajak yang timbul dari transaksi ESA (khusus untuk Saham Jatah Pasti) seluruh beban dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh Peserta Program ESA.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 14 tanggal 10 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 2 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 18 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
PT RHB Sekuritas Indonesia	525.250.000	Rp157.575.000.000,-	100
Total	525.250.000	Rp157.575.000.000,-	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. : (021) 2283 6086
Faksimili : (021) 2283 6096

Nama Partner : Mulyadi
Nomor STTD : STTD.KAP-00036/PM.02/2017
Tanggal STTD : 18 Oktober 2017
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar Profesi : Standar Profesi Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan Kerja : KNMT&R/V/EL-0033/03/2021

Tugas Pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 - Kota BNI, 41st Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
Jakarta 10220, Indonesia

Nama Partner : Fabiola Hutagulung, S.H.
Nomor STTD : STTD.KH-200/PM.2/2018
Tanggal STTD : 23 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018
Surat Penunjukan Kerja : 141/GIO/II/21 tanggal 2 Februari 2021

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

Notaris : **MUHAMMAD HANAFI, SH**
Komplek Rukan Tende Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122 - 124
Jakarta Selatan
Telp. (021) 72780381 - 72780382

Nomor STTD : STTD.N-165/PM.223/2019
Tanggal STTD : 7 Januari 2019
Surat Penunjukan Kerja : 73/MH.NOT/VIII/2020

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/VII/2010-003
Izin BAE : Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1400/KMK.010/1990 tertanggal 03 Nopember 1990.
Surat Penunjukan Kerja : PW-040/HIS/032021

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut definisi tentang hubungan afiliasi antara Lembaga Penunjang dan Perseroan dalam UUPM, yang termasuk dalam afiliasi adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
4. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta 9/2021 dan Akta No. 107/2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

1. **Kegiatan usaha utama:**

Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (KBLI 50133).

2. **Kegiatan usaha penunjang:**

(1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50131**).

(2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).

(3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).

(4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

Modal

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 840.000.000.000, (delapan ratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100, (seratus rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah **2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham** atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah)** telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun ;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS ;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan
 - e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan :
- a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat ; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut;
7. HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait ;
8. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ;
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ;
10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

11. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuandalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harusmemperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatismutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
14. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
15. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - a. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - b. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini ;
 - c. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi ;
 - d. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.
17. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

18. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan ;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS ;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS ; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat saham ;
 - c. nilai nominal saham ;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat kolektif saham ;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - d. nilai nominal saham ;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
16. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan ;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis ;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis ;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis ;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang saham, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
17. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
18. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
19. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau dokumen lainlain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan diPasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan ; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan buktibukti hak sebagaimana sewaktuwaktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik buktibukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
11. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
12. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 8 ini.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.
5. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham.
 - 1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) Ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik ;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS ;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS ; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
7. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ;
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 angka (1) butir a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 9 Pasal ini.
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ;
dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
15. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Aya 4 butir 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak diteapkan oleh ketua pengadilan negeri.
16. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan ;
dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
17. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
18. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
19. .Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
20. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan

ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 dan Ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

21. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham ;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS ; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
22. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.
 - i. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - ii. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - iii. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan ;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK ;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.
 - i. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - ii. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas

dan rinci.

- iii. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini angka (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS.
 - (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ;
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat ;
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS ; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka (1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akandiselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama ; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 6. Usulan Mata Acara Rapat.
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik ;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan ;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS ;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat ; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.

7. Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS ;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS ;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut ;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS.

8. Bahan Mata Acara Rapat.

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS ;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS ;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut ;
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS ; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen ; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS.
- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
 - (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
 - (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. Pemanggilan RUPS Kedua.
- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan ;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan ; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
11. Pemanggilan RUPS Ketiga.
- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan ;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua ;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua ;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua ; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.
12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.
- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan

pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit :

- a. situs web penyedia e-RUPS ;
- b. situs web bursa efek ; dan
- c. situs web Perseroan ; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit :

- a. situs web bursa efek ; dan
- b. situs web Perseroan ; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham.

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :

- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua ; dan
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.–

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 9 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik :
- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham ;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan ; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
 - (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum ; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh

Penyedia eRUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia eRUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

16. Penyedia e-RUPS.

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biroadministrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
 - a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS ;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS ;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS ;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS ;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian ;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama ;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi ;

- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS ; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan eRUPS.
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
- a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS ;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS ;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS ;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS ;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS ;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS ;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan ;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pimpinan RUPS.
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akandiputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat ;
 - b. Mata acara rapat ;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat ; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.

- i. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- ii. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- iii. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- iv. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- v. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- vi. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- vii. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- viii. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhirwaktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini.
- ix. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS ;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS ;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah ;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mataacara rapat ;
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan ;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS ;
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ;
 - h. Keputusan RUPS ; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- x. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- xi. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai dengan angka (10) ayat ini, pasal 12 ayat 12 angka 1 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 16.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

- 1. Keputusan RUPS :
 - (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.
 - (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatannya, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan :
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ;

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan Sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik ;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. tidak pernah dinyatakan pailit ;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit ;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan ;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK ;
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain ; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau

- c. meninggal dunia ; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini ; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris ;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi ;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut ;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut ;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang :
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e) ; atau
 - b. lampauya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

Tugas dan Wewenang Direksi

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
- d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara-setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan- merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13.
 - a. Pasal 17 Ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang

tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan- keputusan yang diambil di dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

b. Berita Acara Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 1 (satu) Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari 2 orang, 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. tidak pernah dinyatakan pailit ;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit ;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung- maupun tidak langsung yang berkaitan dengan-- kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar- ini.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang

bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini ; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; atau
 - d. meninggal dunia ; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS ; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan palingsedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.

5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan- kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengadilan Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/2016, POJK 9/2016 dan POJK 17/2020.

Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0.5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipohisrhb@rhbgroup.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 24 – 30 Agustus 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
24 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
25 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
26 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
27 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
30 Agustus 2021	00.00 – 10.00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Selain itu penjatahan pasti juga diberikan kepada Karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan IX.A.7.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penawaran Umum saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan dana dihimpun sebanyak Rp157.575.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% (lima belas persen) atau 78.787.500 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp23.636.250.000,- (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I	> 15% atau Rp 20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- Saham milik pemegang saham Emiten;
- Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- Saham hasil pembelian kembali Efek (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah

memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis..

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower Lt.11
District 8 – SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 509 39 888
Fax. (021) 509 39 777
Website: www.rhbgroup.com
Email: ipohisrhb@id.rhbgroup.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hanafiah Ponggawa & Partners.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Jakarta, 13 Agustus 2021

Kepada Yth.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk ("Perseroan")

Gedung Office 8 Lantai 7 SCBD

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

DKI Jakarta

Up.: **Direksi**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners, ("Dentons HPRP")** berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Fabiola Hutagalung, S.H., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-200/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") Nomor 200902, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 141/GIO/II/21 tertanggal 2 Februari 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana**") sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga nilai penawaran seluruhnya adalah sebesar Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") sebagaimana telah diputuskan oleh Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan Nomor 0325a/HIS-JKT/DIR-OP057/III-2021 tanggal 18 Maret 2021, sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**HMETD**) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan merupakan saham dalam portepel yang dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain, kecuali dalam Penawaran Umum Perdana ini. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan prinsip pencatatan Efek bersifat Ekuitas dari BEI No.: S-04328/BEI.PP3/06-2020 tertanggal 23 Juni 2021.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -2-

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT RHB SEKURITAS INDONESIA** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 20 tanggal 21 April 2021, sebagaimana telah diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 10 Mei 2021, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021 (ii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 18 tanggal 12 Agustus 2021 yang keempatnya dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta PPEE**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek.

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 46% (empat puluh enam persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan belum membuat perjanjian atau perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.
2. Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu PT Hasnur Resources Terminal ("**HRT**"). Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada *mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader*. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 ("**Akta No. 9/2021**").

Selain persetujuan di atas, berdasarkan Akta No. 9/2021, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk pelaksanaan program ESA dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait di bidang pasar modal.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -3-

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan “**Entitas Anak**” adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **HRT**, dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
2. **PT Hasnur Mitra Sarana**, dengan persentase kepemilikan saham Perseroan melalui HRT sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) (“**HMS**”).

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 1021/FH/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini (“**Laporan Uji Tuntas**”).

Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan: (i) Pendapat Segi Hukum No.Ref.:456/GH/IV/21 tertanggal 21 April 2021, (ii) Pendapat Segi Hukum No. Ref.:606/FH/V/21 tertanggal 17 Mei 2021, (iii) Pendapat Segi Hukum No.Ref.: 813/FH/VI/21 tertanggal 18 Juni 2021, (iv) Pendapat Segi Hukum No.Ref.:870/FH/VII/21 tertanggal 5 Juli 2021 dan (v) Pendapat Segi Hukum No. Ref.: 929/FH/VII/21 tertanggal 21 Juli 2021 serta (i) Laporan Uji Tuntas No.Ref.:454/GH/IV/21 tertanggal 21 April 2021, (ii) Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 605/FH/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, (iii) Laporan Uji Tuntas No.Ref.: 812/FH/VI/21 tertanggal 18 Juni 2021 (iv) Laporan Uji Tuntas No.Ref.:869/FH/VII/2 tertanggal 5 Juli 2021 dan (v) Laporan Uji Tuntas No.Ref.: 928/FH/VII/21 tertanggal 21 Juli 2021 yang terdahulu yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
2. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -4-

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
5. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:
 - (1) **Sekitar 46% (empat puluh enam persen)** dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -5-

pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan belum membuat perjanjian atau perikatan apapun dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.

- (2) **Sekitar 23% (dua puluh tiga persen)** dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
- (3) **Sekitar 31% (tiga puluh satu persen)** akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana transaksi belanja modal Perseroan sebagaimana disebutkan pada poin (1) tersebut di atas, memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan akan tunduk pada ketentuan transaksi material sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020.

Terhadap rencana penggunaan dana berupa penggunaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan dan HRT secara umum sebagaimana disebutkan pada poin (2) dan (3) di atas, tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena rangkaian transaksi penggunaan dana tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Lebih lanjut, (i) kontraktor, konsultan, dan supplier dalam transaksi pembelian kapal Perseroan secara umum akan menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada poin (1) dan (3) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Pada poin (2) rencana pemberian pinjaman ke HRT merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sehingga Perseroan harus tunduk pada ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -6-

dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

2. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) PT Nur Internasional Samudra, (ii) PT Hasnur Jaya International, (iii) Jayanti Sari, dan (iv) Zainal Hadi HAS HB selaku para pemegang saham Perseroan yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 30 Juni 2021 dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

3. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 20 tanggal 21 April 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No 15 tanggal 10 Mei 2021, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No 3 tanggal 2 Juli 2021, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 19 tanggal 12 Agustus 2021 yang keempatnya dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta PPAS**"); dan
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari KSEI No. SP-021/SHM/KSEI/0321 tanggal 7 Mei 2021.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat,

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -7-

dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 ("**Akta Pendirian Perseroan**")

Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), pendapat segi hukum atas Anggaran Dasar Perseroan mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Akta Pendirian Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 9/2021 yang perubahannya terakhir kali adalah sebagaimana dicantumkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 ("**Akta No. 107/2021**") yang untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2021 dan perubahannya pada Akta No. 107/2021 tersebut, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang **Pengangkutan**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -8-

A. Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50133**).

B. Kegiatan usaha penunjang:

- (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut-operatornya (**KBLI 50131**).
- (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
- (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
- (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 9/2021, telah (i) disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Bersama dari Menkumham C.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ("**Dirjen AHU**") dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ("**Kemenko**") C.q. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 pada website OSS, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha rill berupa pengangkutan barang berupa batu bara, melalui laut dengan menggunakan kapal laut sesuai dengan KBLI 50133, KBLI 50131 dan KBLI 50132, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagaimana dimuat dalam dalam Akta No. 107/2021 yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -9-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

berdasarkan Akta No. 107/2021, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas pada tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7
4.	Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun	147.070.000	14.707.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.101.000.000	210.100.000.000	100

Perseroan telah melakukan pencadangan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berdasarkan:

- (i) Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp25.497.078.971 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau setara dengan 12% (dua belas persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan; dan
- (ii) Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp16.502.921.029 (enam belas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh sembilan Rupiah) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan

untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) sekaligus pengendali dari Perseroan adalah Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.

Dalam rangka pelaksanaan:

- A. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 7 April 2021 melalui Notaris Muhammad Hanafi, S.H.

Lebih lanjut, Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

- B. Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 85/2021**"), Pemegang saham Perseroan melalui keputusan sirkuler tertanggal 11 Mei 2021 telah menetapkan Jayanti Sari dan

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -10-

Zainal Hadi HAS HB sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 85/2021.

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta sebagaimana dijabarkan pada huruf (A) angka (6) Pendapat Segi Hukum ini.

5. Berdasarkan Akta No. 9/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Jayanti Sari : Direktur Utama

Achmad Ma'mur¹⁾* : Direktur

: Direktur

Soma Ariyaka

Dewan Komisaris

Zainal Hadi HAS HB : Komisaris Utama

Abdurrachman Kunwibowo : Komisaris

Nur Prasetyo : Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal di atas, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

Catatan:

Sehubungan dengan telah berpulangannya Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan Akta No. 9/2021, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Almarhum telah dinyatakan berakhir.

Pada tanggal pernyataan ini, seluruh kewenangan serta fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Almarhum Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas aspek keuangan dan administrasi Perseroan, akan dijalankan oleh Ibu Jayanti Sari selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana dijelaskan oleh Perseroan melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 062/HIS-JKT/DIR-UM05/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan akan memutuskan dan mengangkat anggota Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Almarhum Bapak Achmad Ma'mur.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -11-

6. Catatan Atas Korporasi Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, (i) anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2021, telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya dan (ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali atas:**

Pembagian Dividen Sebelum Kecukupan Cadangan Wajib

Kami mencatat bahwa Perseroan belum mencadangkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, sebelum melakukan pembagian dividen berdasarkan Keputusan Sirkuler 30 Juni 2020 sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT,

UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas pembagian dividen yang dilakukan sebelum kecukupan pencadangan atas modal yang disetor dan ditempatkan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUPT. Oleh karena itu, kekurangan pencadangan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan.

Sehubungan dengan hal di atas, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini Perseroan telah menggenapi kewajiban melakukan pencadangan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar 20% sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT.

Ketiadaan Akta Jual Beli dalam bentuk Akta Notariil atas pengambilalihan saham oleh NIS dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No.2/2020

Jual beli saham sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) saham milik HJI kepada NIS sebagaimana termaktub dalam Akta No.2/2020, hanya dilaksanakan melalui perjanjian jual beli saham bawah tangan, dan tidak melalui akta notarial, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 128 ayat (2) UUPT.

Sehubungan hal di atas, kami mencatat bahwa UUPT tidak mengatur sanksi atas ketiadaan akta notarial tersebut.

Lebih lanjut, mengingat: (i) HJI dan NIS telah menandatangani perjanjian jual beli saham di bawah tangan; (ii) transaksi penjualan saham dilakukan diantara grup usaha Perseroan sehingga minim risiko keberatan dari pihak ketiga; dan (iii) Perseroan telah memenuhi ketentuan pengumuman koran sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT dan setelah dilakukannya pengumuman koran tersebut tidak terdapat gugatan dan/atau klaim dari pihak ketiga, maka pengambilalihan saham oleh NIS dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 telah mengikat dan berlaku bagi HJI, Perseroan, NIS, dan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal di atas, ketiadaan Akta Jual Beli berbentuk Notariil atas pengambilalihan saham oleh NIS dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan dan rencana penawaran umum perdana Perseroan.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -12-

7. Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0318a/HIS-JKT/DIR-OP058.3/III-2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : Setyo Buwono

Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal tertanggal 1 April 2021 sebagai acuan Unit Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 56/2015. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan juga telah memberikan persetujuan atas pengangkatan Setyo Buwono sebagai Ketua Unit Audit Internal melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2021.

8. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Dwita Ameilia Lestari sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 0181/HIS-JKT/DIR-OP051/II-2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

9. Komite Audit Perseroan

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 0387/HIS-JKT/COM-OP053/III-2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Nur Prasetyo
Anggota Komite Audit : Boy Hamdani Tamin
Anggota Komite Audit : Hendra Iskandar Lubis

Anggota Komite Audit atas nama Boy Hamdani Tamin dan Hendra Iskandar Lubis telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 55/POJK.04/2015

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 April 2021 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab **dengan isi muatan** sesuai **dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55/2015**. Lebih lanjut, Perseroan telah memenuhi kewajiban Perseroan untuk memuat Piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dalam tautan sebagai berikut:

<https://www.pthis.id/>

10. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk komite nominasi dan remunerasi.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -13-

Dalam hal pelaksanaannya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Mei 2021, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang relevan.

Sehubungan dengan tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan terkait uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang fungsi Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan.
13. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), (ii) Perjanjian Fasilitas Kredit BNI 2018, dan Perjanjian Fasilitas Kredit BNI 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") ("**Perjanjian Kredit Perseroan**") dan (iii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**").

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, Perjanjian Kredit Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
- d. Sehubungan dengan pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana serta ketentuan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan di dalam Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BNI yang dibuktikan dengan telah dibubuhkannya tanda tangan dari pejabat berwenang BNI sesuai dengan peraturan yang berlaku di BNI sebagaimana tercantum di dalam Surat Perseroan No. 0880/HIIS-JKT/DIR-LG072/X-2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -14-

Pengesampingan Ketentuan – Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Surat Bank BNI tertanggal 10 Februari 2021 No. BMM/2.5/88 Perihal Persetujuan atas Perubahan Jadwal Rencana Penawaran Umum dan Tindakan – Tindakan Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan persetujuan BNI atas hal-hal sebagai berikut (“**Waiver BNI**”):

- (i) Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan.
- (ii) Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO), maupun dalam rangka sahnya, mengikatnya, dan/atau efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, mengadakan, menerbitkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh OJK, BEI, Biro Administrasi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan instansi pemerintah yang berwenang.
- (iii) Persetujuan untuk mengenyampingkan persyaratan mengenai kewajiban penyampaian pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis atas (i) perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) perubahan status perusahaan Perseroan, (iii) perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan (iv) perubahan terhadap susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan, mengingat (a) Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya akan diperdagangkan pada bursa efek dan (b) perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan diumumkan melalui keterbukaan informasi dan situs web Perseroan.

Setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan tersebut di atas, maka segala hal yang timbul sebagai bentuk akibat dari dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan:

- (i) diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
- (ii) perubahan komposisi pemegang saham publik di dalam Perseroan; dan
- (iii) pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pemegang saham publik.

14. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya (“**Aset Material Perseroan**”), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Kepemilikan Perseroan atas Penyertaan Saham Perseroan dalam HRT dan HMS melalui HRT telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -15-

- didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa;
 - d. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga, kecuali atas Aset Material Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Perseroan; dan
 - e. Apabila jaminan atas Aset Material Perseroan yang dijaminkan kepada BNI sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Kredit tersebut akan dieksekusi dan alas hak kepemilikan serta penggunaan Aset Material Perseroan tersebut menjadi dimiliki oleh pihak ketiga manapun, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan secara material.
15. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan.
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.
16. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -16-

secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

C. ENTITAS ANAK - PT HASNUR RESOURCES TERMINAL

1. HRT didirikan dengan nama **PT Hasnur Resources Terminal** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tertanggal 9 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta Barat yang telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU.27245.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0043688.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 serta diumumkan dalam BNRI No. 73 tertanggal 11 September 2012 serta Tambahan BNRI No. 48193 ("**Akta Pendirian HRT**").

HRT telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas Anggaran Dasar HRT mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Akta Pendirian HRT adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran dasar HRT yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan:

- a. Akta Pendirian HRT;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HRT No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Drs Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0012470.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 6 Maret 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038144.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 ("**Akta No. 2/2019**"); dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas HRT No. 30 tertanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat HRT No. 3 tertanggal 3 Agustus 2020 keduanya dibuat dihadapan Indra Tjahja Rinanto S.H,M Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusan No. AHU-0054524.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 8 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129607.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020 ("**Akta No. 3/2020**").

(Akta Pendirian HRT, Akta No. 2/2019 dan Akta No 3/2020 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar HRT**").

Anggaran Dasar HRT telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali atas ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada huruf B angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 sebagaimana termaktub dalam Akta Akta No. 2/2019, maksud dan tujuan HRT adalah berusaha dalam **kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan HRT, HRT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -17-

(52221) menjalankan usaha di bidang pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HRT, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha HRT dalam Akta No. 2/2019, telah: (i) disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Bersama dari Menkumham C.q. Dirjen AHU dan Kemenko C.q. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 pada website OSS, dan (ii) telah sesuai dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, HRT telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HRT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan yang dimiliki oleh HRT.

4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan HRT adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2020 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp126.000.000.000 (seratus dua puluh enam miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.600 (dua belas ribu enam ratus Rupiah); dan

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp31.500.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.600 (dua belas ribu enam ratus Rupiah)

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan pemegang saham HRT berdasarkan Akta No. 3/2020 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp1.000	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	Perseroan	2.375.000	29.925.000.000	95
2.	PT Hasnur Jaya International	125.000	1.575.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.500.000	31.500.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HRT selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Susunan pemegang saham HRT selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.3/2020. Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham HRT selain atas Akta No.3/2020.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HRT sebagaimana disebut di atas adalah benar dan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HRT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta No. 3/2020 sebagaimana dijabarkan pada huruf B angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HRT adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9 tertanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -18-

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350765 tertanggal 15 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134574.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Agustus 2020 (“**Akta No. 9/2020**”), yaitu sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
Asep Edwin Firdaus	: Direktur Utama
Tubagus Fahed Ichmar Widayasa	: Direktur
Soma Ariyaka	: Direktur
Jayanti Sari	: Komisaris Utama
Zainal Hadi HAS HB	: Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar HRT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

6. **Catatan Atas Korporasi HRT**

(i) Anggaran Dasar HRT telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham HRT selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali atas:**

Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI

Akta-akta berikut tidak didaftarkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI:

- a. Akta No. 2/2019; dan
- b. Akta No. 3/2020.

Sehubungan dengan tidak diumumkannya akta-akta dalam BNRI dan Tambahan BNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan (i) Surat Keterangan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No.003/NOT/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021 dan (ii) Surat Keterangan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No.005/NOT/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021 menyatakan bahwa percetakan pengumuman dalam BNRI atas Akta No. 2/2019 dan Akta No. 3/2020 tersebut di atas sedang diurus di instansi yang berwenang dan apabila telah selesai dicetak maka akan diserahkan kepada HRT.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut di atas, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap HRT.

Pembagian Dividen Sebelum Kecukupan Cadangan Wajib

Kami mencatat bahwa HRT belum mencadangkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, sebelum melakukan pembagian dividen berdasarkan Keputusan Sirkuler Juni 2020, sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas pembagian dividen yang dilakukan tanpa adanya pencadangan atas modal yang disetor dan ditempatkan terlebih dahulu sesuai Pasal 71 UUPT. Oleh karena itu, ketiadaan bukti pencadangan modal

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -19-

yang ditempatkan dan disetor tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan.

Ketiadaan Akta Jual Beli berbentuk Notariil atas pengambilalihan saham oleh Perseroan dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2020

Jual beli 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham milik HJI kepada Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 3/2020, hanya dilaksanakan melalui perjanjian jual beli saham bawah tangan tidak melalui akta notarial, sebagaimana dipersyaratkan melalui Pasal 128 ayat (2) UUPT.

Sehubungan hal di atas, kami mencatat bahwa UUPT tidak mengatur sanksi atas ketiadaan akta notarial tersebut.

Lebih lanjut, mengingat: (i) HJI dan Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham di bawah tangan; (ii) transaksi penjualan saham dilakukan diantara grup usaha Perseroan sehingga minim risiko keberatan dari pihak ketiga; dan (iii) HRT telah memenuhi ketentuan pengumuman koran sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT dan setelah dilakukannya pengumuman koran tersebut tidak terdapat gugatan dan/atau klaim dari pihak ketiga, pasca pengumuman tersebut, maka pengambilalihan saham oleh Perseroan dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2020 telah mengikat dan berlaku bagi HJI, Perseroan, HRT, dan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal di atas, ketiadaan Akta Jual Beli berbentuk Notariil atas pengambilalihan saham oleh Perseroan dari HJI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2020, tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan dan rencana penawaran umum perdana Perseroan.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HRT telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HRT telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas kepemilikan peraturan perusahaan, upah minimum, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan keikutsertaan HRT dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan HRT.
9. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material HRT dengan pihak ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga HRT**") dan (ii) perjanjian-perjanjian HRT dengan pihak afiliasi, yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi HRT**").

(Perjanjian Pihak Ketiga HRT dan Perjanjian Afiliasi HRT secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian HRT**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian HRT telah dibuat oleh HRT sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HRT dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian HRT sah dan mengikat HRT;
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HRT sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HRT, sepanjang pengetahuan HRT, HRT sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana HRT menjadi pihak yang mengakibatkan HRT dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*); dan

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -20-

- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian HRT yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;

Dengan tidak adanya larangan dalam Perjanjian HRT, yang sekiranya dapat membatasi rencana Penawaran Umum Perdana, maka:

- a. Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana; dan
 - b. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat disalurkan kepada HRT dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (*use of proceed*) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.
10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HRT tidak membutuhkan penguasaan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya dan dengan demikian HRT tidak memiliki aset material.
 11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HRT, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HRT, HRT tidak memiliki aset material yang perlu diasuransikan.
 12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) HRT sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HRT; dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris HRT, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. HRT tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris HRT tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -21-

D. ENTITAS ANAK - PT HASNUR MITRA SARANA

1. HMS didirikan dengan nama **PT Hasnur Mitra Sarana** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn, M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00598.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000878.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 82, Tambahan BNRI No. 29433 Tanggal 6 Januari 2010 ("**Akta Pendirian HMS**").

HMS telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas anggaran dasar HMS mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Akta Pendirian HMS adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran dasar HMS yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan:

A. Akta Pendirian HMS; dan

- B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tertanggal 16 Desember 2019 dibuat dihadapan Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-000453.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001192.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020 ("**Akta No. 29/2019**").

(Akta Pendirian HMS dan Akta No. 29/2019 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar HMS**").

Anggaran Dasar HMS telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali atas ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada huruf C angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar HMS, maksud dan tujuan HMS adalah berusaha dalam **bidang pengangkutan dan pergudangan**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan HMS, HMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan antara lain:

A. **(49431) Angkutan bermotor untuk barang umum;**

Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.

B. **(49432) Angkutan bermotor untuk barang khusus;**

Menjalankan kegiatan usaha untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -22-

C. (50222) Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;

Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.

D. (52103) Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah Kawasan berikut;

Menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari Pabean yang dengan peraturan pemerintah yang diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.

E. (52222) Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;

Menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

F. (52240) Penanganan bongkar muat barang;

Menjalankan kegiatan usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.

G. (52291) Jasa pengurusan transportasi (JPT);

Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

H. (52239) Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);

Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.

I. (52295) Angkutan multimoda; dan

Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada peneruma barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -23-

(freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

J. (52299) Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.

Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, seperti jasa pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Pengungkapan maksud dan kegiatan usaha HMS dalam Akta No. 29/2019, telah (i) disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Bersama dari Menkumham C.q. Dirjen AHU dan Kemenko C.q. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 pada website OSS, dan (ii) telah sesuai dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, HMS telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan yang dimiliki oleh HMS.

4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan HMS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian HMS sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Susunan pemegang saham HMS adalah berdasarkan Akta adalah sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 3 Agustus 2020 dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336117 tanggal 8 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0129614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020 (“**Akta No. 4/2020**”), adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp1.000.000,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Hasnur Resources Terminal	499	499.000.000	99.8
2.	PT Hasnur Jaya International	1	1.000.000	0.2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		500	500.000.000	100
Saham dalam Portepel		500	500.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HMS selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Susunan pemegang saham HMS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.4/2020. Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham HMS selain atas Akta No.4/2020.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -24-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham HMS sebagaimana disebut di atas adalah benar dan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas ketiadaan bukti pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta No. 29/2019 sebagaimana dijabarkan pada huruf C angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

5. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HMS adalah berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah beritahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350767 tanggal 15 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134578.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Agustus 2020 ("**Akta No. 10/2020**") yaitu sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
Asep Edwin Firdaus	: Direktur Utama
Tubagus Fahed Ichmar Widayasa	: Direktur
Soma Ariyaka	: Direktur
Jayanti Sari	: Komisaris Utama
Zainal Hadi HAS HB	: Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar HMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

6. **Catatan Atas Korporasi HMS**

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HMS, (i) Anggaran Dasar HMS telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham HMS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali atas:**

Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI

Akta No. 29/2019 tidak didaftarkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI

Sehubungan dengan tidak dimumukannya Akta No. 29/2019 dalam BNRI dan Tambahan BNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan Surat Keterangan No 004/NOT/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, pencetakan pengumuman dalam BNRI atas Akta No. 29/2019 tersebut di atas sedang diurus di instansi yang berwenang dan apabila telah selesai dicetak maka akan diserahkan kepada HMS.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut di atas, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap HMS.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -25-

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HMS telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HMS telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas upah minimum, Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan keikutsertaan HMS dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan HMS. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HMS, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HMS, jumlah pekerja HMS tidak mencapai 10 (sepuluh) orang dan oleh karenanya tidak terdapat perizinan dan/atau dokumen yang terkait dengan peraturan perusahaan yang perlu dimiliki atau dipenuhi oleh HMS berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UUCK.
9. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material HMS dengan pihak ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga HMS**") dan (ii) perjanjian-perjanjian HMS dengan pihak afiliasi, yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi HMS**") (Perjanjian Pihak Ketiga HMS dan Perjanjian Afiliasi HMS secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian HMS**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perjanjian HMS telah dibuat oleh HMS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar HMS dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian HRT sah dan mengikat HMS;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HMS sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HMS, sepanjang pengetahuan HMS, HMS sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana HMS menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan HMS dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan Perjanjian HMS yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan; danDengan tidak adanya larangan dalam Perjanjian HMS, yang sekiranya dapat membatasi rencana Penawaran Umum Perdana, maka:
 - a. Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana; dan
 - b. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat disalurkan kepada HMS dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (*use of proceed*) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.
10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, HMS tidak membutuhkan penguasaan atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya dan dengan demikian HMS tidak memiliki aset material.
11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap HMS, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HMS, HMS tidak memiliki aset material yang perlu diasuransikan.

PT Hasnur Internasional Shipping, Tbk.

No. Ref.: 1022/FH/VIII/21

Halaman -26-

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) HMS sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan HMS; dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris HMS sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris HMS, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. HMS tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris HMS tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hanafiah Ponggawa & Partners



Fabiola Hutagalung, S.H.

STTD No. STTD.KH-200/PM.2/2018

HKHPM No. 200902

XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



HASNUR GROUP

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018/**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018***

(MATA UANG RUPIAH/*RUPIAH CURRENCY*)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	Halaman/ Page	
Daftar Isi		Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3-4	<i>.....Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	5-6	<i>...Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian....	8-134	<i>..Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Lampiran I-VI.....	135-140	<i>.....Attachment I-VI</i>



HASNUR GROUP

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA ("GRUP")
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES (THE "GROUP")
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- Nama : **Jayanti Sari**
Alamat Kantor : Office 8, 7th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Alamat Domisili : Jl. Kartika Utama SM-21,
RT 014 RW 016,
Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Telepon : 021-29343888
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : **Achmad Ma'mur**
Alamat Kantor : Office 8, 7th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Alamat Domisili : Jl. Niaga Raya BK 1 A,
RT 007 RW 011,
Kelurahan Sepanjang Jaya,
Kecamatan Rawalumbu,
Kota Bekasi
Telepon : 021-29343888
Jabatan : Direktur

- Name : **Jayanti Sari***
*Office Address : **Office 8, 7th Floor,***
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190
*Address of Domicile : **Jl. Kartika Utama SM-21,***
RT 014 RW 016,
Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
*Telephone : **021-29343888***
*Title : **President Director***
- Name : **Achmad Ma'mur***
*Office Domicile : **Office 8, 7th Floor,***
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190
*Address of Domicile : **Jl. Niaga Raya BK 1 A ,***
RT 007 RW 011,
Kelurahan Sepanjang Jaya,
Kecamatan Rawalumbu,
Kota Bekasi
*Telephone : **021-29343888***
*Title : **Director***

Menyatakan bahwa:

Declared that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
- Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Group;*
- The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
- All information contained in the consolidated financial statements of the Group have been disclosed in a complete and truthful manner;*
 - The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit information or material facts; and*
- We are responsible for the internal control system of the Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 11 Mei 2021/May 11, 2021
Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


Jayanti Sari
Direktur Utama/President Director


Achmad Ma'mur
Direktur/Director





Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298

www.crowe.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Laporan No. 00598/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/V/2021

Report No. 00598/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/V/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

*The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors*

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditor's responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 2

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti dijelaskan dan diungkapkan pada Catatan 1c dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan memperoleh kepemilikan mayoritas pada PT Hasnur Resources Terminal, entitas sepengendali, pada bulan Juni 2020. Perusahaan mencatat transaksi akuisisi tersebut menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Page 2

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As explained and disclosed in Notes 1c and 32 to the consolidated financial statements, the Company acquired majority ownership in PT Hasnur Resources Terminal, an under common control entity, in June 2020. The Company recorded this acquisition transaction under the pooling of interest method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control". Therefore, the Company's statements of financial position as of December 31, 2019, 2018 and January 1, 2018/ December 31, 2017 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2019 and 2018, have been presented as if they had been combined since the beginning of the period when the combining entities are under common control.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 3

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00096/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian.

Page 3

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Hasnur Intemasional Shipping Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the years then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Hasnur Intemasional Shipping Tbk (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020, 2019 and 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have issued the independent auditors' report No. 00096/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/III/2021 dated March 5, 2021 on the consolidated financial statements of PT Hasnur Intemasional Shipping Tbk and its Subsidiary for years ended December 31, 2020, 2019 and 2018. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, as described in Note 30 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements for years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 33 to the consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 4

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Hasnur Internasional Shipping Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Page 4

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk in Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**Mulyadi**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0008

11 Mei 2021/May 11, 2021

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019**)	2018 *) **)	1 Januari/ January 1, 2018 31 Desember/ December 31, 2017 *) **)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e,2g,2s,3, 4,25,26,27	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928	12.123.900.579	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto						Trade receivables - net
Pihak ketiga	2e,2f,2k,3,5,11,	16.602.381.547	11.305.986.757	17.995.343.569	30.611.664.603	Third parties
Pihak-pihak berelasi	15,23,25,27	31.342.438.692	98.155.262.715	58.138.272.643	44.716.330.376	Related parties
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	2e,3,25,27	790.265.083	1.485.334.927	2.004.596.280	1.446.308.538	Third parties
Persediaan	2i,3,6,11,15	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727	2.086.542.313	Inventories
Beban dibayar dimuka	2h,7	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184	1.060.349.572	Prepayment
Uang muka - bagian lancar	2h,8	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555	199.015.905	Advance payments - current portion
Pajak dibayar dimuka	2p,16	1.330.157.644	-	-	-	Prepaid tax
TOTAL ASET LANCAR		92.266.921.060	139.289.412.561	102.489.975.886	92.244.111.886	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - neto						Trade receivables - net
Pihak ketiga	2e,2f,2k,3,5,11,	1.466.438.021	-	-	-	Third parties
Uang muka pembelian lahan	2f,23	26.823.491.000	-	-	-	Advance for purchase of land
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp184.825.798.291 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp161.891.815.408 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp140.965.654.711 pada tanggal 31 Desember 2018	2j,2l, 3,9,11,15	230.909.554.164	204.041.498.985	223.576.833.592	204.659.139.961	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation Rp184,825,798,291 as of December 31, 2020, Rp161,891,815,408 as of December 31, 2019, Rp140,965,654,711 as of December 31, 2018
Uang muka - bagian tidak lancar	2h,8	-	-	-	11.843.040.000	Advance payments - non-current portion
Beban docking ditangguhkan - setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp63.363.768.690 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp49.436.458.549 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp38.660.610.750 pada tanggal 31 Desember 2018	2h,10,21	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255	10.425.599.376	Deferred charges on docking - net of amortization Rp63,363,768,690 as of December 31, 2020, Rp49,436,458,549 as of December 31, 2019, Rp38,660,610,750 as of December 31, 2018
Piutang dari pihak-pihak berelasi - bagian tidak lancar	2e,2f,3, 23,25,27	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862	57.897.972.432	Due from related parties - non-current portion
Aset pajak tangguhan	2p,2q,3,16	509.663.610	547.475.711	2.291.936.314	508.215.658	Deferred tax assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		286.131.053.493	289.372.124.293	300.825.770.023	285.333.967.427	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909	377.578.079.313	TOTAL ASSETS

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

***) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019 **)	2018 *) **)	1 Januari/ January 1, 2018 31 Desember/ December 31, 2017 *) **)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	2e, 3, 11	-	-	-	9.800.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha	2e, 2f, 3, 12, 23, 25, 27	43.415.406	3.100.589.681	34.418.095.685	35.997.525.498	Trade payables
Pihak berelasi						Related parties
Pihak ketiga		29.020.859.669	24.473.817.561	30.151.933.579	36.613.111.922	Third parties
Utang lain-lain	2e, 3, 13, 25, 27	471.146.230	294.714.485	123.635.618	233.250.411	Other payables
Pihak ketiga						Third parties
Liabilitas yang masih harus dibayar	2e, 3, 14, 25, 27	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504	4.389.957.537	Accrued liabilities
Utang pajak	2p, 3, 16	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083	3.173.922.155	Taxes payable
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	2e, 2f, 2v, 3, 23, 25, 27	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552	33.000.000	Due to related parties - current portion
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2e, 2m, 2v, 3, 15, 25, 27	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936	6.466.766.946	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		54.058.635.372	54.335.890.340	91.555.297.957	96.707.534.469	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	2e, 2f, 2s, 3, 23, 25, 27	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585	40.875.564.194	Due to related parties - long term portion
Liabilitas derivatif	2e, 3, 15, 24, 27	-	-	-	266.514.630	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2e, 2m, 2v, 3, 15, 25, 27	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000	6.466.766.940	Long-term bank loans - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	2n, 2o, 3, 17	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877	12.746.353.331	Employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		75.313.726.078	108.863.157.566	59.973.665.462	60.355.199.095	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		129.372.361.450	163.199.047.906	151.528.963.419	157.062.733.564	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - Rp2.100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018						Share capital - Rp2,100,000 per share as of December 31, 2020 and Rp1,000,000 per share as of December 31, 2019 and 2018
Modal dasar - 840.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018						Authorized - 840,000 shares as of December 31, 2020 and 400,000 shares as of December 31, 2019 and 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	18	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	Issued and fully paid - 100,000 shares as of December 31, 2020, December 31, 2019 and 2018,
Tambahan modal disetor	1c	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075	-	Additional paid-in capital
Saldo laba		30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671	71.899.589.424	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain:						Other comprehensive income:
Bagian efektif dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	2e, 24	-	-	-	248.931.782	Effective portion of unrealized gain on derivative transaction designated as cash flow hedge
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2d	-	30.681.156.165	44.750.448.744	48.362.587.541	Proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan non-pengendali		247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490	220.511.108.747	Total equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
		1.724.055.129	-	-	4.237.002	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490	220.515.345.749	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909	377.578.079.313	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

**) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019 **)	2018 *) **)	
PENDAPATAN NETO	2f,20,23	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2f,2n,21,23	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	2f,2n,22,23	31.181.805.572	25.865.676.027	32.812.061.518	General and administrative
LABA USAHA		33.140.341.225	42.593.299.352	28.552.376.305	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan jasa keagenan - neto		663.892.445	615.044.453	821.355.189	Income agency services - net
Pendapatan bunga		563.900.597	831.727.371	447.309.860	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto		140.123.462	(14.812.063)	274.932.986	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	24	-	-	515.446.412	Ineffective portion of gain on derivative transaction designated as cash flow hedge
Beban bunga	11,15	(12.539.795.928)	(6.569.841.848)	(4.380.645.685)	Interest expense
Lain-lain - neto		9.866.753	174.841.903	1.155.498.983	Miscellaneous - net
Beban lain-lain - neto		(11.162.012.671)	(4.963.040.184)	(1.166.102.255)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		21.978.328.554	37.630.259.168	27.386.274.050	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2p,3,16				INCOME TAX EXPENSE
Kini - Final		3.533.988.999	4.314.323.046	4.244.984.954	Current - Final
Kini - Tidak final		634.026.715	849.613.404	741.293.331	Current - Non final
Tanggungan		59.394.386	1.708.733.628	(1.843.060.454)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan		4.227.410.100	6.872.670.078	3.143.217.831	Income Tax Expense
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		17.750.918.454	30.757.589.090	24.243.056.219	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		875.156.034	(322.526.498)	3.773.719.997	PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA TAHUN BERJALAN		18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216	INCOME FOR THE YEAR

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

**) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2020	2019 **)	2018 *) **)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that may not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	20,17	(3.226.073.346)	452.844.344	(190.737.791)	Remeasurement of - employee benefit liabilities
- Manfaat pajak penghasilan terkait		21.582.285	(35.726.975)	(43.156.544)	Related income tax - expense
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		(3.204.491.061)	417.117.369	(233.894.335)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		-	(107.180.924)	(129.469.634)	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		(3.204.491.061)	309.936.445	(363.363.969)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:					INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	29	18.495.659.911	30.435.062.592	28.016.776.216	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		130.414.577	-	-	Non-controlling interest
TOTAL		18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216	TOTAL
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		15.498.102.435	30.744.999.037	27.653.412.247	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(76.519.008)	-	-	Non-controlling interest
TOTAL		15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	28	184.956	304.351	280.167	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

**) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
 Net Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Laba Komersial dan Lain-lain/ Other Comprehensive Income	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Total/ Total	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of December 31, 2017*)	Income for the year	Realization of derivative OCI	Other comprehensive income for the year	Disposal of subsidiary	Balance as of December 31, 2018*) **)	Income for the year	Other comprehensive income for the year	Proforma equity adjustments arising from restructuring transactions under common control	Cash dividends	Balance as of December 31, 2019 **)
Saldo 31 Desember 2017*)	100.000.000.000	-	71.899.589.424	248.931.782	48.362.587.541	220.511.108.747	4.237.002	220.515.345.749											
Laba tahun berjalan	-	-	28.016.776.216	-	-	28.016.776.216	-	28.016.776.216											
Realisasi OCI derivatif	-	-	-	(248.931.782)	-	(248.931.782)	-	(248.931.782)											
Laba komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(363.363.969)	-	-	(363.363.969)	-	(363.363.969)											
Pelepasan entitas anak	-	7.483.332.075	-	-	(3.612.138.797)	3.871.193.278	(4.237.002)	3.866.956.276											
Saldo 31 Desember 2018*) **)	100.000.000.000	7.483.332.075	99.553.001.671	-	44.750.448.744	251.786.782.490	-	251.786.782.490											
Laba tahun berjalan	-	-	30.435.062.592	-	-	30.435.062.592	-	30.435.062.592											
Laba komprehensif lain tahun berjalan	-	-	309.936.445	-	-	309.936.445	-	309.936.445											
Penyesuaian proforma ekuitas dan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	(14.069.292.579)	(14.069.292.579)	-	(14.069.292.579)											
Dividen kas	-	-	(3.000.000.000)	-	-	(3.000.000.000)	-	(3.000.000.000)											
Saldo 31 Desember 2019 **)	100.000.000.000	7.483.332.075	127.298.000.708	-	30.681.156.165	265.462.488.948	-	265.462.488.948											

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
 Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Net Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity							Keperluan Non-Pengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital/ Issued and Fully Paid	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Labai/ Retained Earnings	Labas Korporatif Lain/Other Comprehensive Income	Bagian Efektif dari Laba yang Belum Direalisasi atas Transaksi Derivatif yang Ditetapkan sebagai Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Unrealized Gain on Derivative Transaction Designated as Cash Flow Hedge	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Total/ Total		
Saldo 31 Desember 2019**)	100.000.000.000	7.483.332.075	127.298.000.708	-	30.681.156.165	265.462.488.948	-	265.462.488.948	
Penyesuaian saldo atas Penerapan awal PSAK 71	2v,5	-	(993.043.850)	-	-	(993.043.850)	-	(993.043.850)	
Saldo 1 Januari 2020	100.000.000.000	7.483.332.075	126.304.956.858	-	30.681.156.165	264.469.445.098	-	264.469.445.098	
Labas tahun berjalan	-	-	18.495.659.911	-	-	18.495.659.911	130.414.577	18.626.074.488	
Labas komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(3.127.972.053)	-	-	(3.127.972.053)	(76.519.008)	(3.204.491.061)	
Dividen setoran	2r,18	107.000.000.000	(107.000.000.000)	-	-	-	-	-	
Penambahan modal	18	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	
Dividen kas	2r,18	-	(4.565.259.388)	-	-	(4.565.259.388)	-	(4.565.259.388)	
Akuisisi entitas anak	1c,19	-	(289.159.429)	-	(30.681.156.165)	(30.970.315.594)	1.670.159.560	(29.300.156.034)	
Saldo 31 Desember 2020	210.000.000.000	7.194.172.646	30.107.385.328	-	247.301.557.974	1.724.055.129	249.025.613.103		

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

**) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019 **)	2018 *) **)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		342.244.393.871	339.892.319.387	355.617.725.168	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga		563.900.597	831.727.371	447.309.860	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya		(236.944.642.262)	(341.470.532.598)	(282.639.584.138)	Cash payments to suppliers, employees and others
Pembayaran kas beban bunga		(12.539.795.928)	(6.569.841.848)	(4.380.645.685)	Cash payments for expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan		(4.267.425.887)	(4.631.261.235)	(4.879.059.962)	Cash payments of corporate income tax
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		89.056.430.391	(11.947.588.923)	64.165.745.243	Net cash provided by operating activities (used in)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pengurangan (penambahan) piutang pihak-pihak berelasi		55.214.799.208	(14.950.850.227)	(10.474.681.673)	Decrease (increase) in due from related parties
Perolehan aset tetap	9,31	(49.802.038.062)	(1.390.826.090)	(31.809.378.997)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penambahan beban docking ditangguhkan		(18.511.312.021)	(9.421.368.078)	(14.996.649.890)	Addition of deferred charges on docking
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(13.098.550.875)	(25.763.044.395)	(57.280.710.560)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	31	33.154.800.000	65.000.000.000	104.044.980.000	Proceeds from bank loans
Penambahan setoran modal	18	3.000.000.000	-	-	Additional share capital
Penerimaan utang kepada pihak-pihak berelasi	31	-	776.000.000	4.708.024.500	Proceeds from due to related parties
Liabilitas derivatif		-	-	(266.514.630)	Derivative liability
Pembayaran pinjaman bank	31	(75.802.654.082)	(12.852.112.854)	(92.952.766.950)	Payment of bank loans
Pembayaran utang kepada pihak-pihak berelasi	31	(20.733.281.968)	(9.206.841.367)	(15.331.766.300)	Payment of due to related parties
Pembayaran kas dividen	18	(4.565.259.388)	(3.000.000.000)	-	Payment of cash dividends
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(64.946.395.438)	40.717.045.779	201.956.620	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		11.011.484.078	3.006.412.461	7.086.991.303	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		21.782.812.389	18.776.399.928	12.123.900.579	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
Penurunan kas dan bank dari pelepasan entitas anak		-	-	(434.491.954)	Decrease in cash on hand and in banks from deconsolidation of subsidiary
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	4	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1d)/The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 1d)

**) Disajikan kembali (Catatan 32)/As restated (Note 32)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Grup dan informasi umum

PT Hasnur Internasional Shipping (“Perusahaan”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Ira Sudjono, S.H., No. 47 tanggal 14 Desember 2009. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 82, Tambahan No. 29410 tanggal 12 Oktober 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No. 11 tanggal 14 Agustus 2020, sehubungan dengan perubahan pemegang saham dan susunan dewan direksi dan komisaris. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0350768 tanggal 15 Agustus 2020.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan kantor pusatnya beralamat di Office 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar Perusahaan, tujuan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam pengiriman barang laut domestik, termasuk transportasi kargo, pengiriman industri dan layanan kapal sewaan.

Perusahaan memulai usaha komersial pada Agustus 2010. Grup merupakan bagian dari Grup Hasnur.

Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya dan Perusahaan memiliki kantor untuk mendukung kegiatan operasionalnya di Jl. Berangas Timur No. 95A, Alalak Utara, Kalimantan Selatan.

1. GENERAL

a. The Group’s Establishment and general information

PT Hasnur Internasional Shipping (the “Company”) was established in Jakarta based on the Notarial Deed No. 47 of Ira Sudjono, S.H., dated December 14, 2009. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 dated January 6, 2010 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 82, Supplement No. 29410 dated October 12, 2010.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 11 of Indra Tjahja Rinanto, S.H., dated August 14, 2020, concerning changes in the composition of shareholders and Boards of Commissioners and Directors. The amendment was reported to and accepted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Approval Letter No. AHU-AH.01.03-0350768 dated August 15, 2020.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located Office 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s objective and scope is to engage in the domestic ocean freight forwarding, including cargo transportation, industrial shipping and chartered vessel services.

The Company commenced its commercial operations in August 2010. The Group is part of Hasnur Group.

Currently, the Company and its Subsidiary are engaged in the business of transportation goods by using ships that are specifically designed to transport a certain type of goods, including the sea freight charter business and its operators the Company has an office to support its operation activities in in Jl. Berangas Timur No. 95A, Alalak Utara, Kalimantan Selatan.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No. 11 tanggal 14 Agustus 2020, tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB :
Komisaris : Abdurrachman Kunwibowo :

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari :
Direktur : Achmad Ma'mur :
Direktur : Soma Ariyaka :

Berdasarkan Akta Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 5 tanggal 5 Juni 2018, tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Rachmadi HAS :
Komisaris : Zainal Hadi HAS HB :
Komisaris : Yuni Abdi Nurhas :
Komisaris : Masyhur Hamdan :

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari :
Direktur : Hasnuryani :
Direktur : H. Syamsuddin :
Direktur : Achmad Ma'mur :

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup memiliki karyawan tetap masing-masing sejumlah 77, 73 dan 73 orang (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup telah membayar remunerasi Komisaris dan Dewan Direksi masing-masing sebesar Rp7.473.036.177, Rp5.307.548.139 dan Rp5.701.532.890.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 11 of Indra Tjahja Rinanto, S.H., dated August 14, 2020, concerning changes the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors. The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director

Based on Notarial Deed No. 5 of Drs. Soebiantoro, S.H., dated June 5, 2018, concerning changes the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors. The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group had a total of 77, 73 and 73 permanent employees, respectively (unaudited).

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group was remuneration payment to Board of Commissioners and Board of Directors amounting to Rp7,473,036,177, Rp5,307,548,139 and Rp5,701,532,890 respectively.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Ruang Lingkup Usaha/Scope of Activities	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ Domicile, Date of Establishment	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ Commencement of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Total Aset Sebelum Jurnal Eliminasi (dalam jutaan/ Total Assets Before Elimination Entries (in million))		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership									
PT Hasnur Resources Terminal (HRT)	Penyedia jasa terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya/ Terminal and other port facilities	Kalimantan Selatan, 9 Mei 2011/ May 9, 2011	2011	95.00%	-	-	36,481	-	-
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership									
PT Hasnur Mitra Sarana (HMS)	Jasa bongkar muat/ Loading and unloading services	Kalimantan Selatan, 14 Desember 2009/ South Kalimantan, December 14, 2009	2009	99.80%	-	-	204	-	-

PT Barito Putera Docking (BPD)

Berdasarkan Akta Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 78 tanggal 30 Mei 2018, Perusahaan menjual seluruh saham BPD yang dimilikinya kepada PT Hasnur Jaya Tambang (HJT) sebanyak 8.464 lembar saham dan PT Hasnur Group Indonesia (HGI) sebanyak 34 lembar saham dengan harga jual sebesar Rp8.498.000.000. Selisih antara nilai tercatat investasi dengan harga jual sebesar Rp7.483.332.075 disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Arus kas neto dari transaksi tersebut sebesar Rp434.491.954 setelah dikurangkan dengan saldo kas BPD.

Perhitungan dari selisih pelepasan untuk entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

	2018
Nilai tercatat aset lancar	419.963.103
Nilai tercatat aset tidak lancar	4.463.270.282
Nilai tercatat liabilitas jangka pendek	3.803.832.449
Nilai tercatat liabilitas jangka panjang	64.733.011
Nilai tercatat aset bersih yang dilepaskan	1.014.667.925
Harga jual	8.498.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	7.483.332.075

PT Barito Putera Docking (BPD)

Based on Notarial Deed No. 78 of Drs. Soebiantoro, S.H., dated May 30, 2018, the Company sold all of its BPD shares to PT Hasnur Jaya Tambang (HJT) with 8,464 shares and PT Hasnur Group Indonesia (HGI) with 34 shares with total selling price of Rp8,498,000,000. The difference between the carrying amount of investment with selling price amounting to Rp7,483,332,075 was presented as "Additional Paid-In Capital" as a component of equity in the consolidated statements of financial position. Net cash flow from the transaction amounted to Rp434,491,954 after deducting BPD's cash balance.

The computation of the difference in the disposal of business for entities under common control is as follows:

Carrying value of current assets
Carrying value of non-current assets
Carrying value of short-term liabilities
Carrying value of long-term liabilities
Carrying value of disposal of net assets
Selling price

Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup

PT Hasnur Resources Terminal (HRT)

Sesuai dengan Akta Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No. 30 pada tanggal 30 Juni 2020, pemegang saham PT Hasnur Resources Terminal (HRT) menyetujui untuk meningkatkan modal dasar saham dan mengubah nilai nominal saham. Selanjutnya, sesuai dengan Akta Notaris No. 3 pada tanggal 3 Agustus 2020, dari Notaris yang sama, pemegang saham HRT, PT Hasnur Jaya International dan PT Hasnur Jaya Utama, menjual 2.375.000 lembar saham kepada Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp29.925.000.000. Perusahaan melakukan pembayaran secara non-kas untuk harga pembelian sebesar Rp29.925.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari "Utang kepada pihak-pihak berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan keterangan di atas, kepemilikan Perusahaan di HRT menjadi 95%.

Transaksi akuisisi dicatat sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", akuisisi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018/31 Desember 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian (Catatan 32).

Selisih antara harga beli dan nilai aset bersih yang diakuisisi dicatat sebagai bagian dari "Tambah modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2020.

1. GENERAL (continued)

c. The Group Structure

PT Hasnur Resources Terminal (HRT)

Based on Notarial Deed No. 30 of Indra Tjahja Rinanto, S.H. dated June 30, 2020, PT Hasnur Resources Terminal's (HRT) shareholders approved to increase the authorized share capital and changes nominal amount of shares. Furthermore, based on Notarial Deed No. 3 of the same Notary, dated August 3, 2020, the shareholders of HRT, PT Hasnur Jaya International and PT Hasnur Jaya Utama, sold 2,375,000 shares to the Company, which has a nominal amount of Rp29,925,000,000. The Company paid the shareholders through non-cash for the purchase price of Rp29,925,000,000 and was recorded as part of "Due to related parties" in the consolidated statement of financial position.

As a result of the above, the Company's ownership in HRT became 95%.

The acquisition above is considered as restructuring transaction between entities under common control. In accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control", the restructuring was treated under the pooling of interest method. Therefore, the Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, 2018 and January 1, 2018/December 31, 2017 and the related consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2019 and 2018, have been presented as if they had been combined since the beginning of the period when the combining entities are under common control (Note 32).

The difference between the purchase price and the net asset value acquired, was recorded as part of "Additional paid-in capital" account in the 2020 consolidated statement of financial position.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup

PT Hasnur Resources Terminal (HRT)
(lanjutan)

Perhitungan dari selisih akuisisi untuk entitas sependengali adalah sebagai berikut:

	2020
Nilai tercatat aset lancar	7.314.448.459
Nilai tercatat aset tidak lancar	93.137.394.276
Nilai tercatat liabilitas jangka pendek	10.933.194.068
Nilai tercatat liabilitas jangka panjang	59.882.808.096
Nilai tercatat aset bersih yang dilepaskan	29.635.840.571
Harga perolehan	29.925.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	289.159.429

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anaknya ("Grup") bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kembali pada tanggal 11 Mei 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan VIII.G.7 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. GENERAL (continued)

c. The Group Structure

PT Hasnur Resources Terminal (HRT)
(continued)

The computation of the difference in the acquisition of business for entities under common control is as follows:

Carrying value of current assets	7.314.448.459
Carrying value of non-current assets	93.137.394.276
Carrying value of short-term liabilities	10.933.194.068
Carrying value of long-term liabilities	59.882.808.096
Carrying value of disposal of net assets	29.635.840.571
Purchase price	29.925.000.000
Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control	289.159.429

d. Completion of the Financial Statements

The management of the Company and its Subsidiaries ("Group") is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that were completed and authorized for reissued on May 11, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines VIII.G.7 on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (OJK).

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Grup memilih menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada Catatan 3 serta pengelolaan modal pada Catatan 25.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of several amended PSAK. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company and its Subsidiaries functional currency.

The Group elected to present one single consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and disclosed source of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 25.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the consolidated financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

b. Principles of consolidation (continued)

Laporan keuangan Entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Grup memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Group owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- b. *Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. *The Group's voting rights and potential voting rights.*

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiaries and ceases when the Group loses control of the subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiaries.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

Transaksi antar Perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar Grup dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas anak;
- b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

Inter-Company transactions, balances and unrealized gains and losses on transactions between Group companies are eliminated. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are also eliminated in full on consolidation.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiaries is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

A change in the ownership interest of a subsidiaries, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiaries, it:

- a. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiaries;*
- b. *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- c. *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- d. *recognizes the fair value of the consideration received;*
- e. *recognizes the fair value of any investment retained;*
- f. *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
- ii) untuk diperdagangkan;
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
- ii) untuk diperdagangkan;
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

- g. reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

c. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
- ii) held primarily for the purpose of trading;
- iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle;
- ii) held primarily for the purpose of trading;
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period; or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Berdasarkan PSAK 38, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor.

e. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Business combination of entities under common control

Business combination involving entities under common control is accounted in accordance with PSAK 38. Under PSAK 38, business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, is not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction does not result in a gain or loss for the Group as a whole or for individual entities within the Group.

Since the business combination transaction of entities under common control does not result to change of ownership in terms of the economic substance of the business which are exchanged, the transaction is recognized in the carrying amount based on the pooling of interest method.

In applying pooling of interest method, the components of the financial statements for the period during which the restructuring occurred and for other periods presented for comparison purposes are presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the entity is under common control. The carrying values of the elements of those statements are the carrying amount of the joining entity in a business combination under common control. The difference between the consideration transferred and the carrying amount of any business combination under common control transactions in equity are presented under additional paid-in capital.

e. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

From January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 71, which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Aset keuangan

(i) Financial assets

Mulai 1 Januari 2020

From January 1, 2020

Pengakuan awal

Initial recognition

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

Financial assets are classified in the two categories as follows:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. Financial assets at amortised cost;
2. Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan bank, piutang usaha - neto, piutang lain-lain dan piutang pihak-pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

The Group's financial assets include cash on hand and in banks, trade receivables - net, other receivables and due from related parties which are classified as financial assets at amortized cost. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Financial assets at amortised cost.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the *Effective Interest Rate* ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) Liabilitas keuangan

(ii) Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

1. Financial liabilities at amortised cost;
2. Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL).

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup meliputi pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka panjang, utang kepada pihak-pihak berelasi dan liabilitas derivatif. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The Group's financial liabilities include short-term bank loan, trade payables, other payables, accrued liabilities, long-term bank loan, due to related parties and derivative liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

Financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statement of profit or loss.

Gains or losses are recognized in the consolidated profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Financial liabilities at fair value through profit or loss.

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through the consolidated profit or loss.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Grup yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Perusahaan melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing menggunakan kontrak valuta berjangka dan swap suku bunga. Penggunaan derivatif lebih rinci diungkapkan pada Catatan 24.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated profit or loss.

Derivative financial instruments and hedging activities

The Company enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, using foreign exchange forward contracts and interest rate swaps. Further details on the use of derivatives are disclosed in Note 24.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (lanjutan)

Derivative financial instruments and hedging activities (continued)

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus. Dampak Perjanjian Induk Saling-Hapus terhadap posisi keuangan Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 24.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company has both a legally enforceable right and intention to offset. The impact of the Master Netting Agreements on the Company's financial position is disclosed in Note 24.

Sejak 1 Januari 2020

Starting January 1, 2020

Pada insepisi hubungan lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item lindung nilai, beserta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Selanjutnya, pada insepisi lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perusahaan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai tersebut efektif dalam saling hapus antara perubahan nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilai, yaitu ketika hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut:

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents whether the hedging instrument is effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk, which is when the hedging relationships meet all of the following hedge effectiveness requirements:

- Ada hubungan ekonomik antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai;
- Pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut; dan
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah sama dengan yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindungi nilai oleh Perusahaan dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan Perusahaan untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut.

- There is an economic relationship between the hedged item and the hedging instrument;
- The effect of credit risk does not dominate the value changes that result from that economic relationship; and
- The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Company actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Company actually uses to hedge that quantity of hedged item.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai yang berkaitan dengan rasio lindung nilai tetapi tujuan manajemen risiko untuk hubungan lindung nilai yang ditetapkan tetap sama, Perusahaan menyesuaikan rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai tersebut (misalnya, menyeimbangkan kembali lindung nilai) sehingga memenuhi kriteria kualifikasi lagi.

Perusahaan menetapkan perubahan penuh dalam nilai wajar kontrak berjangka (misalnya termasuk elemen berjangka) sebagai instrumen lindung nilai untuk semua hubungan lindung nilai yang melibatkan kontrak berjangka.

Catatan 24 menetapkan rincian dari nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Grup menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Derivative financial instruments and hedging activities (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

If a hedging relationship ceases to meet the hedge effectiveness requirement relating to the hedge ratio but the risk management objective for that designated hedging relationship remains the same, the Company adjusts the hedge ratio of the hedging relationship (i.e. rebalances the hedge) so that it meets the qualifying criteria again.

The Company designates the full change in the fair value of a forward contract (i.e. including the forward elements) as the hedging instrument for all of its hedging relationships involving forward contracts.

Note 24 sets out details of the fair values of the derivative instruments used for hedging purposes.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Fair value of financial instruments

The Group measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each consolidated statement of financial position date.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Nilai wajar dari instrumen keuangan (lanjutan)

Fair value of financial instruments (continued)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar atas aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Nilai wajar dari instrumen keuangan (lanjutan)

Fair value of financial instruments (continued)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Penyesuaian risiko kredit

Credit risk adjustment

Grup melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Grup terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan. ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events. Conditions current and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables without significant financing component.

Penghentian pengakuan

Derecognition

(i) Aset keuangan

(i) Financial assets

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

- a) The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

- b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- b) The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets (continued)

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) Liabilitas keuangan

(ii) Financial liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk instrumen keuangan pada dan sebelum 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Accounting policies applied for financial instrument as at and before December 31, 2019 are as follows:

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

(i) Aset keuangan

(i) Financial assets

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using effective interest method except for those assets in which the interest calculation is not material.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Gains or losses are recognized in profit and loss when the financial assets are derecognized or impaired effective interest rate method, except, as well as through the amortization process.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Penurunan nilai aset keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Loans and receivables (continued)

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Interest Expense" in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Impairment of financial assets

The Group assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

(i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

(i) Financial assets carried at amortized cost

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

For financial assets carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Financial liabilities (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

- (i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- (i) *Financial assets carried at amortized cost (continued)*

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

- (i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
(ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
(iii) personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.

- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) entitas dan Grup adalah anggota dari Grup usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(ii) Financial liabilities (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Impairment of financial assets (continued)

- (i) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

f. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:

- (i) has control or joint control over the Group;
(ii) has significant influence over the Group; or
(iii) is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.

- b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:

- (i) the entity and the Group are members of the same Group (which means that each parent, subsidiaries and fellow subsidiaries is related to the others);
(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) both entities are joint ventures of the same third party;

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

f. Transactions with related parties (continued)

- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Grup;
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the Group;
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a);
- (vii) a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

g. Kas dan bank

g. Cash on hand and in banks

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks, which are not pledged as collateral or restricted in use.

h. Beban dibayar dimuka

h. Prepaid expenses

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Beban dibayar dimuka (lanjutan)

Biaya pemugaran (*docking*) kapal dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi dengan metode garis lurus sampai dengan biaya pemugaran kapal berikutnya atas kapal tersebut, dan disajikan sebagai "Beban *Docking* Ditangguhkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto.

Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

j. Aset tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Prepaid expenses (continued)

Vessel dry docking costs are capitalized when incurred and are amortized on a straight-line method over the period to the next dry docking, and is shown as "Deferred Charges on Docking" in the consolidated statements of financial position.

i. Inventories

Inventory is measured at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and estimated cost necessary to make the sale. Allowance for decline in the value of the inventory is provided to reduce the carrying value of inventory to its net realizable value.

Allowance for inventory obsolescence is provided based on the periodic review of the condition of inventory.

j. Property, plant and equipment

The Group has chosen the cost model as a measurement of its property, plant and equipment accounting policy.

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Aset tetap (lanjutan)

j. Property, plant and equipment (continued)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets, as follows:

	Tahun/Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	10-20	5,00%-10,00%	<i>Buildings</i>
Kapal	10-16	6,25%-10,00%	<i>Vessels</i>
Mesin	4-8	12,50%-25,00%	<i>Machineries</i>
Kendaraan	4-8	12,50%-25,00%	<i>Vehicles</i>
Peralatan kantor	4	25,00%	<i>Office equipment</i>

Penyusutan untuk kapal dihitung menggunakan nilai residu dari nilai perolehannya. Estimasi nilai residu merupakan estimasi terbaik manajemen berdasarkan data historis atas laba penjualan kapal yang dimiliki oleh Grup, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar kapal tersebut dapat dijual, untuk lebih mencerminkan periode pengakuan pendapatan dan biaya yang lebih baik.

Depreciation of vessels is computed using residual value of its original acquisition cost. The estimated residual value of the original acquisition cost is based on management's best estimate of the historical data related to gain on sale of vessels owned by the Group, after taking into account the costs incurred in order for the vessels to be ready for sale, to properly reflect the period of recognition of revenues and expenses.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

k. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Group assesses at the end of each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

l. Sewa

Mulai 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Impairment of non-financial assets (continued)

Based on the evaluation of the management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of non-financial assets as of December 31, 2020, 2019 and 2018.

l. Leases

From January 1, 2020

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK 73 which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to lease which had been previously classified as "operating lease". This policy is applied to contracts entered into or charged, on or after January 1, 2020.

The adoption of PSAK 73 has no material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements.

As lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset;
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai pesewa

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan beberapa properti investasinya.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessor

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to some of its investment properties.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When the Group is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Group's net investment outstanding in respect of the leases.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease obligation.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Sebagai pesewa

As lessee

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

m. Biaya emisi utang

m. Debt issuance costs

Biaya emisi utang dari pinjaman jangka panjang dikurangkan dari penerimaan pinjaman jangka panjang. Biaya emisi utang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Debt issuance costs of long-term loans are deducted from the proceeds of long-term loans. The debt issuance costs are amortized using effective interest rate method.

n. Pengakuan pendapatan dan beban

n. Revenue and expenses recognition

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

From January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.

1. Identify contract(s) with a customer.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri *relative* diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and expenses recognition (continued)

2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Pendapatan belum ditagihkan" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Pendapatan dari jasa pelayaran/angkutan laut diakui berdasarkan kesepakatan bersama antara Grup dan penyewa kapal sebagai berikut:

1. Pendapatan dari jasa pengangkutan berdasarkan *spot* diakui ketika barang diangkut, sesuai dengan *Bill of Lading*.
2. Pendapatan dari *demurrage* terjadi ketika proses pengangkutan melebihi waktu yang disepakati, biasanya karena terjadi hal-hal yang berada di luar kendali Grup, nilai penalti telah tertuang dalam perjanjian (Surat Perjanjian Angkutan Laut-SPAL).
3. Pendapatan dari jasa perbaikan dan pemeliharaan diakui ketika jasa diberikan atau disediakan secara signifikan dan manfaat telah diterima oleh pelanggan.
4. Pendapatan dari *time charter* diakui secara proporsional selama periode yang dicakup sesuai dengan kontrak.

Pendapatan dari bantuan layanan bongkar muat diakui ketika layanan diberikan atau disediakan secara signifikan dan manfaat telah diterima oleh pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and expenses recognition (continued)

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Unbilled revenue" and contract liabilities are presented under "Unearned revenue".

The adoption of PSAK 72 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

Revenues from shipping/marine transportation are recognized based on agreement between the Group and customers are as follows:

1. *Revenues from freight operations based on spot are recognized when the goods are transported, in accordance with Bill of Lading.*
2. *Revenues from demurrage occurs when the shipping process exceeds the agreed time, usually because of circumstances that happen beyond the Group's control, the value of the penalty has been contained in the agreement (Surat Perjanjian Angkutan Laut-SPAL).*
3. *Revenue from repair and maintenance service are recognized when the services are rendered or significantly provided and the benefits have been received by the customer.*
4. *Revenue from time charter is recognized proportionally over the period covered in accordance with the contract.*

Revenues from assistance of loading and unloading services are recognized when the services are rendered or significantly provided and the benefits have been received by the customers.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan dan beban lainnya

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai aset lancar lain-lain. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban lain-lain

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

o. Imbalan kerja

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang").

Berdasarkan PSAK No. 24, perhitungan estimasi liabilitas atas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Revenue and expenses recognition (continued)

Expenses

Expenses from contracts with customers and other expenses

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental of obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72 and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Other expenses

Expenses are recognized when incurred accrual basis).

o. Employee benefits

The Group recognized unfunded employee benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law").

Under PSAK No. 24, the calculation of estimated liability for employees benefits based on Labor Law No. 13/2003, is determined using the "Projected Unit Credit" method.

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Actuarial gain and losses;
- ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest;
- iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyelesaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada penghasilan komprehensif lainnya pada periode/tahun di mana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

p. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee benefits (continued)

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

Actuarial gain and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in period/year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

p. Income tax

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax. Income tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan final

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak bersifat final sebesar 1,2% dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan tahun berjalan sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan total pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih lebih (kurang) antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar dimuka (utang pajak).

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Income tax (continued)

Final income tax

Based on the Decision Letters No. 416/KMK.04/1996 dated June 14, 1996 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Circular Letter No. 29/PJ.4/1996 dated August 13, 1996 of the Directorate General of Taxes, revenues from freight operations and charter of vessels are subject to final income tax computed at 1.2% of the revenues for domestic companies, and the related costs and expenses are considered non-deductible for income tax purposes.

Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period for accounting purposes.

The positive (negative) difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax (tax payable).

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

q. Provisi dan kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

q. Provisions and contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Provisi dan kontinjensi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

r. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

s. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan konsolidasian.

Kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,

	2020	2019	2018
1 Dolar Amerika Serikat	14.105	13.901	14.481

United States Dollar 1

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provisions and contingencies (continued)

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

r. Dividends

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

s. Foreign currency transactions and balances

Transactions during the year involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are recognized in the current year's consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The middle rates of exchanges of Bank Indonesia used are as follows:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Laba per saham dasar

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

u. Informasi segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

v. Standar akuntansi baru

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup. Grup telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Basic earnings per share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing the total income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

u. Segment information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing certain products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risk and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, result, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated in the consolidation process.

v. New accounting standards

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2020 and have not been early adopted by the Group. The Group has assessed the impact of these new standards and interpretations as set out below:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

The narrow-scope amendments to PSAK 1 clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (i.e. the receipt of a waver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

Amandemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors". The amendments will become effective on January 1, 2023 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination"

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, amendemen PSAK 22 tersebut:

These amendments clarify the definition of business for the purpose of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition. In general, the amendments to PSAK 22:

- a. mengamendemen definisi bisnis;
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output; dan

- a. amended the definition of business;
- b. added an optional concentration test that allows a simplified assessment of whether the acquired set of activities and assets is not a business;
- c. clarified the business element that to be considered as a business, an integrated set of activities and assets acquired includes, as a minimum, substantive inputs and processes that together contribute significantly to the ability to produce outputs; and

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" (lanjutan)

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination" (continued)

d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

d. added illustrative guidance and examples to help the entity assess whether substantive processes have been acquired.

Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

The amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Definition of Business" will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual"

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Reference to Conceptual Framework"

Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual" ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual pelaporan keuangan.

The amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Reference to Conceptual Framework" clarifies the interaction between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework for financial reporting.

Secara umum, Amandemen PSAK 22 ini:

In general, the amendments to PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

- Add descriptions regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30" stated in paragraphs 21A-21C.

- Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adding paragraph 23A regarding the definition of a contingent asset and its accounting treatment.

Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

The amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Reference to Conceptual Framework" will become effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts"

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

These amendments clarify the cost of fulfilling a contract when assessing whether a contract is onerous.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" (lanjutan)

- *Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts" (continued)*

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

The amendments to PSAK 57 specify that the cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of:

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

1. *Incremental costs of fulfilling that contract; and*
2. *Allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts.*

Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

The amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts" will become effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

- *Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2"*

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73, "Sewa" yang terkait dengan:

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 addresses issues that may affect financial reporting during the interest rate benchmark reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the interest rate benchmark with a new alternative reference. These amendments amend the requirements in PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 62, "Insurance Contracts" and PSAK 73, "Leases" related to:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

- *changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;*
- *hedge accounting; and*
- *disclosures.*

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2" (lanjutan)

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2" (continued)

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 only applies to changes required by the interest rate benchmark reform for financial instruments and hedging relationships. These amendments will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

As a result of the COVID-19 pandemic, rental concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standard board made an amendment to PSAK 73 which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rental concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognised in profit or loss arising from the rental concessions.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" (lanjutan)

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

Penerapan PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan membuat laporan keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdayabanding" dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62, "Kontrak Asuransi" yang berlaku saat ini masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh pemangku kepentingan dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"

Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. New accounting standards (continued)

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" (continued)

The amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" will become effective for the annual reporting period starting on or after June 1, 2020 and earlier application is permitted.

- PSAK 74, "Insurance Contracts"

The adoption of PSAK 74, "Insurance Contracts" will make the financial statements of insurance companies "comparable" with other industries such as banking and other financial services companies because PSAK 62, "Insurance Contracts" in effect currently still allows reporting that varies in each jurisdiction/country. In addition, PSAK 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, get transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for insurance protection products with investment features.

PSAK 74, "Insurance Contracts" will become effective on January 1, 2025 and earlier application is permitted.

- PSAK 112, "Accounting for Endowments"

In general, PSAK 112 regulates the accounting treatment for waqf transactions carried out by both nazhir and waqif in the form of organizations and legal entities. PSAK 112 can also be applied by an individual nazhir.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf" (lanjutan)

- PSAK 112, "Accounting for Endowments" (continued)

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Waqf management and development is a reporting entity (the term 'waqf entity' is used) which prepares separate financial statements and is not consolidated into the financial statements of an organization or legal entity from nazhir. The financial statements of a waqf entity do not consolidate the financial statements of their subsidiaries. Complete financial statements of waqf entities include statements of financial position, detailed reports of waqf assets, activity reports, cash flow reports, and notes to financial statements.

Ketentuan transisi PSAK 112 ini adalah prospektif *catch-up* sejak awal periode sajian.

The transitional provisions of PSAK 112 are prospective *catch-up* since the beginning of the presentation period.

PSAK 112, "Akuntansi Wakaf" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK 112, "Accounting for Endowments" will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 69, "Agrikultur"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

- 2020 Annual Improvements (effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted)
 - PSAK 69, "Agriculture"
 - PSAK 71, "Financial Instruments"
 - PSAK 73, "Leases"

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The Group is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISAK)

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Grup telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing masing standar dan interpretasi.

On January 1, 2020, the Group adopted new PSAK and ISAK that are effective for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

v. New accounting standards (continued)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (lanjutan)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISAK) (continued)

Penerapan dari standar-standar dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional dan bisa memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Group's operations and resulted in an effect on the consolidated financial statements, as follow:

Penerapan atas PSAK 71

Adoption of PSAK 71

Grup menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 dengan mengakui efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal cadangan penurunan piutang usaha sebagai berikut:

The Group has adopted PSAK 71 "Financial Instrument" effectively for the financial year beginning January 1, 2020 by recognizing the cumulative effect of initially applying the new standards as an adjustment to the beginning balance of allowance for impairment of trade receivables as follows:

	Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha/ Allowance for impairment of trade receivables	
Saldo 31 Desember 2019	(384.984.087)	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Penyesuaian saldo awal setelah penerapan awal PSAK 71	(993.043.850)	<i>Opening balance adjustment upon initial adoption of PSAK 71</i>
Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian PSAK 71	<u>(1.378.027.937)</u>	<i>Balance as of January 1, 2020 after adjustment of PSAK 71</i>

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK 71 yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan kenaikan provisi atas penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp993.043.850 yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba pada 1 Januari 2020.

For trade receivables, the Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 which requires the use of lifetime expected loss provision of all trade receivables. This increased the provision for impairment of trade receivables by Rp993,043,850 which were recognized as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Standar akuntansi baru (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 71 (lanjutan)

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK No. 73: "Lease";
- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan;
- Amandemen PSAK No.25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- Penyesuaian 2019 PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan;
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

w. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. New accounting standards (continued)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISAK) (continued)

Adoption of PSAK 71 (continued)

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK No. 73: "Lease";
- Amendments of PSAK No.1: Presentation of Financial Statements;
- Amendment of PSAK No. 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors;
- Adjustment of 2019 PSAK No.1: Presentation of Financial Statements;
- Revised 2019 Conceptual Framework for Financial Reporting.

w. Events after the reporting period

Events after the reporting period that provide additional information about the Group's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements.

Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the consolidated financial statements.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 33.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dan 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Group's management has made an assessment of the Group's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Group has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 33.

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 and 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2e.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimating provision for impairment loss on receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

The Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan penurunan nilai realisasi neto dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Imbalan kerja

Penentuan biaya liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20 dan 17.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2j dan 9.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in net realizable value and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical conditions, their market selling prices and estimated costs of completion.

The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of the Group's inventories are disclosed in Note 6.

Employee benefits

The determination of the Group's cost for employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the profit or loss as and when they occurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 20 and 17.

Depreciation of property, plant and equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2j and 9.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Grup. Penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam Catatan 2e dan 27.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

4. KAS DAN BANK

	2020	2019	2018
Kas	46.010.171	113.627.190	103.339.809
Bank			
<u>Rekening Rupiah</u>			
Pihak ketiga			
PT Bank DBS Indonesia	8.043.758.511	4.298.128.187	1.064.005.465
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.479.501.844	13.138.235.091	14.388.053.963
PT Bank Oke Indonesia Tbk	2.720.610.016	2.642.078.116	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	310.613.157	1.397.930.471	3.017.239.553
<u>Rekening Dolar Amerika Serikat (Catatan 26)</u>			
Pihak ketiga			
PT Bank DBS Indonesia (AS\$13.740 pada tahun 2020, AS\$13.870 pada tahun 2019, AS\$14.071 pada tahun 2018)	193.802.768	192.813.334	203.761.138
Total	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Financial instruments

The Group recorded certain financial assets and liabilities initially based on fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's statement of profit or loss and other comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 2e and 27.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 16.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	2020	2019	2018
Cash on hand			
Cash in banks			
<u>Rupiah Accounts</u>			
Third parties			
PT Bank DBS Indonesia			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
PT Bank Oke Indonesia Tbk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
<u>United States Dollar Account (Note 26)</u>			
Third parties			
PT Bank DBS Indonesia (US\$13,740 in 2020, US\$13,870 in 2019 and US\$14,071 in 2018)			
Total			

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	2020	2019	2018	
Pihak-pihak berelasi (Catatan 23)				Related parties (Note 23)
Rupiah				Rupiah
PT Energi Batubara Lestari	20.828.897.622	25.330.773.515	17.677.225.592	PT Energi Batubara Lestari
PT Bhumi Rantau Energi	10.499.012.499	38.939.441.335	11.880.487.610	PT Bhumi Rantau Energi
PT Hasnur Jaya International	14.528.571	33.776.895.265	28.472.406.841	PT Hasnur Jaya International
PT Hasnur Cipta Terpadu	-	108.152.600	108.152.600	PT Hasnur Cipta Terpadu
Sub-total	31.342.438.692	98.155.262.715	58.138.272.643	Sub-total
Pihak ketiga - bagian lancar				Third parties - current portion
Rupiah				Rupiah
PT Kreasi Energi Alam	9.711.719.329	-	1.020.171.988	PT Kreasi Energi Alam
PT Pelita Samudera Shipping	1.751.494.870	748.114.123	1.695.575.412	PT Pelita Samudera Shipping
PT Maritime Power	1.525.634.880	-	-	PT Maritime Power
PT Bima Maritimindo	817.630.000	-	-	PT Bima Maritimindo
PT Bukit Samudera Logistik	630.843.128	660.843.128	-	PT Bukit Samudera Logistik
PT Globalindo Anugrah Pratama	630.000.000	630.000.000	720.000.000	PT Globalindo Anugrah Pratama
PT Artuna Bara Energi	607.673.498	-	-	PT Artuna Bara Energi
PT Borneo Samudra Perkasa	493.601.633	403.368.144	6.575.333.979	PT Borneo Samudra Perkasa
PT Indomuda Satria Internusa	360.000.000	1.826.438.021	1.826.438.021	PT Indomuda Satria Internusa
PT Sumber Rezeki Samudra Jaya	-	2.614.461.384	-	PT Sumber Rezeki Samudra Jaya
PT Semen Indonesia Logistik	-	833.388.653	-	PT Semen Indonesia Logistik
PT Azzahra Tursina Mandiri	-	761.936.612	-	PT Azzahra Tursina Mandiri
PT Watama Prima	-	743.655.924	718.645.674	PT Watama Prima
PT Adi Bahari Nuansa	-	522.500.000	-	PT Adi Bahari Nuansa
PT Prima Multi Mineral	-	-	1.772.662.253	PT Prima Multi Mineral
PT Prima Energi Multi Trading	-	-	1.295.138.971	PT Prima Energi Multi Trading
PT Habco Primatama	-	-	1.315.851.056	PT Habco Primatama
PT Arsyndo Panca Mitra	-	-	1.276.000.000	PT Arsyndo Panca Mitra
PT Binuang Tapin Membangun	-	-	1.022.364.717	PT Binuang Tapin Membangun
PT Cakrawala Nusa Bahari	-	-	945.515.581	PT Cakrawala Nusa Bahari
PT Prima Multitrada	-	-	810.287.816	PT Prima Multitrada
PT Batu Gunung Mulia	-	-	629.982.756	PT Batu Gunung Mulia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	1.487.440.269	1.946.264.855	3.806.336.325	Others (each below Rp500 million)
Sub-total	19.482.475.628	11.690.970.844	25.430.304.549	Sub-total
Pihak ketiga - bagian tidak lancar				Third party - non-current portion
Rupiah				Rupiah
PT Indomuda Satria Internusa	1.466.438.021	-	-	PT Indomuda Satria Internusa
Sub-total	19.482.475.628	11.690.970.844	25.430.304.549	Sub-total
Total	50.824.914.320	109.846.233.559	83.568.577.192	Total
Dikurangi: penyisihan atas ECLs	(1.413.656.060)	(384.984.087)	(7.434.960.980)	Less: allowance for ECLs
Neto	49.411.258.260	109.461.249.472	76.133.616.212	Net

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo	29.554.698.255	13.329.301.038	16.568.069.379	Not yet due
Jatuh tempo:				Due:
Sampai dengan 30 hari	10.440.173.477	33.643.074.133	12.254.006.156	Up to 30 days
31 - 90 hari	6.586.450.354	14.546.578.333	10.510.574.932	31 - 90 days
> 90 hari	4.243.592.234	48.327.280.055	44.235.926.725	> 90 days
Dikurangi: penyisihan atas ECLs	(1.413.656.060)	(384.984.087)	(7.434.960.980)	Less: allowance for ECLs
Total	49.411.258.260	109.461.249.472	76.133.616.212	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha:

	2020	2019	2018
Saldo awal	(384.984.087)	(7.434.960.980)	(12.173.665.746)
Penyesuaian saldo awal setelah penerapan awal PSAK 71	(993.043.850)	-	-
Saldo awal setelah penyesuaian PSAK 71	(1.378.027.937)	(7.434.960.980)	(12.173.665.746)
Penambahan (Catatan 22)	(338.310.839)	(302.682.717)	(7.352.659.610)
Penghapusan	302.682.716	7.352.659.610	12.091.364.376
Saldo akhir	(1.413.656.060)	(384.984.087)	(7.434.960.980)

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang usaha Grup sebesar Rp9.375.000.000 digunakan sebagai jaminan atas jangka panjang kepada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 piutang usaha Grup sebesar Rp20.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 15).

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk Perusahaan dan entitas anak pada tahun 2019 dan 2018 berdasarkan hasil penelaahan secara individual sedangkan untuk penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk Perusahaan dan entitas anak pada tahun 2020 berdasarkan hasil penelaahan secara kolektif berdasarkan PSAK 71.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019	2018
Bahan bakar	3.250.176.686	2.992.104.851	3.798.496.057
Suku cadang	250.966.841	232.900.008	270.832.670
Total	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movement of allowances for impairment of trade receivables:

	2020	2019	2018
Saldo awal	(384.984.087)	(7.434.960.980)	(12.173.665.746)
Penyesuaian saldo awal setelah penerapan awal PSAK 71	(993.043.850)	-	-
Saldo awal setelah penyesuaian PSAK 71	(1.378.027.937)	(7.434.960.980)	(12.173.665.746)
Penambahan (Catatan 22)	(338.310.839)	(302.682.717)	(7.352.659.610)
Penghapusan	302.682.716	7.352.659.610	12.091.364.376
Saldo akhir	(1.413.656.060)	(384.984.087)	(7.434.960.980)

As of December 31, 2018, the Group's trade receivables amounting to Rp9,375,000,000 are pledged as collaterals for long-term bank loans to PT Bank DBS Indonesia (Note 15).

As of December 31, 2020, 2019 and 2018 the Group's trade receivables amounting to Rp20,000,000,000 are pledged as collaterals for long-term bank loan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 15).

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The additional expected loss provision of trade receivables established by the Company and its subsidiaries in 2019 and 2018 was based on individual review, while the additional expected loss provision of trade receivables established by the Company and its subsidiaries in 2020 based on the results of a collective review based on PSAK 71.

The management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

6. INVENTORIES

This account consists of:

	2020	2019	2018
Bahan bakar	3.250.176.686	2.992.104.851	3.798.496.057
Suku cadang	250.966.841	232.900.008	270.832.670
Total	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, persediaan Grup dijadikan sebagai jaminan untuk fasilitas pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank DBS Indonesia (Catatan 15).

Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan mendekati nilai realisasi neto-nya.

6. INVENTORIES (continued)

As of December 31, 2018, the Group's inventories are pledged as collaterals for long-term loan from PT Bank DBS Indonesia (Note 15).

The Group's management is of the opinion that the carrying amount of inventories approximate their net realizable value.

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	2020	2019	2018	
Asuransi	1.246.974.441	521.219.417	394.052.184	Insurance
Lain-lain	457.043.054	-	-	Others
Total	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184	Total

7. PREPAYMENT

8. UANG MUKA

	2020	2019	2018	
Docking	2.630.796.001	1.197.506.488	641.195.000	Docking
Biaya kapal	1.491.277.300	336.250.581	-	Vessels Cost
Kendaraan	-	641.800.000	-	Vehicles
Lain-lain	80.147.304	638.234.428	470.787.555	Others
Total	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555	Total
Dikurangi: bagian lancar	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555	Less: current portion
Bagian tidak lancar	-	-	-	Non-current portion

8. ADVANCE PAYMENTS

Berdasarkan perjanjian No. 51 tanggal 23 November 2017, Grup sepakat mengadakan perjanjian pembangunan dan jual beli kapal dengan PT Palma Progress Shipyard (Palma). Grup memiliki komitmen untuk membeli 1 (satu) unit *tugboat* berukuran 28,05 meter, dengan harga USD1.280.000. *Tugboat* akan diserahkan tidak lebih dari empat (4) bulan setelah pembayaran pertama tanggal 29 November 2017. Pada tanggal 1 Maret 2018, Palma telah menyelesaikan pembangunan *tugboat* dan menyerahkannya kepada Grup. *Tugboat* ini telah dilaporkan dengan Akta Pendaftaran Kapal No. 4672 tanggal 6 Maret 2018.

Based on agreement No. 51 dated November 23, 2017, the Group agreed to enter into shipbuilding and sales purchase agreement with PT Palma Progress Shipyard (Palma). The Group has a commitment to buy 1 (one) unit of *tugboat* with the size of 28.05 meter, price at USD1,280,000. The *tugboat* will be delivered no latter than four (4) months after first payment dated November 29, 2017. On March 1, 2018, Palma has completed the construction of *tugboat* and handed over to the Group. This *tugboat* has reported with the Ship Registration Certificate No. 4672 March 6, 2018.

Berdasarkan perjanjian No. 7068/L/XI/2017 tanggal 22 November 2017, Grup sepakat mengadakan perjanjian pembangunan dan jual beli kapal dengan PT Tunas Karya Bahari Indonesia (TKBI). Grup memiliki komitmen untuk membeli 1 (satu) unit kapal tongkang "HULL 381" sebesar Rp25.000.000.000. Kapal tongkang akan diserahkan tidak lebih dari lima (5) bulan setelah pembayaran pertama tanggal 27 November 2017.

Based on agreement No. 7068/L/XI/2017 dated November 22, 2017, the Group agreed to enter into shipbuilding and sales purchase agreement with PT Tunas Karya Bahari Indonesia (TKBI). The Group has a commitment to buy 1 (one) unit of barge "HULL 381" amounting to Rp25,000,000,000. The barge will be delivered no latter than five (5) months after first payment dated November 27, 2017.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. UANG MUKA (lanjutan)

Pada tanggal 27 April 2018, berdasarkan Berita Acara Peluncuran Kapal No. 0401/TKBI/LP/2018, TKBI telah menyelesaikan pembangunan tongkang dan menyerahkannya kepada Grup.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Yudo Diharjo Lantanea No. 3 tanggal 22 Januari 2020, Grup sepakat mengadakan perjanjian pembangunan dan jual beli kapal dengan PT Palma Progress Shipyard. Grup memiliki komitmen untuk membeli 1 (satu) unit *tugboat* berukuran 29,11 meter dengan harga USD1.420.000. *Tugboat* akan diserahkan tidak lebih dari empat (4) bulan setelah pembayaran pertama tanggal 29 Januari 2020. Pada tanggal 3 Maret 2020, Palma telah menyelesaikan pembangunan *tugboat* dan menyerahkannya kepada Grup.

Berdasarkan Akta Notaris Yondri Darto S.H., tanggal 22 Januari 2020, Grup sepakat mengadakan perjanjian pembangunan dan jual beli dengan PT Tunas Karya Bahari Indonesia (TKBI). Grup memiliki komitmen untuk membeli 1 (satu) unit kapal tongkang "HULL 383" sebesar Rp27.200.000.000. Kapal tongkang akan diserahkan tidak lebih dari lima (5) bulan setelah pembayaran pertama tanggal 29 Januari 2020.

Pada tanggal 9 Maret 2020, berdasarkan Berita Acara Peluncuran Kapal No. 0001/TKBI/BASTK/V/2020, TKBI telah menyelesaikan pembangunan tongkang dan menyerahkannya kepada Grup.

9. ASET TETAP

8. ADVANCE PAYMENTS (continued)

On April 27, 2018, based on "Berita Acara Peluncuran Kapal" No. 0401/TKBI/LP/2018, TKBI has completed the construction of barge and handed over to the Group.

Based on Notarial Deed of Dr. Yudo Diharjo Lantanea No. 3 dated January 22, 2020, the Group agreed to enter into shipbuilding and sales purchase agreement with PT Palma Progress Shipyard. The Group has a commitment to buy 1 (one) unit of tugboat with the size of 29.11 meter, price at USD1,420,000. The tugboat will be delivered no latter than four (4) months after first payment dated January 29, 2020. On March 3, 2020, Palma has completed the construction of tugboat and handed over to the Group.

Based on Notarial Deed of Yondri Darto, S.H., dated January 22, 2020, the Group agreed to enter sales purchase agreement with PT Tunas Karya Bahari Indonesia (TKBI). The Group has a commitment to buy 1 (one) unit of barge "HULL 383" amounting to Rp27,200,000,000. The barge will be delivered no latter than five (5) months after first payment dated January 29, 2020.

On March 9, 2020, based on "Berita Acara Peluncuran Kapal" No. 0001/TKBI/BASTK/V/2020, TKBI has completed the construction of barge and handed over to the Group.

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2020

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	216.476.300	-	-	-	216.476.300	Buildings
Kapal	358.498.960.245	48.827.742.200	-	-	407.326.702.445	Vessels
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750	Machineries
Kendaraan	2.471.055.909	590.363.636	-	-	3.061.419.545	Vehicles
Peralatan kantor	3.489.409.189	383.932.226	-	-	3.873.341.415	Office equipment
Sub-total	365.933.314.393	49.802.038.062	-	-	415.735.352.455	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	41.897.760	14.673.305	-	-	56.571.065	Buildings
Kapal	157.456.293.054	22.404.671.109	-	-	179.860.964.163	Vessels
Mesin	1.235.859.563	19.895.250	-	-	1.255.754.813	Machineries
Kendaraan	1.638.555.806	172.864.942	-	-	1.811.420.748	Vehicles
Peralatan kantor	1.519.209.225	321.878.277	-	-	1.841.087.502	Office equipment
Sub-total	161.891.815.408	22.933.982.883	-	-	184.825.798.291	Sub-total
Nilai Tercatat	204.041.498.985				230.909.554.164	Carrying Value

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

2019

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	183.076.300	33.400.000	-	-	216.476.300	Buildings
Kapal	358.498.960.245	-	-	-	358.498.960.245	Vessels
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750	Machineries
Kendaraan	1.917.409.091	553.646.818	-	-	2.471.055.909	Vehicles
Peralatan kantor	2.685.629.917	803.779.272	-	-	3.489.409.189	Office equipment
Sub-total	364.542.488.303	1.390.826.090	-	-	365.933.314.393	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	28.227.788	13.669.972	-	-	41.897.760	Buildings
Kapal	137.157.935.943	20.298.357.111	-	-	157.456.293.054	Vessels
Mesin	1.215.964.313	19.895.250	-	-	1.235.859.563	Machineries
Kendaraan	1.404.956.438	233.599.368	-	-	1.638.555.806	Vehicles
Peralatan kantor	1.158.570.229	360.638.996	-	-	1.519.209.225	Office equipment
Sub-total	140.965.654.711	20.926.160.697	-	-	161.891.815.408	Sub-total
Nilai Tercatat	223.576.833.592				204.041.498.985	Carrying Value

2018

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Dekonsolidasi Entitas Anak/ Deconsolidation of Subsidiaries	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	6.291.076.127	43.589.800	-	(6.151.589.627)	183.076.300	Buildings
Kapal	315.641.680.245	42.857.280.000	-	-	358.498.960.245	Vessels
Mesin	1.622.218.070	-	-	(364.805.320)	1.257.412.750	Machineries
Kendaraan	2.321.909.091	-	351.500.000	(53.000.000)	1.917.409.091	Vehicles
Peralatan kantor	2.083.612.736	751.549.197	-	(149.532.016)	2.685.629.917	Office equipment
Sub-total	327.960.496.269	43.652.418.997	351.500.000	(6.718.926.963)	364.542.488.303	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.621.120.552	10.262.472	-	(1.603.155.236)	28.227.788	Buildings
Kapal	117.772.660.633	19.385.275.310	-	-	137.157.935.943	Vessels
Mesin	1.529.386.882	19.895.250	-	(333.317.819)	1.215.964.313	Machineries
Kendaraan	1.238.552.083	456.841.855	263.625.000	(26.812.500)	1.404.956.438	Vehicles
Peralatan kantor	1.139.636.158	168.466.084	-	(149.532.013)	1.158.570.229	Office equipment
Sub-total	123.301.356.308	20.040.740.971	263.625.000	(2.112.817.568)	140.965.654.711	Sub-total
Nilai Tercatat	204.659.139.961				223.576.833.592	Carrying Value

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation is charged as follows:

	2020	2019	2018	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	22.537.806.312	20.431.336.066	19.484.536.780	Cost of revenues (Note 21)
Beban usaha (Catatan 22)	396.176.571	481.949.631	517.579.191	Operating expenses (Note 22)
Pendapatan (beban) lain-lain - jasa keagenan	-	12.875.000	38.625.000	Other income (expenses) - agency services
Total	22.933.982.883	20.926.160.697	20.040.740.971	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Perhitungan pelepasan aset tetap sebagai berikut:

	2018
Harga perolehan	351.500.000
Akumulasi penyusutan	263.625.000
Nilai tercatat	87.875.000
Dikurangi: hasil pelepasan	-
Rugi pelepasan aset tetap	87.875.000

Aset tetap Grup, seperti kapal, bangunan, mesin dan kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kecelakaan kapal laut dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu pada PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan PT Howden Insurances Broker Indonesia, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp405.006.307.100, Rp310.478.200.000 dan Rp272.977.572.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, detail dari aset yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan oleh Grup untuk menunjang operasional adalah sebagai berikut:

	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost
Kendaraan	580.000.000
Peralatan kantor	28.850.000
Total	608.850.000

Pada tanggal 31 Desember 2020, kapal Grup yang masing-masing terdiri dari 12 *tugboats* dan tongkang dijaminkan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kapal Grup yang masing-masing terdiri dari 12 *tugboats* dan tongkang dijaminkan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek dari PT Bank DBS Indonesia dan jangka panjang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 11 dan 15).

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

The disposal of fixed assets is calculated as follows:

	Acquisition cost
	Accumulated depreciation
	Carrying value
	Less: proceeds
Loss on disposal of fixed assets	

The Group's property, plant and equipment such as vessels, buildings, machines and vehicles were covered by insurance against losses from marine accidents and other risks under certain blanket policies for PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan PT Howden Insurances Broker Indonesia, third parties with sums insured on December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp405,006,307,100, Rp310,478,200,000 and Rp272,977,572,000, respectively. The management is of the opinion that the sums insured are adequate to cover possible losses from such risks.

As of December 31, 2020, details of fully depreciated assets that are still used by the Group in its operation are as follows:

	Vehicles
	Office equipment
Total	Total

As of December 31, 2020, the Group's vessels which consist of 12 *tugboats* and barges, respectively are pledged as collaterals for long-term bank loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 15).

As of December 31, 2019 and 2018, the Group's vessels which consist of 12 *tugboats* and barges, respectively are pledged as collaterals for short-term bank loans from PT Bank DBS Indonesia and long-term bank loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Notes 11 and 15).

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Based on the assessment of the management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of property, plant and equipment as of December 31, 2020, 2019 and 2018.

10. BEBAN DOCKING DITANGGUHKAN

	2020	2019
<i>Docking</i>	82.159.850.104	63.648.538.083
Akumulasi amortisasi	(63.363.768.690)	(49.436.458.549)
Total	18.796.081.414	14.212.079.534

10. DEFERRED CHARGES ON DOCKING

	2018
<i>Docking</i>	54.227.170.005
Akumulasi amortisasi	(38.660.610.750)
Total	15.566.559.255

Amortisasi sebesar Rp13.927.310.141, Rp10.775.847.799 dan Rp9.855.690.011 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dibebankan pada beban pokok pendapatan (Catatan 21).

Amortization amounting to Rp13,927,310,141, Rp10,775,847,799 and Rp9,855,690,011 for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively were charged to cost of revenues (Note 21).

11. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah disahkan oleh Akta Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., No. 35 tanggal 20 Maret 2013, HIS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia ("DBS") dalam bentuk *Account Payable Financing (APF)* dengan nilai pinjaman maksimal Rp15.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang USD. Pinjaman ini dikenakan bunga *cost of fund (COF)* jangka pendek dari DBS ditambah 3%, dengan indikasi 10,6% per tahun untuk penarikan dalam Rupiah dan 6% per tahun untuk penarikan dalam USD. Jangka waktu pendanaan maksimum adalah 2 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas pinjaman ini berlaku sampai dengan 20 Maret 2014 dan diperpanjang secara otomatis untuk periode 3 bulan. Fasilitas pinjaman ini bersama-sama dengan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 15) dijamin dengan aset kapal HIS (Catatan 9), piutang (Catatan 5), persediaan (catatan 6) dan dijamin dengan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya Utama (HJU).

11. SHORT-TERM BANK LOAN

PT Bank DBS Indonesia

Based on the loan agreement which was legalized by Notarial Deed No. 35 of Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin. M Com., dated March 20, 2013, HIS obtained credit facility from PT Bank DBS Indonesia ("DBS") in the form of *Account Payable Financing (APF)* with total maximum credit facility amounting to Rp15,000,000,000 or equivalent in USD. This loan bears interest rate at short term *cost of fund (COF)* from DBS plus 3%, indicatively 10.6% per annum for IDR loan and 6% per annum for USD facility. The maximum funding period is 2 months from the date of withdrawal. This loan facility is valid until March 20, 2014 and automatically extended for three months period. This loan facility together with long-term bank loan (Note 15) are collateralized by the HIS's ships assets (Note 9), receivables (Note 5), inventories (Note 6) and is secured by the corporate guarantee from PT Hasnur Jaya Utama (HJU).

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

Perubahan terakhir atas perjanjian ini pada 28 Juni 2016, yang telah disahkan oleh Akta Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., No. 57, dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengubah dan menegaskan kembali perjanjian sebelumnya. Setelah perubahan terakhir fasilitas adalah: (1) fasilitas *uncommitted accounts payable financing (APF)* dan (2) fasilitas *uncommitted accounts receivables financing (ARF)* dengan maksimal fasilitas pinjaman dari kedua fasilitas sebesar Rp10.000.000.000 atau ekuivalennya dalam USD. Pinjaman ini dikenakan bunga *cost of fund (COF)* jangka pendek dari DBS ditambah 3%. Berdasarkan perubahan terakhir dengan addendum keempat No. 130/PFFPA-DBSI/V/1-2/2019 tertanggal 15 Mei 2019 tentang penegasan kembali fasilitas *APF* dan *ARF*, fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 Maret 2020 dan DBS dapat secara otomatis memperpanjang perjanjian untuk dua belas bulan berikutnya dimulai 1 hari dari tanggal jatuh tempo perjanjian, kecuali ada pemberitahuan tertulis untuk penghentian fasilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp9.800.000.000. Saldo pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2018.

Pinjaman ini memuat pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan, saldo minimum kas di bank dan pembatasan administrasi lainnya yang diatur dalam perjanjian yang sama dengan perjanjian fasilitas pinjaman bank jangka panjang dari *Amortizing Term Loan (ATL)* dari DBS (Catatan 15).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total beban bunga atas fasilitas ini sebesar Rp809.015.556 dan dicatat sebagai bagian "Beban Lain-lain - Beban Bunga" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

11. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank DBS Indonesia (continued)

The latest addendum of this agreement was on June 28, 2016, which legalized by Notarial Deed No. 57 of Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com., in which both parties agreed to change and reaffirm the previous agreement. After the latest amendment, facilities are: (1) *uncommitted accounts payable financing facility (APF)* and (2) *uncommitted accounts receivables financing (ARF)* facility with total maximum credit facility of both facilities amounting to Rp10,000,000,000 or equivalent in USD. This loan bears interest rate at short term cost of fund (COF) from DBS plus 3%. Based on the latest 4th addendum No. 130/PFFPA-DBSI/V/1-2/2019 dated May 15, 2019 related reaffirmation of *APF* and *ARF* facilities, due date of the facilities is March 20, 2020 and DBS can automatically extend the agreement for the next twelve months as of 1 day from due date of agreement, except of there is written notification for discontinue the facilities.

As of December 31, 2017, the outstanding loan of this facility amounted to Rp9,800,000,000. This outstanding loan has been fully paid on December 27, 2018.

The loan has several negative covenants which required HIS to maintain certain financial ratios, minimum balances of cash in bank and other administrative covenants regulated in the same agreement with long-term bank loan agreements of the *Amortizing Term Loan (ATL)* Facility from DBS (Note 15).

For the year ended December 31, 2018, the total interest expenses for this loan facilities amounted to Rp809,015,556 and were recorded as part of "Other Expenses - Interest Expense" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

	2020	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 23)				Related parties (Note 23)
Rupiah				Rupiah
PT Barito Putera Docking	43.415.406	-	-	PT Barito Putera Docking
PT Hasnur Jaya International	-	2.957.329.681	4.036.691.757	PT Hasnur Jaya International
PT Magma Sigma Utama	-	143.260.000	143.260.000	PT Magma Sigma Utama
PT Hasnur Jaya Utama	-	-	30.237.943.928	PT Hasnur Jaya Utama
PT Hasnur Informasi Teknologi	-	-	200.000	PT Hasnur Informasi Teknologi
Sub-total	43.415.406	3.100.589.681	34.418.095.685	Sub-total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. UTANG USAHA (lanjutan)

12. TRADE PAYABLES (continued)

	2020	2019	2018	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Borneo Samudra Perkasa	4.586.680.309	3.086.981.092	2.729.979.143	PT Borneo Samudra Perkasa
PT AKR Corporindo Tbk	4.347.648.728	3.477.140.794	7.384.019.985	PT AKR Corporindo Tbk
PT Trans Energy Indonesia	2.992.380.505	1.890.220.791	3.730.244.420	PT Trans Energy Indonesia
PT Ambang Barito Nusapersada	2.349.828.459	2.306.836.411	1.710.714.097	PT Ambang Barito Nusapersada
PT Bahtera Energi Samudra Tuah	2.011.434.875	2.192.519.942	1.475.681.022	PT Bahtera Energi Samudra Tuah
PT Pulau Seroja Jaya	1.859.719.658	2.270.836.394	1.129.974.246	PT Pulau Seroja Jaya
PT Patria Maritime Industry	1.171.950.000	1.288.717.195	894.248.329	PT Patria Maritime Industry
PT Pelayaran Saudara Sejati	1.394.403.518	-	-	PT Pelayaran Saudara Sejati
PT Duta Bahari Menara Line Dockyard	792.715.550	-	-	PT Duta Bahari Menara Line Dockyard
PT Virgo Samudera Jaya	789.966.517	-	-	PT Virgo Samudera Jaya
PT Lumena Mandiri Nusantara	781.354.551	-	-	PT Lumena Mandiri Nusantara
PT Karya Santosa Tatajaya	632.880.652	632.880.652	632.880.652	PT Karya Santosa Tatajaya
PT Walasuji Padmarin Nusantara	556.146.558	382.389.840	-	PT Walasuji Padmarin Nusantara
PT Pelita Samudera Shipping	267.639.528	1.656.341.294	1.437.384.963	PT Pelita Samudera Shipping
PT Mitra Sarana Lines	-	1.606.289.588	-	PT Mitra Sarana Lines
PT Habco Primatama	-	-	4.370.157.406	PT Habco Primatama
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	4.486.110.261	3.682.663.568	4.656.649.316	Others (each below Rp500 million)
Sub-total	29.020.859.669	24.473.817.561	30.151.933.579	Sub-total
Total	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264	Total

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by aging are as follows:

	2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo	16.151.983.247	16.945.510.571	11.821.616.295	Not yet due
Jatuh tempo:				Due:
Sampai dengan 30 hari	9.856.104.533	6.484.466.457	14.040.155.608	Up to 30 days
31 - 90 hari	391.991.560	244.808.545	6.464.716.752	31 - 90 days
> 90 hari	2.664.195.735	3.899.621.669	32.243.540.609	> 90 days
Total	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264	Total

13. UTANG LAIN-LAIN

13. OTHER PAYABLES

	2020	2019	2018	
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah				Rupiah
Utang karyawan	234.184.189	247.919.253	17.746.054	Employees payable
Lain-lain	236.962.041	46.795.232	105.889.564	Others
Total	471.146.230	294.714.485	123.635.618	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019	2018
Rupiah			
Kompensasi karyawan	2.562.710.534	2.000.900.101	2.196.557.668
Pengangkutan	1.459.922.965	679.647.644	479.735.026
Jasa profesional	606.300.000	-	-
Perlengkapan	-	319.446.580	620.707.938
Persediaan bahan bakar	-	245.015.201	1.194.432.118
Lain-lain (masing-masing dibawah 500juta)	118.277.601	566.399.233	530.257.754
Total	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504

14. ACCRUED LIABILITIES

	2020	2019	2018
Rupiah			
Employees' compensation	2.562.710.534	2.000.900.101	2.196.557.668
Freight	1.459.922.965	679.647.644	479.735.026
Professional fee	606.300.000	-	-
Supplies	-	319.446.580	620.707.938
Fuel inventory	-	245.015.201	1.194.432.118
Others (each below Rp500million)	118.277.601	566.399.233	530.257.754
Total	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

	2020	2019	2018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.325.780.000	22.414.980.000	27.358.980.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	-	63.558.654.082	-
PT Bank DBS Indonesia	-	-	6.466.766.936
Total pinjaman bank	43.325.780.000	85.973.634.082	33.825.746.936
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000

15. LONG-TERM BANK LOANS

	2020	2019	2018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.325.780.000	22.414.980.000	27.358.980.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	-	63.558.654.082	-
PT Bank DBS Indonesia	-	-	6.466.766.936
Total bank loan	43.325.780.000	85.973.634.082	33.825.746.936
Less: current maturities	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
Long term bank loan - net of current maturities	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000

a. PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah disahkan oleh Akta Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., No. 35 tanggal 20 Maret 2013, HIS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia ("DBS") dalam bentuk fasilitas *Amortizing Term Loan (ATL)* dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp225.000.000.000. Fasilitas ini digunakan HIS membiayai kembali pinjaman sebelumnya dari BNI dan sisa saldo akan digunakan untuk pembelian *tugboat* dan tongkang.

Fasilitas *ATL* telah dicairkan beberapa kali, yang dicatat menjadi beberapa Kredit Investasi (KI), sebagai berikut:

a. PT Bank DBS Indonesia

Based on the loan agreement which was legalized by Notarial Deed No. 35 of Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., dated March 20, 2013, HIS obtained credit facility from PT Bank DBS Indonesia ("DBS") in the form of *Amortizing Term Loan Facility (ATL)* with total maximum credit facility amounting to Rp225,000,000,000. This facility is used by HIS to refinance the previous loan from BNI and the remaining amount will be used to purchase tugboats and barges.

The *ATL* facility was withdrawn several times, which were recorded into various Investment Credits (IC), as follows:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

Kredit Investasi bagian I - IV

Berdasarkan permohonan pencairan No. 0360/HIS-JKT/DIR-PMH/III/2013, HIS memperoleh fasilitas ATL dari DBS sebesar Rp148.195.307.581, yang dibagi menjadi empat bagian sebesar Rp71.211.171.637 (KI-I), Rp33.707.750.044 (KI-II), Rp33.930.050.800 (KI-III) dan Rp9.346.335.100 (KI-IV) dengan jangka waktu pinjaman masing-masing 31 Desember 2015, 8 Juli 2017, 27 Juli 2016 dan 2 Agustus 2017. Penarikan ini digunakan untuk membiayai kembali fasilitas kredit investasi BNI.

Kredit Investasi bagian V

Berdasarkan permohonan pencairan No. 0457/HIS-JKT/DIR-PMH/IV/2013, HIS memperoleh fasilitas ATL bagian V dari DBS sebesar Rp13.846.950.000, dengan jangka waktu pinjaman hingga 30 April 2018. Pinjaman ini digunakan untuk membeli *tugboat* baru (TB Hasnur 10).

Kredit Investasi bagian VI

Berdasarkan permohonan pencairan No. 0674/HIS-JKT/DIR/KU075/VI/2013, HIS memperoleh (ATL) bagian VI dari DBS sebesar Rp11.898.120.000, dengan jangka waktu pinjaman hingga 3 Juli 2018. Pinjaman ini adalah digunakan untuk membeli tongkang baru (*Barge* Hasnur 310).

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga jangka panjang *cost of fund* + 2% atau *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) + 5,6%, yang menunjukkan 10,25% per tahun. Untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman ini, HIS dikenakan biaya fasilitas sebesar 0,4% per tahun dari jumlah keseluruhan fasilitas (yang akan dibayar setiap tahun).

Biaya fasilitas tidak dapat dikembalikan dan dibayarkan di muka pada saat penarikan pertama di bawah fasilitas atau dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal perjanjian. Untuk tahun kedua dan seterusnya, biaya fasilitas dibayarkan pada tanggal peringatan Perjanjian Kredit.

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. PT Bank DBS Indonesia (continued)

Investment Credit part I - IV

Based on the withdrawal request for No. 0360/HIS-JKT/DIR-PMH/III/2013, HIS obtained ATL facility from DBS amounting to Rp148,195,307,581, which was divided into four parts amounting to Rp71,211,171,637 (IC-I), Rp33,707,750,044 (IC-II), Rp33,930,050,800 (IC-III) and Rp9,346,335,100 (IC-IV) with loan terms of December 31, 2015, July 8, 2017, July 27, 2016 and August 2, 2017, respectively. These withdrawals were used to refinance the BNI investment credit facilities.

Investment Credit part V

Based on the withdrawal request No. 0457/HIS-JKT/DIR-PMH/IV/2013, HIS obtained ATL facility part V from DBS amounting to Rp13,846,950,000, with loan term until April 30, 2018. This loan was used to purchase a new tugboat (TB Hasnur 10).

Investment Credit part VI

Based on the withdrawal request No. 0674/HIS-JKT/DIR/KU075/VI/2013, HIS obtained (ATL) part VI from DBS amounting to Rp11,898,120,000, with loan term until July 3, 2018. This loan was used to purchase a new barge (Barge Hasnur 310).

This loan bears an interest rate of long term *cost of fund* + 2% or *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) + 5.6%, which indicated 10.25% per annum. To avail this loan facility, HIS was charged facility fee of 0.4% per annum on the total amount of the facility (to be paid on annual basis).

The facility fee is non-refundable and payable upfront on the earlier of the first withdrawal under the facility or within 5 business days from the agreement date. For the second year onwards, the facility fee is payable on anniversary date of the Credit Agreement.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

a. PT Bank DBS Indonesia (continued)

Kredit Investasi bagian VI (lanjutan)

Investment Credit part VI (continued)

Adendum terakhir dari perjanjian yang telah disahkan dengan Akta Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., No. 57 tanggal 28 Juni 2016, di mana kedua belah pihak sepakat untuk merestrukturisasi fasilitas kredit ATL. Setelah amandemen terakhir, total pinjaman untuk fasilitas ATL adalah sebesar Rp23.172.581.557. Berdasarkan adendum terakhir, pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga jangka panjang *cost of fund* + 2% atau *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) + 5,6%, yang menunjukkan 10,25% per tahun. Untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman ini, Grup dikenakan biaya fasilitas sebesar 0,4% per tahun dari jumlah keseluruhan fasilitas (yang akan dibayar setiap tahun). Pada tahun 2016, Grup membayar biaya restrukturisasi sebesar Rp347.588.723 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Usaha - Biaya Administrasi Bank". Biaya restrukturisasi tidak dapat dikembalikan dan harus dibayar dimuka pada tanggal perjanjian atau dalam 5 hari kerja sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 Desember 2019.

The latest addendum of this agreement was on June 28, 2016 which was legalized by Notarial Deed No. 57 of Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., in which both parties agreed to restructure the ATL credit facility. After the latest amendment the total credit for ATL facility amounted to Rp23,172,581,557. Based on the latest addendum, this loan bears an interest rate of long term cost of fund + 2% or Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) + 5.6%, which indicated 10.25% per annum. To avail this loan facility, the Group was charged facility fee of 0.4% per annum on the total amount of the facility (to be paid on annual basis). In 2016, the Group paid the restructuring fee amounted to Rp347,588,723 and was recorded as part of "Operating Expenses - Bank Administrative Cost". The restructuring fee is non-refundable and payable upfront on the date of the agreement or within 5 business days from the agreement date. This facility will mature on December 20, 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.466.766.936 dan Rp12.933.533.886. Saldo pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2019. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp421.309.927, Rp1.162.654.640 dan Rp1.999.870.443, dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Beban Bunga" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

As of December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of this loan amounted to Rp6,466,766,936 and Rp12,933,533,886, respectively. This outstanding loan has been fully paid on December 20, 2019. The related interest expenses for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp421,309,927, Rp1,162,654,640 and Rp1,999,870,443, respectively and was recorded as part of "Other Expenses - Interest Expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Untuk semua perjanjian pinjaman dari DBS (APF dan ATL), fasilitas pinjaman masing-masing dijamin dengan seluruh *tugboat* dan tongkang serta aset yang akan dibeli HIS (Catatan 9) dan dijamin berdasarkan perjanjian hipotek, yang disahkan dengan Akta Notaris No. 36 - 67 dari Veronica Nataadmadja

For all of the loan agreements from DBS (APF and ATL), loan facilities are collateralized by all HIS's tugboat and barge and assets that will be purchased (Note 9) and pledged under mortgages agreement, which was legalized by Notarial Deed No. 36 - 67 of Veronica Nataadmadja S.H., M Corp Admin., M Com.,

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

a. PT Bank DBS Indonesia (continued)

S.H., M Corp Admin., M Com., tanggal 20 Maret 2013. Piutang usaha (Catatan 5) dan persediaan (Catatan 6) HIS dijamin secara fidusia yang disahkan oleh Akta Notaris No. 58 dan 60 dari Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., tanggal 28 Juni 2016. Fasilitas ini juga dijamin dengan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya Utama (HJU).

dated March 20, 2013, respectively. Trade receivables (Note 5) and inventories (Note 6) of HIS are pledged under fiduciary basis which was legalized by Notarial Deed No. 58 and 60 of Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin., M Com., dated June 28, 2016. These facilities are also secured by the corporate guarantee from PT Hasnur Jaya Utama (HJU).

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

This facilities contain certain restrictions requiring HIS to meet and maintain financial ratio, among others;

1. *Debt Service Ratio (DSCR)* dengan rasio minimum 1,00 pada tahun 2013 dan 2014, dan dengan rasio minimum 1,10 pada tahun 2015 dan seterusnya;
2. *Net Debt to EBITDA ratio* pada rasio maksimum 3,00;
3. *Net Debt to Equity Ratio (NDER)* pada rasio maksimum 3,00.

1. *Debt Service Ratio (DSCR)* with a minimum ratio of 1.00 in 2013 and 2014, and with a minimum ratio of 1.10 in 2015 and onwards;
2. *Net Debt to EBITDA ratio* at the maximum ratio of 3.00;
3. *Net Debt to Equity Ratio (NDER)* at the maximum ratio of 3.00.

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari DBS sebelum, antara lain:

The loan covenants also require HIS to obtain written approval from DBS before, among others:

1. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham dengan rasio diatas 30%, jika rasio tersebut dibawah 30%, HIS perlu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada bank;
2. Menerima pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
3. Mengubah jenis usaha;
4. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen sejenisnya;
5. Memindahtangankan aset utama dan/atau aset material kepada pihak ketiga, kumulatif lebih dari 5% dari total aset dalam tahun buku fiskal;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga;

1. Distribute and/or pay dividend in any form to the shareholders with ratio above 30%, if the ratio is under 30%, HIS needs to provide written notice to the bank;
2. Receive new credit and/or new loan and/or additional loan from another bank or third parties;
3. Change the type of business;
4. Change HIS's form and/or legal status, liquidate, merge and/or dissolve, including issuance of new shares and/or sell existing shares, option rights, warrant or similar instruments;
5. Transfer major assets and/or material asset to third parties, cumulative of more than 5% from total asset during fiscal year;
6. Apply for bankruptcy or request postponement of payment;
7. Commit to be a guarantor for third parties loan;

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. PT Bank DBS Indonesia (lanjutan)

8. Membayarkan utang kepada pemegang saham, direktur, komisaris yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
9. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang menguntungkan pemegang saham, direksi, komisaris;
10. Menyetujui untuk melakukan *capital expenditure*; dan
11. Melakukan transfer fidusia atas aset tetap, hipotek, yang memiliki pengaruh terhadap aset HIS.

Pada tanggal 30 Agustus 2013, HIS menandatangani kontrak *swap* bunga antar-mata uang dengan DBS terkait dengan fasilitas ATL dari DBS (Catatan 24).

Pada tanggal 5 Desember 2017, HIS telah menerima persetujuan tertulis dari DBS sehubungan dengan penerimaan pinjaman baru dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain hal di atas, manajemen HIS berpendapat bahwa semua pembatasan dari DBS telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 25 September 2020, HIS telah menerima surat keterangan dari DBS sehubungan dengan pelunasan pinjaman.

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 019/BMM/PK-KI/2018 tanggal 28 Februari 2018, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian *tugboat* dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp60.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12,75% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 60 bulan terhitung sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2023. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp29.644.980.000 pada Maret dan Mei 2018 dan akan jatuh tempo pada Januari 2022.

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

a. PT Bank DBS Indonesia (continued)

8. Pay debt to shareholders, directors, commissioners either for existing of or future debt;
9. Make and sign a significant agreement which provide benefits to shareholders, directors, commissioners;
10. Agree to make capital expenditure; and
11. Make fiduciary transfer of property, plant and equipment, mortgage, which have influence on HIS's assets.

On August 30, 2013, HIS entered into cross currency interest swap contract with DBS related to the ATL facility from DBS (Note 24).

On December 5, 2017, HIS obtain written approval from DBS in relation with receiving new loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Other than this matter, HIS management is of the opinion that all the DBS's covenants have been met as of December 31, 2018 and 2017.

On September 25, 2020, HIS obtained notification letter from DBS in relation with repayment of the loan.

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on agreement No. 019/BMM/PK-KI/2018 dated February 28, 2018, HIS agreed to enter into the loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. HIS obtained credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") in the form of "Investment Credit" for purchases of *tugboat* and barges with total maximum credit facility amounting to Rp60,000,000,000 with interest rate of 12.75% per annum. This credit facility is valid for 60 months period starting from February 28, 2018 to February 27, 2023. This facility has been disbursed amounting to Rp29,644,980,000 in March and May 2018 and will mature in January 2022.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan aset kekayaan HIS atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (*merger*), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi *proceed* HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;
12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

This facility contain certain restrictions requiring HIS to meet and maintain financial ratio, among others;

1. *Current Ratio* minimum of 1 (one);
2. *Debt Equity Ratio* maximum of 2.5 (two point five);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimum of 1 (one).

The loan covenants also require HIS to obtain written approval from BNI before, among others:

1. *Change HIS form and/or legal status, liquidate, articles of association, merge and/or dissolve, including issue new shares and/or sell existing shares;*
2. *Use HIS funds for purposes outside the business financed by credit facilities at the bank;*
3. *Sell, transfer, rent and lend HIS's assets or vice versa with significant amounts;*
4. *Obtain loan/new credit from a bank or other financial institution;*
5. *Bind as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage HIS's assets to other parties;*
6. *Apply for bankruptcy or request postponement of payment;*
7. *Enter into consolidation, merger or acquisition;*
8. *Make investments that exceed HIS's proceeds;*
9. *Mortgaging or guarantee the HIS's shares to any party;*
10. *Change the type of business;*
11. *Conduct interfinancing with affiliated HIS or parent HIS;*
12. *Have new business except currently held;*
13. *Settle the borrowings shareholders and borrowings affiliated HIS;*
14. *Make agreements and unreasonable transaction;*

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *tugboat* dan tongkang (Catatan 9) dan piutang usaha HIS (Catatan 5) dan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya International (HJI). Fasilitas ini juga dijamin dengan tanah dan bangunan milik Direksi Ibu Jayanti Sari seluas 360 meter persegi (SHM No. 10571) yang terletak di wilayah Jakarta Barat.

Pada tanggal 7 September 2020, HIS melakukan penggantian jaminan fasilitas ini dengan tanah dan bangunan milik Direksi Ibu Jayanti Sari seluas 4.068 meter persegi (SHM No. 01168) yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp11.170.980.000, Rp22.414.980.000 dan Rp27.358.980.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp2.129.406.376, Rp2.927.072.014 dan Rp2.408.975.489 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Beban Bunga" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan perjanjian No. 1041/His-JKT/Dir-UM051/IX-2019 tanggal 17 Januari 2020, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian *tugboat* dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp33.154.800.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 72 bulan terhitung sejak 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2026. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp33.154.800.000 pada April dan Mei 2020 dan akan jatuh tempo pada Januari 2026.

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

15. Transfer all or part of the rights or obligations of the credit recipient which arising under a credit agreement;
16. Settle/make a payment of principal and interest or other fees for loans or debts to other parties outside of those approved in the credit agreement;
17. Provide loans to other parties, except reasonable operational transactions based on the bank's assessment.

This loan facility is collateralized by the HIS's *tugboat* and barge (Note 9), trade receivables (Note 5) and corporate guarantee from PT Hasnur Jaya International (HJI). This facility also secured by land and building owned by Director Ms. Jayanti Sari area of 360 square meters (SHM No. 10571) which is located in West Jakarta.

On September 7, 2020, HIS was replace garrantee this facility by land and building owned by Director Ms. Jayanti Sari area of 4,068 square meters (SHM No. 01168) which is located in South Kalimantan.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of this loan amounted to Rp11,170,980,000, Rp22,414,980,000 and Rp27,358,980,000, respectively. The related interest expenses for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp2,129,406,376, Rp2,927,072,014 and Rp2,408,975,489, respectively and was recorded as part of "Other Expenses - Interest Expense" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Based on agreement No. 1041/His-JKT/Dir-UM051/IX-2019 dated January 17, 2020, HIS agreed to enter into the loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. HIS obtained credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") in the form of "Investment Credit" for purchases of *tugboat* and barges with total maximum credit facility amounting to Rp33,154,800,000 with interest rate of 12% per annum. This credit facility is valid for 72 months period starting from January 17, 2020 to January 16, 2026. This facility has been disbursed amounting to Rp33,154,800,000 in April and May 2020 and will mature in January 2026.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan HIS kepada pihak lain;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (merger), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi proceed HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

This facility contain certain restrictions requiring HIS to meet and maintain financial ratio, among others;

1. *Current Ratio* minimum of 1 (one);
2. *Debt Equity Ratio* maximum of 2.5 (two point five);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimum of 1 (one).

The loan covenants also require HIS to obtain written approval from BNI before, among others:

1. *Change HIS form and/or legal status, liquidate, articles of association, merge and/or dissolve, including issue new shares and/or sell existing shares;*
2. *Use HIS funds for purposes outside the business financed by credit facilities at the bank;*
3. *Sell or guarantee HIS's assets to other parties;*
4. *Obtain loan/new credit from a bank or other financial institution;*
5. *Bind as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage HIS's assets to other parties;*
6. *Apply for bankruptcy or request postponement of payment;*
7. *Enter into consolidation, merger or acquisition;*
8. *Make investments that exceed the HIS's proceeds;*
9. *Mortgaging or guarantee the HIS's shares to any party;*
10. *Change the type of business;*
11. *Conduct interfinancing with affiliated HIS or parent HIS;*

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini sebesar Rp32.154.800.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.565.146.933 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Beban Bunga" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada 12 Oktober 2020 dan 10 Februari 2021, Perusahaan menerima persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pemberitahuan tertulis Perusahaan untuk rencana penawaran umum perdana.

Manajemen HIS berpendapat bahwa semua pembatasan dari BNI telah dipenuhi.

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit (SPK) No. 001/SME1/BOI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, HRT sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Dinar Indonesia Tbk (saat ini bernama PT Bank Oke Indonesia Tbk - Bank Oke) dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk investasi dengan total limit kredit

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

12. Have new business except currently held;
13. Settle the borrowings shareholders and borrowings affiliated HIS;
14. Make agreements and unreasonable transaction;
15. Transfer all or part of the rights or obligations of the credit recipient which arising under a credit agreement;
16. Settled/make a payment of principal and interest or other fees for loans or debts to other parties outside of those approved in the credit agreement;
17. Provide loans to other parties, except reasonable operational transactions based on the bank's assessment.

As of December 31, 2020, the outstanding balance of this loan amounted to Rp32,154,800,000. The related interest expenses for the year ended December 31, 2020 amounted to Rp2,565,146,933 was recorded as part of "Other Expenses - Interest Expense" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

On October 12, 2020 and February 10, 2021, the Company received written approval from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in relation with the Company written notification for planning initial offering public.

HIS's management is of the opinion that all the BNI's covenants have been met.

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk

Based on Letter of Credit Offer (SPK) No. 001/SME1/BOI/VII/2019 dated July 15, 2019, HRT agreed to enter into the loan agreement with PT Bank Dinar Indonesia Tbk (currently named PT Bank Oke Indonesia Tbk - Bank Oke) in the form of "Investment Credit" for investing with total credit limit amounting

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk (lanjutan)

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk (continued)

sebesar Rp65.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Juli 2029. Fasilitas ini dikenakan biaya provisi pinjaman dan biaya administrasi dari fasilitas Kredit Investasi masing-masing sebesar 0,75% dan 0,50%. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan unit kantor "Office 8" lantai 7 atas nama PT Hasnur Jaya Utama dan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya Utama. Fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya pada 19 Juli 2019.

to Rp65,000,000,000 with interest rate of 12% per annum and subject to change by PT Bank Dinar Indonesia Tbk. This credit facility is valid for 10 years period starting from July 15, 2019 to July 15, 2029. This facilities bears provisions and administration from Investment Credit facility amounting to 0.75% and 0.50%, respectively. This loan facility is collateralized by "Office 8" unit 7th floor under the name of PT Hasnur Jaya Utama and corporate guarantee from PT Hasnur Jaya Utama. This facility has fully withdrawdown in July 19, 2019.

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HRT memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Oke sebelum, antara lain:

The loan covenants also require the HRT to obtain written approval from Bank Oke before, among others:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha dan/atau perubahan jaminan;
2. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal;
3. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting/material.

1. Do changes on Group business and/or changes in collateral;
2. Doing merger, acquisition, take over, or investment in share;
3. Transfer major assets and/or material asset.

Dan HRT menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sebelum melakukan, antara lain:

And it also require HRT to sending written announcement to Bank Oke before, among others:

1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau tuntutan hukum terhadap HRT maupun memberi jaminan;
3. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dari bank lain atau pihak ketiga sepanjang HRT tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang harus dipenuhi.

1. Changes of Board of Directors and/or Board of Commisioners;
2. Having lawsuits, claims and/or litigation towards the HRT or guarantor;

3. Obtained credit facilities, new or additional facilities from another bank or third parties as long as HRT can meet certain restriction on financial ratio.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar nihil dan Rp63.558.654.082. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp7.845.242.619 dan Rp3.221.459.907 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Beban Bunga" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of this loan amounted to nil and Rp63,558,654,082, respectively. The related interest expenses for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp7,845,242,619 and Rp3,221,459,907 and was recorded as part of "Other Expenses - Interest Expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum kedua No. 049/SME I/BOI/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 tentang perubahan suku bunga pinjaman. Suku bunga untuk fasilitas pinjaman ini menjadi 11,50%.

Pada 1 Oktober 2020, HRT menerima persetujuan tertulis dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sehubungan dengan pemberitahuan tertulis HRT untuk penggunaan fasilitas kredit, melakukan perubahan susunan pemegang saham dan direksi, dan rencana penawaran umum perdana PT Hasnur Internasional Shipping. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 18 Desember 2020.

15. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

c. PT Bank Oke Indonesia Tbk (continued)

This agreement was amended several times, the latest by third addendum No. 049/SME I/BOI/VI/2020 dated June 9, 2020 related changes interest rate. Interest rate this facility is 11.50%.

On October 1, 2020, HRT received written approval from PT Bank Oke Indonesia Tbk in relation with HRT written notification for the use of the credit facility, made changes to the composition of shareholders and directors, and planning initial offering public of PT Hasnur Internasional Shipping. This loan has been fully paid on December 18, 2020.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka:

	2020	2019	2018	
Pajak Pertambahan Nilai	1.330.157.644	-	-	Value-Added Tax

b. Utang pajak:

	2020	2019	2018	
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4 ayat 2 - Final	15.891.518	651.001.048	408.010.716	Article 4(2) - Final
Pasal 15 - Final	874.292.800	1.108.022.870	683.005.985	Article 15 - Final
Pasal 21	53.300.105	221.581.842	140.008.859	Article 21
Pasal 23	805.763.827	45.902.459	19.299.792	Article 23
Pasal 25	287.607.311	87.138.040	77.580.700	Article 25
Pasal 29	170.644.103	236.793.477	138.692.487	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	-	936.611.242	155.434.544	Value-Added Tax
Surat Tagihan Pajak (STP)	48.681.925	1.253.099	-	Tax Collection Letter (STP)
Total	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083	Total

c. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Pajak penghasilan badan:				Corporate income tax:
Perusahaan				Company
Kini - Final	3.533.988.999	4.314.323.046	4.244.984.954	Current - Final
Kini - Tidak Final	146.056.328	153.761.000	205.338.750	Current - Non Final
Entitas Anak				Subsidiaries
Kini - Tidak Final	487.970.387	695.852.404	535.954.581	Current - Non Final
Tangguhan	59.394.386	1.708.733.628	(1.843.060.454)	Deferred
Beban pajak penghasilan	4.227.410.100	6.872.670.078	3.143.217.831	Income tax expense

c. The components of income tax expense (benefit) are as follows:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

d. Pajak penghasilan pasal 15 - final:

d. Income tax article 15 - final:

Perusahaan bergerak di bidang pelayaran yang dikenakan PPh pasal 15 final sebesar 1,2% dari peredaran bruto sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996.

The Company is engaged in shipping, which is subject to final income tax article 15 rate of 1.2% from gross revenue based on Finance Ministry Decisions No. 416/KMK.04/1996 dated June 14, 1996 and SE-29/PJ.4/1996 dated August 13, 1996.

Perhitungan pajak penghasilan final sehubungan dengan operasional Perusahaan adalah sebagai berikut:

The calculations of the final income tax in connection with the operation of the Company are as follows:

	2020	2019	2018	
Total pendapatan atas jasa sewa kapal dan <i>demurrage</i>	294.499.083.224	359.526.920.500	353.748.746.139	Total service revenue from vessel rentals freight services and demurrage
Pajak penghasilan pasal 15 - pajak final 1,2%	3.533.988.998	4.314.323.046	4.244.984.953	Income tax article 15 - final tax at 1.2%
Pajak penghasilan pasal 15 - pajak final dipotong pada tahun berjalan	(3.754.818.431)	(3.971.229.596)	(4.079.058.363)	Income tax article 15 - final tax deducted in the current year
Utang pajak penghasilan pasal 15 - final				Income tax payable article 15 - final
utang pajak penghasilan Perusahaan tahun berjalan	(220.829.433)	343.093.450	165.926.590	current year corporate income tax of the Company
Utang pajak penghasilan pasal 15 - final				Income tax payable article 15 - final
utang pajak penghasilan Perusahaan tahun sebelumnya	921.933.157	578.839.707	412.913.116	prior year corporate income tax of the Company
Pajak penghasilan pasal 15 - final dipotong dari pemasok	173.189.076	186.089.713	104.166.279	Income tax article 15 - final withheld from vendor
Total	874.292.800	1.108.022.870	683.005.985	Total

e. Pajak Kini

e. Current Tax

	2020	2019	2018	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	21.978.328.554	37.630.259.168	27.386.274.050	Income before income tax benefit (expense) per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Entitas Anak	1.090.347.187	322.526.498	(3.773.719.996)	Income before income tax benefit (expense) of the Subsidiaries
Eliminasi	(892.970.504)	(3.049.639.028)	8.854.545.866	Elimination
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan	22.175.705.237	34.903.146.638	32.467.099.920	Income before income tax benefit (expense) of the Company

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

e. Pajak Kini (lanjutan)

e. Current Tax (continued)

	2020	2019	2018	
Pajak dihitung pada tarif yang berlaku	4.878.655.152	8.725.786.660	8.116.774.980	Tax calculated based on applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap	(1.198.609.909)	(4.257.702.614)	(2.606.164.592)	Tax effect of permanent differences
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto				Income tax benefit (expense) of:
Perusahaan	3.680.045.327	4.468.084.046	5.510.610.388	The Company
Entitas anak - neto	547.364.773	2.404.586.032	(1.307.105.873)	Subsidiaries - net
Taksiran beban pajak penghasilan - neto menurut laporan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.227.410.100	6.872.670.078	4.203.504.515	Estimated income tax expense - net per consolidated statements of profit (loss) and other comprehensive income

Taksiran laba kena pajak Perusahaan untuk tahun fiskal 2020, 2019 dan 2018, hasil rekonsiliasi seperti yang tercantum dalam tabel diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Estimated taxable income of the Company for fiscal years 2020, 2019 and 2018, resulting from the reconciliation as shown in the table above will be the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns (SPT) submitted to Tax Office.

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	2020				
	Saldo Awal 1 Januari/ Beginning Balance January 1	Ditambahkan (Dikreditkan) ke/ Added (Credited) to		Saldo Akhir 31 Desember/ Ending Balance December 31	
		Laba Rugi/ Profit or Loss	Laba Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	
Entitas anak: Imbalan kerja karyawan	547.475.711	50.100.756	21.582.285	(109.495.142)	509.663.610
					Subsidiary: Employee benefits
	2019				
	Saldo Awal 1 Januari/ Beginning Balance January 1	Dikreditkan (Dibebankan) ke/ Added (Credited) to		Saldo Akhir 31 Desember/ Ending Balance December 31	
		Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income		
Entitas Anak: Imbalan kerja karyawan	441.456.161	141.746.525	(35.726.975)		547.475.711
Rugi fiskal	1.850.480.153	(1.850.480.153)	-		-
					Subsidiary: Employee benefits Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - Neto	2.291.936.314	(1.708.733.628)	(35.726.975)		547.475.711
					Deferred tax assets - Net

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

16. TAXATION (continued)

f. Pajak Tangguhan (lanjutan)

f. Deferred Tax (continued)

	2018					
	Saldo Awal 1 Januari/ Beginning Balance January 1	Ditambahkan (Dikreditkan) ke/ Added (Credited) to		Pengurangan Aset Pajak Tangguhan atas Pelepasan Entitas Anak/ Decrease on Deferred Tax Asset on Disposal of Subsidiaries	Saldo Akhir 31 Desember/ Ending Balance December 31	
		Laba Rugi/ Profit or Loss	Laba Komprehensif Lainnya/Other Comprehensive Income			
Entitas anak: Imbalan kerja karyawan	414.274.658	86.521.301	(43.156.544)	(16.183.254)	441.456.161	<i>Subsidiary:</i> Employee benefits
Rugi fiskal	93.941.000	1.756.539.153	-	-	1.850.480.153	Fiscal loss
Total	508.215.658	1.843.060.454	(43.156.544)	(16.183.254)	2.291.936.314	Total

g. Pemeriksaan Pajak

g. Tax Audit

Perusahaan

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan menerima surat dari kantor pajak yang menginformasikan dimulainya pemeriksaan pajak terkait dengan pajak penghasilan badan 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.

The Company

In December 2, 2019, the Company received letter from tax office informing the commencement of tax assessment related to the 2017 corporate income tax. As of the date of issuance of financial statements, the tax audit process is still ongoing.

h. Surat Ketetapan Pajak

h. Tax Assessment Letter

Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Pajak Pertambahan Nilai periode Mei 2020, Pajak Penghasilan 21 periode Februari 2018, Januari - Desember 2019 dan Februari - Juni 2020, Pajak Penghasilan 4 ayat 2 periode Juni 2018 dan Pajak Penghasilan 25 periode Desember 2019 dan Januari 2020 sebesar Rp203.319.252. Beban yang terjadi akibat STP tersebut dicatat sebagai dari "Beban usaha - Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Company

As of December 31, 2020, the Company received Tax Collection Letter (STP) on Value Added Tax period May 2020, Income Tax Articles 21 for period February 2018, January - December 2019 and February - June 2020, Tax Article 4 (2) period June 2018 and Tax Articles 25 period December 2019 and January 2020 amounting to Rp203,319,252. The expenses related to those STP were recorded as part of "Operating Expenses - Others" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, HRT menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Pajak Penghasilan 21 periode Maret - Agustus 2018 dan Januari - Februari 2019 dan Pajak Penghasilan 23 untuk periode Juni, September dan Desember 2019 sebesar Rp164.282.678. Beban yang terjadi akibat STP tersebut dicatat sebagai dari "Beban Usaha - Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, HRT menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk periode Februari - Mei 2018 sebesar Rp12.776.568. Beban yang terjadi akibat STP tersebut dicatat sebagai dari "Beban Usaha - Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember dan 2019 HMS menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 2017 sebesar masing-masing Rp896.153.068 dan Rp150.465.684. Seluruh STP telah dilunasi HMS sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Beban yang terjadi akibat STP tersebut dicatat sebagai dari "Beban Usaha - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 31 Desember 2020 dan 2019.

i. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

16. TAXATION (continued)

h. Tax Assessment Letter (continued)

The Subsidiaries

As of December 31, 2020, HRT received Tax Collection Letter (STP) on Income Tax Articles 21 for period March - August 2018 and January - February 2019 and Income Tax Articles 23 for period June, September and December 2019 amounting to Rp164,282,678. The expenses related to those STP were recorded as part of "Operating Expenses - Others" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2019, HRT received Tax Collection Letter (STP) on Value-added Tax for period February - May 2018 amounting to Rp12,776,568. The expenses related to those STP were recorded as part of "Operating Expenses - Others" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2020 and 2019, HMS received several Tax Collection Letter (STP) on Value Added Tax for period 2017 amounting to Rp896,153,068 and Rp150,433,599. All STP have been paid by HMS until December 31, 2020 and 2019. The expenses related to those STP were recorded as part of "Operating Expense - Others" in December 31, 2020 and 2019 consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

i. Changes in Corporate Tax Rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

i. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Grup Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021, 16 April 2020 dan 12 Juni 2019. Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

	2020	2019	2018	
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun/ <i>per annum</i>	10% per tahun/ <i>per annum</i>	10% per tahun/ <i>per annum</i>	Salary increment rate
Tingkat diskonto aktuarial	5,88 - 6,59% per tahun / <i>per annum</i>	7,60% per tahun/ <i>per annum</i>	8,19% per tahun/ <i>per annum</i>	Discount rate
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019	TMI-III 2011	TMI-III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalitas/ <i>from mortality rate</i>	5% dari tingkat mortalitas/ <i>from mortality rate</i>	5% dari tingkat mortalitas/ <i>from mortality rate</i>	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5%, ≤ 39 tahun/ <i>years</i> 3%, 40 - 44 tahun/ <i>years</i> 2%, 45 - 49 tahun/ <i>years</i> 1%, 50 - 54 tahun/ <i>years</i>	5%, ≤ 39 tahun/ <i>years</i> 3%, 40 - 44 tahun/ <i>years</i> 2%, 45 - 49 tahun/ <i>years</i> 1%, 50 - 54 tahun/ <i>years</i>	5%, ≤ 39 tahun/ <i>years</i> 3%, 40 - 44 tahun/ <i>years</i> 2%, 45 - 49 tahun/ <i>years</i> 1%, 50 - 54 tahun/ <i>years</i>	Resignation rate

16. TAXATION (continued)

i. Changes in Corporate Tax Rate (continued)

Perpu No. 1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Group provides provision for employee benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003). The benefits are unfunded. The following tables summarize the components of net benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the consolidated statements of financial position for the estimated liabilities for employees' benefits as calculated by an independent actuary, PT Sigma Prima Solusindo, for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, in its reports dated February 19, 2021, April 16, 2020 and June 12, 2019, respectively. The actuarial calculation used the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rincian berikut ini menyajikan komponen beban dan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup:

a. Beban imbalan kerja karyawan:

	2020	2019	2018
Biaya jasa kini	1.344.377.704	956.936.191	882.767.939
Biaya bunga	987.498.455	962.387.158	839.022.633
Penyelesaian program	-	379.473.000	-
Total	2.331.876.159	2.298.796.349	1.721.790.572

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan:

	2020	2019	2018
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan:

	2020	2019	2018
Saldo awal	13.134.188.465	11.806.816.877	12.746.353.331
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908	(139.107.417)	-
Laba (rugi) komprehensif lain	3.226.073.346	(452.844.344)	190.737.791
Beban imbalan kerja tahun berjalan	2.331.876.159	2.298.796.349	1.721.790.572
Pembayaran manfaat	(143.338.800)	(379.473.000)	(2.787.331.806)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan entitas anak	-	-	(64.733.011)
Saldo akhir	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

Pada tanggal 31 Desember 2018, pembayaran manfaat yang belum dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp307.935.600 dicatat sebagai bagian dari "Liabilitas yang Masih Harus Dibayar - Kompensasi Karyawan".

d. Perubahan atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:

	2020	2019	2018
Saldo awal	13.134.188.465	11.806.816.877	12.746.353.331
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908	(139.107.417)	-
Keuntungan aktuarial	3.226.073.346	(73.371.344)	(2.500.727.636)
Beban jasa kini	1.344.377.704	956.936.191	882.767.939
Beban bunga	987.498.455	962.387.158	839.022.633
Pembayaran manfaat	(143.338.800)	(379.473.000)	(95.866.379)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan investasi	-	-	(64.733.011)
Total	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The following tables summarize the components of employee benefits expense and liabilities of the Group:

a. Employee benefits expense:

	2020	2019	2018
Biaya jasa kini	1.344.377.704	956.936.191	882.767.939
Biaya bunga	987.498.455	962.387.158	839.022.633
Penyelesaian program	-	379.473.000	-
Total	2.331.876.159	2.298.796.349	1.721.790.572

b. Employee benefits liabilities:

	2020	2019	2018
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

c. The movements in the employee benefit liabilities:

	2020	2019	2018
Saldo awal	13.134.188.465	11.806.816.877	12.746.353.331
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908	(139.107.417)	-
Laba (rugi) komprehensif lain	3.226.073.346	(452.844.344)	190.737.791
Beban imbalan kerja tahun berjalan	2.331.876.159	2.298.796.349	1.721.790.572
Pembayaran manfaat	(143.338.800)	(379.473.000)	(2.787.331.806)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan entitas anak	-	-	(64.733.011)
Saldo akhir	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

As of December 31, 2018, benefit payment that has not been paid to employees amounting to Rp307,935,600 was recorded as part of "Accrued Liabilities - Employee Compensation".

d. Changes in the present value of defined benefit obligation:

	2020	2019	2018
Saldo awal	13.134.188.465	11.806.816.877	12.746.353.331
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908	(139.107.417)	-
Keuntungan aktuarial	3.226.073.346	(73.371.344)	(2.500.727.636)
Beban jasa kini	1.344.377.704	956.936.191	882.767.939
Beban bunga	987.498.455	962.387.158	839.022.633
Pembayaran manfaat	(143.338.800)	(379.473.000)	(95.866.379)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan investasi	-	-	(64.733.011)
Total	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel lain konstan, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih rendah sebesar Rp1.087.876.766, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih tinggi sebesar Rp1.225.922.723.

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp1.172.106.825, sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp1.063.206.801.

Profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2020	
Sampai dengan 2 tahun	3.891.367.634	Up to 2 years
2 tahun - 5 tahun	3.839.591.007	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	11.349.031.437	More than 5 years
Total	19.079.990.078	Total

Manajemen Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas tersebut memadai untuk memenuhi liabilitas imbalan kerja Grup.

Sensitivity analysis for discount rate risk

As of December 31, 2020, if the discount rate is higher by 1 percent with all other variables held constant, the present value of defined benefit obligation would have been Rp1,087,876,766 lower, while if the discount rate is lower by 1 percent, the present value of defined benefit obligation would have been Rp1,225,922,723 higher.

Sensitivity analysis for salary increase rate risk

As of December 31, 2020, if the salary increase rate is higher by 1 percent with all other variables held constant, the present value of defined benefits obligation would have been Rp1,172,106,825 higher, while if the salary increase rate is lower by 1 percent, the present value of defined benefits obligation would have been Rp1,063,206,801 lower.

The maturity profile of defined benefit obligation as of December 31, 2020 is as follows:

The management of the Group has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Group's liability for its employee benefits.

18. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris Indra Tjahja Rinato, S.H., No. 29 tanggal 30 Juni 2020, tentang perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal saham Perusahaan. Peningkatan modal saham dilakukan dengan dividen saham sebesar Rp110.000.000.000 sehingga total modal saham menjadi Rp210.000.000.000, dengan perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp2.100.000.

18. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 29 of Indra Tjahja Rinanto, S.H., dated June 30, 2020, concerning changes in the composition shareholders and increase authorized share capital of the Company. The increased authorized share capital with dividend shares amounting to Rp110,000,000,000 so that total share capital becomes Rp210,000,000,000, changes in the nominal value of the share from Rp1,000,000 to Rp2,100,000.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Edaran tanggal 30 Juni 2020, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp110.000.000.000 dari saldo laba tahun buku 2019.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler para pemegang saham Perusahaan, pemegang saham menyetujui ratifikasi penetapan jumlah dividen saham dimana semula pemegang saham lama menetapkan dividen saham sebesar Rp110.000.000.000 menjadi Rp107.000.000.000 dan kekurangan setoran modal dilakukan secara tunai sebesar Rp3.000.000.000.

Berdasarkan Akta No. 33, tanggal 30 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui melakukan pembagian dividen perseroan sebesar Rp9.130.518.778. Kemudian terdapat Keputusan Sirkuler para pemegang saham Perusahaan, bahwa berdasarkan perhitungan ulang pemegang saham menyetujui ratifikasi penetapan jumlah dividen menjadi Rp4.565.259.388. Pada tanggal 26 Juni 2020 dividen sudah dibayarkan sebesar Rp456.525.938 dan sisa hutang dividen sebesar Rp4.108.733.450 pada tanggal 30 Juni 2020 dan telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2020.

Setelah transaksi-transaksi diatas kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nominal/ Value	Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Hasnur Jaya International	95.000	199.500.000.000	95,00%
Hj. Rachmadi HAS	715	1.501.500.000	0,715%
Jayanti Sari	715	1.501.500.000	0,715%
Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	1.499.400.000	0,714%
Hasnuryadi Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714%
Hasnuryani	714	1.499.400.000	0,714%
Yuni Abdi Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714%
Zainal Hadi HAS HB	714	1.499.400.000	0,714%
Total	100.000	210.000.000.000	100,00%

Berdasarkan Akta No. 29, tanggal 30 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui melakukan penjualan dan pembelian saham sebagai berikut:

- Penjualan sebagian kepemilikan 51.000 saham PT Hasnur Jaya International menjadi PT Nur Internasional Samudra;
- Penjualan sebagian kepemilikan 6.285 saham PT Hasnur Jaya International menjadi Jayanti Sari;

18. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Circular Decision dated June 30, 2020, the shareholders of the Company approved the dividends shares amounting to Rp110,000,000,000 from retained earnings 2019.

Based on the Circular Decision of the Company's shareholders, the shareholders approved the ratification of the determination of the dividend shares amount whereby the old shareholders initially set a dividend shares of Rp110,000,000,000 to Rp107,000,000,000 and underpayment of paid up capital made in cash amounting to Rp3,000,000,000.

Based on Notarial Deed No. 33 dated June 30, 2020, the Company's shareholders agreed to distribute a dividend of the Company amounting to Rp9,130,518,778. Then there is Circular Decision of the Company's shareholders, that based on the recalculation the shareholders approved the ratification of the determination of the dividend amount to Rp4,565,259,388. On June 26, 2020 dividend already paid amounting to Rp456,525,938 and the remaining dividends payable amounted to Rp4,108,733,450 as of June 30, 2020 and has been paid on July 1, 2020.

After the above transactions, the Company shareholders composition become as follows:

Based on Notarial Deed No. 29 dated June 30, 2020, the Company's shareholders agreed to purchase and sell for shares as follows:

- Sell certain ownership 51,000 shares of PT Hasnur Jaya International to PT Nur Internasional Samudra;
- Sell certain ownership 6,285 shares PT Hasnur Jaya International to Jayanti Sari;

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

- Penjualan sebagian sebagian kepemilikan 2.715 saham PT Hasnur Jaya International menjadi Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh kepemilikan 715 saham Hj. Rachmadi HAS menjadi Zainal Hadi HAS;
- Penjualan seluruh kepemilikan 714 saham Hajjah Nila Susanti Zulfikar menjadi Zainal Hadi HAS;
- Penjualan seluruh kepemilikan 714 saham Hasnuryadi Sulaiman menjadi Zainal Hadi HAS;
- Penjualan seluruh kepemilikan 714 saham Hasnuryani menjadi Zainal Hadi HAS;
- Penjualan seluruh kepemilikan 714 saham Yuni Abdi Nur Sulaiman menjadi Zainal Hadi HAS.

Susunan dan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL (continued)

- Sell certain ownership 2,715 shares PT Hasnur Jaya International to Zainal Hadi HAS HB;
- Sell all ownership 715 shares Hj. Rachmadi HAS to Zainal Hadi HAS;
- Sell all ownership 714 shares Hajjah Nila Susanti Zulfikar to Zainal Hadi HAS;
- Sell all ownership 714 shares Hasnuryadi Sulaiman to Zainal Hadi HAS;
- Sell all ownership 714 shares Hasnuryani to Zainal Hadi HAS;
- Sell all ownership 714 shares Yuni Abdi Nur Sulaiman to Zainal Hadi HAS.

The composition and percentage of the Company's shareholders as of December 31, 2020, is as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nominal/ Value	Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Nur Internasional Samudra	51.000	107.100.000.000	51,00%
PT Hasnur Jaya International	35.000	73.500.000.000	35,00%
Jayanti Sari	7.000	14.700.000.000	7,00%
Zainal Hadi HAS HB	7.000	14.700.000.000	7,00%
Total	100.000	210.000.000.000	100,00%

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholding structure as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nominal/ Value	Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000	95,00%
Hj. Rachmadi HAS	715	715.000.000	0,715%
Jayanti Sari	715	715.000.000	0,715%
Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	714.000.000	0,714%
Hasnuryadi Sulaiman	714	714.000.000	0,714%
Hasnuryani	714	714.000.000	0,714%
Yuni Abdi Sulaiman	714	714.000.000	0,714%
Zainal Hadi HAS HB	714	714.000.000	0,714%
Total	100.000	100.000.000.000	100,00%

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Secara Edaran Pemegang Saham tanggal 12 Februari 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui melakukan pembagian dividen perseroan sebesar Rp3.000.000.000 dari saldo laba ditahan tahun 2017.

18. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Circular Decision of Shareholders dated February 12, 2019, the Company's shareholders agreed to distribute a dividend of the Company amounting to Rp3,000,000,000 from the retained earnings balance in 2017.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Mutasi tambahan modal disetor:

Transaksi	Tahun transaksi/ Transaction year	2020	2019	2018	Transactions
Akuisisi dari PT Hasnur Resources Terminal	2020	(289.159.429)	-	-	Acquisitions of PT Hasnur Resources Terminal
Pelepasan dari PT Barito Putera Docking	2018	7.483.332.075	7.483.332.075	7.483.332.075	Disposal of PT Barito Putera Docking
Total		7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075	Total

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Movement of additional paid-in capital:

20. PENDAPATAN NETO

Akun ini merupakan pendapatan neto dari:

	2020	2019	2018	
Pihak-pihak berelasi (Catatan 23)				Related parties (Note 23)
Pengangkutan	225.324.340.480	332.613.255.511	285.692.283.083	Freight
Jasa bantuan pemuatan dan pembongkaran	15.779.665.123	13.995.714.864	10.027.259.872	Assistance of loading and unloading services
Demurrage	-	243.250.000	-	Demurrage
Pihak ketiga				Third parties
Pengangkutan	68.983.833.646	26.550.414.989	65.843.263.056	Freight
Demurrage	190.909.099	-	893.200.000	Demurrage
Jasa bantuan pemuatan dan pembongkaran	70.500.000	-	-	Assistance of loading and unloading services
Charter	-	120.000.000	1.320.000.000	Charter
Total	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011	Total
(Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto):				(Customers exceeding 10% of total net revenues):
	2020	2019	2018	
Pendapatan neto:				Net revenues:
Pihak-pihak berelasi				Related parties
PT Bhumi Rantau Energi	183.883.383.405	228.427.759.901	266.474.850.144	PT Bhumi Rantau Energi
PT Energi Batubara Lestari	41.440.957.075	27.508.219.567	17.202.797.427	PT Energi Batubara Lestari
PT Tapin Suthra Berjaya	-	76.920.526.043	41.712.077.762	PT Tapin Suthra Berjaya
Total	225.324.340.480	332.856.505.511	325.389.725.333	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2020	2019	2018
Spot kapal	124.943.838.373	175.453.421.261	180.592.760.643
Biaya penarikan kapal	30.065.839.725	32.386.687.607	24.878.599.449
Penyusutan (Catatan 9)	22.537.806.312	20.431.336.066	19.484.536.780
Biaya operasional kapal	20.490.937.275	20.303.349.411	20.198.199.559
Docking (Catatan 10)	13.927.310.141	10.775.847.799	9.855.690.011
Channel fee	13.807.653.927	15.786.349.714	13.736.516.611
Bahan bakar	6.388.186.506	13.644.033.260	16.777.932.554
Keagenan	3.914.556.748	4.430.609.574	4.275.711.610
Perbaikan dan pemeliharaan	3.049.634.132	3.540.287.111	2.157.259.974
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	6.901.338.412	8.311.738.182	10.454.360.997
Total	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188

21. COST OF REVENUES

Vessel spot	
Towing fee	
Depreciation (Note 9)	
Vessel operation cost	
Docking (Note 10)	
Channel fee	
Fuel	
Agency	
Repair and maintenance	
Others (each below Rp2 billion)	
Total	

22. BEBAN USAHA

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
Umum dan administrasi			
Kompensasi karyawan	20.877.924.319	16.219.009.543	16.231.257.511
Jasa profesional	2.408.392.979	933.817.605	1.023.520.201
Beban imbalan kerja (Catatan 17)	2.331.876.159	2.298.796.349	1.721.790.572
Biaya administrasi	1.476.749.495	921.600.977	690.978.629
Perjamuan	1.044.016.099	1.361.840.592	1.217.312.798
Perjalanan dinas dan transportasi	858.529.726	1.652.483.797	2.383.546.551
Perlengkapan kantor	583.539.799	525.831.220	474.324.198
Penyusutan (Catatan 9)	396.176.571	481.949.631	517.579.191
Beban penyisihan piutang (Catatan 5)	338.310.839	302.682.717	7.352.659.610
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp300 juta)	866.289.586	1.167.663.596	1.199.092.257
Total	31.181.805.572	25.865.676.027	32.812.061.518

22. OPERATING EXPENSES

The details of operating expenses are as follows:

General and administrative	
Employees' compensation	
Employee benefits expense	
Professional fee	
(Note 17)	
Administrative cost	
Entertainment	
Travel and transportation	
Office supplies	
Depreciation (Note 9)	
Bad debt expenses (Note 5)	
Miscellaneous	
(each below Rp300 million)	
Total	

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018
<u>Piutang usaha (Catatan 5)</u>			
PT Energi Batubara Lestari	20.828.897.622	25.330.773.515	17.677.225.592
PT Bhumi Rantau Energi	10.499.012.499	38.939.441.335	11.880.487.610
PT Hasnur Jaya International	14.528.571	33.776.895.265	28.472.406.841
PT Hasnur Citra Terpadu	-	108.152.600	108.152.600
Total	31.342.438.692	98.155.262.715	58.138.272.643
<u>Piutang dari pihak-pihak berelasi</u>			
PT Hasnur Jaya Utama	7.408.810.519	63.486.682.634	41.635.647.588
PT Magma Sigma Utama	217.014.765	250.000.000	250.000.000
H. A. Sulaiman H. B. (almarhum)	-	4.000.000.000	4.000.000.000
PT Hasnur Jaya International	-	-	8.255.825.545
PT Hasnur Binauang Putra Mulia	-	-	2.384.580.300
PT Barito Putera Docking	-	1.698.025.276	1.698.025.276
PT Hasnur Jaya Tambang	-	651.488.330	651.488.330
PT Energi Batubara Lestari	-	324.628.606	324.628.606
PT Barito Putera Plantation	-	78.314.302	78.314.302
PT Hasnur Jaya Energi	-	42.930.915	72.930.915
PT Hasnur Group Indonesia	-	39.000.000	39.000.000
Total	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The details of balances with related parties are as follows:

Trade receivables (Note 5)	
PT Energi Batubara Lestari	
PT Bhumi Rantau Energi	
PT Hasnur Jaya International	
PT Hasnur Citra Terpadu	
Total	
Due from related parties	
PT Hasnur Jaya Utama	
PT Magma Sigma Utama	
H. A. Sulaiman H. B. (deceased)	
PT Hasnur Jaya International	
PT Hasnur Binauang Putra Mulia	
PT Barito Putera Docking	
PT Hasnur Jaya Tambang	
PT Energi Batubara Lestari	
PT Barito Putera Plantation	
PT Hasnur Jaya Energi	
PT Hasnur Group Indonesia	
Total	

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

	2020	2019	2018	
<u>Uang muka pembelian lahan</u> PT Hasnur Jaya International	26.823.491.000	-	-	<u>Advance for purchase of land</u> PT Hasnur Jaya International
<u>Utang usaha (Catatan 12)</u> PT Barito Putera Docking PT Hasnur Jaya International PT Magma Sigma Utama PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Informasi Teknologi	43.415.406 - - - -	- 2.957.329.681 143.260.000 - -	- 4.036.691.757 143.260.000 30.237.943.928 200.000	<u>Trade payables (Note 12)</u> PT Barito Putera Docking PT Hasnur Jaya International PT Magma Sigma Utama PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Informasi Teknologi
Total	43.415.406	3.100.589.681	34.418.095.685	Total
<u>Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar</u> PT Hasnur Jaya International PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Jaya Tambang PT Hasnur Jaya Energi PT Barito Putera Docking	185.041.378 23.800.000 - - -	- 23.800.000 4.332.874.211 - -	1.405.831.909 1.512.895.237 6.115.000.000 30.000.000 43.415.406	Due to related parties - <u>current portion</u> PT Hasnur Jaya International PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Jaya Tambang PT Hasnur Jaya Energi PT Barito Putera Docking
Total	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552	Total
<u>Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang</u> PT Hasnur Jaya International PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Citra Terpadu	28.643.936.000 1.575.000.000 -	783.980.000 2.431.736.585 21.550.000.000	1.470.132.000 2.431.736.585 21.550.000.000	Due to related parties - <u>non-current portion</u> PT Hasnur Jaya International PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Citra Terpadu
Total	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585	Total
<u>Pendapatan</u> PT Bhumi Rantau Energi PT Energi Batubara Lestari PT Hasnur Jaya International PT Tapin Suthra Berjaya	183.883.383.405 41.440.957.075 15.779.665.123 -	228.427.759.901 27.508.219.567 13.995.714.864 76.920.526.043	230.569.414.963 17.202.797.427 10.027.259.872 37.920.070.693	<u>Revenues</u> PT Bhumi Rantau Energi PT Energi Batubara Lestari PT Hasnur Jaya International PT Tapin Suthra Berjaya
Total	241.104.005.603	346.852.220.375	295.719.542.955	Total
<u>Beban pokok pendapatan</u> PT Hasnur Jaya International PT Barito Putera Docking	622.217.595 13.800.000	2.918.261.062 -	4.036.691.757 -	<u>Cost of revenues</u> PT Hasnur Jaya International PT Barito Putera Docking
Total	636.017.595	2.918.261.062	4.036.691.757	Total
<u>Beban umum dan administrasi</u> PT Barito Putera Docking	520.984.872	520.984.872	520.984.872	<u>General and administrative expense</u> PT Barito Putera Docking
<u>Pendapatan lain-lain</u> PT Hasnur Jaya Utama PT Magma Sigma Utama	984.984.925 9.840.765	- -	- -	<u>Other income</u> PT Hasnur Jaya Utama PT Magma Sigma Utama
Total	994.825.690	-	-	Total

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Remuneration payment to Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

	2020	2019	2018	
<u>Imbalan kerja jangka pendek</u> Dewan Komisaris Dewan Direksi	1.495.740.375 5.977.295.802	1.672.136.550 3.635.411.589	1.458.356.800 4.243.176.090	<u>Short-term employee benefits</u> Board of Commissioners Board of Directors
Total	7.473.036.177	5.307.548.139	5.701.532.890	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Hubungan dan sifat saldo/transaksi antara Grup dan pihak-pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The relationship and the nature of accounts/transactions between the Group and the above related parties are as follows:

Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of Accounts/Transactions
PT Hasnur Jaya International (HJI)	Pemegang saham/Shareholder	Piutang usaha, piutang dari pihak berelasi, uang muka pembelian lahan, utang usaha, utang kepada pihak berelasi, pendapatan, beban pokok pendapatan dan jaminan korporasi untuk pinjaman bank/Trade receivable, due from a related party, advance for purchase of land, trade payable, due to a related party, revenue, cost of revenue and corporate guarantee for bank loan
Jayanti Sari	Pemegang saham/Shareholder	Memberikan jaminan aset tetap untuk pinjaman bank/Providing fixed assets as guarrante for bank loan
PT Energi Batubara Lestari (EBL)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang usaha, piutang dari pihak berelasi dan pendapatan/Trade receivable, due from a related party and revenue
PT Bhumi Rantau Energi (BRE)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang usaha dan pendapatan/Trade receivable and revenue
PT Hasnur Citra Terpadu (HCT)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang usaha dan utang kepada pihak berelasi/Trade receivable and due to a related party
PT Hasnur Jaya Utama (HJU)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang dari pihak berelasi, utang usaha, utang kepada pihak berelasi, pendapatan lain-lain dan jaminan korporasi untuk pinjaman bank/Due from a related party, trade payable, due to a related party, other income and corporate guarantee for bank loan
PT Magma Sigma Utama (MSU)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang dari pihak berelasi, utang usaha dan pendapatan lain-lain/Due from related party, trade payable and other income
PT Hasnur Binuang Putra Mulia (HBPM)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang dari pihak berelasi/Due from a related party
PT Barito Putera Docking (BPD)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang dari pihak berelasi, utang usaha, utang kepada pihak berelasi, beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi/Due from a related party, trade payable, due to a related party, cost of revenue and general and administration expenses
PT Hasnur Jaya Tambang (HJT)	Entitas afiliasi/Affiliated entity	Piutang dari pihak berelasi dan utang kepada pihak berelasi/Due from a related party and due to a related party

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

<u>Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties</u>	<u>Hubungan/ Relationship</u>	<u>Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of Accounts/Transactions</u>
PT Barito Putera Plantation (BPP)	Entitas afiliasi/ <i>Affiliated entity</i>	Piutang dari pihak berelasi/ <i>Due from a related party</i>
PT Hasnur Jaya Energi (HJE)	Entitas afiliasi/ <i>Affiliated entity</i>	Piutang dari pihak berelasi dan utang kepada pihak berelasi/ <i>Due from a related party and due to a related party</i>
PT Hasnur Group Indonesia (HGI)	Entitas afiliasi/ <i>Affiliated entity</i>	Piutang dari pihak berelasi/ <i>Due from a related party</i>
PT Hasnur Informasi Teknologi (HIT)	Entitas afiliasi/ <i>Affiliated entity</i>	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
PT Tapin Suthra Berjaya (TSB)	Entitas afiliasi/ <i>Affiliated entity</i>	Pendapatan/ <i>Revenue</i>

Entitas afiliasi adalah entitas dibawah pengendalian pemegang saham yang sama dan/atau memiliki dewan direksi atau komisaris yang sama dengan Grup.

Affiliated entity is an entity controlled by the same shareholders and/or have the same board of directors or commissioners with the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, piutang usaha dari EBL, BRE, HJI dan HCT merupakan piutang dari *freight charter* dan pendapatan *demurrage*.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, trade receivables from EBL, BRE, HJI and HCT represent receivable from freight charter and demurrage revenues.

Perusahaan menerima pembayaran piutang dari pihak berelasi Bapak H. A. Sulaiman H.B (almarhum) sebesar Rp4.000.000.000. Saldo piutang dari pihak berelasi ini telah dilunasi pada tanggal 12 Oktober 2020.

The Company received payment of due from a related party Mr. H. A. Sulaiman H.B (deceased) amounting to Rp4,000,000,000. The outstanding due from a related party has been fully paid on October 12, 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HJI dan HJU menjual masing-masing 2.250.000 dan 125.000 lembar saham HRT yang dimilikinya kepada Perusahaan dengan nilai nominal masing-masing Rp28.350.000.000 dan Rp1.575.000.000.

On June 30, 2020, HJI and HJU sold 2,250,000 and 125,000 shares respectively owned to HRT which has a nominal amount Rp28,350,000,000 and Rp1,575,000,000, respectively.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan melakukan *net-off* atas utang dan piutang pihak berelasi dengan HCT sebesar Rp1.108.152.600

Based on agreements dated on June 30, 2020, the Company net-off balance due to and due from related parties with HCT amounting to Rp1,108,152,600.

Utang kepada HCT sebesar Rp19.200.000.000 merupakan pinjaman untuk pembelian kapal. Utang tersebut tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan, dan akan jatuh tempo pada tahun 2018. Sisa utang kepada HCT sebesar Rp2.350.000.000 digunakan untuk membiayai aktivitas operasi Perusahaan. Perjanjian ini mengalami perubahan pada tanggal 31 Desember 2018 terkait penjadwalan kembali pelunasan pinjaman pada tanggal 29 Desember 2023. Pada tahun 2020, Perusahaan, HCT dan HJU mengadakan perjanjian dimana Perusahaan akan mengalihkan hutangnya kepada HJU sebesar Rp20.441.847.400. Sehingga saldo utang Perusahaan adalah nihil.

Due to HCT amounting to Rp19,200,000,000, represent loans for purchase of vessels. Those payables are non-interest bearing, unsecured and will mature in 2018. The remaining due to HCT amounting to Rp2,350,000,000 was used to finance the Company's operating activities. This agreement was amended on December 31, 2018 changes on reschedule of payment loan on December 29, 2023. In 2020, the Company, HCT and HJU enter into agreement, in which the Company will transfer their due to HJU amounting to Rp20,441,847,400. Therefore, the remaining balance of the Company's due to is nil.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Piutang dari dan utang kepada pihak-pihak berelasi kecuali utang HCT adalah piutang dan utang dari pinjaman yang diperoleh dari pihak-pihak berelasi untuk membiayai kegiatan operasional pihak-pihak berelasi dan pengeluaran operasional pihak-pihak berelasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak berelasi.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJU sebesar Rp2.133.513.606.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJU sebesar Rp1.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, BPD, dan HJU menandatangani perjanjian dimana, Perusahaan akan mengalihkan piutang pihak berelasi dari BPD kepada HJU sebesar Rp1.698.025.276. Sehingga saldo piutang dari pihak berelasi BPD adalah nihil.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, HJT dan HJU menandatangani perjanjian dimana, Perusahaan akan mengalihkan piutang dari HJT kepada HJU sebesar Rp401.488.330.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, HGI dan HJU menandatangani perjanjian dimana, Perusahaan akan mengalihkan piutang dari HGI kepada HJU sebesar Rp34.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, EBL, dan HJU menandatangani perjanjian dimana, Perusahaan akan mengalihkan piutang dari EBL kepada HJU sebesar Rp4.000.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, HJU dan EBL menandatangani perjanjian, dimana Perusahaan akan mengalihkan utangnya kepada EBL sebesar Rp1.431.736.585. Sesuai kesepakatan antara Perusahaan dan EBL pada tanggal yang sama, Perusahaan menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi kepada EBL senilai Rp1.431.736.585.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Due from and due to related parties except due to HCT are receivables and payables from loan provided to by the related parties to finance the related parties operating activities and the related parties operational expenditures which were paid in advance by the related parties.

Based on agreements dated June 30, 2020, the Company net-off balance due to and due from related parties with HJU amounting to Rp2,133,513,606.

Based on agreements dated June 30, 2020, the Company net-off balance due to and due from related parties with HJU amounting to Rp1,000,000,000.

On June 30, 2020, the Company, BPD and HJU entered into agreement, in which the Company, will transfer due from a related party BPD to HJU amounting to Rp1,698,025,276. Therefore, the remaining balance of BPD due from is nil.

On June 30, 2020, the Company, HJT and HJU entered into agreement, in which the Company will transfer receivables from HJT to HJU amounting to Rp401,488,330.

On June 30, 2020, the Company, HGI and HJU entered into agreement, in which the Company will transfer receivables from HGI to HJU amounting to Rp34,000,000.

On June 30, 2020, the Company, EBL and HJU entered into agreement, in which the Company will transfer receivables from EBL to HJU amounting to Rp4,000,000,000.

On June 30, 2020, the Company, HJU and EBL enter into agreement, in which the Company will transfer their payables to EBL amounted to Rp1,431,736,585. Based on agreement between, the Company and EBL in the same date, the Company net-off balance due to and due from related parties EBL amounted to Rp1,431,736,585.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perusahaan, HJU dan EBL menandatangani perjanjian, dimana Perusahaan, akan mengalihkan utangnya kepada EBL sebesar Rp11.768.333.794. Sesuai kesepakatan antara Perusahaan dan EBL pada tanggal yang sama, Perusahaan, menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan EBL sebesar Rp11.768.333.794.

Berdasarkan perjanjian No. 0550/HIS-JKT/DIR-LG033.3/VI-2020 pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan menerima perjanjian pengangkutan batubara jarak jauh (*long towing*) dengan BRE berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan amandemen I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE/I/2021 jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2021.

Berdasarkan perjanjian No. 006a/HIS-JKT/DIR-LG033.51/I-2020 pada tanggal 2 Januari 2020, Perusahaan menerima perpanjangan jangka waktu atas perjanjian pengangkutan batubara jarak dekat (*transshipment*) dengan BRE yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2030.

Pada tanggal 13 Maret 2019, Perusahaan menerima addendum dan amandemen keempat atas perjanjian pengangkutan batubara dengan BRE mengenai perubahan tarif yang berlaku sejak 1 Januari 2019.

Pada tanggal 28 September 2018, HJT, HJI dan Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan mengalihkan seluruh 'kewajiban kepada HJI kepada HJT sebesar Rp8.062.511.670, kemudian Perusahaan mengapusbukukan utang dan piutang pihak berelasi dengan HJT. Sehingga, sisa piutang Perusahaan dari HJT sebesar Rp401.488.330. Pada tahun 2020, Perusahaan telah mengalihkan piutang dari HJT menjadi HJU.

Pada tanggal 7 Agustus 2018, HJI dan Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama program kepemilikan kendaraan karyawan sebesar Rp1.960.176.000. Perjanjian ini akan berakhir pada 6 Agustus 2022. Pada tanggal yang sama, Perusahaan juga mengadakan perjanjian dana pinjaman dengan HJI terkait dengan pembayaran uang muka program kepemilikan kendaraan karyawan sebesar Rp607.763.409. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada 6 Agustus 2022 dan telah dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2019.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

On June 30, 2020, the Company, HJU and EBL enter into agreement, in which the Company will transfer their payables to EBL amounted to Rp11,768,333,794. Based on agreement between the Company and EBL in the same date, the Company net-off balance due to and due from related parties with EBL amounting to Rp11,768,333,794.

Based on agreement No. 0550/HIS-JKT/DIR-LG033.3/VI-2020 on May 29, 2020, the Company agreement of transportation of long towing coal agreement with BRE is valid June 1, 2020 until December 31, 2020. This agreement has been renewed with amendment I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE/I/2021 maturity until December 31, 2021.

Based on agreement No. 006a/HIS-JKT/DIR-LG033.51/I-2020 on January 2, 2020, the Company received renewal of transportation of transshipment coal agreement with BRE is valid January 1, 2020 until December 31, 2030.

On March 13, 2019, the Company received the 4th addendum and amendment of transportation of coal agreement with BRE regarding the latest amendment was changes of the tariff that is effective from January 1, 2019.

On September 28, 2018, HJT, HJI and the Company entered into transfer of rights and obligations agreement. In this agreement, the Company will transfer 'obligations to HJI' to HJT amounting to Rp8,062,511,670, then the Company net off balance due to and due from related parties with HJT. Therefore, the remaining Company's due from HJT amounted to Rp401,488,330. In 2020, the Company was transfer due from related parties from HJT to HJU.

On August 7, 2018, HJI and the Company entered into employee car ownership programs agreement amounting to Rp1,960,176,000. This agreement will expire on August 6, 2022. At the same time, the Company also entered into loan agreement with HJI related to advance payment employee car ownership programs amounting to Rp607,763,409. This agreement will mature on August 6, 2022 and has been fully paid on October 1, 2019.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 2 Januari 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa gedung kantor dengan BPD. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beban sewa atas transaksi ini masing-masing sebesar Rp520.984.872 dicatat sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian. Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 untuk transaksi ini disajikan sebagai bagian dari "Utang kepada Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan Perjanjian No. 001-P/C.Leg/BRE/V/2016, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengangkutan Batubara pada tanggal 2 Mei 2016 dengan BRE dimana BRE sebagai pemilik izin penambangan dan produksi batubara di area yang berlokasi di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menunjuk Perusahaan untuk melakukan transportasi di wilayah terkait dengan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir dalam 40 bulan. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tanggal 2 Juli 2018 dengan addendum dan amendemen No. 002/P/Add/C.Leg/BRE/VII/2018. Perubahan terakhir adalah perubahan tarif yang berlaku sampai 31 Desember 2019.

Selama 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, pendapatan dari HJI berupa pemuatan batubara, bantuan atas jasa bongkar-muat dan *tugboat* yang disediakan oleh HRT dan HMS masing-masing sebesar Rp15.779.665.123, Rp13.995.714.864 dan Rp10.027.259.872. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo terutang dari transaksi ini adalah sebesar Rp14.528.571, Rp33.776.895.265 dan Rp28.472.406.841 dan disajikan sebagai "Piutang Usaha - Pihak Berelasi".

Perjanjian atas transaksi ini telah diubah beberapa kali umumnya perubahan adalah atas jangka waktu perjanjian dan perubahan tarif, yang terakhir adalah pada tanggal 2 Juli 2019. Sehingga, jangka waktu yang semula berlaku hingga 31 Januari 2019 menjadi 31 Desember 2020 dan tarif yang berlaku menjadi Rp1.500/metrik ton (MT).

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

On January 2, 2017, the Group entered into building office rental agreement with BPD. This agreement applied from January 1, 2017 to December 31, 2021. For the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, the related rental expenses amounting to Rp520,984,872, respectively is recorded as part of "General and Administrative Expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The outstanding balance as of December 31, 2018 for this transaction is presented as part of "Due to Related Party" in the consolidated statements of financial position.

Based on Agreement No. 001-P/C.Leg/BRE/V/2016, the Company entered into Transportation of Coal Agreement on May 2, 2016 with BRE whereby BRE as the owner of coal mining and production license of an area located at Lokpaikat, Kabupaten Tapin, South Kalimantan, appointed the Company to perform transportation in the related area with scope of works as stated in the agreement. These agreement will expire in 40 months. This agreement has been amended several times, the latest on July 2, 2018 with addendum and amendments No. 002/P/Add/C.Leg/BRE/VII/2018. The latest amendment was changes of the tariff that is applicable until December 31, 2019.

During December 31, 2020, 2019 and 2018, revenues from HJI represent coal loading, assistance of loading and unloading services and tugboat assistance provided by HRT and HMS amounting to Rp15,779,665,123, Rp13,995,714,864 and Rp10,027,259,872, respectively. As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance from this transaction amounted to Rp14,528,571, Rp33,776,895,265 and Rp28,472,406,841, respectively, and presented as "Trade Receivables - Related Party".

The agreement for these transaction has been amended several time, generally the changes was on change in period and tariffs, the latest dated July 2, 2019. Therefore, the period that was originally valid until January 31, 2019 becomes December 31, 2020 and tariffs applied becomes Rp1,500/metric ton (MT).

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, HRT menghapusbukukan piutang usaha pihak berelasi dengan HJI sebesar Rp29.505.840.100.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT dan HJI menandatangani perjanjian, dimana HJI akan mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dengan luas area 12,23 hektar kepada HRT sebesar Rp26.823.491.000.

Berdasarkan perjanjian No. 0728/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tanggal 30 Juni 2020, pinjaman HJU sebesar Rp62.481.000.000 merupakan pinjaman yang diberikan oleh HRT untuk keperluan belanja modal sebagai tambahan dana. Pinjaman ini dikenakan bunga 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2029. Pada tanggal 30 Desember 2020 mengalami perubahan perjanjian bahwa HRT memberikan potongan sebesar 75% atas bunga yang dikenakan. Pinjaman ini telah dilunasi oleh HJU pada tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp61.250.607.040.

Berdasarkan perjanjian No. 0730/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tanggal 30 Juni 2020, pinjaman MSU sebesar Rp207.174.000 merupakan pinjaman yang diberikan oleh HRT untuk keperluan belanja modal sebagai tambahan dana. Pinjaman ini dikenakan bunga 9,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, HJT dan BPP menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan piutang dari BPP kepada HJT sebesar Rp78.314.302.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, HGI dan HJT menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan piutang dari HGI kepada HJT sebesar Rp5.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, HJT, dan HJT menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan piutang dari HJT kepada HJT sebesar Rp10.800.000.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, HRT menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJT sebesar Rp250.000.000.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Based on agreements dated June 30, 2020, HRT net-off balance trade receivables related parties with HJI amounting to Rp29,505,840,100.

On June 30, 2020, HRT and HJI enter into agreement, in which HJI will transfer their ownership of land with area of interest 12.23 hectares to HRT amounted to Rp26,823,491,000.

Based on agreement No. 0728/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 dated June 30, 2020, HJU represents loan provided by HRT for capital expenditures purposes as of additional funds. This receivables bears interest of 12% per annum and will mature on July 19, 2029. On December 30, 2020 this addendum agreement that HRT provide discount amounted 75% for interest charge. This loan was fully paid by HJU on December 18, 2020 amounting to Rp61,250,607,040.

Based on agreement No. 0730/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 dated June 30, 2020, due from MSU amounting to Rp207,174,000 represents loan provided by HRT for capital expenditures purposes as of additional funds. This receivables bears interest of 9.5% per annum and will mature on June 30, 2021.

On June 30, 2020, HRT, HJT and BPP entered into agreement, in which HRT will transfer receivables from BPP to HJT amounting to Rp78,314,302.

On June 30, 2020, HRT, HGI and HJT entered into agreement, in which HRT will transfer receivables from HGI to HJT amounting to Rp5,000,000.

On June 30, 2020, HRT, HJT and HJT entered into agreement, in which HRT will transfer receivables from HJT to HJT amounting to Rp10,800,000.

Based on agreements dated June 30, 2020, HRT net-off balance due to and due from related parties with HJT amounting to Rp250,000,000.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, HJT, dan HJE menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan piutang dari HJE kepada HJT sebesar Rp42.930.915.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, EBL, dan HMS menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan piutang dari EBL kepada HMS sebesar Rp156.628.606.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, HRT menghapusbukkan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJI sebesar Rp1.922.967.974.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HRT, HJT dan HJI menandatangani perjanjian dimana, HRT akan mengalihkan utang terhadap HJT kepada HJI sebesar Rp111.954.783. Sesuai kesepakatan antara HRT dan HJI pada tanggal yang sama, HRT menghapusbukkan utang dan piutang pihak-pihak berelasi kepada HJI senilai Rp111.954.783.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, HRT menghapusbukkan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJT sebesar Rp137.045.217.

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang dari HJT dan HGI masing-masing sebesar Rp250.000.000 dan Rp5.000.000 merupakan piutang yang berasal dari penjualan seluruh saham milik HRT atas HJT. Piutang ini tidak dikenakan bunga dan dibayar berdasarkan permintaan dari HRT. Pada tahun 2020, Perusahaan telah menghapusbukkan utang dan piutang afiliasi tersebut.

Berdasarkan perjanjian No. 0926a/HJI-JKT/DIR-LG032.6/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, HRT mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan Mobil (COP) dengan PT Hasnur Jaya International. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada 9 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo terutang atas transaksi ini disajikan sebagai bagian dari "Utang kepada Pihak-pihak Berelasi" dan telah dibayar lunas pada 2019.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

On June 30, 2020, HRT, HJT and HJE entered into agreement, in which HRT will transfer receivables from HJE to HJT amounting to Rp42,930,915.

On June 30, 2020, HRT, EBL and HMS entered into agreement, in which HRT will transfer receivables from EBL to HMS amounting to Rp156,628,606.

Based on agreements dated June 30, 2020, HRT net-off balance due to and due from related parties with HJI amounting to Rp1,922,967,974.

On June 30, 2020, HRT, HJT and HJI entered into agreement, in which HRT will transfer payables to HJT to HJI amounting to Rp111,954,783. Based on agreement between HRT and HJI in the same date, HRT net-off balance due to and due from related parties HJI amounted to Rp111,954,783.

Based on agreements dated June 30, 2020, HRT net-off balance due to and due from related parties with HJT amounting to Rp137,045,217.

In December 31, 2018, due from HJT and HGI amounted to Rp250,000,000 and Rp5,000,000, respectively, represents receivable from the sale of all shares owned by HRT to HJT. This receivable is non-interest bearing and paid based on demand from HRT. In 2020, the Company was net-off due from and due to related parties.

Based on agreement No. 0926a/HJI-JKT/DIR-LG032.6/X/2018 dated October 10, 2018, HRT entered into Car Owner Program (COP) cooperation agreement with PT Hasnur Jaya International. This agreement will be valid until October 9, 2022. As of December 31, 2018, the outstanding balance of this transaction presented as part of "Due to Related Parties" and has been fully paid in 2019.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. 0927a/HJI-JKT/DIR-LG072/X-2018 tertanggal 10 Oktober 2018, HRT menandatangani surat pernyataan pengakuan utang dengan HJI untuk melakukan pembayaran uang muka Program Kepemilikan Kendaraan Mobil (COP). Pada tahun 2018, beban atas uang muka sebesar Rp76.760.500, disajikan sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi". Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo terutang atas transaksi ini disajikan sebagai bagian dari "Utang kepada Pihak-pihak Berelasi" dan telah dibayar lunas pada tanggal 12 November 2019.

Pada tanggal 3 September 2018, HRT, HMS dan HJI menandatangani perjanjian, dimana HRT akan mengalihkan utangnya kepada HMS sebesar Rp919.701.573 dengan piutang dari HJI. Sesuai kesepakatan antara HRT, HMS dan HJI pada tanggal yang sama, HRT menghapusbukan utang kepada HMS dengan piutang dari HJI senilai Rp919.701.573.

Sejak 2014, HRT menandatangani perjanjian "Fasilitas terminal khusus ekstensi Sungai Putting dan Sungai Salai" dengan HJI. Berdasarkan perjanjian tersebut, HRT memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan yang dimiliki oleh HJI dan untuk menagih pengguna pelabuhan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian sebelumnya mengenai biaya fasilitas dan lahan. Sehingga, setelah perubahan terakhir, biaya fasilitas menjadi Rp10/metrik ton (MT) dan lahan menjadi Rp10/metrik ton (MT). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 biaya pelabuhan masing-masing sebesar Rp622.217.595, Rp2.918.261.062 dan Rp4.036.691.757 dan disajikan sebagai "Beban Pokok Pendapatan - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo terutang dari transaksi ini masing-masing sebesar nihil, Rp2.957.329.681 dan Rp4.036.691.757 dan disajikan sebagai "Utang Usaha - Pihak-Pihak Berelasi" kepada HJI.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Based on agreement No. 0927a/HJI-JKT/DIR-LG072/X-2018 dated October 10, 2018, HRT entered into statement of acknowledgment of debt with HJI to make advance payments for the Car Owner Program (COP). In 2018, expense for advances amounted to Rp76,760,500, presented as part of "General and Administrative Expense". As of December 31, 2018, the outstanding balance of this transaction presented as part of "Due to Related Parties" and have been fully paid on November 12, 2019.

In September 3, 2018, HRT, HMS and HJI enter into agreement, in which HRT will transfer their payables to HMS amounted to Rp919,701,573 with due from HJI. Based on agreement between HRT, HMS and HJI in the same date, HRT net-off their due to HMS with due from HJI amounted to Rp919,701,573.

Since 2014, HRT entered into "Putting extension and Salai River specialized terminal facilities" agreement with HJI. Based on the agreement, HRT has the responsibility to operate the port facilities owned by HJI and to bill the port users. The agreement has been amended several time, the latest was dated December 31, 2020, in which both parties agreed to change facilities charges and area charges. Therefore, after the latest amendment, facilities charges to Rp10/metric ton (MT) and area charges to Rp10/metric ton (MT). For the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 the port charges amounted to Rp622,217,595, Rp2,918,261,062 and Rp4,036,691,757, respectively, and were presented as "Cost of Revenues - Others" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance from this transaction amounted nil, Rp2,957,329,681 and Rp4,036,691,757, respectively and is presented as "Trade Payables - Related Parties" to HJI.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2020, HMS menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan EBL sebesar Rp2.174.963.991.

Pada tanggal 30 Juni 2020, HMS, EBL, dan HJI menandatangani perjanjian dimana, HMS akan mengalihkan utangnya kepada HJI sebesar Rp1.502.281.614.

Pada tanggal tanggal 30 Juni 2020, HMS, HJT dan EBL menandatangani perjanjian, dimana HMS akan mengalihkan utangnya kepada EBL sebesar Rp3.833.874.211.

Pada tanggal 1 Juli 2019, HMS dan HJI menandatangani perjanjian dimana, HMS akan menggunakan jasa manajemen dan pemasaran dari HJI. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli 2019 hingga 31 Desember 2019. Perjanjian ini mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada tanggal 30 Juli 2020 dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian sampai dengan 1 Juli 2020.

Berdasarkan perjanjian tanggal 28 Februari 2019, HMS menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan PT HJU dan PT HBPM sebesar Rp1.100.000.000. Kemudian, HBPM melunasi utang pihak berelasi pada tanggal 13 dan 17 Desember 2019. Sehingga, pada 31 Desember 2020 saldo piutang pihak berelasi HMS dari HBPM adalah nihil.

Pada tanggal 28 Februari 2019, HMS, HJU, dan HJT menandatangani perjanjian dimana, Grup akan mengalihkan piutang dari HJU kepada HJT sebesar Rp9.979.125.789.

Berdasarkan perjanjian tanggal 28 Februari 2019, HMS menghapusbukukan utang dan piutang pihak-pihak berelasi dengan HJU sebesar Rp30.650.839.165.

24. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

Pada tanggal 30 Agustus 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian *cross currency interest swap* dengan PT Bank DBS Indonesia (DBS). Untuk memiliki tingkat bunga tetap atas pinjaman jangka panjangnya dari DBS (Catatan 15), memiliki saldo terutang sebesar Rp153.430.436.067 dan tingkat bunga yang terutang sebesar 5,5% + 1 bulan IDR JIBOR. Berdasarkan kontrak, efektif 28 Agustus 2013, Perusahaan mengalihkan pinjamannya dengan serangkaian angsuran pokok pinjaman sebesar USD13.577.915 dengan suku bunga tetap sebesar 6,95%.

23. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Based on agreements dated June 30, 2020, HMS net-off balance due to and due from related parties with EBL amounting to Rp2,174,963,991.

On June 30, 2020, HMS, EBL and HJI entered into agreement, in which HMS will transfer their payable to HJI amounting to Rp1,502,281,614.

In June 30, 2020, HMS, HJT and EBL enter into agreement, in which HMS will transfer their payables to EBL amounted to Rp3,833,874,211.

On July 1, 2019, HMS and HJI entered into agreement, in which HMS will use management and marketing service from HJI. This agreement applied from July 1, 2019 to December 31, 2019. This agreement was several amended, at the latest on July 30, 2020 with the ended in the term of the agreement until July 1, 2020.

Based on agreements dated February 28, 2019, HMS net-off balance due to and due from related parties with PT HJU and PT HBPM amounting to Rp1,100,000,000. And then, HBPM was fully paid due to related party on December 13 and 17, 2019. Therefore, on December 31, 2020 remaining balances of due from related parties HMS from HBPM is nil.

On February 28, 2019, HMS, HJU, and HJT entered into agreement, in which the Group will transfer receivables from HJU to HJT amounting to Rp9,979,125,789.

Based on agreements dated February 28, 2019, HMS net-off balance due to and due from related parties with HJU amounting to Rp30,650,839,165.

24. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

On August 30, 2013, the Company entered into a cross currency interest swap contract with PT Bank DBS Indonesia (DBS). In order to have a fixed interest rate on its long-term loan from DBS (Note 15), which had an outstanding balance of Rp153,430,436,067 and born interest rate of 5.5% + 1 month IDR JIBOR. Based on the contract, effective August 28, 2013, the Company swap its loan with a series of installments on loan principal of USD13,577,915 with fixed interest rate of 6.95%.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

Pada Maret 2018, liabilitas derivatif Perusahaan telah jatuh tempo, bagian yang efektif dan tidak efektif dari laba swap yang direalisasi untuk tahun 2018 sebesar Rp515.446.412 dicatat sebagai "Bagian yang Tidak Efektif dari Realisasi Laba atas Transaksi Derivatif Yang Ditetapkan sebagai Lindung Nilai Arus Kas" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL

Manajemen Risiko Keuangan

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Grup memiliki instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai atas eksposur risiko tertentu.

a. Risiko kredit

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan kas di bank dengan memonitor reputasi dan peringkat kredit bank. Aset keuangan Grup yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak-pihak berelasi. Grup memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

Risiko kredit Grup timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risiko maksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan.

**24. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

In March 2018, the Company's derivative liabilities was matured, the effective and ineffective portion of the realized swap gain for 2018 amounting to Rp515,446,412 was recorded as "Ineffective portion of Realized Gain on Derivative Transaction Designated as Cash Flow Hedge" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

Financial Risks Management

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

In its operating, investing and financing activities the Group are exposed to the following financial risks: credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group has derivative financial instrument to hedge certain risk exposures.

a. Credit risk

The Group manages credit risk exposed from its cash in banks by monitoring bank's reputation and credit rating. The financial assets that potentially subject the Group to significant concentrations of credit risk consist principally of cash in banks, trade receivables, other receivables and due from related parties. The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring.

The Group's exposure to credit risk arises from default of other parties, with maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments. At the consolidated statements of financial position date, there were no significant concentrations of credit risk.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL
MANAGEMENT (continued)**

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Grup per tanggal 31 Desember 2020:

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assessment on the Group's financial assets as of December 31, 2020:

		31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>		
Bank	32.748.286.296	-	-	32.748.286.296	Cash in banks	
Piutang usaha	29.554.698.255	19.856.560.005	1.413.656.060	50.824.914.320	Trade receivables	
Piutang lain-lain	790.265.083	-	-	790.265.083	Other receivables	
Piutang dari pihak-pihak berelasi	7.625.825.284	-	-	7.625.825.284	Due from related parties	
Total	70.719.074.918	19.856.560.005	1.413.656.060	91.989.290.983	Total	
		31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>		
Bank	21.669.185.199	-	-	21.669.185.199	Cash in banks	
Piutang usaha	13.329.301.038	96.131.948.434	384.984.087	109.846.233.559	Trade receivables	
Piutang lain-lain	1.485.334.927	-	-	1.485.334.927	Other receivables	
Piutang dari pihak-pihak berelasi	70.571.070.063	-	-	70.571.070.063	Due from related parties	
Total	107.054.891.227	96.131.948.434	384.984.087	203.571.823.748	Total	
		31 Desember 2018/December 31, 2018				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>		
Bank	18.673.060.119	-	-	18.673.060.119	Cash in banks	
Piutang usaha	16.568.069.379	59.565.546.833	7.434.960.980	83.568.577.192	Trade receivables	
Piutang lain-lain	2.004.596.280	-	-	2.004.596.280	Other receivables	
Piutang dari pihak-pihak berelasi	59.390.440.862	-	-	59.390.440.862	Due from related parties	
Total	96.636.166.640	59.565.546.833	7.434.960.980	163.636.674.453	Total	

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing

Grup terekspos terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dalam Dolar Amerika Serikat pada biaya-biaya tertentu, aset dan liabilitas yang timbul dari operasi sehari-hari.

Pada tahun 2013, Grup menandatangani perjanjian *Cross Currency Swap* dengan DBS untuk mengelola eksposurnya terhadap fluktuasi risiko suku bunga mengambang atas pinjaman jangka panjang dari DBS (fasilitas ATL). Perjanjian ini mengekspos Grup terhadap risiko mata uang asing.

Grup memiliki aset moneter dalam mata uang asing yang disajikan pada Catatan 26.

c. Risiko suku bunga

Grup dibiayai melalui pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman lainnya seperti pinjaman dari pihak-pihak berelasi.

Oleh karena itu, Grup terekspos terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terkait terutama terhadap kewajiban pinjaman jangka panjang dan aset dan kewajiban berbunga. Grup menandatangani perjanjian CCS dengan DBS (Catatan 24) untuk mengelola eksposurnya terhadap fluktuasi risiko suku bunga mengambang atas pinjaman jangka panjang (fasilitas ATL). Dengan menandatangani fasilitas ini, bunga pinjaman jangka panjang diubah menjadi tingkat bunga tetap tertentu.

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat, dari jatuh tempo, instrumen keuangan Grup yang terdapat risiko suku bunga:

Suku bunga mengambang

	31 Desember 2020/December 31, 2020			
	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total
Liabilitas Keuangan				
Pinjaman bank jangka panjang	17.310.980.000	6.480.000.000	19.534.800.000	43.325.780.000

Financial Liability
Long-term bank loan

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL
MANAGEMENT (continued)**

Financial Risks Management (continued)

b. Foreign currency risk

The Group is exposed to foreign currency exchange rate movements primarily in United States Dollar on certain expenses, assets and liabilities which arise from daily operations.

In 2013, the Group entered into a Cross Currency Swap agreements with DBS to manage its exposure to the fluctuation of floating interest rate risk on the long-term loan from DBS (ATL facility). This agreement exposes the Group to foreign currency risk.

The Group's monetary asset denominated in foreign currencies which are presented in the Note 26.

c. Interest rate risk

The Group is financed through short-term and long-term bank loans and other borrowings such as loans from related parties.

Therefore, the Group is exposed to market risk for changes in interest rates primarily related to long-term borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group enter CCS agreements with DBS (Note 24) to manage its exposure to the fluctuation of floating interest rate risk of the long-term loan (ATL facility). By entering these facilities, the long-term loan interest was changed into certain fixed rate.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Group financial instruments that are exposed to interest rate risk:

Floating rate

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL
MANAGEMENT (continued)**

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

c. Risiko suku bunga (lanjutan)

c. Interest rate risk (continued)

Suku bunga mengambang (lanjutan)

Floating rate (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019					
	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total	
Liabilitas Keuangan					Financial Liability
Pinjaman bank					
jangka panjang	15.010.381.566	15.415.033.021	55.548.219.495	85.973.634.082	Long-term bank loan
31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total	
Liabilitas Keuangan					Financial Liability
Pinjaman bank					
jangka panjang	11.110.766.936	10.044.000.000	12.670.980.000	33.825.746.936	Long-term bank loan

Grup menganalisis tingkat suku bunga mereka secara dinamis. Berbagai skenario simulasi dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaharuan posisi yang ada dan pendanaan alternatif. Berdasarkan skenario tersebut, Grup menghitung dampak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari perubahan suku bunga yang ditetapkan. Pinjaman bank jangka panjang Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing, renewal of existing positions and alternative financing. Based on these scenarios, the Group calculates the impact on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income of a defined interest rate shift. The Group's long-term bank loans are denominated in Indonesian Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban (manfaat) pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar Rp216.628.900 terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

As of December 31, 2020, if the interest rates of the loans have been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, the income before tax expense (benefit) for the year then ended would have been Rp216,628,900 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

d. Risiko likuiditas

d. Liquidity risk

Grup dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila ada perbedaan waktu signifikan antara penerimaan piutang dengan penyelesaian utang dan pinjaman.

The Group is exposed to liquidity risk if there is significant mismatch in the timing difference between the collection of receivables and settlement of payables and borrowings.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL
MANAGEMENT (continued)**

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi arus kas dan arus kas aktual secara berkesinambungan serta menjaga kecukupan kas dan bank dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini juga diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pemberi pinjaman yang dapat diandalkan.

The Group manages the liquidity risk by ongoing monitoring over the projected and actual cash flow as well as the adequacy of cash and banks and available credit facilities. This risk is also minimized by managing diversified funding resources from reliable quality lenders.

Analisis tabel berikut adalah rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:

The following table analysis are the breakdown of financial liabilities by its maturity:

		2020				
		Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	29.064.275.075	-	-	-	29.064.275.075	Trade payables
Utang lain-lain	471.146.230	-	-	-	471.146.230	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.747.211.100	-	-	-	4.747.211.100	Accrued liabilities
Utang kepada pihak-pihak berelasi	208.841.378	30.218.936.000	-	-	30.427.777.378	Due to related parties
Pinjaman bank jangka panjang	17.310.980.000	6.480.000.000	19.534.800.000	-	43.325.780.000	Long-term bank loans
Total	51.802.453.783	36.698.936.000	19.534.800.000	-	108.036.189.783	Total
		2019				
		Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	27.574.407.242	-	-	-	27.574.407.242	Trade payables
Utang lain-lain	294.714.485	-	-	-	294.714.485	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	3.811.408.759	-	-	-	3.811.408.759	Accrued liabilities
Utang kepada pihak-pihak berelasi	4.356.674.211	783.980.000	23.981.736.585	-	29.122.390.796	Due to related parties
Pinjaman bank jangka panjang	15.010.381.566	15.415.033.021	55.548.219.495	-	85.973.634.082	Long-term bank loans
Total	51.047.586.263	16.199.013.021	79.529.956.080	-	146.776.555.364	Total
		2018				
		Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	Lebih dari 2 tahun/More than 2 years	Total/ Total	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	64.570.029.264	-	-	-	64.570.029.264	Trade payables
Utang lain-lain	123.635.618	-	-	-	123.635.618	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	5.021.690.504	-	-	-	5.021.690.504	Accrued liabilities
Utang kepada pihak-pihak berelasi	9.107.142.552	980.088.000	24.471.780.585	-	34.559.011.137	Due to related parties
Pinjaman bank jangka panjang	11.110.766.936	10.044.000.000	12.670.980.000	-	33.825.746.936	Long-term bank loans
Total	89.933.264.874	11.024.088.000	37.142.760.585	-	138.100.113.459	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas.

26. ASET DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	
Aset moneter		
Bank (Catatan 4)	USD	13.740

Jika nilai denominasi aset neto dari mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 ditampilkan dengan menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2021 (tanggal penyelesaian laporan keuangan), yaitu Rp14.371 untuk 1 Dolar AS, aset moneter Grup akan mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 juta.

Analisis sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terapresiasi sebanyak 10% dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar Rp19.380.270, akibat keuntungan translasi bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sedangkan jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat terdepresiasi sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar Rp19.380.270.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Capital Management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio.

26. ASSET DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2020, the Group's monetary asset denominated in foreign currency is as follows:

	Dalam Rupiah/ Rupiah Equivalent	Monetary Asset
Bank (Catatan 4)	193.802.768	Cash in banks (Note 4)

If the net foreign currency denominated asset as of December 31, 2020 are reflected using the exchange rates as March 5, 2021 (date of completion of the financial statements), which is Rp14,371 to US Dollar 1, the Group's monetary asset will increase by approximately Rp3.6 million.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of December 31, 2020, if the exchange rate of Rupiah against United States Dollar appreciated by 10% with all other variables held constant, the income before tax expense for the year then ended would have been Rp19,380,270 lower, as result of foreign exchange losses on the translation of cash in banks denominated in United States Dollar, while, if the exchange rate of Rupiah against United States Dollar depreciated by 10%, the income before tax expense for the year then ended would have been Rp19,380,270 higher.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

**27. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

	31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan bank	18.776.399.928	18.776.399.928	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	76.133.616.212	76.133.616.212	Trade receivables
Piutang lain-lain	2.004.596.280	2.004.596.280	Other receivables
Piutang dari pihak-pihak berelasi	59.390.440.862	59.390.440.862	Due from related parties
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>
Utang usaha	64.570.029.264	64.570.029.264	Trade payables
Utang lain-lain	123.635.618	123.635.618	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	5.021.690.504	5.021.690.504	Accrued liabilities
Utang kepada pihak-pihak berelasi	34.559.011.137	34.559.011.137	Due to related parties
Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	11.110.766.936	11.110.766.936	Current maturities of long-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	22.714.980.000	22.714.980.000	Long-term bank loans - net of current maturities

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 : Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 : Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3 : Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi.

Nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan liabilitas yang masih harus dibayar yang jatuh tempo dalam satu tahun dalam laporan posisi keuangan mendekati nilai wajarnya karena merupakan jangka pendek. Piutang pihak-pihak berelasi tidak dinyatakan berdasarkan harga pasar dan yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa menimbulkan biaya berlebihan, dicatat sebesar jumlah nominal dikurangi kerugian penurunan nilai.

PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", require disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- Level 1 : Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 : Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 : Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, short-term bank loan, trade payables, other payables, and accrued liabilities in the financial statements reasonably approximate their fair values because they are short-term in nature. Due from related parties are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pinjaman bank jangka panjang adalah kewajiban dengan suku bunga tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar utang kepada dan piutang dari pihak-pihak berelasi karena tidak ada jangka waktu yang pasti meskipun tidak diharapkan akan diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

27. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Long-term bank loans are liabilities with fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

It is not practical to estimate the fair value of due to and due from related parties because there are no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the consolidated statements of financial position date.

28. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Tahun	Laba Tahun Berjalan/ Total Income for the Year	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang beredar/ Weighted-Average Number of Ordinary Shares Outstanding	Laba per Saham/ Earnings per Share	Year
31 Desember 2020	18.495.659.911	100.000	184.956	December 31, 2020
31 Desember 2019	30.435.062.592	100.000	304.351	December 31, 2019
31 Desember 2018	28.016.776.216	100.000	280.167	December 31, 2018

28. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is as follows:

Grup tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Group has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

29. INFORMASI SEGMENT

Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan bongkar muat. Divisi-divisi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup.

29. SEGMENT INFORMATION

The Group operates in Indonesia and has two main operating divisions, which are shipping and loading unloading. Those divisions form the basis for the segment reporting of the Group.

	2020				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN NETO	294.499.083.224	18.179.298.443	(2.329.133.319)	310.349.248.348	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	243.838.972.753	4.517.262.117	(2.329.133.319)	246.027.101.551	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	50.660.110.471	13.662.036.326	-	64.322.146.797	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	25.605.311.636	5.576.493.936	-	31.181.805.572	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	25.054.798.835	8.085.542.390	-	33.140.341.225	OPERATING INCOME

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2020				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan jasa keagenan - neto	663.892.445	-	-	663.892.445	Income agency services - net
Pendapatan bunga	484.280.789	79.619.808	-	563.900.597	Interest income
Laba selisih kurs - neto	140.123.462	-	-	140.123.462	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga	(4.694.553.309)	(7.845.242.619)	-	(12.539.795.928)	Interest expense
Lain-lain	527.163.015	503.326.048	(1.020.622.310)	9.866.753	Others
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(2.879.093.598)	(7.262.296.763)	(1.020.622.310)	(11.162.012.671)	OTHER INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	22.175.705.237	823.245.627	(1.020.622.310)	21.978.328.554	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX EXPENSE
Kini - final	3.533.988.999	-	-	3.533.988.999	Final - current
Kini - tidak final	146.056.328	487.970.387	-	634.026.715	Non final - current
Tangguhan	-	59.394.386	-	59.394.386	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	3.680.045.327	547.364.773	-	4.227.410.100	Income Tax Expense - Net
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	18.495.659.910	275.880.854	(1.020.622.310)	17.750.918.454	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	875.156.034	-	875.156.034	PROFORMA INCOME ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA TAHUN BERJALAN	18.495.659.910	1.151.036.888	(1.020.622.310)	18.626.074.488	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that may not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3.127.972.052)	(98.101.294)	-	(3.226.073.346)	- Remeasurement of employee benefits liabilities
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	21.582.285	-	21.582.285	- Related income tax expenses
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2020				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.367.687.859	1.074.517.879	(1.020.622.310)	15.421.583.427	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali				18.495.659.911 130.414.577	INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL				18.626.074.488	TOTAL
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali				15.498.102.435 (76.519.008)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL				15.421.583.427	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK				184.956	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Aset Segmen	372.927.566.228	36.070.913.685	(30.111.603.872)	378.886.876.041	Segment Assets
Liabilitas Segmen	125.761.052.617	4.706.436.319	(463.789.163)	130.003.699.773	Segment Liabilities
Penyusutan	22.891.235.424	42.747.459	-	22.933.982.883	Depreciation
Informasi Lain atas Pendapatan Neto (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto):					Other Information on Net Revenue (Customers exceeding 10% of total net revenues):
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar muat/ Loading unloading		Total/ Total	
Pendapatan neto:					Net revenues:
PT Bhumi Rantau Energi	183.883.383.406	-	-	183.883.383.406	PT Bhumi Rantau Energi
PT Energi Batubara Lestari	41.440.957.075	-	-	41.440.957.075	PT Energi Batubara Lestari
Total	225.324.340.481	-	-	225.324.340.481	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2019				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN NETO	359.526.920.500	15.298.002.175	(1.302.287.311)	373.522.635.364	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	301.514.000.901	4.851.946.395	(1.302.287.311)	305.063.659.985	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	58.012.919.599	10.446.055.780	-	68.458.975.379	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	21.139.965.349	4.725.710.678	-	25.865.676.027	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	36.872.954.250	5.720.345.102	-	42.593.299.352	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	772.476.732	59.250.639	-	831.727.371	Interest income
Pendapatan jasa keagenan - neto	615.044.453	-	-	615.044.453	Income agency services - net
Beban bunga	(3.348.381.941)	(3.221.459.907)	-	(6.569.841.848)	Interest expense
Rugi selisih kurs - neto	(13.202.833)	(1.609.230)	-	(14.812.063)	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain	4.255.977	170.585.926	-	174.841.903	Others
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(1.969.807.612)	(2.993.232.572)	-	(4.963.040.184)	OTHER INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	34.903.146.638	2.727.112.530	-	37.630.259.168	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX EXPENSE
Final	4.314.323.046	-	-	4.314.323.046	Final
Kini	153.761.000	695.852.404	-	849.613.404	Current
Tangguhan	-	1.708.733.628	-	1.708.733.628	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	4.468.084.046	2.404.586.032	-	6.872.670.078	Income Tax Expense - Net
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	30.435.062.592	322.526.498	-	30.757.589.090	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(322.526.498)	-	(322.526.498)	PROFORMA INCOME ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA TAHUN BERJALAN	30.435.062.592	-	-	30.435.062.592	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that may not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	309.936.445	142.907.899	-	452.844.344	- Remeasurement of- employee benefits liabilities
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(35.726.975)	-	(35.726.975)	- Related income tax expenses
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	309.936.445	107.180.924	-	417.117.369	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2019				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(107.180.924)	-	(107.180.924)	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	309.936.445	-	-	309.936.445	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.744.999.037	-	-	30.744.999.037	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk				30.435.062.592	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali				-	Non-controlling interests
TOTAL				30.435.062.592	TOTAL
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk				30.744.999.037	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali				-	Non-controlling interests
TOTAL				30.744.999.037	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				304.351	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Aset Segmen	323.293.632.109	105.826.088.774	(432.734.665)	428.686.986.218	Segment Assets
Liabilitas Segmen	88.512.299.326	75.965.508.675	(1.253.310.731)	163.224.497.270	Segment Liabilities
Penyusutan	20.750.694.412	175.466.285	-	20.926.160.697	Depreciation
Informasi Lain atas Pendapatan Neto (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto):					Other Information on Net Revenue (Customers exceeding 10% of total net revenues):
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar muat/ Loading unloading	Total		
Pendapatan neto:					Net revenues:
PT Bhumi Rantau Energi	228.427.759.901	-	228.427.759.901		PT Bhumi Rantau Energi
PT Tapin Suthra Berjaya	76.920.526.043	-	76.920.526.043		PT Tapin Suthra Berjaya
Total	305.348.285.944	-	305.348.285.944		Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2018				
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN NETO	353.748.746.139	10.027.259.872	-	363.776.006.011	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	297.612.580.131	4.798.988.057	-	302.411.568.188	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	56.136.166.008	5.228.271.815	-	61.364.437.823	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	21.672.723.873	11.139.337.645	-	32.812.061.518	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	34.463.442.135	(5.911.065.830)	-	28.552.376.305	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan jasa keagenan - neto	821.355.189	-	-	821.355.189	Income agency services - net
Pendapatan bunga	396.154.680	51.155.180	-	447.309.860	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	275.088.776	(155.790)	-	274.932.986	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	515.446.412	-	-	515.446.412	Ineffective portion of gain on derivative transaction designated as cash flow hedge
Beban bunga	(4.380.645.685)	-	-	(4.380.645.685)	Interest expense
Lain-lain	376.258.413	779.240.570	-	1.155.498.983	Others
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(1.996.342.215)	830.239.960	-	(1.166.102.255)	OTHER INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	32.467.099.920	(5.080.825.870)	-	27.386.274.050	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Final	4.244.984.954	-	-	4.244.984.954	Final
Kini	205.338.750	535.954.581	-	741.293.331	Current
Tanggungan	-	(1.843.060.454)	-	(1.843.060.454)	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	4.450.323.704	(1.307.105.873)	-	3.143.217.831	Income Tax Benefit (Expense) - Net
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	28.016.776.216	(3.773.719.997)	-	24.243.056.219	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	3.773.719.997	-	3.773.719.997	PROFORMA INCOME ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA TAHUN BERJALAN	28.016.776.216	-	-	28.016.776.216	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that may not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(363.363.969)	172.626.178	-	(190.737.791)	- Remeasurement of employee benefits liabilities
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(43.156.544)	-	(43.156.544)	- Related income tax expenses

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2018			Total/ Total	
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination		
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(363.363.969)	129.469.634	-	(233.894.335)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(129.469.634)	-	(129.469.634)	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN	(363.363.969)	-	-	(363.363.969)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	27.653.412.247	-	-	27.653.412.247	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali				28.016.776.216 -	INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL				28.016.776.216	TOTAL
TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali				27.653.412.247 -	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL				27.653.412.247	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				280.167	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
INFORMASI LAINNYA Aset Segmen	313.470.397.297	96.625.729.074	(6.527.044.798)	403.569.081.573	OTHER INFORMATION Segment Assets
Liabilitas Segmen	106.434.063.551	51.875.280.330	(6.527.044.798)	151.782.299.083	Segment Liabilities
Penyusutan	19.784.468.194	256.272.777	-	20.040.740.971	Depreciation
Informasi Lain atas Pendapatan Neto (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto):					Other Information on Net Revenue (Customers exceeding 10% of total net revenues):
	Pelayaran/ Shipping	Bongkar muat/ Loading unloading		Total/ Total	
Pendapatan neto:					Net revenues:
PT Bhumi Rantau Energi	266.474.850.144	-	-	266.474.850.144	PT Bhumi Rantau Energi
PT Tapin Suthra Berjaya	41.712.077.762	-	-	41.712.077.762	PT Tapin Suthra Berjaya
Total	308.186.927.906	-	-	308.186.927.906	Total

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan pada Catatan 2.

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

The accounting policy of the operating segments is the same with the summary of significant accounting policies in Note 2.

30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

- a. Berdasarkan amandemen I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE//2021 tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan menerima perpanjangan jatuh tempo dari perjanjian pengangkutan batubara jarak jauh (*long towing*) dengan PT Bhumi Rantau Energi sampai dengan 31 Desember 2021.

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

The Company

- a. Based on amendmend I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE//2021 dated on January 2, 2021, the Company received renewal of maturity from agreement of transportation of long towing coal agreement with PT Bhumi Rantau Energi until December 31, 2021.

Penawaran Umum Perdana

1. Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 9 tanggal 10 Maret 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
- a. Perubahan nama Perusahaan dari PT Hasnur Internasional Shipping menjadi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk;
- b. Mengubah nilai nominal per lembar saham Perusahaan dari Rp2.100.000 per lembar menjadi Rp100 per lembar;
- c. Pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*), tata cara pelaksanaan akan ditentukan kemudian oleh Dewan Direktur;
- d. Melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perusahaan maksimal sejumlah 20,00% dari modal saham Perusahaan dengan nominal nilai Rp100 per lembar saham;
- e. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Initial Public Offering

1. Based on Notarial Deed No. 9 of Muhammad Hanafi, S.H., dated March 10, 2021, the Company's shareholders agreed, among others:
- a. Change in the Company's name from PT Hasnur Internasional Shipping to PT Hasnur Internasional Shipping Tbk;
- b. Change the Company's par value per share from Rp2,100,000 per share to Rp100 per share;
- c. Implement Employee Stock Allocation (ESA) program, procedure will be decided later by Board of Directors;
- d. Execute Initial Public Offering of the Company's shares, with maximum total of 20.00% shares capital of the Company, with nominal value of Rp100 per share;
- e. Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Zainal Hadi HAS HB	:
Komisaris	:	Abdurachman Kunwibowo	:
Komisaris Independen	:	Nur Prasetyo	:

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Direksi

Direktur Utama	:	Jayanti Sari	:
Direktur	:	Achmad Ma'mur	:
Direktur	:	Soma Ariyaka	:

Board of Directors

	:	President Director	:
	:	Director	:
	:	Director	:

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

2. Masing-masing pada tanggal-tanggal 29 Maret 2021, 1 Februari 2021 dan 17 Maret 2021 Perusahaan telah membentuk Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Nur Prasetyo
Boy Hamdani Tamin
Hendra Iskandar Lubis

Sekretaris Perusahaan

Dwita Ameilia Lestari

Audit Internal

Ketua

Setyo Buwono

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

Audit Internal

Chairman

Cadangan Saldo Laba

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No.40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang tertanggal 22 April 2021, Perusahaan telah melakukan pencadangan laba ditahan sebesar Rp25.497.078.971 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau setara dengan 12% (dua belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2021, para pemegang saham menyetujui alokasi dana cadangan umum sebesar Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar) atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Berdasarkan akta notaris DR. Yudo Diharjo Lantanea No. 06 tertanggal 8 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pembangunan dan jual beli 1 (satu) unit *tugboat* 29,11 meter dengan PT Palma Progress Shipyard sebesar USD1.380.000.

Berdasarkan perjanjian pembuatan dan jual beli 1 (satu) unit kapal tongkang pada tanggal 8 April 2021 yang dilaksanakan di hadapan notaris Yondri Darto, SH., antara Perusahaan dengan PT Tunas Karya Bahari Indonesia sebesar Rp27.100.000.000.

**30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

The Company (continued)

Initial Public Offering (continued)

2. On March 29, 2021, February 1, 2021, and March 17, 2021 the Company established Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit, respectively as follows:

Appropriated Retained Earnings

Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 introduced in March 1995, and amended by Law No.40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a Company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Based on Shareholder's Circular Resolution dated April 22, 2021, the Company was appropriated retained earnings amounting to Rp25,497,078,971 (twenty-five billion four hundred ninety-seven million seventy-eight thousand nine hundred and seventy-one Rupiah) or 12% from issued and fully paid capital of the Company.

Based on Shareholder's Circular Resolution dated May 11, 2021, the shareholders approved to allocate as much as Rp42,000,000,000 (fourty two billion) or 20% from issued and fully paid capital of the Company as general reserve.

Based on No. 06 of notarial deed of DR. Yudo Diharjo Lantanea dated April 8, 2021, the Company signed the building and; sale and purchase of 1 (one) unit tugboat 29.11 meters with PT Palma Progress Shipyard amounting to USD1,380,000.

Based on the building and; sale and purchase of 1 (one) unit barge agreement dated April 8, 2021 in the precense of notary Yondri Darto, SH., between the Company and PT Tunas Karya Bahari Indonesia amounting to Rp27.100.000.000

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

PT Hasnur Mitra Sarana

- b. Berdasarkan Akta Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., No. 13 tanggal 21 Januari 2021, para pemegang saham HMS menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Akta ini sudah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat Penerimaan No. AHU-0006387.AH.01.02.TAHUN 2021 pada tanggal 1 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

- c. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi penghidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), alih daya (*outsourcing*), waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayarkan kepada pegawai.

Grup masih menilai dampak penerapan PP 35/2021 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

PT Hasnur Mitra Sarana

- b. Based on Notarial Deed No. 13 of Indra Tjahja Rinanto, S.H., dated January 21, 2021, the Shareholders of HMS approved the changes of objective. The deed has been submitted to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has been issued with Acceptance Letter No. AHU-0006387.AH.01.02.TAHUN 2021 dated February 1, 2021.

Government Regulation Number 35 Year 2021

- c. On February 2, 2021, the Government of Indonesia promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (*Cipta Kerja*), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees.

The Group is still assessing the impact of the implementation of PP 35/2021 on the consolidated Group's financial statements.

**31. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN
ARUS KAS**

- a. Aktivitas investasi, operasi dan pendanaan non-kas yang signifikan

	2020	2019	2018
Aktivitas operasi, investasi non-kas yang signifikan:			
Uang muka pembelian aset melalui piutang usaha	26.823.491.000	-	-
Penghapusan piutang usaha pihak-pihak berelasi dengan utang pihak-pihak berelasi (Catatan 23)	14.308.222.979	-	-
Penghapusan piutang dari dan utang kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 23)	7.730.445.571	3.770.221.026	8.982.213.243
Penyisihan dan penghapusan piutang	1.331.354.689	302.682.717	7.352.659.610
Akuisisi aset tetap dari uang muka	-	-	11.843.040.000
Penerimaan pelepasan penyertaan saham melalui piutang dari pihak-pihak berelasi (Catatan 1c)	-	43.676.285.390	8.498.000.000
Realisasi pembayaran imbalan pasca kerja yang belum dibayar	-	-	307.935.600
Aktivitas pendanaan non-kas yang signifikan:			
Penambahan modal saham melalui dividen saham	107.000.000.000	-	-

**31. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH
FLOWS**

- a. Significant non-cash investing, operating and financing activities

	2020	2019	2018
Significant non-cash operating, investing activities:			
Advance for purchase of land through trade receivables	26.823.491.000	-	-
Net off due to and trade receivables related parties (Note 23)	14.308.222.979	-	-
Net-off due from and due to related parties (Note 23)	7.730.445.571	3.770.221.026	8.982.213.243
Provision for and bad debt expense	1.331.354.689	302.682.717	7.352.659.610
Acquisition of property, plant and equipment from advances	-	-	11.843.040.000
Proceeds from disposal of investment in shares from due from related parties (Note 1c)	-	43.676.285.390	8.498.000.000
Unpaid post employee benefit realization	-	-	307.935.600
Significant non-cash financing activities:			
Increase in share capital through shares dividend	107.000.000.000	-	-

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

31. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)

b. Rekonsiliasi Liabilitas Neto

b. Net Liabilities Reconciliation

	2020	2019	2018	
Pinjaman bank jangka pendek:				<i>Short-term bank loan:</i>
Saldo Awal	-	-	9.800.000.000	<i>Beginning Balance</i>
Arus Kas:				<i>Cash Flows:</i>
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	-	-	74.400.000.000	<i>Proceeds from short-term bank loan</i>
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	-	(84.200.000.000)	<i>Payments of short-term bank loan</i>
Saldo Akhir	-	-	-	<i>Ending Balance</i>
Pinjaman bank jangka panjang:				<i>Long-term bank loans:</i>
Saldo Awal	85.973.634.082	33.825.746.936	12.933.533.886	<i>Beginning Balance</i>
Arus Kas:				<i>Cash Flows:</i>
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	33.154.800.000	65.000.000.000	29.644.980.000	<i>Proceeds from long-term bank loans</i>
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(75.802.654.082)	(12.852.112.854)	(8.752.766.950)	<i>Payments of long-term bank loans</i>
Saldo Akhir	43.325.780.000	85.973.634.082	33.825.746.936	<i>Ending Balance</i>
Utang pihak-pihak berelasi:				<i>Due to related parties:</i>
Saldo Awal	29.122.390.796	34.559.011.137	40.908.564.194	<i>Beginning Balance</i>
Arus Kas:				<i>Cash Flows:</i>
Penerimaan utang pihak berelasi	-	776.000.000	4.708.024.500	<i>Proceeds from due to related parties</i>
Pembayaran utang pihak berelasi	(6.580.944.868)	(2.427.714.157)	(5.151.886.902)	<i>Payments of due to related parties</i>
Transaksi Non-Kas:				<i>Non-Cash Transactions:</i>
Net-off piutang usaha dan piutang dari dan utang kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 23)	(22.038.668.550)	(4.284.706.184)	(5.905.690.655)	<i>Net-off trade receivables and due from and due to related parties (Note 23)</i>
Penyertaan saham melalui utang dari pihak-pihak berelasi (Catatan 23)	29.925.000.000	499.000.000	-	<i>Investment in shares through due to related parties (Note 23)</i>
Saldo Akhir	30.427.777.378	29.122.390.796	34.559.011.137	<i>Ending Balance</i>

c. Rekonsiliasi Liabilitas Neto

c. Net Liabilities Reconciliation

	2020	2019	2018	
Liabilitas derivatif:				<i>Derivative liabilities:</i>
Saldo Awal	-	-	266.514.630	<i>Beginning Balance</i>
Arus Kas:				<i>Cash Flows:</i>
Penerimaan liabilitas derivatif	-	-	-	<i>Proceeds from derivative liabilities</i>
Pembayaran liabilitas derivatif	-	-	266.514.630	<i>Payments of derivative liabilities</i>
Saldo Akhir	-	-	-	<i>Ending Balance</i>

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Restrukturisasi entitas sepengendali

Seperti disajikan dalam Catatan 1c, akuisisi entitas anak (HRT) digolongkan sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Akuisisi tersebut dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan dengan penerapan retrospektif. Akibatnya, Grup menyajikan kembali laporan keuangan komparatif dan menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal tahun terdekat sebelumnya.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	17.809.474.320	21.782.812.389
Piutang usaha - neto	73.539.149.600	109.461.249.472
Piutang lain-lain	1.277.494.634	1.485.334.927
Persediaan	3.059.158.143	3.225.004.859
Beban dibayar dimuka	521.219.417	521.219.417
Uang muka	2.799.001.197	2.813.791.497
TOTAL ASET LANCAR	99.005.497.311	139.289.412.561
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - neto	203.942.541.658	204.041.498.985
Beban <i>docking</i> ditangguhkan - neto	14.212.079.534	14.212.079.534
Piutang dari pihak-pihak berelasi	6.133.513.606	70.571.070.063
Aset pajak tangguhan	-	547.475.711
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	224.288.134.798	289.372.124.293
TOTAL ASET	323.293.632.109	428.661.536.854

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

Restructuring of entities under common control

As disclosed in Note 1c, the acquisition of a subsidiary (HRT) was considered as a restructuring transaction between entities under common control in accordance with PSAK No. 38, "Accounting for Restructuring Transactions of Entities Under Common Control". The acquisition was thus, treated under the pooling of interest method with retrospective application. As a result, the Group restated the comparative financial statements and presented the consolidated statements of financial position as at the beginning of the earliest year presented.

The table below shows the impact of the restatement to the consolidated financial statements:

Consolidated statements of financial position

	ASET
ASET LANCAR	
Cash on hand and in banks	21.782.812.389
Trade receivables - net	109.461.249.472
Other receivables	1.485.334.927
Inventories	3.225.004.859
Prepayment	521.219.417
Advance payments	2.813.791.497
TOTAL CURRENT ASSETS	139.289.412.561
ASET TIDAK LANCAR	
Property, plant and equipment - net	204.041.498.985
Deferred charges on docking - net	14.212.079.534
Due from related parties	70.571.070.063
Deferred tax assets	547.475.711
TOTAL NON-CURRENT ASSETS	289.372.124.293
TOTAL ASSETS	428.661.536.854

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of financial position
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	24.428.987.998	27.574.407.242	Trade payables
Utang lain-lain	253.614.543	294.714.485	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	3.340.805.106	3.811.408.759	Accrued liabilities
Utang pajak	2.051.176.473	3.288.304.077	Taxes payable
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	-	4.356.674.211	Due to related parties - current portion
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.244.000.000	15.010.381.566	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	41.318.584.120	54.335.890.340	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	24.765.716.585	24.765.716.585	Due to related parties - long term portion
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.170.980.000	70.963.252.516	Long-term bank loans - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	11.257.018.621	13.134.188.465	Employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	47.193.715.206	108.863.157.566	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	88.512.299.326	163.199.047.906	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar - 400.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham	100.000.000.000	100.000.000.000	Share capital - par value of Rp1,000,000 per share Authorized - 400,000 shares Issued and fully paid - 100,000 shares
Tambahan modal disetor	7.483.332.075	7.483.332.075	Additional paid in capital
Saldo laba	127.298.000.708	127.298.000.708	Retained earnings
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	30.681.156.165	Proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control
TOTAL EKUITAS	234.781.332.783	265.462.488.948	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	323.293.632.109	428.661.536.854	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of financial position
(continued)

**31 Desember/
December 31, 2018**

	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan bank	15.691.247.274	18.776.399.928	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	45.516.004.764	76.133.616.212	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	1.792.604.280	2.004.596.280	Other receivables
Persediaan	3.962.023.399	4.069.328.727	Inventories
Beban dibayar dimuka	394.052.184	394.052.184	Prepayment
Uang muka	1.111.982.555	1.111.982.555	Advance payments
TOTAL ASET LANCAR	68.467.914.456	102.489.975.886	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	223.302.409.980	223.576.833.592	Property, plant and equipment - net
Beban <i>docking</i> ditangguhkan - neto	15.566.559.255	15.566.559.255	Deferred charges on docking - net
Piutang dari pihak-pihak berelasi	6.133.513.606	59.390.440.862	Due from related parties
Aset pajak tangguhan	-	2.291.936.314	Deferred tax assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	245.002.482.841	300.825.770.023	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	313.470.397.297	403.315.745.909	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	30.076.053.994	64.570.029.264	Trade payables
Utang lain-lain	27.532.844	123.635.618	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.587.602.863	5.021.690.504	Accrued liabilities
Utang pajak	1.283.043.281	1.622.033.083	Taxes payable
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	1.141.222.815	9.107.142.552	Due to related parties - current portion
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.110.766.936	11.110.766.936	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	48.226.222.733	91.555.297.957	TOTAL CURRENT LIABILITIES

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of financial position
(continued)

**31 Desember/
December 31, 2018**

	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	25.451.868.585	25.451.868.585	<i>Due to related parties - long term portion</i>
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	22.714.980.000	22.714.980.000	<i>Long-term bank loans - net of current maturities</i>
Liabilitas imbalan kerja	10.040.992.233	11.806.816.877	<i>Employee benefits liabilities</i>
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	58.207.840.818	59.973.665.462	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	106.434.063.551	151.528.963.419	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			<i>Share capital - par value of Rp1,000,000 per share</i>
Modal dasar - 400.000 saham			<i>Authorized - 400,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham	100.000.000.000	100.000.000.000	<i>Issued and fully paid - 100,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	7.483.332.075	7.483.332.075	<i>Additional paid in capital</i>
Saldo laba	99.553.001.671	99.553.001.671	<i>Retained earnings</i>
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	44.750.448.744	<i>Proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control</i>
TOTAL EKUITAS	207.036.333.746	251.786.782.490	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	313.470.397.297	403.315.745.909	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of financial position
(continued)

**31 Desember/
December 31, 2017**

	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan bank	10.672.424.266	12.123.900.579	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	37.868.204.275	75.327.994.979	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	1.446.308.538	1.446.308.538	Other receivables
Persediaan	2.013.760.987	2.086.542.313	Inventories
Beban dibayar dimuka	1.060.349.572	1.060.349.572	Prepayment
Uang muka - bagian lancar	198.435.655	199.015.905	Advance payments - current portion
TOTAL ASET LANCAR	53.259.483.293	92.244.111.886	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - neto	16.183.254	508.215.658	Deferred tax assets - net
Uang muka - bagian tidak lancar	11.843.040.000	11.843.040.000	Advance payments - non-current portion
Aset tetap - neto	204.057.881.072	204.659.139.961	Property, plant and equipment - net
Beban <i>docking</i> ditangguhkan - neto	10.425.599.376	10.425.599.376	Deferred charges on docking - net
Piutang dari pihak-pihak berelasi	4.000.000.000	57.897.972.432	Due from related parties
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	230.342.703.702	285.333.967.427	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	283.602.186.995	377.578.079.313	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	9.800.000.000	9.800.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha	37.562.948.037	72.610.637.420	Trade payables
Utang lain-lain	43.646.705	233.250.411	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.000.769.317	4.389.957.537	Accrued liabilities
Utang pajak	2.450.359.539	3.173.922.155	Taxes payable
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	-	33.000.000	Due to related parties - current portion
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.466.766.946	6.466.766.946	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	60.324.490.544	96.707.534.469	TOTAL CURRENT LIABILITIES

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of financial position
(continued)

**31 Desember/
December 31, 2017**

	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	33.237.668.957	40.875.564.194	<i>Due to related parties - long term portion</i>
Liabilitas derivatif	266.514.630	266.514.630	<i>Derivative liabilities</i>
Pinjaman bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.466.766.940	6.466.766.940	<i>Long-term bank loans - net of current maturities</i>
Liabilitas imbalan kerja	11.153.987.716	12.746.353.331	<i>Employee benefits liabilities</i>
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	51.124.938.243	60.355.199.095	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	111.449.428.787	157.062.733.564	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			<i>Share capital - par value of Rp1,000,000 per share</i>
Modal dasar - 400.000 saham			<i>Authorized - 400,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham	100.000.000.000	100.000.000.000	<i>Issued and fully paid - 100,000 shares</i>
Saldo laba	71.899.589.424	71.899.589.424	<i>Retained earnings</i>
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	48.362.587.541	<i>Proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control</i>
Penghasilan komprehensif lain: Bagian efektif dari laba (rugi) yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	248.931.782	248.931.782	<i>Other comprehensive income: Effective portion of unrealized gain (loss) on derivative transaction designated as cash flow hedge</i>
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	172.148.521.206	220.511.108.747	<i>Total equity attributable to owners of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali	4.237.002	4.237.002	<i>Non-controlling interest</i>
TOTAL EKUITAS	172.152.758.208	220.515.345.749	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	283.602.186.995	377.578.079.313	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian

Consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
PENDAPATAN NETO	359.526.920.500	373.522.635.364	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	301.514.000.901	305.063.659.985	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	58.012.919.599	68.458.975.379	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	21.139.965.349	25.865.676.027	General and administrative
LABA USAHA	36.872.954.250	42.593.299.352	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHER INCOME (EXPENSE)
Pendapatan bunga	772.476.732	831.727.371	Interest income
Pendapatan jasa keagenan - neto	615.044.453	615.044.453	Income agency services - net
Beban bunga	(3.348.381.941)	(6.569.841.848)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(13.202.833)	(14.812.063)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	4.255.977	174.841.903	Miscellaneous - net
Beban lain-lain - Neto	(1.969.807.612)	(4.963.040.184)	Other expenses - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	34.903.146.638	37.630.259.168	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX EXPENSE
Kini - Final	4.314.323.046	4.314.323.046	Current - Final
Kini - Tidak final	153.761.000	849.613.404	Current - Non final
Tangguhan	-	1.708.733.628	Deferred
Beban pajak penghasilan	4.468.084.046	6.872.670.078	Income tax expense

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	30.435.062.592	30.757.589.090	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITY UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(322.526.498)	PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITY UNDER COMMON CONTROL
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	30.435.062.592	30.435.062.592	TOTAL INCOME FOR THE YEAR
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat pajak penghasilan terkait	309.936.445	452.844.344	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Item that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of employee benefits liabilities
	-	(35.726.975)	Related income tax benefit
LABA KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN LABA KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	309.936.445	417.117.369	OTHER COMPREHENSIVE INCOME BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(107.180.924)	COMPREHENSIVE INCOME PROFORMA OTHER (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL LABA KOMPREHENSIF LAIN	309.936.445	309.936.445	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.744.999.037	30.744.999.037	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
PENDAPATAN NETO	353.748.746.139	363.776.006.011	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	297.612.580.131	302.411.568.188	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	56.136.166.008	61.364.437.823	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA Umum dan administrasi	21.672.723.873	32.812.061.518	OPERATING EXPENSES <i>General and administrative</i>
LABA USAHA	34.463.442.135	28.552.376.305	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHER INCOME (EXPENSE)
Pendapatan (beban) jasa keagenan - neto	821.355.189	821.355.189	<i>Income (expenses) agency services - net</i>
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	515.446.412	515.446.412	<i>Ineffective portion of gain on derivative transaction designated as cash flow hedge</i>
Pendapatan bunga	396.154.680	447.309.860	<i>Interest income</i>
Laba (rugi) selisih kurs - neto	275.088.776	274.932.986	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Beban bunga	(4.380.645.685)	(4.380.645.685)	<i>Interest expense</i>
Lain-lain - neto	376.258.413	1.155.498.983	<i>Miscellaneous - net</i>
Beban lain-lain - Neto	(1.996.342.215)	(1.166.102.255)	<i>Other expenses - Net</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	32.467.099.920	27.386.274.050	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX EXPENSE
Kini - Final	4.244.984.954	4.244.984.954	<i>Current - Final</i>
Kini - Tidak final	205.338.750	741.293.331	<i>Current - Non final</i>
Tangguhan	-	(1.843.060.454)	<i>Deferred</i>
Beban pajak penghasilan - neto	4.450.323.704	3.143.217.831	<i>Income tax expense - net</i>

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	28.016.776.216	24.243.056.219	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITY UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	3.773.719.997	PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITY UNDER COMMON CONTROL
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	28.016.776.216	28.016.776.216	TOTAL INCOME FOR THE YEAR
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(363.363.969)	(190.737.791)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(43.156.544)	Related income tax benefit
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN LABA KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(363.363.969)	(233.894.335)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(129.469.634)	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE LOSS ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(363.363.969)	(363.363.969)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE LOSS
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	27.653.412.247	27.653.412.247	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan arus kas konsolidasian

Consolidated statements of cash flows

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	331.503.775.664	339.892.319.387	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	772.476.732	831.727.371	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(296.059.356.636)	(348.249.659.808)	Cash payments to suppliers, employees and others
Pembayaran kas beban bunga	(3.348.381.941)	(6.569.841.848)	Cash payments for expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan	(3.699.950.854)	(4.631.261.235)	Cash payments of corporate income tax
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	29.168.562.965	(18.726.716.133)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan piutang pihak-pihak berelasi	-	(14.950.850.227)	Increase in due from related parties
Penambahan beban docking ditangguhkan	(9.421.368.078)	(9.421.368.078)	Addition of deferred charges on docking
Perolehan aset tetap	(1.390.826.090)	(1.390.826.090)	Acquisitions of property, plant and equipment
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10.812.194.168)	(25.763.044.395)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	-	65.000.000.000	Proceeds from bank loans
Penerimaan dari utang kepada pihak-pihak berelasi	-	776.000.000	Proceeds from due to related parties
Pembayaran pinjaman bank	(11.410.766.936)	(12.852.112.854)	Payment of bank loans
Pembayaran kas dividen	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	Payment of cash dividends
Penambahan utang kepada pihak-pihak berelasi	(1.827.374.815)	(2.427.714.157)	Increase in due to related parties
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(16.238.141.751)	47.496.172.989	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	2.118.227.046	3.006.412.461	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	15.691.247.274	18.776.399.928	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
Penurunan kas dan bank dari pelepasan entitas anak	-	-	Decrease in cash on hand and in banks from deconsolidation of subsidiary
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	17.809.474.320	21.782.812.389	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**32. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

**Restructuring of entities under common control
(continued)**

Laporan arus kas konsolidasian (lanjutan)

Consolidated statements of cash flows (continued)

	31 Desember/ December 31, 2018		
	Sebelum Penyajian Kembali/ As Previously Reported	Setelah Penyajian Kembali/ As Restated	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	346.100.945.650	355.617.725.168	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	396.154.680	447.309.860	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(296.271.572.671)	(294.573.142.490)	Cash payments to suppliers, employees and others
Pembayaran kas beban bunga	(4.380.645.685)	(4.380.645.685)	Cash payments for expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan	(5.612.188.422)	(3.118.381.008)	Cash payments of corporate income tax
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	40.232.693.552	53.992.865.845	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan beban docking ditangguhkan	(14.996.649.890)	(14.996.649.890)	Addition of deferred charges on docking
Perolehan aset tetap	(31.790.878.997)	(31.809.378.997)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penambahan piutang pihak-pihak berelasi	(1.698.025.276)	(10.481.681.673)	Increase in due from related parties
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(48.485.554.163)	(57.287.710.560)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	104.044.980.000	104.044.980.000	Proceeds from bank loans
Penambahan utang kepada pihak-pihak berelasi	2.445.985.199	4.708.024.500	Increase in due to related parties
Pembayaran pinjaman bank	(92.952.766.950)	(92.952.766.950)	Payment of bank loans
Pembayaran utang kepada pihak-pihak berelasi	-	(5.151.886.902)	Payment of bank loans
Liabilitas derivatif	(266.514.630)	(266.514.630)	Derivative liability
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	13.271.683.619	10.381.836.018	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	5.018.823.008	7.086.991.303	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	10.672.424.266	12.123.900.579	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
Penurunan kas dan bank dari pelepasan entitas anak	-	(434.491.954)	Decrease in cash on hand and in banks from deconsolidation of subsidiary
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	15.691.247.274	18.776.399.928	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00096/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00598/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/V/2021 tanggal 11 Mei 2021. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Catatan 1a, sehubungan dengan tambahan pengungkapan bidang usaha yang dilakukan saat ini;
2. Catatan 1a, sehubungan dengan tambahan pengungkapan alamat atau tempat kedudukan menjalankan usahanya;
3. Catatan 1c, sehubungan dengan tambahan pengungkapan jumlah aset teridentifikasi yang dilepaskan dan liabilitas yang dilepaskan yang terkait dengan pelepasan entitas anak;
4. Catatan 1c, sehubungan dengan tambahan pengungkapan jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang terkait dengan akuisisi entitas anak;
5. Catatan 2a, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas pernyataan kepatuhan terhadap Peraturan VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian;
6. Catatan 2j, sehubungan dengan tambahan pengungkapan persentase penyusutan aset tetap;
7. Catatan 5, sehubungan dengan tambahan pengungkapan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan pengungkapan piutang usaha bagian tidak lancar;
8. Catatan 9, sehubungan dengan tambahan pengungkapan pihak perusahaan asuransi aset tetap serta hubungannya dengan Grup;
9. Catatan 9, sehubungan dengan tambahan pengungkapan aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Grup;

33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company issued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018. The consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. 00096/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/III/2021 dated March 5, 2021 which was reissued with independent auditors' report No. 00598/2.1051/AU.1/06/0008-3/1/V/2021 dated May 11, 2021. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. Note 1a, regarding additional disclosure on the engaged in current business activities;
2. Note 1a, regarding additional disclosure on the address and domiciled of the business;
3. Note 1c, regarding additional disclosure on the recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed related with the disposal of subsidiary;
4. Note 1c, regarding additional disclosure on the recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed related with the acquisition of subsidiary;
5. Note 2a, regarding additional disclosure on the compliance statement for the Guidelines VIII.G.7 on the consolidated financial statement presentation and disclosures;
6. Note 2j, regarding additional disclosure on the percentage of depreciation on fixed assets;
7. Note 5, regarding additional disclosure on the establishment of the expected loss provision of trade receivables and disclosure of trade receivables non-current portion;
8. Note 9, regarding additional disclosure on the insurance companies of property, plant and equipment insurance and their relationship with the Group;
9. Note 9, regarding additional disclosure on the fully depreciated property, plant and equipment that are still used by the Group in its operations;

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

10. Catatan 9, sehubungan dengan perbaikan pengungkapan aset tetap yang dijamin sebagai jaminan pinjaman jangka panjang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
11. Catatan 16e, sehubungan dengan tambahan pengungkapan bahwa rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak dan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Perusahaan;
12. Catatan 18, sehubungan dengan perbaikan pengungkapan bahwa pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp110.000.000.000 dari saldo laba tahun 2019;
13. Catatan 18, sehubungan dengan penambahan pengungkapan kronologis PT Nur Internasional Samudra menjadi pemegang saham sebanyak 51% pada tanggal 31 Desember 2020;
14. Catatan 30, sehubungan dengan penambahan peristiwa setelah periode pelaporan.

34. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Grup serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

**33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

10. Note 9, regarding revised disclosure on the property, plant and equipment which are pledged as collaterals for long-term bank loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
11. Note 16e, regarding additional disclosure that the reconciliation between income before tax expense and estimated taxable income for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 will be used as basis for filing the annual income tax return of the Company;
12. Note 18, regarding revised disclosure that the shareholders of the Company approved the dividend shares amounting to Rp110,000,000,000 from retained earnings 2019;
13. Note 18, regarding addition disclosure that the history shareholders of PT Nur Internasional Samudra to shareholders majority of 51% on December 31, 2020;
14. Note 30, regarding additional events after reporting period.

34. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Group, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Group's operations and financial performance.

The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Group's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Group's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the afore mentioned uncertainty.

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dicatat dengan metode ekuitas.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

35. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, change in equity and cash flows in which the investment in subsidiaries are recorded using equity method.

The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.

Lampiran I

Attachment I

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(PARENT COMPANY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	2019	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	29.773.089.585	17.809.474.320	15.691.247.274	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha - neto	49.396.729.685	73.539.149.600	45.516.004.764	<i>Trade receivables - net</i>
Piutang lain-lain	786.806.381	1.277.494.634	1.792.604.280	<i>Other receivables</i>
Persediaan	3.431.424.867	3.059.158.143	3.962.023.399	<i>Inventories</i>
Beban dibayar dimuka	1.246.974.441	521.219.417	394.052.184	<i>Prepayment</i>
Uang muka	4.169.363.401	2.799.001.197	1.111.982.555	<i>Advance payments</i>
TOTAL ASET LANCAR	88.804.388.360	99.005.497.311	68.467.914.456	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	230.805.677.934	203.942.541.658	223.302.409.980	<i>Property, plant and equipment - net</i>
Beban <i>docking</i> ditangguhkan - neto	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255	<i>Deferred charges on docking - net</i>
Piutang dari pihak-pihak berelasi	4.000.000.000	6.133.513.606	6.133.513.606	<i>Due from related parties</i>
Investasi entitas anak	30.945.622.310	-	-	<i>Investment in subsidiaries</i>
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	284.547.381.658	224.288.134.798	245.002.482.841	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	373.351.770.018	323.293.632.109	313.470.397.297	TOTAL ASSETS

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(PARENT COMPANY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (continued)
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020	2019	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	29.040.157.697	24.428.987.998	30.076.053.994	Trade payables
Utang lain-lain	279.712.682	253.614.543	27.532.844	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.201.291.518	3.340.805.106	4.587.602.863	Accrued liabilities
Utang pajak	1.931.837.414	2.051.176.473	1.283.043.281	Taxes payable
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	-	-	1.141.222.815	Due to related parties - current portion
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000	11.244.000.000	11.110.766.936	Current maturities of long-term bank loans
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	52.763.979.311	41.318.584.120	48.226.222.733	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585	Due to related parties - long term portion
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000	11.170.980.000	22.714.980.000	Long-term bank loans - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	16.763.337.304	11.257.018.621	10.040.992.233	Employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	72.997.073.304	47.193.715.206	58.207.840.818	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	125.761.052.615	88.512.299.326	106.434.063.551	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp2.100.000 per saham				Share capital - par value of Rp2,100,000 per share
Modal dasar - 840.000 saham				Authorized - 840,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Issued and fully paid - 100,000 shares as of December 31, 2020 and par value
Modal dasar - 400.000 saham				of Rp1,000,000 per share
Modal ditempatkan dan Disetor penuh - 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	Authorized - 400,000 shares Issued and fully paid - 100,000 shares as of December 31, 2019 and 2018
Tambahan modal disetor	7.483.332.075	7.483.332.075	7.483.332.075	Additional paid-in capital
Saldo laba	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671	Retained earnings
TOTAL EKUITAS	247.590.717.403	234.781.332.783	207.036.333.746	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	373.351.770.018	323.293.632.109	313.470.397.297	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran III

Attachment III

	2020	2019	2018	
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING (ENTITAS INDUK SAJA) LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING (PARENT COMPANY ONLY) STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
PENDAPATAN NETO	294.499.083.224	359.526.920.500	353.748.746.139	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	243.838.972.753	301.514.000.901	297.612.580.131	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	50.660.110.471	58.012.919.599	56.136.166.008	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA Umum dan administrasi	25.605.311.636	21.139.965.349	21.672.723.873	OPERATING EXPENSES General and administrative
LABA USAHA	25.054.798.835	36.872.954.250	34.463.442.135	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba dari entitas anak	1.020.622.310	-	-	Profit of subsidiaries
Pendapatan jasa keagenan - neto	663.892.445	615.044.453	821.355.189	Income agency services - net
Pendapatan bunga	484.280.789	772.476.732	396.154.680	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	140.123.462	(13.202.833)	275.088.776	Gain (loss) on foreign exchange - net
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	515.446.412	Ineffective portion of gain on derivative transaction designated as cash flow hedge
Beban bunga	(4.694.553.309)	(3.348.381.941)	(4.380.645.685)	Interest expense
Lain-lain - neto	(493.459.295)	4.255.977	376.258.413	Miscellaneous - net
Beban lain-lain - neto	(2.879.093.598)	(1.969.807.612)	(1.996.342.215)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	22.175.705.237	34.903.146.638	32.467.099.920	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Kini - Final	3.533.988.999	4.314.323.046	4.244.984.954	Current - Final
Kini - Tidak final	146.056.328	153.761.000	205.338.750	Current - Non final
Beban Pajak Penghasilan	3.680.045.327	4.468.084.046	4.450.323.704	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	18.495.659.910	30.435.062.592	28.016.776.216	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that may not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3.127.972.052)	309.936.445	(363.363.969)	Remeasurement of employee - benefit liabilities
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.367.687.858	30.744.999.037	27.653.412.247	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(PARENT COMPANY ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Labal/ Retained Earnings	Labal Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Bagian Efektif dari Laba yang Belum Direalisasi atas Transaksi Derivatif yang Ditetapkan sebagai Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Unrealized Gain on Derivative Transaction Designated as Cash Flow Hedge	Total/ Total	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2018		100.000.000.000	-	71.899.589.424	248.931.782	172.148.521.206	4.237.002	172.152.758.208	Balance as of January 1, 2018	
Labal tahun berjalan		-	-	28.016.776.216	-	28.016.776.216	-	28.016.776.216	Income for the year	
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1c	-	7.483.332.075	-	-	7.483.332.075	-	7.483.332.075	Differences arising from restructuring transactions under common control	
Realisasi OCI derivatif		-	-	-	(248.931.782)	(248.931.782)	-	(248.931.782)	Realization of derivative OCI	
Pelepasan entitas anak		-	-	-	-	-	(4.237.002)	(4.237.002)	Disposal of subsidiaries	
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(363.363.969)	-	(363.363.969)	-	(363.363.969)	Other comprehensive loss for the year	
Saldo 31 Desember 2018		100.000.000.000	7.483.332.075	99.553.001.671	-	207.036.333.746	-	207.036.333.746	Balance as of December 31, 2018	

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(PARENT COMPANY ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Years Ended December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital - Issued and Fully Paid	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Laba Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Bagian Efektif dari Laba yang Belum Direalisasi atas Transaksi Derivatif yang Ditetapkan sebagai Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Unrealized Gain on Derivative Transaction Designated as Cash Flow Hedge	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total/ Total	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of December 31, 2018	Income for the year	Other comprehensive income for the year	Cash dividends	Balance as of December 31, 2019	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71	Balance as of January 1, 2020	Income for the year	Other comprehensive loss for the year	Cash dividends	Additional capital	Shares dividend	Balance as of December 31, 2020	
Saldo 31 Desember 2018		100.000.000.000	7.483.332.075	99.553.001.671	-	207.036.333.746	-	207.036.333.746	207.036.333.746														
Laba tahun berjalan		-	-	30.435.062.592	-	30.435.062.592	-	30.435.062.592	30.435.062.592														
Laba komprehensif lain tahun berjalan		-	-	309.936.445	-	309.936.445	-	309.936.445	309.936.445														
Dividen kas	21,18	-	-	(3.000.000.000)	-	(3.000.000.000)	-	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)														
Saldo 31 Desember 2019		100.000.000.000	7.483.332.075	127.298.000.708	-	234.781.332.783	-	234.781.332.783	234.781.332.783														
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71		-	-	(993.043.850)	-	(993.043.850)	-	(993.043.850)	(993.043.850)														
Saldo 1 Januari 2020		100.000.000.000	7.483.332.075	126.304.956.858	-	233.788.288.933	-	233.788.288.933	233.788.288.933														
Laba tahun berjalan		-	-	18.495.659.910	-	18.495.659.910	-	18.495.659.910	18.495.659.910														
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(3.127.972.052)	-	(3.127.972.052)	-	(3.127.972.052)	(3.127.972.052)														
Dividen kas	21,18	-	-	(4.565.259.388)	-	(4.565.259.388)	-	(4.565.259.388)	(4.565.259.388)														
Penambahan modal saham		3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000														
Dividen setoran		107.000.000.000	-	(107.000.000.000)	-	-	-	-	-														
Saldo 31 Desember 2020		210.000.000.000	7.483.332.075	30.107.385.328	-	247.590.717.403	-	247.590.717.403	247.590.717.403														

*) Laporan keuangan konsolidasian termasuk PT Barito Putera Docking (Entitas Anak) yang telah didekonsolidasi pada 30 Mei 2018 (Catatan 1c) The consolidated financial statements includes PT Barito Putera Docking (a Subsidiaries) which have been deconsolidated on May 30, 2018 (Note 7c)

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS**
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING
(PARENT COMPANY ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	2018*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	290.486.657.449	331.503.775.664	346.100.945.650	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	484.280.789	772.476.732	396.154.680	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(222.853.906.550)	(295.680.300.225)	(271.781.049.011)	Cash payments to suppliers, employees and others
Pembayaran kas beban bunga	(4.694.553.309)	(3.348.381.941)	(4.380.645.685)	Cash payments for interest expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan	(3.858.425.814)	(4.079.007.265)	(4.451.637.656)	Cash payments of corporate income tax
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	59.564.052.565	29.168.562.965	65.883.767.978	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Kenaikan (penurunan) piutang dari pihak - pihak berelasi	(1.000.000.000)	-	(10.196.025.276)	Increase (decrease) in due from related parties
Perolehan aset tetap	(49.754.371.700)	(1.390.826.090)	(31.790.878.997)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penambahan beban <i>docking</i> ditangguhkan	(18.511.312.021)	(9.421.368.078)	(14.996.649.890)	Addition of deferred charges on docking
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(69.265.683.721)	(10.812.194.168)	(56.983.554.163)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	33.154.800.000	-	104.044.980.000	Proceeds from bank loans
Penambahan modal saham	3.000.000.000	-	-	Increase in share capital
Liabilitas derivatif	-	-	(266.514.630)	Derivative liability
Pembayaran pinjaman bank	(12.244.000.000)	(11.410.766.936)	(92.952.766.950)	Payment of bank loans
Penambahan (pengurangan) utang kepada pihak-pihak berelasi	2.319.705.809	(1.827.374.815)	(14.707.089.227)	Increase (decrease) in due to related parties
Pembayaran kas dividen	(4.565.259.388)	(3.000.000.000)	-	Payment of cash dividends
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	21.665.246.421	(16.238.141.751)	(3.881.390.807)	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	11.963.615.265	2.118.227.046	5.018.823.008	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	17.809.474.320	15.691.247.274	10.672.424.266	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	29.773.089.585	17.809.474.320	15.691.247.274	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR



Kantor Pusat

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/ RW
006/003
Kel. Senayan, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. (62-21) 29343888
Fax. (62-21) 29343777
Website: <https://www.pthis.id>
E-mail: corsec.his@hasnurgroup.com